



LAPORAN KINERJA



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN





KATA PENGANTAR



Segala puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja KKP Tahun 2019 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Tahun 2019 merupakan suatu bentuk akuntabilitas organisasi kepada instansi dan publik atas amanat/tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Laporan Kinerja 2019 ini mencakup capaian atas target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2019.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019 ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kami menyadari penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019 masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan, tanggapan, maupun saran yang membangun dalam pencapaian target kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan.

Jakarta, Februari 2020
Menteri Kelautan dan Perikanan

Edhy Prabowo



TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA KKP TAHUN 2019

PENGARAH : MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

TIM PENYUSUN :

1. Sekretaris Jenderal
2. Kepala Biro Perencanaan
3. Kabag Pengelolaan Kinerja, Biro Perencanaan
4. Kabag Kerja Sama Antarlembaga, Biro Perencanaan
5. Kabag Perencanaan Umum, Biro Perencanaan
6. Kabag Tata Usaha dan Perizinan Terpadu, Pusdatin
7. Kabag Manajemen Kinerja dan Reformasi Birokrasi, Biro Sumber Daya Manusia dan Aparatur
8. Kabag Organisasi dan Tata Laksana, Biro Hukum dan Organisasi
9. Kabag Protokol, Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri
10. Kabag Perbendaharaan, Biro Keuangan
11. Kabag Rumah Tangga, Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa
12. Kabag Program, Ditjen Perikanan Tangkap
13. Kabag Program, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut
14. Kabag Program, Ditjen Perikanan Budidaya
15. Kabag Program, Ditjen PDS
16. Kabag Program, Ditjen PSDKP
17. Kabag Program, BRSDM KP
18. Kabag Program, BKIPM
19. Kasubbag Harmonisasi Kinerja, Biro Perencanaan
20. Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan, Biro Perencanaan
21. Kasubbag Monitoring Kinerja, Biro Perencanaan
22. Kasubbag Penyerasian Rencana Kerja, Biro Perencanaan
23. Kasubbag Tata Usaha, Biro Sumber Daya Manusia dan Aparatur
24. Kasubbag Tata Usaha Biro Hukum dan Organisasi
25. Kasubbag Tata Usaha Biro Umum dan Pengadaan dan Barang/Jasa
26. Kasubbag Penyajian Data dan Statistik, Pusdatin
27. Kasubbag Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut
28. Kasubbag Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ditjen Perikanan Budidaya
29. Kasubbag Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, Ditjen PDS
30. Kasubbag Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Ditjen PSDKP
31. Kasubbag Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Inspektorat Jenderal
32. Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan, BKIPM
33. Helena Yusufik, Biro Perencanaan
34. Rasuly Cahyadi, Biro Perencanaan
35. Sigit Rachmad Admojiarso, Biro Perencanaan
36. Ikhsan Zuhry, Biro Perencanaan
37. Paramitha Prima K, Biro Perencanaan
38. Yusmansyah, Biro Perencanaan
39. Ratna Ayu Rahardini, Biro Perencanaan
40. Achmad Marsito



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	x
Ringkasan Eksekutif	xiii
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Tugas dan Fungsi KKP	2
1.4 Sumber Daya Manusia KKP	3
1.5 Potensi dan Tantangan Pembangunan KP	7
1.6 Sistematika Penyajian Laporan	13
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis KKP Tahun 2015-2019	16
2.2 Penetapan Kinerja KKP Tahun 2019	18
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	25
3.2 Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama	27
a. <i>Stakeholder Perspective</i>	27
b. <i>Customer Perspective</i>	53
c. <i>Internal Perspective</i>	141
d. <i>Learn and Growth Perspective</i>	175
KINERJA ANGGARAN TAHUN 2019	199
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	206
BAB 4. PENUTUP	
Rencana Tindak Lanjut	210
LAMPIRAN	
Pernyataan Reviu oleh Inspektorat Jenderal	213
Dokumen Perjanjian Kinerja	214
PENGHARGAAN	
Penghargaan KKP	219





DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	Keselarasn Renstra KKP Tahun 2015-2019 dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2019	19
TABEL 3.1	Capaian IKU KKP Tahun 2019	26
TABEL 3.2	Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	27
TABEL 3.3	Kategori Provinsi Berdasarkan Nilai IKMKP	32
TABEL 3.4	Capaian Nilai Tukar Nelayan (NTN) Tahun 2015-2019	34
TABEL 3.5	Capaian NTN Per Provinsi Tahun 2015-2019	35
TABEL 3.6	Capaian Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) Tahun 2015-2019	37
TABEL 3.7	Capaian Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) Per Provinsi Tahun 2015-2019	38
TABEL 3.8	Capaian Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP) Tahun 2015-2019	41
TABEL 3.9	Capaian Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG) Tahun 2015-2019	44
TABEL 3.10	Andil Komoditas dominan yang Menyebabkan Penurunan It Tahun 2019	44
TABEL 3.11	Andil Komoditas Dominan yang Menyebabkan Kenaikan Ib, Tahun 2019	45
TABEL 3.12	Capaian IKU Rata-rata Pendapatan Nelayan Tahun 2015-2019	46
TABEL 3.13	Capaian Rata-Rata Pendapatan Pembudidaya Tahun 2015-2019	47
TABEL 3.14	Capaian jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang meningkat kelasnya	49
TABEL 3.15	Jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang meningkat kelasnya dari jumlah pelaku/usaha yang disuluh Penyuluh Perikanan yang dikoordinasikan oleh Satminkal Penyuluhan	50
TABEL 3.16	Capaian Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	51
TABEL 3.17	Nilai PDB Perikanan Atas Dasar Harga Konstan dan Berlaku Tahun 2019	52
TABEL 3.18	Persentase Kepatuhan (<i>Compliance</i>) Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku	54
TABEL 3.19	Capaian Indikator Kinerja Pembentuk IKU-3 Persentase Kepatuhan (<i>Compliance</i>) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Tahun 2019	55
TABEL 3.20	Capaian Indikator Kinerja Pembentuk IKU-3 Persentase Kepatuhan (<i>Compliance</i>) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Tahun 2016-2019	56
TABEL 3.21	Perbandingan Target dan Capaian Sub IK Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Perikanan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Tahun 2015-2019	56
TABEL 3.22	Perbandingan Target dan Capaian IKP “ dan ruang laut terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku” Tahun 2015- 2019 (%)	60
TABEL 3.23	Capaian Pelaksanaan Kegiatan Utama dalam rangka mendukung Pencapaian Kinerja	61



TABEL 3.24	Capaian Indikator Kinerja Pembentuk ke-3 “Ketaatan kapal perikanan yang mampu diperiksa di laut terhadap peraturan perundang-undangan” Tahun 2015-2019	63
TABEL 3.25	Kriteria Penilaian Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Mandiri	65
TABEL 3.26	Penilaian Status Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Mandiri	66
TABEL 3.27	Hasil Penilaian Tingkat Kemandirian SKPT di 13 Lokasi SKPT Tahun 2019	66
TABEL 3.28	Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT)	67
TABEL 3.29	Persentase Pengelolaan Wilayah KP yang Berkelanjutan	69
TABEL 3.30	Jumlah WPP NRI yang terkelola sumber daya ikannya (WPP) Tahun 2015-2019	70
TABEL 3.31	Rekapitulasi Evaluasi di WPPNRI 571 Tahun 2019	73
TABEL 3.32	Rekapitulasi Evaluasi Di WPPNRI 572 Tahun 2019	74
TABEL 3.33	Rekapitulasi Evaluasi di WPPNRI 573 Tahun 2019	74
TABEL 3.34	Rekapitulasi Evaluasi di WPPNRI 711 Tahun 2019	75
TABEL 3.35	Rekapitulasi Evaluasi di WPPNRI 712 Tahun 2019	76
TABEL 3.36	Rekapitulasi Evaluasi di WPPNRI 713 Tahun 2019	77
TABEL 3.37	Rekapitulasi Evaluasi Di WPPNRI 714 Tahun 2019	78
TABEL 3.38	Rekapitulasi Evaluasi di WPPNRI 715 Tahun 2019	79
TABEL 3.39	Rekapitulasi Evaluasi di WPPNRI 716 Tahun 2019	80
TABEL 3.40A	Rekapitulasi Evaluasi di WPPNRI 717 Tahun 2019	81
TABEL 3.40B	Rekapitulasi Evaluasi di WPPNRI 718 Tahun 2019	82
TABEL 3.41	Jumlah Kawasan Konservasi Perairan yang Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Efektifnya (Kawasan)	84
TABEL 3.42	Penilaian E-KKP3K Tahun 2015-2019	85
TABEL 3.43	Rincian Kegiatan Pengelolaan KKPD Tahun 2019	92
TABEL 3.44	Jumlah Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali Tahun 2017 - 2019	95
TABEL 3.45	Rincian Indikator Kinerja Pembentuk Jumlah Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali Tahun 2017 - 2019	95
TABEL 3.46	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak dan Pulih Kembali Tahun 2019	96
TABEL 3.47	Jumlah WPP yang Terpetakan Potensi Sumber Daya KP untuk Pengembangan Ekonomi Kelautan yang Berkelanjutan	96
TABEL 3.48	Luas Kawasan Konservasi (juta hektar)	102
TABEL 3.49	Luas Kawasan Konservasi Tahun 2019	103
TABEL 3.50	Daftar Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) Kawasan Konservasi	104
TABEL 3.51	Capaian Persentase Penyakit Ikan karantina yang dicegah penyebarannya di wilayah RI	105
TABEL 3.52	Persentase Peningkatan Ekonomi KP	109



TABEL 3.53	Capaian Indikator Kinerja Pembentuk Persentase Peningkatan Ekonomi KP	110
TABEL 3.54	Nilai Pembiayaan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan dari Lembaga Keuangan Bank dan Bukan Bank Tahun 2019	111
TABEL 3.55	Rincian Penyaluran Dana Bergulir melalui LPMUKP s.d Tahun 2019	114
TABEL 3.56	Capaian Nilai Kesesuaian Bantuan Pemerintah Tahun 2019	117
TABEL 3.57	Capaian Nilai Kesesuaian Bantuan Pemerintah Tahun 2019	117
TABEL 3.58	Capaian Produksi Perikanan	118
TABEL 3.59	Produksi Perikanan Tahun 2015-2019	119
TABEL 3.60	Volume Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2018 Menurut Komoditas Utama	120
TABEL 3.61	Volume Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2015-2019	120
TABEL 3.62	Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2015-2019	121
TABEL 3.63	Capaian Indikator Kinerja Utama Produksi Garam Nasional	122
TABEL 3.64	Jumlah Produksi Garam Nasional (ton) tahun 2019	124
TABEL 3.65	Capaian Nilai Ekspor Hasil Perikanan (miliar USD)	127
TABEL 3.66	Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Berdasarkan Komoditas Utama Tahun 2019	127
TABEL 3.67	Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Berdasarkan Negara Tujuan Ekspor Tahun 2019	128
TABEL 3.68	Tingkat Konsumsi Ikan Dalam Negeri (kg/kapita/tahun)	128
TABEL 3.69	Nilai PNBPN Sektor Kelautan dan Perikanan	133
TABEL 3.70	Rincian Realisasi PNBPN Sektor KP Tahun 2019	137
TABEL 3.71	Capaian Indeks Efektifitas Kebijakan Pemerintah	138
TABEL 3.72	Hasil Perhitungan atas Pelaksanaan Survey Indeks Efektifitas Kebijakan Pemerintah	141
TABEL 3.73	Daftar Kebijakan/Peraturan yang dilakukan Survey Tahun 2019	142
TABEL 3.74	Efektivitas Tata Kelola Pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan	143
TABEL 3.75	Capaian Utilitas UPI	146
TABEL 3.76	Jumlah SDM yang dididik, dilatih, disuluh untuk mendukung tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan	147
TABEL 3.77	Rincian Jumlah SDM yang dididik, dilatih, disuluh untuk mendukung tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan Berkelanjutan Tahun 2019	149
TABEL 3.78	Sebaran peserta didik pendidikan KP Tahun Pelajaran 2019/2020	149
TABEL 3.79	Jumlah Rekomendasi dan/atau Inovasi Riset yang Diusulkan untuk Dijadikan Bahan Kebijakan	150
TABEL 3.80	Jumlah Rekomendasi dan/atau Inovasi Riset yang Diusulkan untuk	152
TABEL 3.81	Capaian Sertifikasi HACCP hasil perikanan	153
TABEL 3.82	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Jumlah SKP yang Diterbitkan bagi Unit	156
TABEL 3.83	Jumlah Unit Usaha Perikanan Yang Memenuhi Persyaratan Ekspor (unit)	158



TABEL 3.84	Capaian “Jumlah Laut Pedalaman, Teritorial, Perairan Kepulauan, ZEEI dan	160
TABEL 3.85	Capaian Jumlah lokasi kawasan laut, Wilayah Pesisir yang Memiliki Rencana Zonasi dan/atau masterplan busines plan, yang ditetapkan menjadi peraturan-perundangan	162
TABEL 3.86	Capaian Indikator Kinerja Jumlah lokasi Kawasan Laut dan Wilayah Pesisir yang Memiliki Rencana Zonasi dan/atau Masterplan dan Bisnisplan yang akan Ditetapkan menjadi	163
TABEL 3.87	Rincian Kawasan Capaian RZ tahun 2019	164
TABEL 3.88	Capaian Jumlah Unit Pembudidaya Ikan Bersertifikat CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik)	164
TABEL 3.89	Jumlah Unit Pembenihan bersertifikat CBIB	166
TABEL 3.90	Jumlah Unit Pembenihan Ikan bersertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik)	166
TABEL 3.91	Capaian Sertifikasi CPIB komoditas Ekspor Tahun 2019	168
TABEL 3.92	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggung-jawabkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku	168
TABEL 3.93	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggung-jawabkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku	169
TABEL 3.94	Perkembangan Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	170
TABEL 3.95	Sebaran PPNS Perikanan di Indonesia sampai dengan Tahun 2019	171
TABEL 3.96	Rekap data pemusnahan barang bukti/barang rampasan negara	171
TABEL 3.97	Hasil Verifikasi Keberhasilan Wilayah Perbatasan	172
TABEL 3.98	Capaian Tingkat Keberhasilan Pengawasan di Wilayah Perbatasan	173
TABEL 3.99	Indeks Profesionalitas ASN	176
TABEL 3.100	Capaian Komponen Pembentuk Indeks Profesionalitas Per Unit Eselon 1 di KKP Tahun 2019	177
TABEL 3.101	Capaian Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	178
TABEL 3.102	Capaian Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi KKP Tahun 2019	182
TABEL 3.103	Hasil Penilaian Mandiri Implementasi Reformasi Birokrasi KKP Tahun 2015-2019	184
TABEL 3.104	Capaian Level Maturitas SPIP	188
TABEL 3.105	Hasil Pencapaian Nilai Evaluasi Level Maturitas SPIP lingkup KKP Tahun 2019 Per Aspek Komponen	188
TABEL 3.106	Tingkat Maturitas Implementasi SPIP dan Karakteristiknya	189
TABEL 3.107	Capaian Nilai Kinerja Anggaran KKP	191
TABEL 3.108	Nilai Capaian Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja Eselon I Tahun 2019	192
TABEL 3.109	Capaian Opini atas Laporan Keuangan KKP	192
TABEL 3.110	Pagu dan Realisasi APBN KKP Tahun 2015-2019	199
TABEL 3.111	Realisasi Anggaran KKP Tahun 2019 per Unit Kerja Eselon I	200
TABEL 3.112	Efisiensi KKP Tahun 2019 berdasarkan Penggunaan Sumber Daya	206





DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1	Struktur Organisasi KKP	6
GAMBAR 1.2	Keragaan SDM KKP per Eselon 1	6
GAMBAR 1.3	Keragaan SDM KKP Berdasarkan Jenis Kelamin	7
GAMBAR 1.4	Keragaan SDM KKP Berdasarkan Pendidikan	7
GAMBAR 1.5	Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja	13
GAMBAR 2.1	Visi dan Misi Pembangunan KP Tahun 2015-2019	15
GAMBAR 2.2	Peta Strategis KKP Tahun 2015-2019	16
GAMBAR 3.1	Grafik Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP Tahun 2014-2019	29
GAMBAR 3.2	Peta Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Tahun 2019	30
GAMBAR 3.3	Sebaran IKMKP Tahun 2019 menurut Provinsi	31
GAMBAR 3.4	Grafik Perkembangan Nilai Tukar Nelayan Per Bulan Tahun 2015-2019	34
GAMBAR 3.5	Provinsi dengan NTN Tertinggi dan Terendah Tahun 2019	36
GAMBAR 3.6	Peta Sebaran Nilai Tukar Nelayan di Indonesia Tahun 2019	37
GAMBAR 3.7	Grafik Perkembangan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) Tahun 2015-2019	38
GAMBAR 3.8	Provinsi dengan Capaian NTPi Tertinggi dan Terendah Tahun 2019	40
GAMBAR 3.9	Peta Sebaran Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) di Indonesia Tahun 2019	41
GAMBAR 3.10	Lokasi Sampling Perhitungan NTPHP Tahun 2019	42
GAMBAR 3.11	Pertumbuhan Nilai NTPHP selama tahun 2015-2019	42
GAMBAR 3.12	Grafik Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG) Tahun 2015-2019	43
GAMBAR 3.13	Grafik Rata-Rata Pendapatan Nelayan Tahun 2015-2019	47
GAMBAR 3.14	Grafik Rata-Rata Pendapatan Pembudidaya Tahun 2016-2019	48
GAMBAR 3.15	Grafik Trend Nilai PDB Perikanan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2015-2019	53
GAMBAR 3.16	Grafik Radar Status Tingkat Kemandirian SKPT Tahun 2019	67
GAMBAR 3.17	Volume Ikan dan Nilai Ekonomi Lalu Lintas Ikan	67
GAMBAR 3.18	Peta 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)	71
GAMBAR 3.19	Status Pengelolaan KKP3K sampai dengan Tahun 2019	85
GAMBAR 3.20	Struktur Hybrid di Kab. Bone	98
GAMBAR 3.21	PRPEP Kabupaten Serdang Bedagai	98
GAMBAR 3.22	PRPEP di Kabupaten Sukabumi	100
GAMBAR 3.23	PRPEP di Kabupaten Berau	100
GAMBAR 3.24	PRPEP Kabupaten Tanjung Jabung Barat	101
GAMBAR 3.25	PRPEP di Kab. Pandeglang	101



GAMBAR 3.26	PRPEP di Kab. Lampung Selatan	101
GAMBAR 3.27	Capaian Luas Kawasan Konservasi Tahun 2015 – 2019	104
GAMBAR 3.28	Peta Capaian Luasan Kawasan Konservasi Tahun 2019	107
GAMBAR 3.29	Peta Sebaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Ikan	108
GAMBAR 3.30	Grafik Capaian Nilai Investasi Tahun 2015 s.d tahun2019	111
GAMBAR 3.31	Capaian Nilai Investasi Hasil Kelautan dan Perikanan	112
GAMBAR 3.32	Proporsi Nilai Pembiayaan Usaha Hasil KP dari Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank Berdasarkan Provinsi dan Bidang Usaha Tahun 2019	114
GAMBAR 3.33	Perbandingan Nilai Ekspor Produk Perikanan Berdasarkan Komoditas Utama Tahun 2018-2019	128
GAMBAR 3.34	Pameran Seafood Expo North America (SENA) Tahun 2019	129
GAMBAR 3.35	Pameran Seafood Expo Global (SEG) Tahun 2019	129
GAMBAR 3.36	The III Global Fishery and Seafood Expo Tahun 2019	130
GAMBAR 3.37	Pameran Japan International Seafood and Technology Expo (JISTE)	130
GAMBAR 3.38	Trade Expo Indonesia (TEI) Tahun 2019	131
GAMBAR 3.39	Pelaksanaan Bazar Perikanan di KKP	134
GAMBAR 3.40	Safari Gemarikan di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi DI Yogyakarta	135
GAMBAR 3.41	Pameran KOWANI Fair pada tanggal 4-7 April 2019	135
GAMBAR 3.42	Grafik Penerimaan PNPB Sektor KP Tahun 2015-2019	139
GAMBAR 3.43	Tingkat Efektivitas Kebijakan KKP Tahun 2019	142
GAMBAR 3.44	Utilitas Unit Penanganan dan Pengolahan Produk HasilKelautan dan Perikanan Berdasar Jenis Olahan Tahun 2019	147
GAMBAR 3.45	Sebaran peserta didik pendidikan KP Tahun 2019	150
GAMBAR 3.46	Peta Sebaran Penerbitan Sertifikat HACCP pada UPI Tahun 2019	156
GAMBAR 3.47	Inspeksi HACCP di UPI Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah	157
GAMBAR 3.48	Sebaran SKP yang Diterbitkan bagi UPI pada Tahun 2019	158
GAMBAR 3.49	Jumlah SKP yang Diterbitkan bagi UPI Tahun 2019 Berdasar Jenis Olahannya	159
GAMBAR 3.50	Apel Bersama di perbatasan RI-Malaysia (PLBN entikong)	174
GAMBAR 3.51	Empat Komponen dalam Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	176
GAMBAR 3.52	Capaian Indeks Profesionalitas per Unit Eselon 1 di KKP Tahun 2019	177
GAMBAR 3.53	Grafik Manajemen Pengetahuan Capaian per Komponen Berdasarkan Aspek Dokumen, Aspek Keikutsertaan danAspek Keaktifan per Eselon I Lingkup KKP Tahun 2019	179
GAMBAR 3.54	Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar Berdasarkan	180
GAMBAR 3.55	Formula Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2019	191
GAMBAR 3.56	Penghargaan terhadap Opini atas Laporan Keuangan KKP	196







RINGKASAN

Laporan Kinerja KKP Tahun 2019 berisikan tentang capaian serta permasalahan yang dihadapi selama tahun 2019 dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan di tahun 2019. Tahun 2019 merupakan tahun akhir pelaksanaan Renstra KKP Tahun 2015-2019. Secara umum kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2019, cenderung positif dengan semakin meningkatnya capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai 10 Sasaran Strategis dan 21 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019. Indikator Kinerja Utama pada tahun 2019 telah mengalami penyesuaian nomenklatur dan target apabila dibandingkan dengan target PERMEN KP 63/2017 tentang Rencana Straregis KKP Tahun 2015-2019. Perubahan dan penyesuaian tersebut telah disahkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/Kepmen-KP/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 110/Kepmen-KP/2015 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 dan telah dituangkan dalam perjanjian kinerja KKP Tahun 2019. Sebagian besar penyesuaian nomenklatur dan target tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti arahan nasional, memperhatikan capaian tahun sebelumnya, perubahan cara perhitungan pada manual IKU dan alokasi anggaran yang dikelola KKP serta kondisi dinamika nasional dalam rangka mencapai visi pembangunan kelautan dan perikanan.
2. Capaian kinerja KKP tahun 2019 secara keseluruhan menunjukkan kinerja yang positif. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya nilai capaian indikator kinerja pada setiap sasaran strategis dengan nilai capaian mencapai 96,18%. Dari 10 Sasaran Strategis, terdapat tiga Sasaran Strategis yang belum memenuhi target atau mencapai 30 persen yaitu : SS1. Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat KP, SS3. Terwujudnya Pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan dan SS 9. Terwujudnya Birokrasi KKP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima.
3. Demikian juga dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama, dari 21 IKU, terdapat 7 IKU atau setara dengan 33,33 persen yang belum mencapai target yaitu Pertumbuhan PDB perikanan, Produksi Perikanan, Produksi garam, Nilai Ekspor Hasil Perikanan, Nilai PNBK Sektor Perikanan dan Nilai Reformasi Birokrasi KKP.



4. Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2019 telah direalisasikan anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp.5,05 triliun atau mencapai 91,73 persen dari anggaran sebesar Rp.5,51 triliun. Apabila dibandingkan dengan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS), menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran sebesar 4,45 persen.

5. Ke depan dalam rangka meningkatkan peran KKP sebagai salah satu kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan bidang kelautan dan perikanan dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden serta untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, perlu dibangun komunikasi dengan *stakeholder* pelaku usaha kelautan dan perikanan serta para pemangku kepentingan, sehingga tercipta iklim usaha sektor kelautan dan perikanan yang kondusif. Selain itu KKP beserta jajarannya akan terus berupaya mengoptimalkan dan memperkuat potensi perikanan dan kelautan dengan tetap memperhatikan keberlanjutan sumber daya dan kesejahteraan bagi para *stakeholder* kelautan dan perikanan





PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis KKP 2015-2019 ditopang oleh 3 pilar misi utama yaitu **Misi Kedaulatan, Misi Keberlanjutan dan Misi Kesejahteraan**. Ketiga pilar ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Misi Kesejahteraan tidak akan tercapai apabila mengabaikan kedaulatan dan keberlanjutan.

1. Kedaulatan (*Sovereignty*); mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Keberlanjutan (*Sustainability*); mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
3. Kesejahteraan (*Prosperity*), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Ketiga pilar misi tersebut dijabarkan dalam Renstra KKP melalui pendekatan metoda *Balanced Scorecard* (BSC) yang terdiri dari 4 perspektif, yakni (1) *stakeholders perspective* menjabarkan misi kesejahteraan; (2) *customer perspective* menjabarkan misi keberlanjutan dan misi kedaulatan; (3) *internal process perspective* menjabarkan apa yang dilakukan organisasi; dan (4) *learning and growth perspective* merupakan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan *output* dan *outcome* KKP.

Pada tahun 2019 terdapat 21 IKU (Indikator Kinerja Utama) yang merepresentasikan keberhasilan pencapaian dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Untuk mencapai indikator-indikator tersebut, KKP melaksanakan 9 (sembilan) program pembangunan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh 9 Unit Kerja Eselon I di lingkup KKP. Untuk memastikan keseluruhan program dan kegiatan pembangunan KP tersebut dapat terlaksana sesuai dengan rencana target waktu, kuantitas, kualitas dan sarannya, telah disepakati perjanjian yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Menteri dengan Eselon I dan diturunkan secara berjenjang sampai tingkat individu pegawai, dan telah ditetapkan sampai tingkat daerah (provinsi). Capaian kinerja tersebut kemudian dilaporkan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja



Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, bahwa setiap Kementerian/Lembaga (K/L) diwajibkan melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja KKP tahun 2019 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran KKP. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja KKP Tahun 2019 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran KKP selama tahun 2019. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi perbaikan kinerja.

1.3. Tugas dan Fungsi KKP

Tugas KKP sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah membantu Presiden RI dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut KKP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan riset di bidang kelautan dan perikanan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;



5. Pelaksanaan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
6. Pelaksanaan pengembangan kawasan sentra kelautan dan perikanan terpadu;
7. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
10. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

1.4. Sumber Daya Manusia KKP

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya ditetapkan kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Unit Kerja Eselon I di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yakni:

1. **Sekretariat Jenderal (Setjen)** berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal dan bertugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KKP. Susunan organisasi Setjen terdiri dari: Biro Perencanaan; Biro Sumber Daya Manusia dan Aparatur; Biro Hukum dan Organisasi; Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat; Biro Keuangan; Biro Umum; Pusat Data, Statistik dan Informasi, serta Kelompok Jabatan Fungsional.
2. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL)** berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal dan bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Susunan organisasi Ditjen PRL terdiri dari: Sekretariat Direktorat Jenderal; Direktorat Perencanaan Ruang Laut; Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Direktorat Jasa Kelautan; Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut; dan Kelompok Jabatan Fungsional serta didukung oleh 8 UPT (Unit Pelaksana Teknis).
3. **Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (Ditjen PT)** berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal



dan bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap. Susunan organisasi Ditjen PT terdiri dari: Sekretariat Direktorat Jenderal; Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan; Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan; Direktorat Pelabuhan Perikanan; Direktorat Perizinan dan Kenyelanaan; dan Kelompok Jabatan Fungsional, serta didukung oleh 23 Unit Pelaksana Teknis (UPT).

4. **Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (Ditjen PB)** berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal dan bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budidaya. Susunan organisasi Ditjen PB terdiri dari: Sekretariat Direktorat Jenderal; Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan; Direktorat Perbenihan; Direktorat Pakan dan Obat Ikan; Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya; Kelompok Jabatan Fungsional, serta didukung oleh 15 Unit Pelaksana Teknis (UPT).
5. **Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDS)**, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal dan bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan. Susunan organisasi Ditjen PDS terdiri dari: Sekretariat Direktorat Jenderal; Direktorat Logistik; Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu; Direktorat Pemasaran; Direktorat Usaha dan Investasi; dan Kelompok Jabatan Fungsional serta didukung oleh 1 UPT.
6. **Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP)** berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal dan bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Susunan organisasi Ditjen PSDKP terdiri dari: Sekretariat Direktorat Jenderal; Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada; Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan; Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan; Direktorat Penanganan Pelanggaran; Kelompok Jabatan Fungsional dan didukung oleh 14 UPT.
7. **Inspektorat Jenderal (Itjen)**, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal dan bertugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan KKP. Susunan organisasi Itjen terdiri dari: Sekretariat Inspektorat Jenderal; Inspektorat I; Inspektorat II; Inspektorat III; Inspektorat IV; Inspektorat V; dan Kelompok Jabatan Fungsional.
8. **Badan Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KP (BRSDM)**, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan bertugas menyelenggarakan riset di bidang kelautan dan perikanan, dan





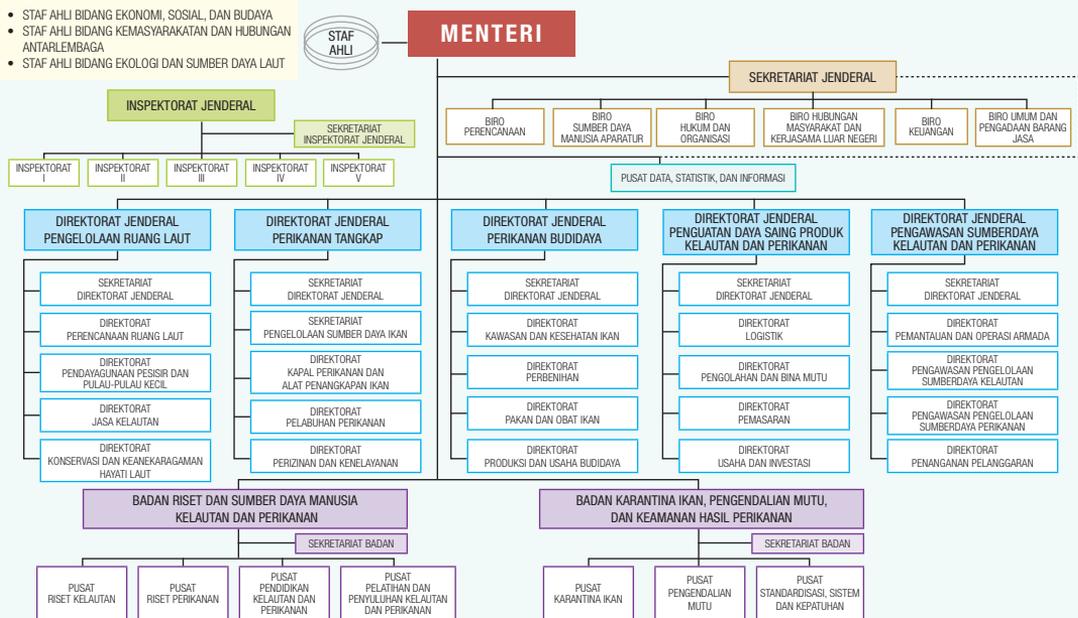
pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Susunan organisasi BRSDMKP terdiri dari: Sekretariat Badan; Pusat Riset Kelautan; Pusat Riset Perikanan; Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan; Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan; dan Kelompok Jabatan Fungsional serta didukung oleh 38 UPT.

9. **Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM)**, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Susunan organisasi BKIPM terdiri dari: Sekretariat Badan; Pusat Karantina Ikan; Pusat Pengendalian Mutu; Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan; dan Kelompok Jabatan Fungsional serta didukung dengan 47 UPT.
10. **Staf Ahli Menteri** adalah unsur pembantu dalam memberikan telaahan, pertimbangan, dan saran pemecahan masalah secara konseptual mengenai hal-hal tertentu menurut keahliannya yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan. Susunan organisasi Staf Ahli Menteri terdiri dari:
 - a. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
 - b. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga; dan
 - c. Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut.

Pada tahun 2018, tepatnya 27 Februari 2018 dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat perubahan struktur organisasi unit kerja eselon II di lingkup Sekretariat Jenderal. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018, terdapat perubahan nomenklatur unit organisasi eselon II yaitu pada Biro Perencanaan, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri serta Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana struktur organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana yang tercantum Permen KP Nomor 6 tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :



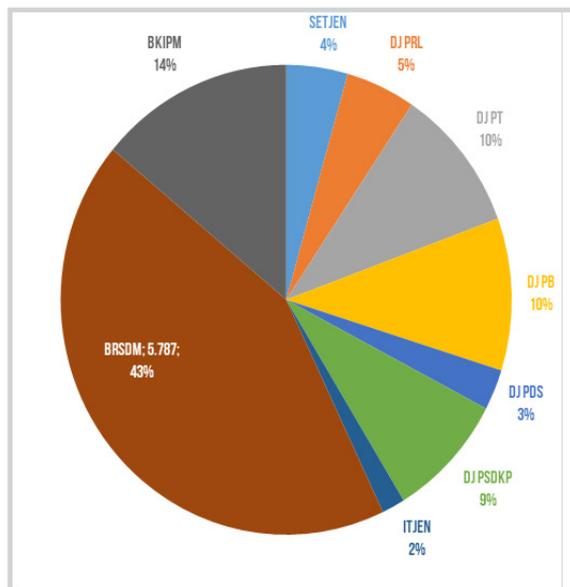
GAMBAR 1.1 STRUKTUR ORGANISASI KKP



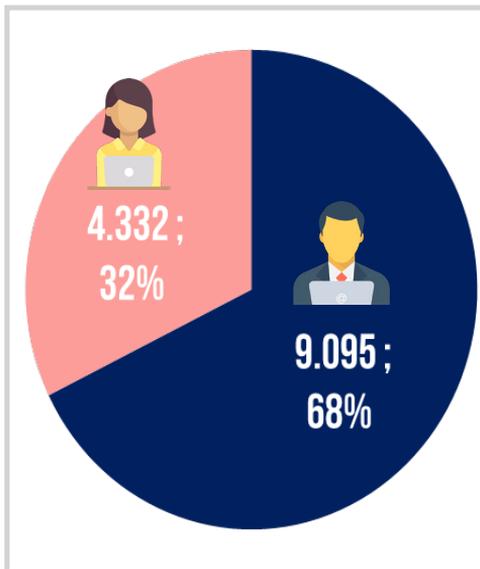
Jumlah Pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pada tahun 2019, jumlah pegawai KKP mencapai 13.427 orang terdiri dari laki-laki 9.095 orang atau 68% dan perempuan 4.332 orang atau 32%. Pegawai KKP tersebut tersebar pada 9 Unit Kerja Eselon I dengan komposisi pegawai sebagai berikut: Setjen 590 orang (4,4%), Ditjen PRL 671(5,0%), Ditjen Perikanan Tangkap 1.342 orang (10%), Ditjen Perikanan Budidaya 1.407 orang (10,5%), Ditjen PDS 376 orang (2,8%), Ditjen PSDKP 1.158 orang (8,6%), Itjen 222 orang (1,7%), BRSDM KP 5.787 (43,1%), dan BKIPM 1.874 (14%). Keragaan SDM KKP tahun 2019 berdasarkan jumlah pegawai per unit kerja seperti pada diagram berikut:

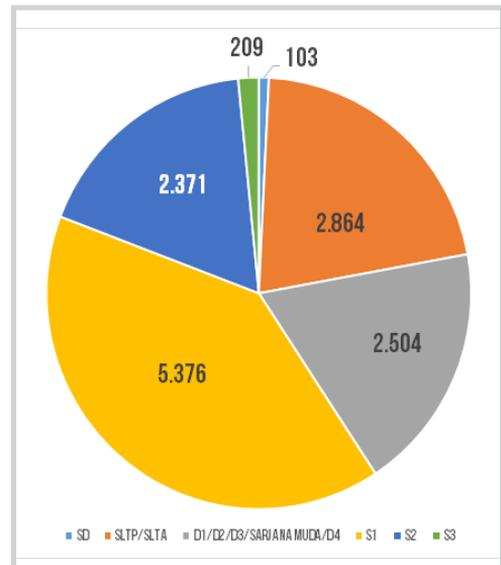
GAMBAR 1.2. KERAGAAN SDM KKP PER ESELON 1



GAMBAR 1.3.
KERAGAAN SDM KKP BERDASARKAN JENIS KELAMIN



GAMBAR 1.4.
KERAGAAN SDM KKP BERDASARKAN PENDIDIKAN



Sedangkan keragaan SDM KKP tahun 2019 menurut golongan adalah sebagai berikut: Golongan V sebanyak 166 orang, Golongan IV sebanyak 781 orang; Golongan III sebanyak 251 orang; Golongan II sebanyak 43 orang dan Golongan I sebanyak 8 orang. Sedangkan untuk jabatan fungsional, terdapat 7.088 orang, yang mencakup Jabatan Fungsional Bidang Kelautan dan Perikanan dengan KKP sebagai instansi pembina sebanyak 4.841 orang (68%) dan Pejabat Fungsional Non Bidang Kelautan dan Perikanan dengan KKP sebagai instansi pengguna sebanyak 2.247 orang (32%). Selain itu, KKP juga mempunyai 150 UPT yang tersebar di 34 provinsi.

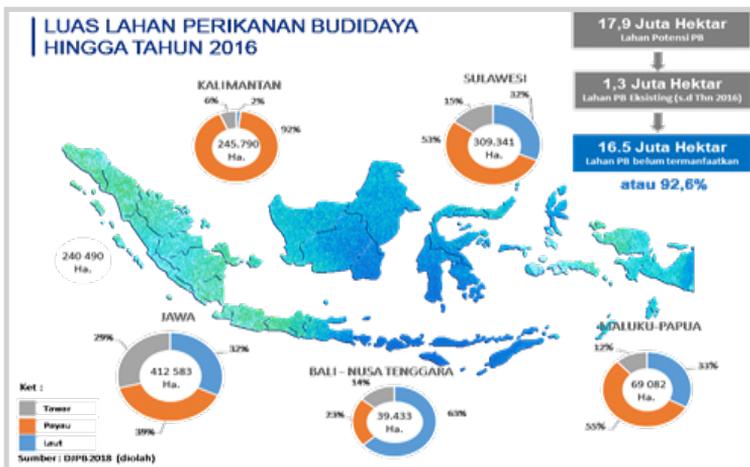
1.5 Potensi dan Tantangan Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau di Indonesia kurang lebih 17.491, dan yang sudah dibakukan dan didaftarkan ke PBB sejumlah 16.671 pulau dan luas perairan laut pedalaman dan perairan kepulauan Indonesia 3.110.000 km²; luas laut teritorial Indonesia adalah 290.000 km²; luas zona tambahan Indonesia 270.000 km²; luas zona ekonomi eksklusif Indonesia 3.000.000 km²; Luas landas kontinen Indonesia 2.800.000 km² dengan panjang garis pantai Indonesia 108.000 km (Kemenko Maritim, 2018). Potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 12,54 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) (Komnas Kajian, 2016). Potensi mikro flora-fauna kelautan juga belum terekplorasi sebagai penyangga pangan fungsional pada masa depan. Keanekaragaman hayati laut Indonesia memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan baik bagi kepentingan konservasi maupun ekonomi produktif. Hasil pengukuran terkini melalui pemetaan citra satelit, luas terumbu karang Indonesia mencapai 25.000 km² (COREMAP-CTI Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2016) atau sekitar 10% dari total terumbu karang dunia yaitu seluas 284.300 km² (Spalding et al. 2001) dengan



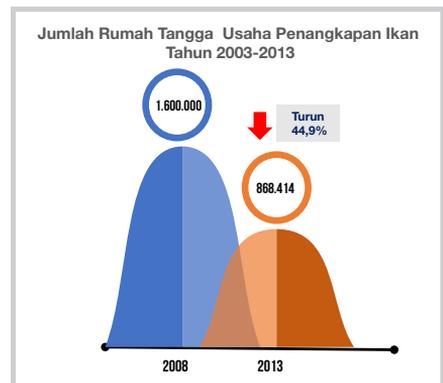
penyumbang terbesar adalah *coral triangle* yang menyumbang sekitar 34% (luas 73.000 km²) terhadap total luas terumbu karang dunia (Burke *et al.* 2014). Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai pusat segitiga karang dunia yang memiliki kekayaan jenis karang paling tinggi yaitu 569 jenis dari 82 marga dan 15 suku (Suharsono, 2014) atau sekitar 70% lebih jenis karang dunia dan 5 jenis diantaranya merupakan jenis yang endemik. Selanjutnya LIPI melalui Pusat Penelitian Oseanografi (P2O) menyatakan bahwa penelitian dan pemantauan terumbu karang terhadap 1067 site di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa terumbu karang dalam kategori jelek sebanyak 386 *site* (36,18%), kategori cukup sebanyak 366 *site* (34,3%), kategori baik sebanyak 245 *site* (22,96%) dan kategori sangat baik sebesar 70 *site* (6,56%).

Sumber daya ikan di laut Indonesia meliputi 37% dari species ikan di dunia, dimana beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kekerangan, dan rumput laut. Perairan laut Indonesia juga menyimpan potensi sumber daya non hayati yang melimpah. Masih banyak wilayah perairan Indonesia yang memiliki potensi ekonomi namun belum terkelola secara memadai. Selain itu, potensi energi terbarukan dari laut, seperti air laut dalam (*deep sea water*) masih menjadi tantangan untuk dikembangkan dan dimanfaatkan di masa yang akan datang. Industri maritim, bioteknologi, jasa kelautan, produksi garam dan turunannya, biofarmakologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, pemasangan pipa dan kabel bawah laut, dan/atau pengangkatan benda dan muatan kapal tenggelam, merupakan sub sektor kelautan yang belum tergarap secara optimal. Potensi lahan perikanan budidaya secara nasional diperkirakan sebesar 17,92 juta ha yang terdiri potensi budidaya air tawar 2,83 juta ha, budidaya air payau 2,96 juta ha dan budidaya laut 12,12 juta ha (sumber: Review Masterplan Perikanan Budidaya Tahun 2014). Pemanfaatannya hingga saat ini masing-masing baru 11,32 persen untuk budidaya air tawar, 22,74 persen pada budidaya air payau dan 2,28 persen untuk budidaya laut. Tingkat pemanfaatan ini masih rendah terutama untuk budidaya laut sehingga diperlukan upaya pemanfaatan agar produksi perikanan budidaya dapat terus ditingkatkan. Peningkatan produksi perikanan budidaya harus disertai dengan peningkatan serapan pasar baik ekspor maupun konsumsi dalam negeri.





Bidang kelautan dan perikanan memiliki permasalahan yang kompleks karena keterkaitannya dengan banyak sektor dan juga sensitif terhadap interaksi terutama dengan aspek lingkungan. Terdapat berbagai isu pengelolaan perikanan laut di Indonesia yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.



Berdasarkan Data Sensus Pertanian yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik, menunjukkan adanya penurunan jumlah Rumah Tangga Perikanan dari 1,6 juta (Sensus Pertanian 2003) menjadi 868,41 ribu (Sensus Pertanian 2013). Hal ini merupakan indikasi lebih menariknya usaha di sektor lain dibandingkan dengan usaha di sektor kelautan dan perikanan. Mata pencaharian sebagai nelayan sudah tidak menjanjikan untuk keberlangsungan hidup dikarenakan ikan-ikan di laut Indonesia mulai habis seperti yang terjadi pada nelayan ketinting dan pitur kepiting. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa perikanan tangkap merupakan salah satu potensi ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi. Beberapa wilayah perairan laut Indonesia telah mengalami gejala *overfishing*. Selain itu, praktik-praktik *Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) Fishing* yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) seperti pencurian ikan dan *transshipment* di tengah laut, penyelundupan benih lobster, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan



termasuk pengeboban ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan Indonesia (KI) maupun oleh kapal perikanan asing (KIA). Hal tersebut telah menyebabkan kerugian baik dari aspek sosial, ekologi/lingkungan, maupun ekonomi. Ancaman *IUU Fishing* dipicu kondisi sektor perikanan global, dimana beberapa negara mengalami penurunan stok ikan, pengurangan armada kapal penangkapan ikan akibat pembatasan pemberian izin penangkapan sedangkan permintaan produk perikanan makin meningkat. Di sisi lain, kemampuan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia belum memadai. *IUU Fishing* juga merupakan global crime, tidak saja tindak pidana perikanan tetapi menyangkut perbudakan, perdagangan manusia, penyelundupan hewan, narkoba dan lain-lain. Masalah perbatasan laut merupakan salah satu kendala dalam pengawasan sumber daya perikanan dan kelautan di wilayah perairan Indonesia. Beberapa perbatasan wilayah dengan negara tetangga belum diselesaikan. Hal ini menjadikan kasus perikanan di wilayah perbatasan belum bisa tuntas.

Selain hal tersebut, hasil riset kesehatan dasar tahun 2013 dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa prevalensi pendek (*stunting*) secara nasional tahun 2013 adalah 37,2%, yang berarti terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2010 (35,6%) dan 2007 (36,8%).

SATU DARI TIGA ANAK INDONESIA MENGALAMI STUNTING
 Peningkatan konsumsi ikan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan gizi anak



Kondisi Kekurangan Gizi di Indonesia

Indikator	2007	2010	2013
Prevalensi anak balita yang pendek	36,8	35,6	37,2
Prevalensi anak balita yang kurus & sangat kurus	13,6	13,3	12,1
Prevalensi bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR) < 2500 gr	11,5	11,1	10,2

Sumber: Riskesdas, 2013

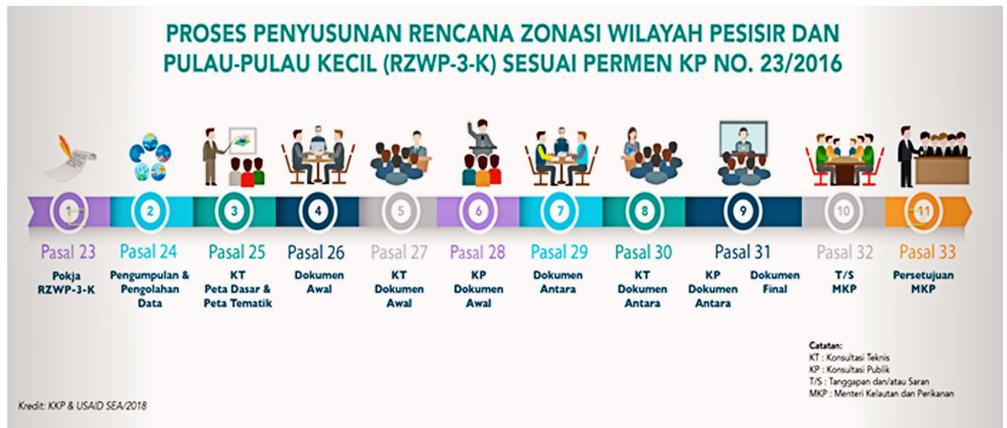
- *Stunting* merupakan suatu keadaan dimana tinggi badan anak lebih rendah dari standar tinggi badan anak seumumnya.
- *Stunting* terjadi sejak dalam kandungan dan akan nampak saat anak berusia 2 tahun.
- Hampir 9 juta anak Indonesia di bawah 5 tahun terlalu pendek untuk usianya.
- Masalah balita *stunting* menjadi beban pembangunan karena akan menurunkan kualitas SDM Indonesia (menghambat perkembangan kognitif/keberhasilan pendidikan dan menurunkan produktivitas kerja usia dewasa).
- Anak yang lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR) dan *stunting* mempunyai potensi 3x lebih besar untuk menderita penyakit jantung dan penyakit degeneratif lainnya, serta mempunyai umur harapan hidup yang lebih pendek

tersebut menunjukkan prevalensi pendek masih tinggi, dan terjadi di wilayah-wilayah yang menjadi sentra perikanan nasional. Hal ini tentu saja memerlukan upaya mendorong masyarakat gemar makan ikan, mengingat kandungan gizi pada ikan merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi prevalensi pendek (*stunting*). Dalam pengembangan perikanan budidaya, masih

dihadapkan pada permasalahan implementasi kebijakan tata ruang dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (Berdasarkan data s.d tahun 2019, dari 34 provinsi baru 24 provinsi yang telah menyelesaikan RZWP3K menjadi Peraturan Daerah yaitu Provinsi Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, DIY, Lampung, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Bengkulu, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jambi, dan Papua Barat).

Aktivitas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, baik yang berada di daratan, wilayah pesisir, maupun lautan, tidak dapat terlepas dari keberadaan potensi bencana alam dan dampak perubahan iklim yang dapat terjadi di wilayah Indonesia. Bencana alam dan perubahan iklim dapat berdampak serius terhadap kegiatan pemanfaatan sumberdaya kelautan

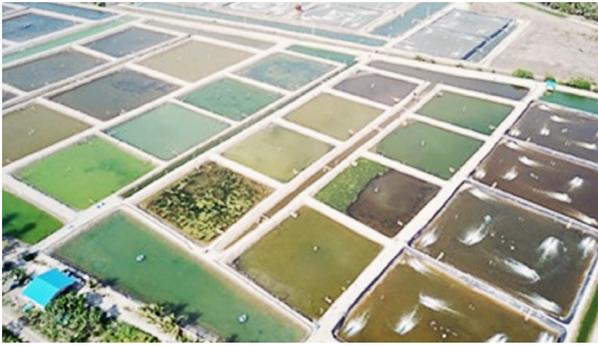




dan perikanan, seperti kenaikan muka air laut yang dapat menyebabkan tenggelamnya pulau-pulau kecil dan sebagian wilayah/lahan budidaya di wilayah pesisir, intrusi air laut ke daratan, peningkatan dan perubahan intensitas cuaca ekstrim (badai, siklon, banjir) yang berpengaruh terhadap kegiatan penangkapan dan budidaya ikan, serta kerusakan sarana dan prasarana. Selain potensi bencana alam dan perubahan iklim, wilayah pesisir juga memiliki potensi kerusakan pesisir berupa kerusakan ekosistem, abrasi, sedimentasi, pencemaran dan permasalahan keterbatasan lahan.

Permasalahan pengembangan perikanan budidaya (i) terbatasnya ketersediaan benih dan induk yang bermutu dan berkualitas (ii) harga pakan masih dikontrol oleh pasar karena ketersediaan pakan yang berkualitas dan bermutu dengan harga terjangkau masih terbatas, (iii) potensi bahan baku pakan lokal untuk pembuatan pakan ikan di masyarakat (kelompok GERPARI) belum optimal dimanfaatkan sehingga masih bergantung pada impor; (iv) keterbatasan pengetahuan SDM pelaku usaha perikanan budidaya, (v) keterbatasan akses permodalan untuk usaha perikanan budidaya; (vi) manajemen pengelolaan lingkungan dan penyakit ikan yang belum optimal; (vi) implementasi cara berbudidaya ikan yang baik (pembesaran, pembenihan dan pembuatan pakan mandiri) belum optimal diimplementasikan oleh pelaku usaha perikanan budidaya; dan (vii) kondisi infrastruktur yang belum optimal mendukung pengembangan usaha perikanan budidaya secara efisien. Selain itu masih terdapat permasalahan eksternal yang dihadapi dalam pengembangan





perikanan budidaya meliputi: (i) tidak adanya kepastian ruang untuk usaha perikanan budidaya, (ii) adanya asimetrik regulasi dan perizinan inter dan intra sektoral yang menghambat pengembangan usaha perikanan budidaya, (iii) adanya perubahan iklim dan penurunan kualitas lingkungan, dan (iv) belum adanya harmonisasi

kebijakan, program dan anggaran antara pusat dan daerah serta inter dan intra sektoral.

Permasalahan terkait masih rendahnya produktivitas dan daya saing usaha kelautan dan perikanan yang disebabkan antara lain oleh belum optimalnya integrasi sistem produksi di hulu dan hilir, masih terbatasnya penyediaan sarana dan prasarana serta masih tingginya biaya logistik. Industri pengolahan ikan Indonesia, masih membutuhkan bahan baku dengan jenis ikan yang spesifik dan standar kualitas tertentu, serta suplai yang kontinu. Faktor utama yang menyebabkan utilisasi industri pengolahan ikan rendah adalah suplai bahan baku ikan yang kurang. Saat ini distribusi stok ikan tidak merata antara wilayah pengelolaan perikanan di mana sebagian besar bahan baku ikan terdapat di wilayah timur Indonesia. Oleh karena itu, perlu didorong regulasi terkait penangkapan ikan untuk bahan baku industri dan regulasi untuk mendorong sistem logistik ikan yang efisien. Selain itu, ketimpangan terlihat pada sebaran industri perikanan, yaitu masih banyak industri pengolahan ikan berada di wilayah barat Indonesia. Ini merupakan dampak kesenjangan infrastruktur antara barat dan timur.

Selain itu dampak dari globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional, mendorong semakin meningkatnya arus lalu lintas dan menurunnya secara bertahap hambatan tarif (*tariff barrier*) dalam perdagangan hasil perikanan antar negara. Keadaan ini memicu masing-masing negara, termasuk negara mitra dagang seperti Uni Eropa, China, Rusia, Canada, Korea, Vietnam dan Norwegia, semakin memperketat persyaratan jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Sebagai anggota *World Trade Organization (WTO)* Indonesia berkewajiban melaksanakan isi ketentuan dalam "*Agreement of The Application of Sanitary and Phytosanitary Measure*" (perjanjian SPS) yang memuat ketentuan tentang penerapan peraturan-peraturan teknis guna melindungi kesehatan manusia, hewan, ikan dan tumbuhan. Konsep perjanjian Sanitary and Phytosanitary (SPS) merupakan instrumen pengendali perdagangan internasional berupa hambatan teknis (*technical barrier to trade*)/hambatan non tariff (*non tariff barrier*). Aspek sangat mendasar yang mempengaruhi lemahnya daya saing dan produktivitas adalah kualitas SDM dan kelemahannya. Saat ini jumlah SDM yang bergantung pada kegiatan usaha kelautan dan perikanan sangat besar, namun pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang dimiliki relatif masih rendah.



1.6 Sistematika Penyajian Laporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagaimana Gambar 6 berikut.

GAMBAR 1.5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA





PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis 2015-2019 Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana yang tertuang dalam Permen KP nomor 63/PERMENKP/2017 tentang Perubahan Permen KP Nomor 45 tahun 2015 tentang Rencana Strategis KKP Tahun 2015-2019, memuat visi dan misi yang merupakan panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan, visi pembangunan diarahkan untuk mewujudkan **“Mewujudkan Sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”**. Visi tersebut dilakukan dengan pelaksanaan 3 misi pembangunan kelautan dan perikanan yaitu : kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan. Ketiga hal di atas dilakukan secara bertanggung jawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

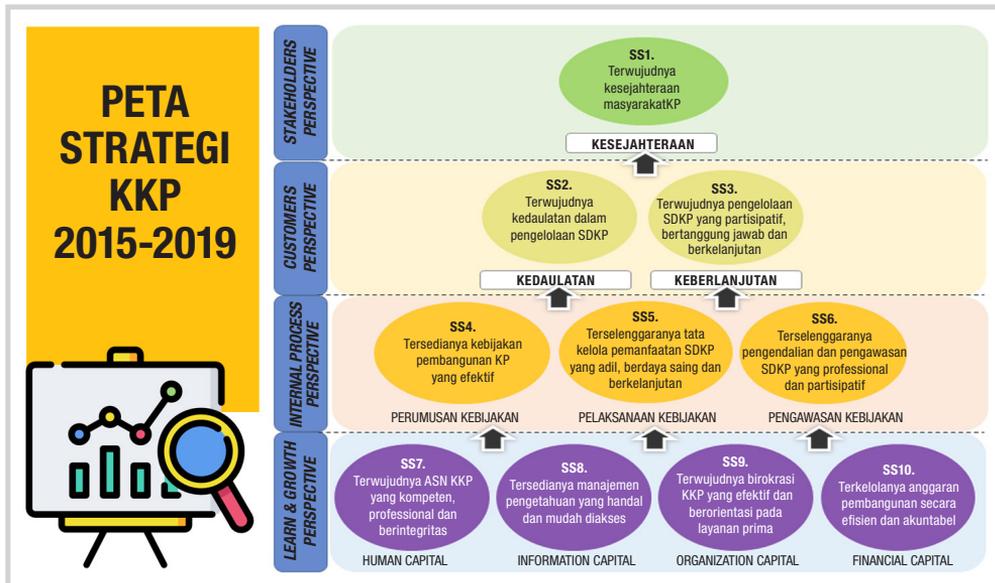
GAMBAR 2.1. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KP TAHUN 2015-2019



2.1 RENCANA STRATEGIS KKP TAHUN 2015-2019

Dalam penyusunan sasaran strategis, KKP menggunakan pendekatan *metode Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yakni *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*, sebagai tersaji dalam peta strategis KKP.

GAMBAR 2.2. PETA STRATEGIS KKP TAHUN 2015-2019



1. Stakeholders Perspective

terdiri dari 1 (satu) Sasaran Strategis, yaitu (SS-1) terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP, dengan indikator kinerja:

- Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
- Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan

2. Customer Perspective

terdiri dari 2 (dua) Sasaran Strategis, yaitu : Sasaran strategis kedua (SS-2) terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP, dengan indikator kinerja:

- Persentase Kepatuhan (*Compliance*) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku.
- Tingkat Kemandirian SKPT.

Sasaran strategis ketiga (SS-3) Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan, dengan indikator kinerja:



- a. Persentase pengelolaan wilayah KP yang berkelanjutan.
- b. Persentase peningkatan ekonomi KP (%).
- c. Produksi perikanan.
- d. Produksi garam Nasional.
- e. Nilai ekspor hasil perikanan.
- f. Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun).
- g. Nilai PNBPN dari sektor KP.

3. **Internal Process Perspective**

Sasaran strategis pada perspektif ini adalah merupakan proses yang harus dilakukan oleh KKP. Terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Strategis, yakni :

- a. Sasaran strategis keempat (SS-4) tersedianya kebijakan pembangunan KP yang efektif, dengan indikator kinerja Indeks efektivitas kebijakan pemerintah.
- b. Sasaran strategis kelima (SS-5) Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan dengan indikator kinerja Efektivitas tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan.
- c. Sasaran strategis keenam (SS-6) terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang profesional dan partisipatif, dengan indikator kinerja:
 - Persentase penyelesaian tindak pidana KP yang disidik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai kebutuhan perundang-undangan yang berlaku.
 - Tingkat Keberhasilan Pengawasan di Wilayah Perbatasan.

4. **Learning and Growth Perspective**

Sebagai *input* yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan *outcome* KKP, terdapat 4 (empat) sasaran strategis yakni:

- a. Sasaran strategis ketujuh (SS-7) yakni terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) KKP yang Kompeten, Profesional, dan Berintegritas, dengan indikatornya Indeks Profesional ASN KKP
- b. Sasaran strategis kedelapan (SS-8) yakni tersedianya manajemen pengetahuan yang handal, dan mudah diakses, dengan indikator kinerja persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar.
- c. Sasaran strategis kesembilan (SS-9) yakni terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima, dengan indikator kinerja nilai kinerja a) Reformasi Birokrasi (RB) KKP b) Level Maturitas SPIIP KKP



- d. Sasaran strategis kesepuluh (SS-10) yakni terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel, dengan indikator kinerja: a) Nilai Kinerja pelaksanaan Anggaran KKP. b) Opini atas Laporan Keuangan KKP.

2.2 PENETAPAN KINERJA KKP TAHUN 2019

Penetapan Kinerja KKP Tahun 2019 merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/ kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/ kinerja.

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Penetapan Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Penetapan Kinerja KKP tahun 2019 merupakan pelaksanaan target Kinerja tahun terakhir Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019, yang memuat sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator lainnya yang terkait dengan tugas fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Indikator Kinerja Utama pada tahun 2019 telah mengalami penyesuaian nomenklatur dan target apabila dibandingkan nomenklatur Indikator Kinerja dan Target yang telah disusun sebagaimana yang tercantum dalam PERMEN KP 63/2017 tentang Rencana Straregis KKP Tahun 2015-2019. Perubahan dan penyesuaian tersebut telah disahkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/Kepmen-KP/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 110/Kepmen-KP/2015 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 dan telah dituangkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2019. Sebagian besar penyesuaian nomenklatur dan target tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti arahan nasional, memperhatikan capaian tahun 2018, alokasi anggaran yang dikelola KKP serta kondisi dinamika nasional dalam rangka mencapai visi pembangunan kelautan dan perikanan. Perubahan tersebut adalah sebagai berikut:



**TABEL 2.1. KESELARASAN RENSTRA KKP TAHUN 2015-2019
DENGAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

No	Renstra KKP Tahun 2015-2019 (Permen KP No. 63 Tahun 2017)		Perjanjian Kinerja Tahun 2019	
	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Target 2019	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Target 2019
	<i>Terwujudnya kesejahteraan Masyarakat KP</i>		<i>Terwujudnya kesejahteraan Masyarakat KP</i>	
1	Indeks Kesejahteraan Masyarakat	57	Indeks Kesejahteraan Masyarakat	57
2	Pertumbuhan PDB Perikanan	11	Pertumbuhan PDB Perikanan	11,00
	<i>Terwujudnya Kedaulatan dalam pengelolaan SDKP</i>		<i>Terwujudnya Kedaulatan dalam pengelolaan SDKP</i>	
3	Persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	87	Persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	87
4	Tingkat Kemandirian SKPT	4	Tingkat kemandirian SKPT	4
	<i>SS3. Terwujudnya pengelolaan SDKP yang bertanggungjawab dan berkelanjutan</i>		<i>SS3. Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan</i>	
5	Persentase pengelolaan wilayah KP yang berkelanjutan	72	Persentase pengelolaan wilayah KP yang berkelanjutan	62,50
6	Persentase peningkatan ekonomi KP	96	Persentase peningkatan ekonomi KP	71,50
7	Produksi perikanan	39,97	Produksi perikanan	38,30
8	Produksi garam rakyat	4,5	Produksi garam nasional	4,50
9	Nilai ekspor hasil perikanan	9,54	Nilai ekspor hasil perikanan	9,50
10	Konsumsi ikan	54,49	Konsumsi ikan	54,49
11	Nilai PNBP dari Sektor KP	583,90	Nilai PNBP sektor KP	820
	<i>SS 4. Tersedianya kebijakan pembangunan KP yang efektif</i>		<i>SS 4. Tersedianya kebijakan pembangunan KP yang efektif</i>	
12	Indeks efektifitas kebijakan pemerintah	7,90	Indeks efektifitas kebijakan pemerintah	7,90
	<i>SS5. Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan</i>		<i>SS5. Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang berkeadilan, berdaya saing dan berkelanjutan</i>	
13	Efektivitas tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan	96	Efektivitas tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan	77



No	Renstra KKP Tahun 2015-2019 (Permen KP No. 63 Tahun 2017)		Perjanjian Kinerja Tahun 2019	
	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Target 2019	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Target 2019
	<i>SS 6. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang partisipatif</i>		<i>SS 6. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif</i>	
14	Persentase penyelesaian tindak pidana KP secara akuntabel dan tepat waktu	92	Persentase penyelesaian tindak pidana KP yang disidik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku	92
15	Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan	78	Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan	78
	<i>SS Terwujudnya ASN KKP yang kompeten, profesional dan berintegritas</i>		<i>SS Terwujudnya ASN KKP yang kompeten, profesional dan berintegritas</i>	
16	Indeks kompetensi dan integritas	81	Indeks Profesionalitas ASN KKP	71
	<i>SS 8. Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses</i>		<i>SS 8. Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses</i>	
17	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	76%	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	80
	<i>SS 9. Terwujudnya Birokrasi KKP yang Efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima</i>		<i>SS 9. Terwujudnya Birokrasi KKP yang Efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima</i>	
18	Nilai kinerja reformasi birokrasi KKP	A (82)	Nilai kinerja reformasi birokrasi KKP	A (81)
19	Level maturitas SPIP	3	Level maturitas SPIP	3,00
	<i>SS 10. Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel</i>		<i>SS 10. Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel</i>	
20	Nilai Kinerja anggaran KKP	Baik (87)	Nilai Kinerja anggaran KKP	Baik (87)
21	Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan KKP	WTP (5)	Opini atas laporan keuangan KKP	3,00 (WDP)



Untuk mewujudkan target yang tertuang dalam perjanjian kinerja tersebut terangkum dalam 9 program pembangunan kelautan dan perikanan dengan menggunakan alokasi anggaran yang tercantum dalam DIPA awal sebesar 5,483 triliun sebagaimana DIPA Nomor : SP DIPA-032/2019 tanggal 5 Desember 2018 dengan pagu akhir KKP menjadi sebesar Rp. 5,51 triliun. Pelaksanaan 9 program pembangunan kelautan dan perikanan tersebut, didukung oleh pelaksanaan kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Ruang Laut

Tujuan Program adalah mewujudkan tertannya dan dimanfaatkannya wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari dengan sasaran peningkatan persentase pendayagunaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah perlindungan dan pemnfaatan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, penataan dan pemanfaatan jasa kelautan, pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil, perencanaan ruang laut dan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Pengelolaan Ruang Laut.

2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Tujuan program adalah meningkatkan produktivitas perikanan tangkap dengan sasaran peningkatan hasil tangkapan dalam setiap upaya tangkap. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah pengelolaan pelabuhan perikanan, pengelolaan kapal dan alat penangkapan ikan, pengelolaan sumber daya ikan, dan dukungan manajemen, pengelolaan perizinan dan kenelayanan dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Perikanan Tangkap.

3. Program Penguatan Daya Saing Produk KP

Tujuan program adalah meningkatnya produksi olahan hasil perikanan yang bernilai tambah, nilai produk hasil perikanan non konsumsi, rata-rata konsumsi ikan per kapita nasional, nilai ekspor hasil perikanan, dan nilai investasi bidang pengolaahn dan pemasaran hasil perikanan, dengan sasaran peningkatan produk perikanan prima yang berdaya saing di pasar domestik dan internasional. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah logistik hasil kelautan dan perikanan, pemasaran hasil kelautan dan perikanan, pengolahan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan, investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan dan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen PSDPKP.

4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Tujuan program adalah meningkatnya produksi perikanan budidaya dengan sasaran program peningkatan produksi perikanan budidaya (volume dan nilai). Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah pengelolaan perbenihan



ikan, pengelolaan kawasan dan kesehatan ikan, pengelolaan produksi dan usaha pembudidayaan ikan, pengelolaan pakan dan obat ikan dan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Perikanan Budidaya.

5. Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Tujuan program adalah meningkatnya ketaatan dan ketertiban dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dengan sasaran perairan Indonesia bebas *IUU Fishing* serta kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah pemantauan dan operasi armada, penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan, pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen PSDKP.

6. Program Riset dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Tujuan Program adalah menyiapkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai basis kebijakan pembangunan KP dengan sasaran termanfaatkannya IPTEK hasil riset oleh para pemangku kepentingan, serta meningkatkan kualitas SDM kelautan dan perikanan dengan sasaran meningkatnya kompetensi SDM kelautan dan perikanan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan, pendidikan kelautan dan perikanan, riset pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan, riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan, riset perikanan, riset kelautan dan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BRSDM KP.

7. Program Karantina, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Tujuan program adalah lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan serta jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan sasaran yaitu meningkatnya lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah karantina ikan, pengendalian mutu, standarisasi sistem dan kepatuhan dan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BKIPM.

8. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP

Tujuan program adalah meningkatkan pengendalian akuntabilitas kinerja pembangunan kelautan dan perikanan dengan sasaran program meningkatnya persentase capaian kinerja pembangunan KP. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang



dilaksanakan adalah pengawasan akuntabilitas aparatur pada unit kerja mitra Inspektorat I dan Pelaksana Pembangunan KP, pengawasan akuntabilitas aparatur pada unit kerja mitra Inspektorat II dan Pelaksana Pembangunan KP, pengawasan akuntabilitas aparatur pada unit kerja mitra Inspektorat III dan Pelaksana Pembangunan KP, pengawasan akuntabilitas aparatur pada unit kerja mitra Inspektorat IV dan Pelaksana Pembangunan KP, pengawasan akuntabilitas aparatur pada unit kerja mitra Inspektorat V dan Pelaksana Pembangunan KP, dan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen KKP.

9. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP

Tujuan Program adalah meningkatkan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan dengan sasaran meningkatnya kesesuaian pelaksanaan dukungan manajerial. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah penyiapan produk hukum dan penataan organisasi KKP, pengelolaan sumber daya manusia aparatur, pengelolaan keuangan KKP, pengelolaan perencanaan, penganggaran, kinerja dan kerja sama antar lembaga, pengelolaan administrasi dan pelayanan penunjang pelaksanaan tugas KKP, pengelolaan humas dan kerja sama luar negeri, pengelolaan data statistik kelautan dan perikanan dan pengelolaan modal usaha kelautan dan perikanan





AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik. Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang capaiannya diukur secara triwulan/semester/tahunan diperhitungkan sesuai dengan karakteristik IKU dimaksud. Monitoring, evaluasi, pengukuran sampai pelaporan dalam rangka pengumpulan data kinerja dilakukan oleh tim pengelola kinerja secara triwulanan. Dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja menggunakan aplikasi *database online* www.kinerjaku.kkp.go.id. Proses penghitungan kinerja menggunakan Manual IKU yang telah disusun sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses penghitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggung jawabnya.

Akuntabilitas Kinerja organisasi merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh Unit Kerja di lingkungan KKP. Dengan didasarkan atas perjanjian kinerja tersebut di atas serta seluruh perjanjian kinerja di level Satuan Kerja, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala. Dalam pelaksanaannya, pengukuran dan pelaporan kinerja KKP menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK), dengan tampilan dashboard capaian KKP Tahun 2019 seperti pada gambar berikut:

Bulan: Desember Tahun: 2019 Unit Kerja: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NPSS: 96.15 %

Perspektif	Bobot	Kode IS	Nama IS	Jml IKU	NIS	Status NIS	Skor IS	NOP	Status NOP
Stakeholders	25,00%	IS1	Terwujudnya ledakan ikan sesuai IKU	2	76,99%	●	76,99%	19,25%	●
		IS2	Terwujudnya ledakan ikan dalam peningkatan SCP	2	100,70%	●	100,70%	25,39%	●
Customer	25,00%	IS3	Terwujudnya peningkatan SCP yang partisipatif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan	7	83,32%	●	93,55%	23,39%	●
		IS4	Terwujudnya Kelayakan Pembangunan KP yang Efektif	1	104,30%	●	104,30%	26,74%	●
Internal Process	25,00%	IS5	Terlenggaranya tata kelola pemerintahan SCP yang berkeadilan, berbasis sabbid dan berkelanjutan	1	113,30%	●	104,94%	26,74%	●
		IS6	Terlenggaranya peningkatan dan pengujian SCP yang profesional dan partisipatif	2	103,42%	●	103,42%	26,74%	●
		IS7	Terwujudnya ASN KKP yang kompeten, profesional dan berintegritas	1	102,08%	●	102,08%	26,74%	●
Learning and Growth	25,00%	IS8	Terwujudnya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses	1	113,93%	●	113,93%	26,81%	●
		IS9	Terwujudnya kinerja KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	2	95,52%	●	107,22%	26,81%	●
		IS10	Terlaksananya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel	2	114,38%	●	114,38%	26,81%	●

Peringatan Warna
 NO WARNA KETERANGAN
 1 ● Baik (Skor >= 100)
 2 ● Hati-hati (Skor >= 90)
 3 ● Buruk (Skor < 90)

sumber. Kinerjaku.kkp.go.id

Analisis capaian kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan setiap Sasaran Strategis untuk setiap *perspective* dilakukan untuk menjelaskan realisasi indikator kinerja utama, permasalahan dan kendala yang dihadapi serta upaya perbaikan yang dilakukan kedepan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan kementerian. Analisis untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerja utama dapat dijelaskan sebagai berikut :



TABEL 3.1. CAPAIAN IKU KKP TAHUN 2019

	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2019		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP	Indeks	57,00	57,66	101,16
2	Pertumbuhan PDB Perikanan	%	11	5,81	52,82
3	Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku	%	87	93,57	107,55
4	Tingkat kemandirian SKPT	tingkat	4,00	4,00	100,00
5	Persentase Pengelolaan wilayah KP yang berkelanjutan	%	62,50	66,49	106,38
6	Persentase peningkatan ekonomi KP	%	71,50	68,22	95,41
7	Produksi perikanan	juta ton	38,30	23,86	62,30
8	Produksi garam nasional	juta ton	4,50	2,85	63,33
9	Nilai ekspor hasil perikanan	USD miliar	9,5	4,94	51,96
10	Konsumsi ikan	kg/kap/th	54,49	54,49	100,00
11	Nilai PNBP dari sektor KP	Rp. Miliar	820	756,51	92,26
12	Indeks efektivitas kebijakan pemerintah	Indeks	7,90	8,24	104,30
13	Efektivitas tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan	%	77,00	87,09	113,10
14	Persentase penyelesaian tindak pidana KP yang disidik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	%	92,00	96,40	104,78
15	Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan	%	78,00	79,60	102,05
16	Indeks profesionalitas ASN	%	71,00	72,48	102,08
17	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	%	80,00	91,14	113,93
18	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi KKP	Nilai	81,00	78,60	97,04
19	Level maturitas SPIP	Level	3,00	3,00	100,00
20	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran KKP	%	87,00	94,62	108,76
21	Opini atas Laporan Keuangan KKP	opini	3,00 (WDP)	5,00 (WTP)	120,00



3.2 Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

A. STAKEHOLDER PERSPECTIVE

SASARAN STRATEGIS (SS-1) “TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN”

Sasaran Strategis-1 “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat KP”, memiliki dua IKU (Indikator Kinerja Utama) yakni Indeks Kesejahteraan Masyarakat (IKM) dan Pertumbuhan PDB Perikanan. Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan diartikan bahwa pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan adalah sebesar-besarnya untuk kepentingan kemakmuran rakyat, dalam kaitan ini KKP senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh stakeholder kelautan dan perikanan, yakni nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar hasil perikanan, petambak garam, dan masyarakat kelautan dan perikanan lainnya melalui program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh KKP.



Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan adalah salah satu ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan yang akan diukur dengan menggunakan 2 (dua) variabel pokok yaitu ekonomi dan sosial. IKMKP bersifat tahunan, dengan capaian pada tahun 2019 sebagai berikut :

TABEL 3.2. INDEKS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN STRATEGIS-1				TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN					
IKU-1				INDEKS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN					
REALISASI				TAHUN 2019				RENSTRA KKP 2015-2019	
2015	2016	2017	2018	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% KENAIKAN 2018-2019	TARGET 2019	% CAPAIAN THD TARGET 2019
45,12	48,78	55,86	56,94	57	57,66	101,16	1,26	57	101,16

Sumber : Balai Besar Sosek Kelautan dan Perikanan, KKP (2020)

Salah satu Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan atas penjabaran misi “kesejahteraan” adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP yang ditargetkan 57 pada tahun 2019. Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dijabarkan dalam Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP). Atas dasar itu dilakukan penghitungan Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP). IKMKP dapat digunakan sebagai alat dalam menentukan prioritas daerah dan intervensi program sektor kelautan dan perikanan daerah. IKMKP dikembangkan dengan mengacu pada konsep Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. IKMKP memiliki 2 (dua) dimensi, yakni:



1. Dimensi Sosial dan Kelembagaan

Keadilan sosial dan kelembagaan tidak hanya menyangkut persoalan proses distribusi atau pemerataan hasil-hasil pembangunan kelautan dan perikanan, tapi berkaitan juga dengan upaya pemenuhan kebutuhan dasar, serta tindakan afirmatif dari KKP untuk melindungi dan memastikan setiap nelayan tradisional, pembudidaya, pengolah, pemasar, dan petambak mendapatkan kemudahan akses terhadap pemenuhan terhadap hak dasarnya, seperti pangan, papan, sandang, pelayanan publik, infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat sehingga mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Indikator Dimensi Sosial dan Kelembagaan terdiri dari:

- a. Jumlah penumbuhan dan pengembangan kelembagaan usaha perikanan tangkap (KUB),
- b. Jumlah penumbuhan dan pengembangan kelembagaan usaha budidaya ikan (Pokdakan),
- c. Jumlah penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pengolah dan pemasaran perikanan (Poklasar),
- d. Jumlah penumbuhan dan pengembangan kelembagaan usaha garam rakyat (Kugar),
- e. Jumlah penumbuhan dan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas),
- f. Jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang meningkat kelasnya dari jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh,
- g. Jumlah kelompok yang disuluh mendukung tata kelola pemanfaatan sumber daya KP yang berdaya saing dan berkelanjutan.

2. Dimensi Ekonomi

Dimensi ekonomi dalam konteks kesejahteraan masyarakat dilihat dari indikator-indikator yang terkait kemampuan para nelayan tradisional, pembudidaya, petambak, pengolah, dan pemasar untuk mendapatkan kemudahan akses dan aset terhadap sumber daya ekonomi untuk mencapai kesejahteraannya. Untuk indikator dimensi ekonomi yang digunakan mencakup: Nilai Tukar Nelayan (NTN), Nilai Tukar Usaha Pembudidaya (NTUPI), Nilai Tukar Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (NTPHP) dan Proporsi pengeluaran pangan terhadap total pendapatan yang dikombinasikan dengan angka konsumsi ikan. Capaian dimensi sosial dan kelembagaan sebesar 56,69 dan capaian dimensi ekonomi sebesar 59,10. Jika dilihat dari masing-masing indikator, penyebab rendahnya capaian kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan untuk dimensi sosial dan kelembagaan adalah masih rendahnya penumbuhan dan pengembangan kelompok pada pelaku usaha perikanan tangkap dan budidaya dimana proporsi kelompok pelaku usaha masih didominasi pada kelompok pemula.

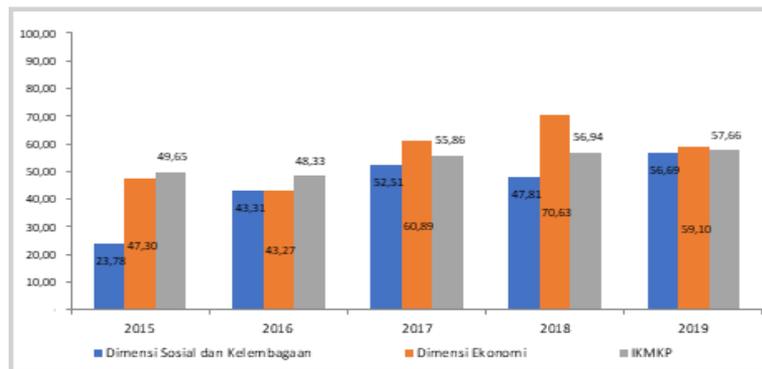
Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP) yang dihasilkan menggunakan bobot yang berbeda untuk dimensi sosial kelembagaan dan ekonomi.



Dimensi sosial dan kelembagaan diberikan bobot lebih besar dibandingkan bobot dimensi sosial. Ke depan dapat dipertimbangkan untuk menggunakan bobot yang berbeda antar wilayah. Dengan adanya pembedaan pembobotan, dapat ditentukan fokus pembangunan pada masing-masing wilayah. Daerah yang telah maju dari sisi ekonomi, dapat diberikan bobot yang lebih rendah atau sebaliknya. Pembobotan dengan penapisan ini dapat menjadi salah satu saran untuk penghitungan selanjutnya. Sedangkan dalam rangka meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan, beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan antara lain :

- a. menciptakan iklim kondusif agar pelaku utama usaha perikanan tangkap dan budidaya dalam hal ini nelayan dan pembudidaya ikan mampu untuk menumbuhkembangkan kelompoknya secara partisipatif;
- b. peningkatan kapasitas penyuluh perikanan dalam teknik fasilitasi, kewirausahaan dan manajemen usaha. masyarakat kelautan dan perikanan dalam upaya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

GAMBAR 3.1. GRAFIK INDEKS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KP TAHUN 2014-2019



Capaian Indikator Kinerja Masyarakat KP dari tahun 2014-2019 terus mengalami peningkatan, yaitu sebesar 49,65 pada tahun 2015 menjadi 57,66 pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Apabila dilihat dari nilai capaian per indikator pada tahun 2019 capaian indikator sosial mengalami peningkatan sebesar 18,57% yaitu 47,81 pada tahun 2018 menjadi 56,69 pada tahun 2019. Peningkatan ini salah satunya disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah kelompok yang disuluh baik pada kelompok KUB, Pokdakan maupun Poklahsar. Namun peningkatan jumlah kelompok tersebut, belum sejalan dengan peningkatan kelas kelompok yang disuluh. Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan usaha yang dilakukan masih sebatas pembentukan kelompok pemula, hal ini terlihat dari besarnya jumlah kelompok pemula. Jika diidentifikasi lebih lanjut, telah terjadi penyesuaian kriteria mengingat kriteria yang sudah ditetapkan tidak bisa dipenuhi. Penumbuhan kelembagaan pelaku utama adalah proses inisiasi dan fasilitasi tumbuhnya suatu kerjasama yang



bersumber dari kesadaran pelaku utama dengan cara bergabung dalam kelompok untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan prinsip kesamaan kepentingan, sumber daya alam, sosial ekonomi, keakraban, saling mempercayai dan keserasian hubungan antara pelaku utama, sehingga dapat merupakan faktor pengikat untuk kelestarian kehidupan berkelompok, dimana setiap anggota kelompok dapat merasa memiliki dan menikmati manfaat sebesar-besarnya dari apa yang ada dalam kelompok. Guna terciptanya penumbuhan kelompok atau kelembagaan pelaku utama perikanan, maka perlu dilakukan beberapa hal yang dapat merangsang dan memotivasi masyarakat pelaku utama usaha perikanan agar bisa tumbuh mandiri. Ujung tombak keberhasilan program ini adalah melalui kegiatan penyuluhan yang berorientasi pada peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap para pelaku utama usaha perikanan (PusatluhKP, 2018). Para penyuluh perikanan, tentunya memiliki peran dan fungsi dalam menumbuhkembangkan kelompok pelaku utama usaha perikanan.

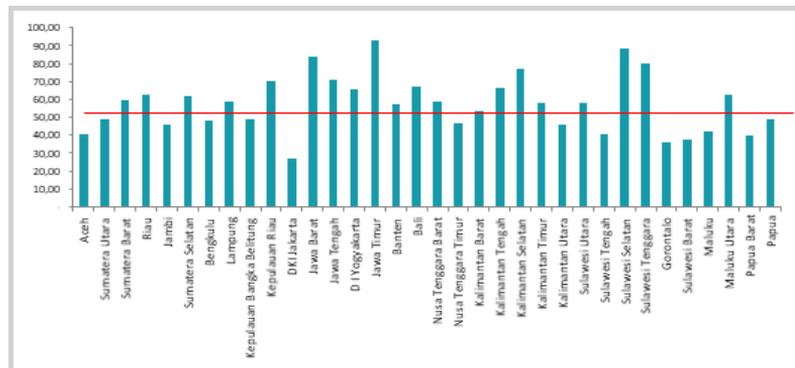
Capaian untuk indikator berdimensi ekonomi, mengalami perlambatan sebesar 16,32% yaitu 70,63 pada tahun 2018 menjadi 59,10 pada tahun 2019. Penurunan indeks ekonomi ini diduga didorong oleh inflasi atau kenaikan harga barang/jasa untuk keperluan produksi dan konsumsi masyarakat KP dan juga melambatnya pertumbuhan ekonomi, baik nasional maupun global. Kedua faktor tersebut mendorong kenaikan indeks harga hasil budidaya yang diterima masyarakat KP lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan pada indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi. Akibatnya, daya beli masyarakat KP menurun yang tercermin dari nilai tukar nelayan, pembudidaya, serta pengolah dan pemasar hasil perikanan yang juga menurun di semua provinsi Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah dalam hal ini KKP harus lebih serius dalam mendorong pembangunan dan penguatan pada dimensi ekonomi dengan berupaya menjaga stabilitas harga, baik harga input produksi maupun harga barang/jasa konsumsi.

GAMBAR 3.2. PETA INDEKS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2019



Nilai IKMKP yang diperoleh masing-masing daerah cukup bervariasi. Terdapat daerah yang sudah memiliki tingkat kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan yang cukup baik, tetapi ada pula daerah yang masih rendah tingkat kesejahteraan masyarakat KP nya. Untuk daerah-daerah yang memiliki tingkat kesejahteraan yang sudah cukup baik (>50) maka daerah tersebut tentunya harus mempertahankan dengan mengelola aspek-aspek yang ada baik pada dimensi ekonomi maupun pada dimensi sosial. Selanjutnya indeks per provinsi di atas dapat ditampilkan ke dalam bentuk peta seperti ditunjukkan pada Gambar 2.

GAMBAR 3.3. SEBARAN IKMKP TAHUN 2019 MENURUT PROVINSI



Dengan demikian, terdapat 8 (delapan) provinsi yang termasuk kelompok IKMKP pada selang kelompok ≤ 40 , yaitu: Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat dan Papua Barat. Sementara itu, 12 (dua belas) provinsi di Indonesia berada pada selang nilai IKMKP 40,01 sampai 60,00. Tujuh provinsi berada pada selang nilai IKMKP 60,01 sampai 80,00. Tujuh provinsi termasuk kelompok IKMKP > 80 , yaitu: Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Banten, dan Kalimantan Tengah.

Hasil penghitungan menunjukkan bahwa capaian IKMKP 2019 sebesar 57,66 dengan capaian dimensi sosial dan kelembagaan sebesar 56,69 dan capaian dimensi ekonomi sebesar 59,10. Hasil penghitungan menunjukkan bahwa capaian IKMKP 2019 meningkat 1,26% dari IKMKP 2018. Capaian dimensi sosial dan kelembagaan meningkat sebesar 18,57%, tetapi capaian dimensi ekonomi mengalami perlambatan sebesar 16,32. Perlambatan indeks ekonomi ini diduga didorong oleh inflasi atau kenaikan harga barang/jasa untuk keperluan produksi dan konsumsi masyarakat KP dan juga melambatnya pertumbuhan ekonomi, baik nasional maupun global. Kedua faktor tersebut mendorong kenaikan indeks harga hasil budidaya yang diterima masyarakat KP lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan pada indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi. Akibatnya, daya beli masyarakat KP menurun yang tercermin dari nilai tukar nelayan, pembudidaya, serta pengolah dan pemasar hasil perikanan yang juga menurun di semua provinsi Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah dalam hal ini KKP harus lebih serius dalam mendorong pembangunan dan penguatan pada dimensi ekonomi dengan



berupaya menjaga stabilitas harga, baik harga input produksi maupun harga barang/jasa konsumsi. IKMKP yang dihasilkan menggunakan bobot yang berbeda untuk dimensi sosial kelembagaan dan ekonomi. Dimensi sosial dan kelembagaan diberikan bobot lebih besar dibandingkan bobot dimensi sosial. Ke depan dapat dipertimbangkan untuk menggunakan bobot yang berbeda antar wilayah. Dengan adanya pembedaan pembobotan, dapat ditentukan fokus pembangunan pada masing-masing wilayah. Daerah yang telah maju dari sisi ekonomi, dapat diberikan bobot yang lebih rendah atau sebaliknya. Pembobotan dengan penapisan ini dapat menjadi salah satu saran untuk penghitungan selanjutnya. Sedangkan dalam rangka meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan, beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan antara lain:

1. menciptakan iklim kondusif agar pelaku utama usaha perikanan tangkap dan budidaya dalam hal ini nelayan dan pembudidaya ikan mampu untuk menumbuhkembangkan kelompoknya secara partisipatif.
2. peningkatan kapasitas penyuluh perikanan dalam teknik fasilitasi, kewirausahaan dan manajemen usaha masyarakat kelautan dan perikanan dalam upaya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

TABEL 3.3. KATEGORI PROVINSI BERDASARKAN NILAI IKMKP

PROPINSI DENGAN NILAI IKMKP < 57,66		PROPINSI DENGAN NILAI IKMKP ≥ 57,66	
1.	Aceh	1.	Riau
2.	Sumatera Utara	2.	Bengkulu
3.	Sumatera Barat	3.	Kepulauan Bangka Belitung
4.	Jambi	4.	Kepulauan Riau
5.	Sumatera Selatan	5.	Jawa Barat
6.	Lampung	6.	Jawa Tengah
7.	DKI Jakarta	7.	D I Yogyakarta
8.	Jawa Timur	8.	Banten
9.	Bali	9.	Nusa Tenggara Barat
10.	Nusa Tenggara Timur	10.	Kalimantan Tengah
11.	Kalimantan Barat	11.	Kalimantan Timur
12.	Kalimantan Selatan	12.	Sulawesi Tengah
13.	Kalimantan Utara	13.	Maluku Utara
14.	Sulawesi Utara	14.	Papua
15.	Sulawesi Selatan		
16.	Sulawesi Tenggara		
17.	Gorontalo		
18.	Sulawesi Barat		
19.	Maluku		
20.	Papua Barat		

Sumber: Hasil Olahan Data (2020)



Capaian dari indikator kinerja pembentuk untuk IKU-1. Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP berikut penjelasannya adalah sebagaimana penjelasan berikut:

DIMENSI EKONOMI

Nilai Tukar

Nilai tukar diperoleh dari perbandingan indek harga hasil produksi yang dijual oleh nelayan/pembudidaya ikan/pengolah/petambak garam (It) terhadap indeks harga biaya operasional produksi nelayan/pembudidaya ikan /pengolah/petambak garam (Ib). Nilai Tukar menunjukkan kemampuan daya tukar dari produk perikanan dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi, juga dapat untuk digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli nelayan/pembudidaya ikan/pengolah/petambak garam. Apabila Nilai Tukar capaiannya sebesar 100 berarti nelayan/pembudidaya ikan/pengolah/petambak garam memperoleh pendapatan lebih besar dari pengeluarannya. Sebaliknya apabila Nilai Tukar kurang dari 100, maka artinya pengeluaran nelayan untuk biaya rumah tangga dan produksi lebih besar dari uang yang diperoleh dari hasil menjual produk perikanan. Semakin tinggi Nilai Tukar, secara relatif semakin kuat kemampuan/daya beli nelayan/pembudidaya ikan/pengolah/petambak garam. Oleh sebab itu Nilai Tukar dapat dipergunakan sebagai salah satu indikator dini tingkat kesejahteraan nelayan/pembudidaya ikan/pengolah/petambak garam.

Beberapa faktor yang mempengaruhi Nilai Tukar antara lain adalah hasil produksi perikanan dalam waktu berjalan, harga komoditi produksi perikanan yang dihasilkan pada waktu berjalan, pengeluaran/ongkos yang dikeluarkan untuk memproduksi komoditi perikanan, harga barang dan jasa konsumsi untuk memproduksi komoditi perikanan, pengeluaran/ongkos yang dikeluarkan untuk kebutuhan sehari-hari, serta faktor harga ikan yang tidak mudah dikontrol dan dipengaruhi oleh situasi pasar.

1. Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan alat ukur kesejahteraan nelayan yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima oleh nelayan dengan harga yang dibayarkan oleh nelayan. Angka capaian NTN diperoleh dari Badan Pusat Statistik yang diolah oleh KKP dan dilaporkan secara berkala setiap bulannya. Tabel 4 menunjukkan realisasi NTN selama lima tahun terakhir dari tahun 2015-2019 terus mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2015 sebesar 106,14, tahun 2016 sebesar 108,24, tahun 2017 sebesar 111,02 tahun 2018 sebesar 113,28 dan tahun 2019 sebesar 113,74 atau mencapai 100,65% dari target yang telah ditetapkan di tahun 2019 yaitu sebesar 113.

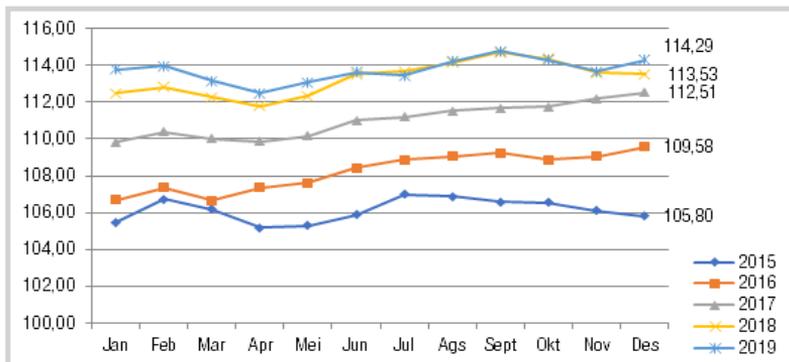


TABEL 3.4. CAPAIAN NILAI TUKAR NELAYAN (NTN) TAHUN 2015-2019

SASARAN STRATEGIS-1				TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN					
IKU-1				INDEKS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN					
INDIKATOR KINERJA PEMBENTUK				NILAI TUKAR NELAYAN (NTN)					
REALISASI				TAHUN 2019				RENSTRA KKP 2015-2019	
2015	2016	2017	2018	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% KENAIKAN 2018-2019	TARGET 2019	% CAPAIAN THD TARGET 2019
106,14	108,24	111,02	113,28	113,00	113,74	100,65	0,41	113,00	100,65

Sumber: Badan Pusat Statistik (2020)

Naiknya Nilai Tukar Nelayan (NTN) dari 113,28 pada tahun 2018 menjadi 113,74 pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan yang semakin meningkat. Keberhasilan pencapaian target Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan dampak peningkatan volume dan nilai produksi perikanan tangkap yang dinikmati oleh nelayan.

GAMBAR 3.4. GRAFIK PERKEMBANGAN NILAI TUKAR NELAYAN PER BULAN TAHUN 2015-2019


Selama tahun 2019, NTN mengalami tren kenaikan dan mencapai nilai tertinggi pada bulan September 2019 dengan nilai mencapai 114,79. Tren naiknya NTN disebabkan naiknya indeks pendapatan nelayan yang disebabkan mulai terjadinya musim ikan. Sedangkan nilai terendah terjadi pada bulan April 2018 yaitu sebesar 112,47 yang dipengaruhi oleh faktor cuaca. Nilai Tukar Nelayan (NTN) selama lima tahun terakhir (2015 s.d 2019) menunjukkan realisasi yang fluktuatif dengan tren sebagai berikut, dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 1,98%, tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 2,57%, tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 2,04% dan tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,41%. Jika dibandingkan dengan target NTN sampai akhir Renstra tahun 2019 sebesar 113, posisi capaian tahun 2019 sudah mencapai 100,65%.



TABEL 3.5. CAPAIAN NTN PER PROVINSI TAHUN 2015-2019

PROVINSI	2015	2016	2017	2018	2019	PERTUMBUHAN 2018-2019 (%)
NASIONAL	102,38	102,82	104,05	105,99	106,94	0,90
SUMATERA						
Aceh	97,66	97,86	97,14	97,59	97,01	(0,59)
Sumatera Utara	97,31	99,86	102,95	102,67	103,42	0,73
Sumatera Barat	106,85	106,47	109,15	107,88	104,98	(2,69)
Riau	106,03	110,46	115,25	114,97	112,31	(2,31)
Jambi	100,39	101,70	102,71	103,68	105,80	2,04
Sumatera Selatan	98,58	97,90	97,62	100,05	99,27	(0,78)
Bengkulu	99,14	96,56	96,14	97,56	97,88	0,33
Lampung	99,19	98,38	98,60	99,71	101,00	1,29
Kep. Bangka Belitung	100,51	106,07	108,96	111,12	112,47	1,21
Kep. Riau	107,38	108,98	110,26	113,50	115,94	2,15
JAWA						
DKI Jakarta	98,17	100,09	98,29	99,38	97,68	(1,71)
Jawa Barat	98,84	99,13	101,64	105,81	108,04	2,11
Jawa Tengah	101,30	102,55	102,24	103,57	105,01	1,40
D.I. Yogyakarta	105,40	104,28	101,65	102,88	103,48	0,58
Jawa Timur	105,63	106,09	109,74	112,99	113,61	0,55
Banten	105,36	106,41	106,77	108,03	109,22	1,10
BALI-NUSATENGARA						
Bali	104,60	102,71	105,19	104,64	102,59	(1,95)
Nusa Tenggara Barat	101,34	101,04	104,60	107,51	109,00	1,39
Nusa Tenggara Timur	104,00	103,12	105,68	109,43	108,47	(0,88)
KALIMANTAN						
Kalimantan Barat	100,02	102,59	102,03	104,92	109,12	4,00
Kalimantan Tengah	103,85	106,66	107,24	108,55	110,56	1,85
Kalimantan Selatan	110,30	109,78	109,46	111,62	110,43	(1,07)
Kalimantan Timur	98,38	99,89	101,36	103,32	104,62	1,25

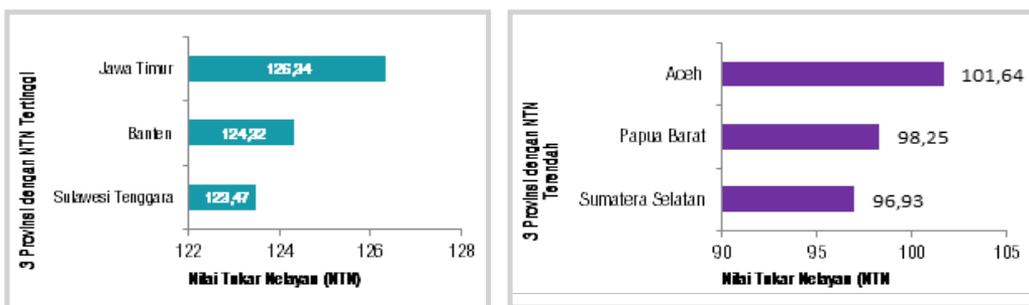


SULAWESI						
Sulawesi Utara	105,67	100,08	103,18	107,08	108,11	0,96
Sulawesi Tengah	104,88	107,31	107,85	106,63	105,82	(0,76)
Sulawesi Selatan	104,24	100,98	102,04	104,16	105,61	1,39
Sulawesi Tenggara	103,99	110,32	114,20	116,52	117,36	0,73
Gorontalo	99,64	101,37	101,11	101,30	97,06	(4,18)
Sulawesi Barat	100,47	101,83	104,19	107,52	109,73	2,05
MALUKU-PAPUA						
Maluku	106,19	105,43	105,03	105,34	107,69	2,22
Maluku Utara	102,26	102,03	103,57	106,83	107,22	0,36
Papua Barat	105,42	103,04	100,26	100,69	97,05	(3,61)
Papua	105,21	103,63	98,97	97,92	101,21	3,37

Sumber: BPS, Perhitungan Tahun Dasar 2012

Standar kesejahteraan nelayan adalah angka Nilai Tukar Nelayan sebesar 100, apabila Nilai Tukar Nelayan di bawah 100 maka nelayan dikategorikan belum sejahtera dan apabila Nilai Tukar Nelayan di atas 100 maka nelayan dikategorikan sejahtera. Selama tahun 2019, hingga bulan Desember realisasi NTN rata-rata di atas 100. Namun demikian, berdasarkan capaian di 34 provinsi, terdapat dua provinsi yang rata-rata NTN di bawah 100 yakni Provinsi Sumatera Selatan dan Papua Barat dengan capaian masing-masing sebesar 96,93 dan 98,25. Berdasarkan capaian NTN di 34 provinsi, terdapat 3 provinsi dengan capaian tertinggi yaitu Jawa Timur (126,34), Banten (122,57), dan Sulawesi Tenggara (123,46). Sedangkan 3 provinsi dengan capaian terendah yaitu Sumatera Selatan (96,93), Papua Barat (98,25), dan Aceh (101,64).

GAMBAR 3.5. PROVINSI DENGAN NTN TERTINGGI DAN TERENDAH TAHUN 2019

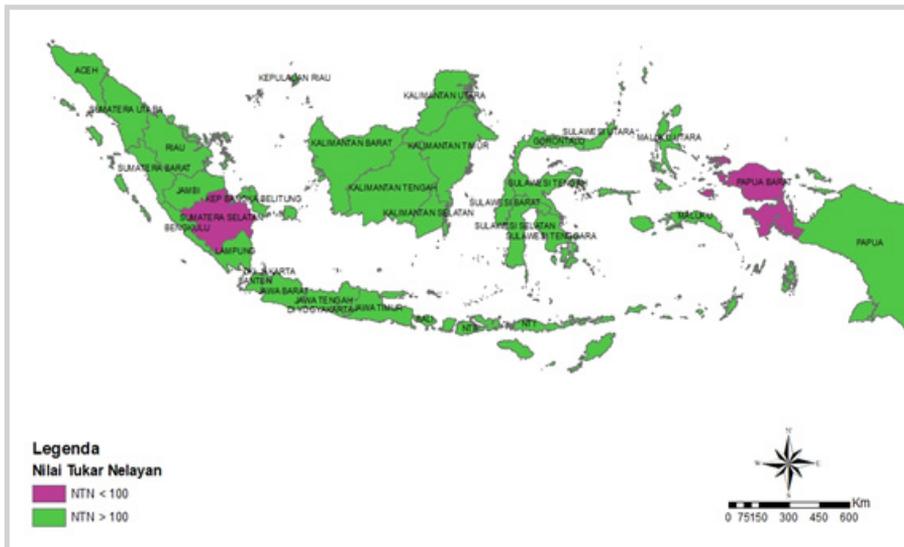


Keberhasilan pencapaian target NTN merupakan dampak peningkatan volume dan nilai produksi perikanan tangkap. Disaat yang bersamaan biaya yang harus dikeluarkan oleh nelayan cenderung stabil sepanjang tahun, dimana komponen barang produksi dan penambahan barang modal dapat ditekan dengan adanya pembangunan infrastruktur



yang mendukung kemudahan akses nelayan terhadap BBM, air/es dan pasar, dan juga tingkat inflasi berpengaruh terhadap meningkatnya capaian NTN.

GAMBAR 3.6. PETA SEBARAN NILAI TUKAR NELAYAN DI INDONESIA TAHUN 2019



2. Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)

Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi) merupakan alat ukur kesejahteraan pembudidaya yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima oleh pembudidaya dengan harga yang dibayarkan oleh pembudidaya. Angka capaian NTPi diperoleh dari Badan Pusat Statistik yang diolah oleh KKP dan dilaporkan secara berkala setiap bulannya.

TABEL 3.6. CAPAIAN NILAI TUKAR PEMBUDIDAYA IKAN (NTPi) TAHUN 2015-2019

SASARAN STRATEGIS-1			TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN					
IKU-1			INDEKS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN					
INDIKATOR KINERJA PEMBENTUK			NILAI TUKAR PEMBUDIDAYA (NTPi)					
REALISASI			TAHUN 2019				RENSTRA KKP 2015-2019	
2016	2017	2018	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% KENAIKAN 2018-2019	TARGET 2019	% CAPAIAN THD TARGET 2019
98,96	99,09	100,80	103,00	102,09	97,86	1,28	103,00	97,86

Sumber: Badan Pusat Statistik (2020)

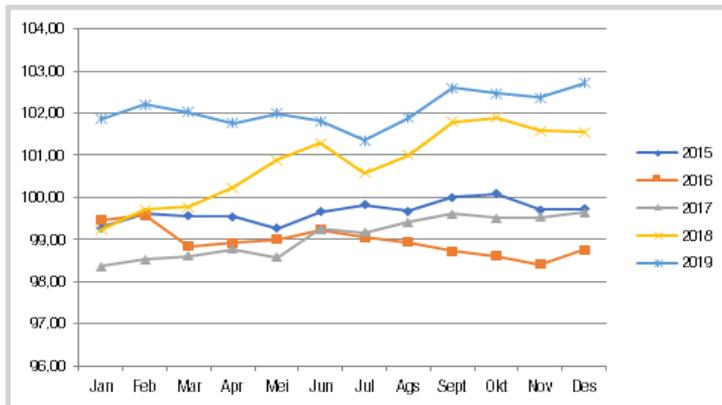
*Angka sementara

Berdasarkan hasil pemantauan di 34 provinsi oleh BPS, rata-rata capaian NTPi di 34 provinsi di Indonesia pada bulan Januari s.d Desember 2019 adalah sebesar 102,09 atau mencapai sebesar 97,86% dari target tahun 2019 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 103. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2019 sesuai Renstra KKP tahun



2015-2019 yaitu sebesar 103, realisasi NTPi tahun 2019 telah mencapai sebesar 97,86%. Belum tercapainya target NTPi tahun 2019 disebabkan karena peningkatan margin keuntungan penjualan ikan sebagai akibat dari semakin turunnya biaya produksi karena penggunaan pakan mandiri juga dibarengi dengan meningkatnya harga-harga kebutuhan rumah tangga yang mengakibatkan indeks bayar konsumsi rumah tangga juga meningkat.

GAMBAR 3.7. GRAFIK PERKEMBANGAN NILAI TUKAR PEMBUDIDAYA IKAN (NTPi) TAHUN 2015-2019



Selama tahun 2019, NTPi mencapai nilai tertinggi pada bulan Oktober 2019 dengan nilai mencapai 102,71. Sedangkan nilai terendah terjadi pada bulan Juli 2019 yaitu sebesar 101,81. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) selama lima tahun terakhir (2015 s.d 2019) menunjukkan realisasi yang fluktuatif dengan tren sebagai berikut dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami perlambatan sebesar 0,69%, tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 0,13%, tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 1,73% dan tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 1,28%. Rincian realisasi NTPi per provinsi sampai dengan tahun 2019 tersaji dalam Tabel 11.

TABEL 3.7. CAPAIAN NILAI TUKAR PEMBUDIDAYA IKAN (NTPi) PER PROVINSI TAHUN 2015-2019

PROVINSI	2015	2016	2017	2018	2019	PERTUMBUHAN 2018-2019
NASIONAL	99,67	98,96	99,09	100,80	102,09	1,28
SUMATERA						
Aceh	95,34	94,47	93,42	92,96	92,50	(0,50)
Sumatera Utara	93,60	95,86	97,30	95,54	96,81	1,33
Sumatera Barat	108,22	106,77	109,16	107,54	104,14	(3,16)
Riau	102,42	101,45	106,07	104,53	101,92	(2,50)
Jambi	97,22	95,06	95,05	95,22	96,17	1,00
Sumatera Selatan	101,01	98,77	97,20	102,08	101,57	(0,50)
Bengkulu	98,77	94,38	92,99	94,18	95,40	1,29



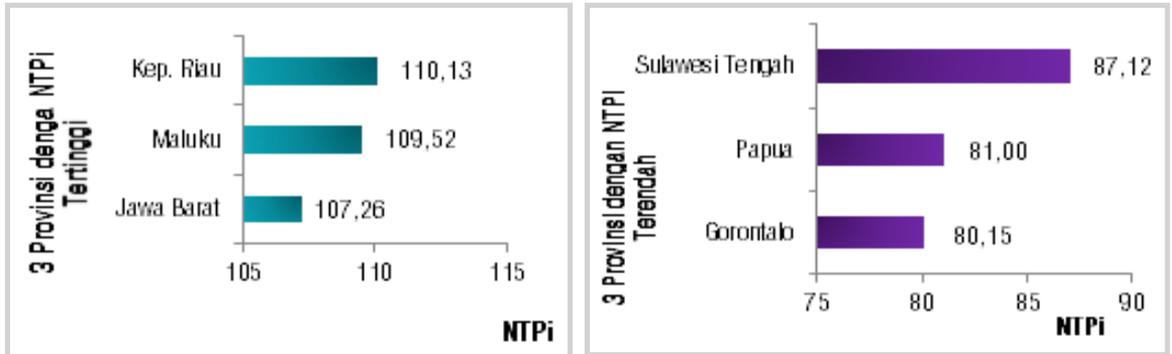
PROVINSI	2015	2016	2017	2018	2019	PERTUMBUHAN 2018-2019
NASIONAL	99,67	98,96	99,09	100,80	102,09	1,28
Lampung	96,88	95,56	94,63	94,80	95,31	0,54
Kep. Bangka Belitung	94,20	94,73	94,55	93,12	90,54	(2,78)
Kep. Riau	108,43	107,28	106,52	107,20	110,13	2,73
JAWA						
DKI Jakarta	94,29	93,42	92,82	91,22	90,90	(0,35)
Jawa Barat	98,10	98,22	100,53	104,86	107,26	2,29
Jawa Tengah	100,25	101,06	99,96	100,16	102,03	1,87
D.I. Yogyakarta	105,29	103,87	100,76	101,80	102,40	0,58
Jawa Timur	104,94	102,48	101,09	104,27	105,62	1,29
Banten	96,41	96,46	96,21	96,66	97,43	0,80
BALI - NUSATENGARA						
Bali	91,74	89,85	88,64	88,70	89,03	0,37
Nusa Tenggara Barat	93,10	89,71	90,60	93,04	93,99	1,02
Nusa Tenggara Timur	99,95	99,50	97,65	98,00	98,64	0,66
KALIMANTAN						
Kalimantan Barat	99,15	99,26	98,66	98,72	100,49	1,80
Kalimantan Tengah	96,80	97,30	96,07	98,30	101,76	3,52
Kalimantan Selatan	102,66	102,09	102,16	104,24	104,62	0,37
Kalimantan Timur	90,14	89,68	89,70	92,18	91,03	(1,25)
SULAWESI						
Sulawesi Utara	95,18	92,98	91,48	94,24	94,23	(0,01)
Sulawesi Tengah	92,80	88,95	85,50	85,83	87,12	1,50
Sulawesi Selatan	102,08	99,13	97,97	101,45	104,13	2,64
Sulawesi Tenggara	97,71	96,29	97,33	99,92	102,74	2,82
Gorontalo	92,04	89,23	84,86	82,45	80,15	(2,80)
Sulawesi Barat	99,20	96,21	94,92	94,86	95,87	1,07
MALUKU - PAPUA						
Maluku	108,80	105,78	102,63	104,92	109,52	4,39
Maluku Utara	109,21	107,57	104,19	103,88	105,90	1,95
Papua Barat	91,92	89,77	89,12	89,09	87,92	(1,32)
Papua	90,69	88,17	83,40	82,18	81,00	(1,44)

Sumber: BPS, Perhitungan Tahun Dasar 2012



Berdasarkan Gambar 8, terdapat 3 provinsi dengan capaian Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) tertinggi yaitu Kepulauan Riau (110,13), Maluku (109,52) dan Jawa Barat (107,26). Sedangkan 3 provinsi dengan capaian NTPi terendah yaitu Sulawesi tengah (87,12), Papua (81) dan Gorontalo (80,15).

GAMBAR 3.8. PROVINSI DENGAN CAPAIAN NTPi TERTINGGI DAN TERENDAH TAHUN 2019



Pada tahun 2019, NTPi telah mencapai nilai diatas 100 yaitu sebesar 102,09. NTPi juga mengalami peningkatan yaitu 100,80 pada tahun 2018 menjadi 102,09. Hal ini menunjukkan bahwa afirmasi kebijakan untuk program perikanan budidaya telah dapat meningkatkan NTPi.

Kenaikan harga komoditas ikan hasil budidaya air tawar dan komoditas ikan hasil budidaya air payau merupakan penyumbang kenaikan pendapatan yang diterima oleh pembudidaya. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan bantuan pemerintah sektor bidang perikanan budidaya yang lebih fokus pada budidaya tawar dan payau telah tepat dan berdampak pada masyarakat sehingga NTPi terus mengalami kenaikan.

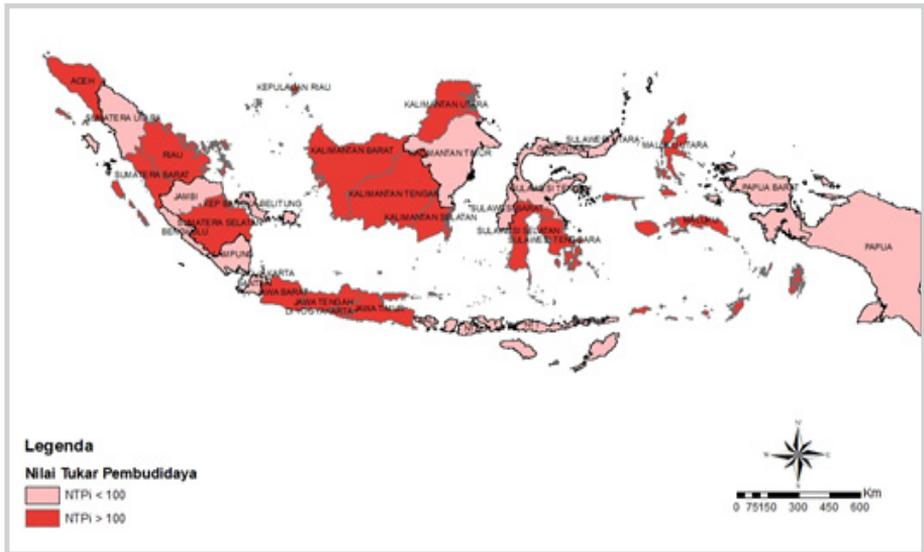
Penyebab kenaikan ini salah satunya disebabkan oleh kebijakan bantuan pemerintah pakan mandiri, bioflok, bantuan minapadi, escavator, bantuan benih dan induk unggul, bantuan prasarana

dan kebijakan lainnya yang menjadi pemicu naiknya harga jual ikan budidaya dan menekan biaya produksi perikanan budidaya. Kendala dalam pencapaian Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) diantaranya adalah masih cukup tingginya harga pakan, sementara pakan merupakan komponen utama dalam biaya produksi (60-70%). Selain itu, naiknya harga kebutuhan pokok sebagai akibat dari semakin melemahnya nilai rupiah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam pencapaian NTPi. Meskipun belum mencapai target, namun angka tersebut menunjukkan bahwa hasil dari pembudidayaan ikan bisa mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup pembudidaya sehari-hari. Kementerian Kelautan dan Perikanan akan terus berupaya meningkatkan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi), melalui pelaksanaan kebijakan yang bersifat afirmatif dan pemberian bantuan pemerintah sebagai salah satu stimulan bagi para pembudidaya serta memperluas akses permodalan bagi usaha budidaya diantaranya melalui (i) pengembangan pakan mandiri melalui penyediaan bahan baku, uji lab, penyediaan mesin pellet, pengembangan laboratorium nutrisi pakan, dan pembinaan ke pembudidaya dan memperbanyak



percontohan untuk budidaya pakan mandiri seperti cacing darah, cacing sutra dan azolla yang diharapkan dapat mengurangi biaya penggunaan pakan; (ii) pengembangan teknologi bioflok untuk menekan Food Conversion Ratio/FCR guna meningkatkan efisiensi pakan dan produktivitas perikanan budidaya; dan (iii) pengembangan mariculture untuk peningkatan/pengalihan ke budidaya rumput laut yang rendah input produksi, diantaranya melalui pengembangan sentra kebun bibit serta pemberian asuransi perikanan bagi pembudidaya ikan kecil.

GAMBAR 3.9. PETA SEBARAN NILAI TUKAR PEMBUKIDAYA IKAN (NTPi) DI INDONESIA TAHUN 2019



3. Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP)

NTPHP menunjukkan daya tukar dari produk olahan ikan dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun biaya yang dikeluarkan untuk pengolahan ikan. Pada tahun 2019, nilai capaian NTPHP sebesar 103,53 (angka sementara) atau mencapai 100,03% dari target yang ditetapkan yaitu 103,50. Apabila dibandingkan dengan nilai capaian tahun 2018 terjadi kenaikan sebesar 0,40%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra KKP tahun 2015-2019 telah mencapai 100,03%.

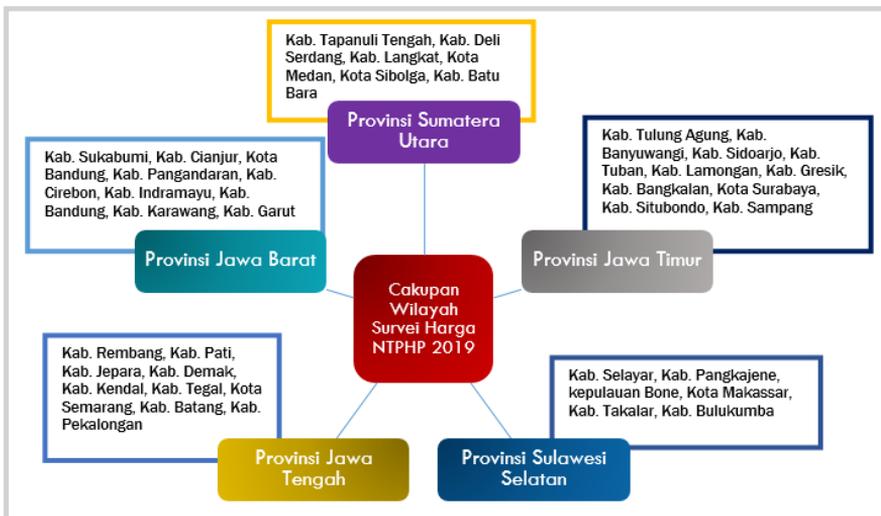
TABEL 3.8. CAPAIAN NILAI TUKAR PENGOLAH HASIL PERIKANAN (NTPHP) TAHUN 2015-2019

SASARAN STRATEGIS-1			TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN						
IKU-1			INDEKS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN						
INDIKATOR KINERJA PEMBENTUK			NILAI TUKAR PENGOLAH HASIL PERIKANAN (NTPHP)						
REALISASI			TAHUN 2019				RENSTRA KKP 2015-2019		
2016	2017	2018	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% KENAIKAN 2018-2019	TARGET 2019	% CAPAIAN THD TARGET 2019	
102,38	102,67	103,12	103,5	103,53	100,03	0,40	103,50	100,03	



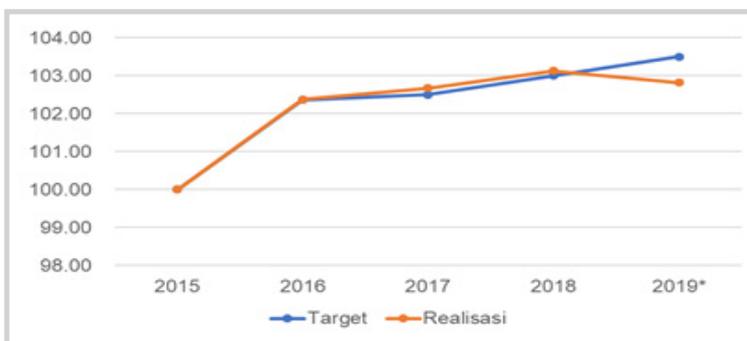
NTPHP yang lebih dari 100 menunjukkan bahwa kenaikan harga produksi lebih besar dari kenaikan harga konsumsi, artinya pendapatan pengolah hasil perikanan naik lebih besar dari pengeluarannya atau surplus. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan pemerintah di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan diantaranya gudang penyimpanan berpendingin (Cold Storage dan Integrated Cold Storage), kendaraan berpendingin, Ice Flake Machine dan sarana lainnya telah berhasil menjadi salah satu stimulan ekonomi menyebabkan terjadinya efektivitas produksi hulu dan hilir lebih kuat, efisiensi biaya produksi dan membantu mempertahankan kualitas bahan baku dan produk akhir sehingga harga produk akhir menjadi lebih tinggi. NTPHP Tahun 2019 merupakan nilai nasional yang dihitung melalui sampling di 40 Kabupaten/Kota yang tersebar di 5 Provinsi (Gambar 18). Ke depan, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan melakukan penghitungan NTPHP pada seluruh provinsi di Indonesia.

GAMBAR 3.10. LOKASI SAMPLING PERHITUNGAN NTPHP TAHUN 2019



Pada tahun 2019, nilai capaian NTPHP sebesar 103,53 atau mencapai 100,30% dari target yang ditetapkan yaitu 103,50. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan daya tukar produk olahan hasil perikanan.

GAMBAR 3.11. PERTUMBUHAN NILAI NTPHP SELAMA TAHUN 2015-2019



Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian NTPHP selama tahun 2019 antara lain :

- a. Pembiayaan usaha hasil kelautan dan perikanan dari Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank, termasuk pembiayaan dari Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP). Pertumbuhan pembiayaan usaha di bidang kelautan dan perikanan yang cenderung positif menunjukkan bahwa kepercayaan industri jasa keuangan kepada bidang kelautan dan perikanan semakin meningkat.
- b. Pengadaan kendaraan berpendingin dan telah diserahkan kepada kelompok usaha perikanan dan koperasi perikanan di beberapa wilayah, yang digunakan untuk mendistribusikan ikan dari hulu sampai hilir sehingga kontinuitas dan supply ikan bagi unit pengolah ikan dan konsumen terjamin dan harga relatif stabil.
- c. Fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang dibangun dan dimanfaatkan berupa chest freezer, Integrated Cold Storage dan cold storage, sentra kuliner, pasar ikan bersih, pasar ikan modern. Dengan adanya bantuan tersebut para pengolah dan pemasar hasil kelautan dan perikanan dapat meningkatkan jumlah produksi yang mengakibatkan naiknya pendapatan para pengolah hasil perikanan.
- d. Pembinaan cara pengolahan dan penanganan ikan yang baik dan benar di unit penanganan dan unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan, berdampak pada peningkatan kualitas mutu produk menjadi lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari telah diterbitkannya 2.973 SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan) untuk Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan.
- e. Bantuan Ice Flake Machine kapasitas 1,5 ton, sehingga kualitas ikan tetap terjaga, dampaknya adalah harga ikan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya.

4. Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG)

Nilai Tukar Petambak Garam merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petambak garam (Indeks terima = It) dengan indeks harga yang dibayar petambak garam (Indeks bayar = Ib). Indeks harga yang diterima petambak garam (It) merupakan indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petambak garam, sedangkan Ib adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petambak garam, baik untuk konsumsi sehari-hari maupun kebutuhan untuk proses produksi.

Secara konseptual NTPG adalah pengukur kemampuan tukar garam yang dihasilkan petambak dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi garam, dengan kata lain apabila $NTPG=100$, berarti masyarakat mengalami *impas/break even*, $NTPG>100$ menunjukkan masyarakat mengalami surplus, dan $NTPG<100$ menunjukkan bahwa masyarakat mengalami defisit. Indeks NTPG menggambarkan perkembangan tingkat pendapatan masyarakat kelautan dan perikanan dibidang tambak garam dari waktu ke waktu.



TABEL 3.9. CAPAIAN NILAI TUKAR PETAMBAK GARAM (NTPG) TAHUN 2015-2019

SASARAN STRATEGIS-1				TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN					
IKU-1				INDEKS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN					
INDIKATOR KINERJA PEMBENTUK				NILAI TUKAR PETAMBAK GARAM (NTPG)					
REALISASI				TAHUN 2019				RENSTRA KKP 2015-2019	
2015	2016	2017	2018	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% KENAIKAN 2018-2019	TARGET 2019	% CAPAIAN THD TARGET 2019
98,82	102,23	115,61	110,14	102,5	91,19	88,96	-17,21	102,5	88,96

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020
*angka sementara

Pada tahun 2019, realisasi NTPG sebesar 91,19 atau mencapai 88,96% dari target yang ditetapkan yaitu 102,50, sedangkan apabila dibandingkan dengan target tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam Renstra KKP Tahun 2015-2019 yaitu sebesar 102,50, realisasi NTPG tahun 2019 mencapai 88,96%.

Apabila dibandingkan dengan nilai capaian tahun 2018, NTPG tahun 2019 mengalami perlambatan sebesar 17,21%. Penurunan nilai ini diakibatkan karena turunnya harga garam ditingkat petambak garam sehingga penghasilan para petambak garam menurun. Penurunan NTPG dikarenakan turunnya It (Indeks terima) sebesar 16,33 persen sedangkan Ib (Indeks bayar) naik sebesar 1,07 persen. Penurunan It Tahun 2019 dipengaruhi oleh turunnya It garam tambak dan garam rebusan, masing-masing sebesar 16,87 persen dan 2,87 persen. Komoditas dominan yang mempengaruhi penurunan It tahun 2019 adalah garam tambak di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat

TABEL 3.10. ANDIL KOMODITAS DOMINAN YANG MENYEBABKAN PENURUNAN IT TAHUN 2019

KOMODITAS	ANDIL KOMODITAS (%)
Garam Tambak Provinsi Jawa Timur	1,86
Garam Tambak Provinsi Jawa Tengah	1,69
Garam Tambak Provinsi Jawa Barat	1,03

Kenaikan Ib Tahun 2019 dipengaruhi oleh kenaikan Indeks KRT (Konsumsi Rumah Tangga) dan BPPBM (Belanja Produksi dan Penambahan Barang Modal), masing-masing sebesar 1,13 persen dan 0,97 persen. Pada kelompok KRT, terjadi kenaikan pada seluruh subkelompok. Kenaikan terbesar terjadi pada subkelompok sandang sebesar 1,44 persen. Sementara itu, subkelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar mengalami kenaikan yang terkecil sebesar 0,65 persen. Pada kelompok BPPBM, kenaikan juga terjadi pada seluruh subkelompok pembentuk BPPBM. Kenaikan tertinggi terjadi pada subkelompok biaya sewa dan pengeluaran lain sebesar 1,15 persen.

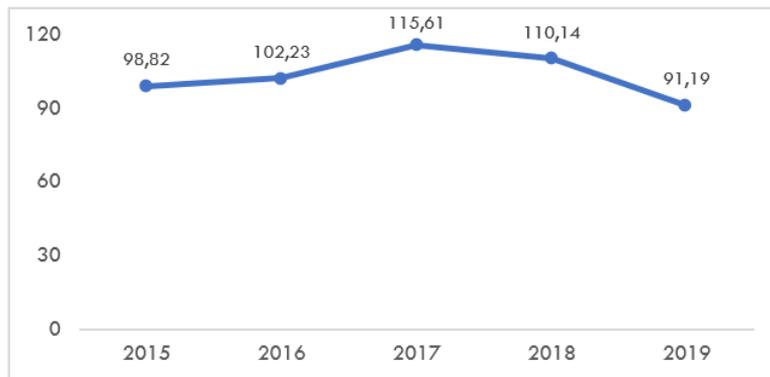


Sedangkan, kenaikan terkecil terjadi pada subkelompok transportasi dan komunikasi sebesar 0,61 persen. Komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan Ib pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

TABEL 3.11. ANDIL KOMODITAS DOMINAN YANG MENYEBABKAN KENAIKAN IB, TAHUN 2019

KELOMPOK	SUBKELOMPOK	KOMODITAS	ANDIL KOMODITAS (%)
BPPBM	Biaya Sewa dan Pengeluaran lain	Sewa Tanah untuk Tambak	0,04
BPPBM	Biaya Sewa dan Pengeluaran Lain	Kayu Bakar	0,03
KRT	Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	Rokok Kretek Filter	0,01
KRT	Bahan Makanan	Bawang Merah	0,01
KRT	Bahan Makanan	Bawang Putih	0,01
KRT	Bahan Makanan	Cabai Merah	0,01
KRT	Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	Rokok Kretek	0,01

GAMBAR 3.12. GRAFIK NILAI TUKAR PETAMBAK GARAM (NTPG) TAHUN 2015-2019



Secara umum capaian NTPG dari tahun 2015 ke tahun 2019 berfluktuatif, yaitu dari tahun 2016 ke tahun 2015 NTPG mengalami kenaikan sebesar 3,45%, dari tahun 2017 ke tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 13,09%, dari tahun 2018 ke tahun 2017 terjadi perlambatan sebesar 4,73% dan tahun 2019 ke tahun 2018 mengalami perlambatan sebesar 17,21.

5. Rata-Rata Pendapatan Nelayan

Rata-rata pendapatan nelayan merupakan total pendapatan per orang nelayan yang dari aktivitas penangkapan ikan yang diperoleh dari hasil penjualan dan tangkapan/produksi setelah dikurangi modal kerja diperoleh dalam 1 (satu) bulan. Indikator ini memiliki definisi dan teknik penghitungan yang sama dengan indikator rata-rata pendapatan Rumah



Tangga Perikanan (RTP) per bulan. Pada tahun 2019, capaian rata-rata pendapatan nelayan adalah sebesar Rp. 3.852.000. atau sebesar 149,88% dari target sebesar Rp. 2.570.000 per bulan. Apabila dibandingkan rata-rata Upah Minimum Regional (UMR) sebagaimana tertuang Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/308/HI.01.00/X/2019 yaitu sebesar Rp.2.455.766, Rata-rata Pendapatan Nelayan Tahun 2019 relatif lebih tinggi.

TABEL 3.12. CAPAIAN IKU RATA-RATA PENDAPATAN NELAYAN TAHUN 2015-2019

SASARAN STRATEGIS-1				TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN					
IKU-1				INDEKS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN					
INDIKATOR KINERJA PEMBENTUK				RATA-RATA PENDAPATAN NELAYAN PER BULAN (RP)					
REALISASI				TAHUN 2019				RENSTRA KKP 2015-2019	
2015	2016	2017	2018	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% KENAIKAN 2018-2019	TARGET 2019	% CAPAIAN THD TARGET 2019
1.934.390	2.141.506	2.288.344	3.385.947	2.570.000	3.852.000	149,88%	24,60	4.330.000	97,44

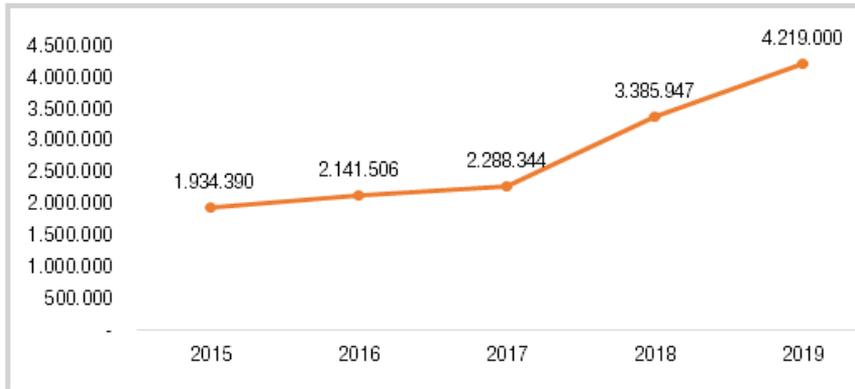
Angka sementara

Peningkatan pendapatan nelayan seiring dengan peningkatan realisasi volume produksi perikanan tangkap disebabkan oleh: Implementasi cara penanganan ikan yang baik (CPIB) di atas kapal dan di pelabuhan perikanan, Infrastruktur yang mendukung akses terhadap pasar di kawasan pesisir lebih baik dibandingkan dengan fasilitas yang tersedia di sekitar perairan umum daratan. Selain itu, telah dilakukan berbagai kebijakan pengelolaan perikanan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu:

- Kebijakan larangan bongkar muat (transshipment) di atas laut meningkatkan jumlah kapal yang tambat di darat, sehingga hasil tangkapan ikan dapat tercatat dengan baik di pelabuhan pangkalan;
- Tindakan tegas terhadap kapal-kapal *IUU Fishing* menyebabkan jalur migrasi ikan yang selama ini tertahan dapat diakses oleh nelayan lokal, sehingga menumbuhkan fishing ground baru atau peningkatan jumlah tangkapan di *fishing ground* yang lama. Persaingan dengan kapal asing juga menjadi jauh berkurang, karena selama ini nelayan lokal kalah dalam hal kapasitas kapal dan teknologi penangkapan ikan. Kondisi ini menyebabkan peningkatan jumlah hasil tangkapan ikan yang didaratkan oleh nelayan lokal.
- Adanya bantuan sarana penangkapan ikan berupa kapal perikanan dan alat penangkap ikan serta mesin kapal perikanan.

Tahun 2019 rata-rata pendapatan nelayan per bulan meningkat sebesar 24,60% jika dibandingkan rata-rata pendapatan nelayan di tahun 2018 yaitu Rp.3,38 juta di tahun 2018 menjadi Rp.4,21 juta di tahun 2019. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya kesejahteraan nelayan”



GAMBAR 3.13. GRAFIK RATA-RATA PENDAPATAN NELAYAN TAHUN 2015-2019

Rata-rata pendapatan nelayan dari tahun 2015-2019, terus mengalami peningkatan, dengan pertumbuhan mencapai 22,53%. Hal ini menunjukkan afirmasi kebijakan untuk program perikanan tangkap telah dapat meningkatkan pendapatan rata-rata nelayan pada tahun 2019.

6. Rata-Rata Pendapatan Pembudidaya

Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atas faktor-faktor produksi yang mereka sumbangkan dalam turut serta membentuk produk nasional, pendapatan atau income adalah uang yang diterima oleh seseorang dan perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa bunga, dan laba termasuk juga beragam tunjangan, seperti kesehatan dan pensiun, sementara itu terkait dengan pendapatan pembudidaya adalah uang yang diterima oleh pembudidaya yang merupakan hasil dari kegiatan membudidayakan ikan, sehingga bisa diukur seberapa jauh kegiatan pembudidayaan ikan dapat memberikan kehidupan yang layak bagi pembudidaya.

TABEL 3.13. CAPAIAN RATA-RATA PENDAPATAN PEMBUDIDAYA TAHUN 2015-2019

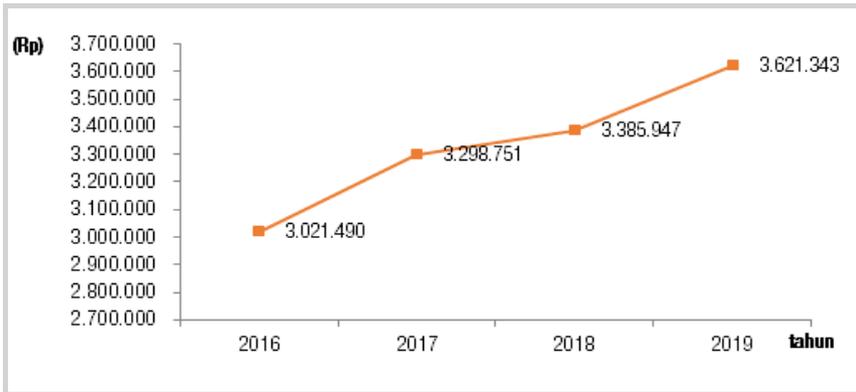
SASARAN STRATEGIS-1				TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN					
IKU-1				INDEKS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN					
INDIKATOR KINERJA PEMBENTUK				RATA-RATA PENDAPATAN PEMBUDIDAYA (Rp)					
REALISASI				TAHUN 2019				RENSTRA KKP 2015-2019	
2015	2016	2017	2018	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% KENAIKAN 2018-2019	TARGET 2019	% CAPAIAN THD TARGET 2019
-	3.021.490	3.298.751	3.385.947	3.300.000	3.621.343	109,74	6,95	3.300.000	109,74

Pada tahun 2019, rata-rata pendapatan pembudidaya ditargetkan Rp.3.300.000,- dengan realisasi Rp. 3.621.343,- atau mencapai 109,74%. Kenaikan rata-rata pembudidaya



tersebut seiring dengan naiknya produksi perikanan budidaya. Hal menunjukkan bahwa kebijakan afirmatif di perikanan budidaya telah sesuai dan telah dapat meningkatkan rata-rata pendapatan pembudidaya.

GAMBAR 3.14. GRAFIK RATA-RATA PENDAPATAN PEMBUDIDAYA TAHUN 2016-2019



Pada tahun 2019, rata-rata pendapatan pembudidaya mengalami kenaikan sebesar 6,95% apabila dibandingkan dengan tahun 2018, sebesar Rp. 3,38 juta pada tahun 2018 menjadi Rp. 3,62 juta di tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan afirmatif di perikanan budidaya telah sesuai dan telah dapat meningkatkan rata-rata pendapatan pembudidaya.

Peningkatan pendapatan pembudidaya merupakan cerminan dari keberhasilan pembangunan perikanan budidaya oleh karena itu rencana aksi yang dilakukan dalam setiap pencapaian IKU secara tidak langsung juga merupakan rencana aksi dalam rangka meningkatkan pendapatan pembudidaya. Pendapatan pembudidaya ikan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga ikan, termasuk rumput laut, harga rumput laut kering pada tahun 2019 menjadi faktor yang cukup berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan pembudidaya ikan sehingga dibandingkan dengan tahun 2018 pendapatan pembudidaya mengalami peningkatan sebesar 6,95%, harga ikan merupakan indikator yang perlu mendapat perhatian

khusus dari pemerintah, harga ikan untuk beberapa jenis ikan diindikasikan dapat menyebabkan inflasi untuk ikan hasil budidaya, ikan bandeng merupakan salah satu ikan yang harganya dapat menyebabkan inflasi menurut BPS. Harga ikan dipengaruhi oleh banyak hal, seperti musim, waktu panen, harga sarana produksi pembudidayaan ikan dan preferensi konsumsi masyarakat, oleh karena itu banyak cara yang bisa dilakukan untuk menstabilkan harga ikan di masyarakat, tidak terbatas hanya pada bantuan pemerintah saja tapi bisa juga dengan berbagai penguatan kelembagaan ataupun dengan promosi yang terus menerus.



DIMENSI SOSIAL DAN KELEMBAGAAN

1. Jumlah Kelompok Pelaku Utama/Usaha Yang Meningkatkan Kelasnya dari Jumlah Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Disuluh

Indikator kinerja ini merupakan jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang meningkat kelasnya setelah mendapatkan pelatihan dan/atau penyuluhan, berdasarkan Kepmen KP No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan. Kelembagaan pelaku utama perikanan (nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pemasar hasil perikanan, masyarakat pengawas dan usaha garam rakyat) diklasifikasikan ke dalam beberapa kelas dengan memperhatikan pada penguasaan teknologi, pengorganisasian, skala usaha, kemampuan permodalan, kemitraan/kerjasama, dan akses informasi pasar. Kelas kelompok perikanan terdiri atas 1). Kelas Pemula yaitu kelas kelompok pelaku utama perikanan dengan nilai terbawah dan terendah pada batas skoring penilaian dari 0 sampai dengan 350 dari segi kemampuannya dalam penguasaan teknologi, pengorganisasian, skala usaha, kemampuan permodalan, kemitraan/kerja sama, dan akses informasi pasar, serta diberikan piagam pengukuhan yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah; 2). Kelas Madya, merupakan kelas kelompok pelaku utama perikanan dengan nilai menengah pada batas skoring penilaian dari 351 sampai dengan 650 dari segi kemampuannya dalam penguasaan teknologi, pengorganisasian, skala usaha, kemampuan permodalan, kemitraan/kerjasama, dan akses informasi pasar, serta sudah melakukan kegiatan perencanaan meskipun masih terbatas, dan diberikan piagam pengukuhan yang ditandatangani oleh Camat dan 3). Kelas Utama yaitu kelas kelompok pelaku utama perikanan dengan nilai tertinggi pada batas skoring penilaian dari 651 sampai dengan 1.000 dari segi kemampuannya dalam penguasaan teknologi, pengorganisasian, skala usaha, kemampuan permodalan, kemitraan/kerjasama, dan akses informasi pasar, serta sudah melakukan kegiatan dalam perencanaan sampai pelaksanaan meskipun masih terbatas, dan diberikan piagam pengukuhan yang ditandatangani oleh Bupati. Capaian indikator kinerja pembentuk jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang meningkat kelasnya dari jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh dapat dilihat pada Tabel berikut:

TABEL 3.14. CAPAIAN JUMLAH KELOMPOK PELAKU UTAMA/USAHA YANG MENINGKAT KELASNYA DARI JUMLAH KELOMPOK PELAKU UTAMA/USAHA YANG DISULUH TAHUN 2015-2019

SASARAN STRATEGIS-1				TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN					
IKU-1				INDEKS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN					
INDIKATOR KINERJA PEMBENTUK				JUMLAH KELOMPOK PELAKU UTAMA/USAHA YANG MENINGKAT KELASNYA DARI JUMLAH PELAKU/USAHA YANG DISULUH					
REALISASI				TAHUN 2019*				RENSTRA KKP 2015-2019	
2015	2016	2017	2018	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% KENAIKAN 2018-2019	TARGET 2019	% CAPAIAN THD TARGET 2019
4.690	6.321	1.000	1.522	1.500	1.903	126,87	25,03	1200	158,58



Jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang meningkat kelasnya dari jumlah pelaku utama/usaha yang disuluh mengalami peningkatan sebesar 25,03% yaitu 1.522 orang di tahun 2018 menjadi 1.903 orang di tahun 2019. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya kapasitas kelompok pelaku utama/usaha di bidang kelautan dan perikanan

Jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang meningkat kelasnya dari jumlah pelaku utama/usaha yang disuluh target tahun 2019 sebesar 1.500 orang dengan realisasi 1.903 orang atau mencapai 126,87%. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, capaian indikator ini mengalami kenaikan sebesar 25,03%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir pelaksanaan Renstra KKP tahun 2015-2019, realisasi indikator ini mencapai 158,58% dari target tahun 2019 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 1.200 orang. Peningkatan kelas ini terdiri atas peningkatan kelas kelompok Pemula ke Madya sebanyak 1.831 kelompok kelompok dan peningkatan kelompok Madya ke Utama sebanyak 72 kelompok. Pada periode tahun 2019 ini, Penyuluh Perikanan yang dikoordinasikan oleh Satminkal Penyuluhan telah berhasil meningkatkan kelas 1.903 kelompok pelaku utama/usaha, dengan rincian capaian IKU menurut Satminkal sebagai berikut :

TABEL 3.15. JUMLAH KELOMPOK PELAKU UTAMA/USAHA YANG MENINGKAT KELASNYA DARI JUMLAH PELAKU/USAHA YANG DISULUHPENYULUH PERIKANAN YANG DIKOORDINASIKAN OLEH SATMINKAL PENYULUHAN

NO.	SATMINKAL	TARGET	KELAS KELOMPOK		
			MADYA	UTAMA	CAPAIAN
1.	BPPP Medan	182	189	-	189
2.	BPPP Tegal	242	251	-	251
3.	BPPP Banyuwangi	237	464	39	503
4.	BPPP Bitung	111	114	-	114
5.	BPPP Ambon	65	66	-	66
6.	BRPPUPP Palembang	152	230	30	160
7.	BRPBATPP Bogor	154	154	1	155
8.	BBRBLPP Gondol	150	153	2	155
9.	BRPBAPPP Maros	207	210	-	210
JUMLAH		1.500	1.831	72	1.903

Capaian positif ini antara lain disebabkan oleh pelaksanaan manajemen kinerja berbasis BSC yang diterapkan dengan cascading indikator kinerja mulai dari Satminkal sampai ke Penyuluh Perikanan, sehingga berpengaruh signifikan terhadap proses pendampingan



dalam pencapaian IKU peningkatan kelas kelompok. Di samping itu, adanya pedoman kerja penyuluh perikanan tahun 2019 yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan peranan monitoring capaian Indikator Kinerja Utama yang dilaksanakan oleh satminkal dengan beberapa instrumen monitoring, baik melalui pelaporan online penyuluh, SKP, maupun Perjanjian Kinerja antara Kepala Satminkal (Satuan Administrasi Pangkalan) dengan Penyuluh Perikanan, serta evaluasi kinerja penyelenggaraan penyuluhan sangat mendukung tercapainya IKU ini. Upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk tercapainya target kinerja tersebut diantaranya : a). Penyusunan dan sosialisasi berupa pertemuan maupun menggunakan media online dan penyebaran materi melalui cyber extension Kelautan dan Perikanan dan b). Pembinaan terhadap penyuluh perikanan untuk melaksanakan pendampingan pengembangan kelas kelompok.

IKU

2

Pertumbuhan PDB Perikanan (%)

Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perikanan. Pertumbuhan ekonomi sektor perikanan merupakan perubahan PDB (atas dasar harga konstan) sektor perikanan dari satu periode ke periode berikutnya. PDB Perikanan tersebut hanya didasarkan pada sektor primer yang mencakup perikanan tangkap dan perikanan

budidaya.

TABEL 3.16 CAPAIAN IKU-2 PERTUMBUHAN PDB PERIKANAN (%)

SASARAN STRATEGIS-1				TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN					
IKU-2				PERTUMBUHAN PDB PERIKANAN (%)					
REALISASI				TAHUN 2019				RENSTRA KKP 2015-2019	
2015	2016	2017	2018	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% KENAIKAN 2018-2019	TARGET 2019	% CAPAIAN THD TARGET 2019
7,89	5,19	5,70	5,19	11,00	5,81	52,81	11,94	11,00	52,81

Sumber. Badan Pusat Statistik

* Angka Tahun 2019

Berdasarkan data BPS, pertumbuhan PDB Perikanan tahun 2019 mencapai 5,81% atau baru mencapai sebesar 52,81% dari target yang telah ditetapkan di dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 maupun dokumen Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018, capaian di tahun 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 11,94%. Meskipun masih belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja, namun Pertumbuhan PDB Perikanan Tahun 2019 telah melampaui atau diatas rata-rata Pertumbuhan PDB secara Nasional yang baru mencapai 5,02%. Selain itu Pertumbuhan PDB Perikanan tersebut juga telah melampaui Pertumbuhan PDB Kelompok Pertanian Tahun 2019 yaitu sebesar 3,64%.



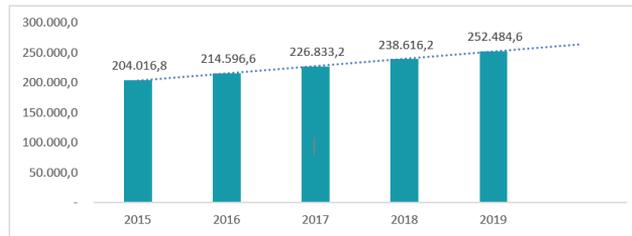
TABEL 3.17 NILAI PDB PERIKANAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN DAN BERLAKU TAHUN 2019

LAPANGAN USAHA	TAHUN										
	2018 **)					2019 ***)					
	I	II	III	IV	JUMLAH	I	II	III	IV	JUMLAH	
Berdasar harga berlaku	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	465.451,5	502.430,5	519.547,0	413.374,6	1.900.803,6	478.674,4	538.033,6	547.179,6	449.739,3	2.013.626,9
	1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	349.549,7	383.407,6	396.360,8	288.180,7	1.417.498,8	353.995,5	409.214,2	412.497,8	313.815,2	1.489.522,7
	a. Tanaman Pangan	132.877,0	123.733,7	121.752,4	71.369,0	449.732,1	126.166,1	130.167,6	118.730,0	71.805,8	446.869,5
	b. Tanaman Hortikultura	48.349,5	60.146,2	61.328,2	48.889,3	218.713,2	51.479,4	65.694,2	67.711,8	53.945,1	238.830,5
	c. Tanaman Perkebunan	105.779,5	133.331,1	145.040,5	105.034,5	489.185,6	106.974,3	140.411,1	151.544,4	118.578,0	517.507,8
	d. Peternakan	55.649,6	59.083,9	60.638,5	56.902,7	232.274,7	62.133,9	65.341,3	66.564,2	62.968,5	257.007,9
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	6.894,1	7.112,7	7.601,2	5.985,2	27.593,2	7.241,8	7.600,0	7.947,4	6.517,8	29.307,0
	2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	22.488,0	24.671,7	25.228,1	25.009,0	97.396,8	22.480,6	26.362,7	28.275,3	27.003,4	104.122,0
	3. Perikanan	93.413,8	94.351,2	97.958,1	100.184,9	385.908,0	102.198,3	102.456,7	106.406,5	108.920,7	419.982,2
	PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB)	3.511.408,7	3.685.610,8	3.842.159,9	3.799.132,1	14.838.311,5	3.783.859,3	3.963.861,7	4.067.378,0	4.018.844,4	15.833.943,4
Persentase PDB Perikanan											
Persentase terhadap kelompok pertanian	13,26	13,63	13,52	10,88	12,81	12,65	13,57	13,45	11,19	12,72	
Persentase terhadap PDB	2,66	2,56	2,55	2,64	2,60	2,70	2,58	2,62	2,71	2,65	
Berdasar harga konstan thn 2010	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	316.769,5	348.372,5	359.569,1	282.662,8	1.307.373,9	322.526,8	366.937,0	370.787,8	294.705,7	1.354.957,3
	1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	243.057,9	273.897,1	283.322,8	205.498,1	1.005.775,9	245.897,8	288.709,2	290.434,8	214.213,3	1.039.255,1
	a. Tanaman Pangan	85.159,6	84.338,3	82.516,7	46.131,5	298.146,1	80.106,1	88.647,9	78.715,8	45.657,2	293.127,0
	b. Tanaman Hortikultura	32.381,1	40.128,9	40.506,9	32.114,3	145.131,2	34.381,8	42.559,7	42.523,4	33.692,9	153.157,8
	c. Tanaman Perkebunan	82.544,8	104.618,2	114.996,9	85.336,8	387.496,7	85.315,3	109.322,5	120.706,3	89.803,4	405.147,5
	d. Peternakan	38.086,3	39.756,1	39.953,0	37.744,5	155.539,9	41.119,6	42.848,1	43.037,7	40.736,1	167.741,5
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	4.886,1	5.055,6	5.349,3	4.171,0	19.462,0	4.975,0	5.331,0	5.451,6	4.323,7	20.081,3
	2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	14.747,0	15.893,3	16.326,5	16.015,0	62.981,8	14.328,1	15.992,7	16.918,8	15.978,0	63.217,6
	3. Perikanan	58.964,6	58.582,1	59.919,8	61.149,7	238.616,2	62.300,9	62.235,1	63.434,2	64.514,4	252.484,6
	PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB)	2.498.580,4	2.603.764,5	2.684.167,0	2.638.885,4	10.425.397,3	2.625.156,2	2.735.291,4	2.818.887,4	2.769.908,7	10.949.243,7
Perikanan	5,81	4,82	3,97	6,18	5,19	5,66	6,24	5,87	5,50	5,81	
Kelompok Pertanian	3,35	4,70	3,64	3,84	3,89	1,82	5,33	3,12	4,26	3,64	
PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB)	5,06	5,27	5,17	5,18	5,17	5,07	5,05	5,02	4,97	5,02	

Sumber. Badan Pusat Statistik, 2020

**angka sangat sementara



GAMBAR 3.15. GRAFIK TREND NILAI PDB PERIKANAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN (ADHK) TAHUN 2015-2019

Nilai PDB Perikanan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) terus mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp.238.641 miliar di tahun 2018 menjadi sebesar Rp. 252.485 miliar di tahun 2019 atau mengalami pertumbuhan sebesar 5,81%.

Nilai PDB Perikanan atas Dasar Harga Konstan (ADHK) terus mengalami peningkatan yaitu dari Rp. 204,016 miliar pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp. 252,484 miliar pada tahun 2019. Sedangkan Laju pertumbuhan *quarter to quarter* (q-to-q) menggambarkan capaian musiman perekonomian masing-masing sektor. Secara rata-rata, laju pertumbuhan q-to-q PDB Perikanan triwulanan sepanjang tahun 2019 adalah sebesar 1,35 persen, dengan pertumbuhan tertinggi dicatatkan pada TW III sebesar 1,93 persen, dan paling rendah pada TW II sebesar -0,11 persen. Pada tahun 2019, terjadi pola musiman PDB Perikanan yang berbeda dibandingkan dengan pola musiman pada periode-periode sebelumnya.

B. CUSTOMER PERSPECTIVE

SASARAN STRATEGIS (SS-2) “TERWUJUDNYA KEDAULATAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN”

Kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai salah satu pilar dari misi kementerian yang harus diwujudkan sesuai dengan visi dan misi Presiden. Untuk itu KKP bersama instansi terkait lainnya mempunyai tugas untuk mengawal perwujudan kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi. Selama empat tahun yaitu tahun 2015-2019, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mewujudkan tercapainya sasaran strategis terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yaitu melalui peningkatan kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan serta membangun sentra bisnis kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil dan terluar. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan menggunakan dua Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu 1). Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 2). Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT).



IKU
3

Persentase Kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

IKU-3 merupakan kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan perijinan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Capaian IKU Persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tahun 2019 sebesar 93,57% melebihi target tahun 2019 sebesar 87% atau telah mencapai 107,55%. Perbandingan capaian kinerja tahun 2015-2019 sebagai berikut:

TABEL 3.18 PERSENTASE KEPATUHAN (COMPLIANCE) PELAKU USAHA KP TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

SASARAN STRATEGIS-2				TERWUJUDNYA KEDAULATAN DALAM PENGELOLAAN SDKP					
IKU-3				PERSENTASE KEPATUHAN (<i>COMPLIANCE</i>) PELAKU USAHA KP TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU (%)					
REALISASI				TAHUN 2019				RENSTRA KKP 2015-2019	
2015	2016	2017	2018	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% PERTUMBUHAN 2018-2019	TARGET 2019	% CAPAIAN
82,91	79,70	93,57	96,38	87,00	93,57	107,55	-2,92	87,00	107,55

Target kinerja sejak awal periode renstra tahun 2015 yaitu 70% sampai dengan akhir periode renstra tahun 2019 selalu meningkat sebesar 87%. Hal tersebut, menunjukkan upaya KKP agar tingkat kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Secara umum capaian kinerja menunjukkan tren positif apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan setiap tahunnya (melebihi target). Persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tahun 2019 mengalami perlambatan sebesar 2,92% dari capaian tahun 2018. Penurunan tersebut tidak menunjukkan turunnya tingkat kepatuhan karena capaian tahun 2019 telah melebihi target (107,55%), namun lebih disebabkan oleh meningkatnya pelaku usaha kelautan dan perikanan yang diperiksa dibandingkan dengan periode tahun 2018. Penyebab utama penurunan capaian tahun 2019 adalah turunnya capaian seluruh Indikator Kinerja Pembentuk, dengan poin penurunan sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah kapal perikanan yang diperiksa dipelabuhan, khususnya kapal cantrang yang pada tahun 2019 sebanyak 780 unit tidak diterbitkan Surat Laik Operasi (SLO) walaupun diberikan surat keterangan melaut (SKM), namun secara ketentuan tidak dimasukkan kedalam kapal yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;



2. Banyaknya pelaku usaha kelautan yang baru dan baru dilakukan pengawasan pada tahun 2019, sehingga teridentifikasi tidak taat, antara lain pelaku usaha pemanfaatan mangrove, terumbu karang, dan pasir laut;
3. Menurunnya hari operasi Kapal Pengawas, sehingga menurunnya kapal perikanan yang diperiksa di laut, juga menurunnya kepatuhan kapal perikanan yang diperiksa tersebut;
4. Menurunnya kepatuhan kapal perikanan yang mengaktifkan transmitter.

TABEL 3.19. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PEMBENTUK IKU-3 PERSENTASE KEPATUHAN (COMPLIANCE) PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU TAHUN 2019

SASARAN STRATEGIS - 2	TERWUJUDNYA KEDAULATAN DALAM PENGELOLAAN SDKP			
IKU-3	Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku (%)			
SUB INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI (R)	BOBOT (B)	CAPAIAN (RXB)
Indikator Kinerja Pembentuk 1-Persentase ketaatan Pelaku Usaha Perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	91,21%	94,39%	50%	47,20%
Indikator Kinerja Pembentuk 2-Persentase ketaatan pemanfaatan WP3K (Kawasan konservasi, reklamasi, pasir laut, PPK, wisata bahari, BMKT, usaha garam) dan ruang laut (KSN dan KSNT) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.	62%	87,24%	15%	13,09%
Indikator Kinerja Pembentuk 4-Persentase Kepatuhan Kapal Perikanan yang mampu diperiksa di laut terhadap peraturan perundang-undangan	96,79%	98,09%	20%	19,62%
Indikator Kinerja Pembentuk 4-Persentase kapal perikanan yang patuh terhadap ketentuan sistem pemantauan kapal perikanan	85,00%	88,60%	15%	13,39%



TABEL 3.20. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PEMBENTUK IKU-3 PERSENTASE KEPATUHAN (COMPLIANCE) PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU TAHUN 2016-2019

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBENTUK	REALISASI TAHUN 2016	REALISASI TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2019
1.	Persentase ketaatan pelaku usaha perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan;	69,78	93,22	96,11%	94,39%
2.	Persentase ketaatan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) dan ruang laut;	57,50	57,50	92,56%	87,24%
3.	Persentase ketaatan kapal perikanan yang mampu diperiksa di laut terhadap peraturan perundang-undangan;	96,79	96,79	98,13%	98,09%
4.	Persentase ketaatan kapal perikanan terhadap ketentuan sistem pemantauan kapal perikanan.	89,91	89,91	98,77%	88,60%

Penjelasan terhadap capaian empat Indikator Kinerja Pembentuk IKU-3 adalah sebagai berikut :

1. Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Perikanan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undang yang Berlaku

Capaian IK “Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Perikanan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undang yang Berlaku” tahun 2019 telah tercapai sebesar 94,39% dari target 91,21% (Persen capaian 103,48%). Perbandingan capaian kinerja tahun 2019 dengan capaian tahun-tahun periode renstra sebagai berikut:

TABEL 3.21. PERBANDINGAN TARGET DAN CAPAIAN SUB IK “PERSENTASE KETAATAN PELAKU USAHA PERIKANAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU TAHUN 2015-2019

SUB INDIKATOR KINERJA	TAHUN									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Perikanan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undang yang Berlaku	-	86,61%	-	91,07%	86,65%	93,22%	91,21%	96,11%	91,21%	94,39%

Keterangan : T=Target, R = Realisasi



Capaian tahun 2019 dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 96,11%, terjadi perlambatan sebesar 1,72%, sedangkan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 selalu mengalami peningkatan sebesar 9,5%. Penurunan capaian kinerja tahun 2019, tidak menunjukkan turunnya tingkat kepatuhan, karena capaian tahun 2019 telah melebihi target bahkan melebihi target akhir periode Renstra 2015-2019 sebesar 91,21%. Hal tersebut, lebih disebabkan oleh meningkatnya jumlah kapal yang diperiksa sebanyak 25.334 Kapal, dibandingkan dengan jumlah kapal yang diperiksa pada Tahun 2018 sebanyak 18.907 kapal (selisih 6.427 kapal). Pencapaian kinerja diperoleh dari agregasi empat sub indikator kinerja pengawasan sumber daya perikanan yaitu 1). Persentase ketaatan unit usaha penangkapan ikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2). Persentase ketaatan unit usaha pengolahan hasil perikanan berdasarkan perundangan yang berlaku; 3). Persentase ketaatan importasi ikan sesuai sesuai ketentuan yang berlaku dan 4). Persentase ketaatan unit usaha budidaya perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Uraian masing-masing kegiatan yang dilakukan di tahun 2019 dalam rangka pencapaian indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

a. **Pengawasan Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan**

Pengawasan ketaatan kapal perikanan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi dan kelaikan teknis kapal perikanan di 14 UPT Pengawasan SDKP. Dibandingkan dengan tahun 2018, kapal perikanan yang diperiksa mengalami kenaikan 33,99% (6.427 kapal dari 18.907 kapal). Nilai tersebut menunjukkan korelasi positif antara kenaikan pemeriksaan kapal dengan tingkat kepatuhan kapal perikanan. Tingkat kepatuhan kapal perikanan terhadap ketentuan yang berlaku pada tahun 2019 sebesar 94,32% atau menurun dari tahun 2018 yaitu sebesar 97,40%. Hal tersebut disebabkan pada tahun 2019 terjadi peningkatan secara signifikan kapal perikanan yang diperiksa, salah satunya adalah kapal dengan alat tangkap cantrang sebanyak 780 kapal. Seluruh kapal tersebut tidak diterbitkan Surat Laik Operasi oleh pengawas perikanan, akan tetapi diperbolehkan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Surat Keterangan Melaut (SKM). Kebijakan tersebut hanya berlaku khusus untuk kapal cantrang yang beroperasi di Laut Jawa – Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu, penghitungan kepatuhan kapal perikanan sesuai ketentuan harus berdasarkan Kapal yang diterbitkan SLO. Ketidaktaatan kapal sebagian besar disebabkan oleh tidak lengkapnya dokumen kapal, terutama pada kapal yang izinnya diterbitkan oleh daerah. Terhadap kapal yang tidak taat dilakukan pembinaan untuk melengkapi kekurangan dokumen serta kekurangan lain yang didapati oleh pengawas

Pada tahun 2019 telah dilakukan pengawasan kapal perikanan di pelabuhan sebanyak 25.334 kapal perikanan yang terdiri dari kapal perikanan yang beroperasi di Zona Eksklusif Ekonomi Indonesia (ZEEI) sebanyak 7.157 kapal dan yang beroperasi di teritorial sebanyak 18.177 kapal. Dari sejumlah kapal yang diperiksa, sebanyak 23.895 kapal perikanan dinyatakan laik operasi dan 1.439 kapal perikanan tidak laik operasi.



perikanan pada saat dilakukan pengawasan, sedangkan terhadap kapal tidak laik operasi tidak diterbitkan SLO. Kegiatan pendukung utama yang dilaksanakan jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2019 dalam pencapaian kinerja meliputi: 1) Pengawasan kepatuhan Kapal Perikanan di 14 UPT PSDKP melalui penerbitan Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) dan Surat Laik Operasi (SLO), 2) supervisi kegiatan pembinaan analisa dan evaluasi ketaatan kapal perikanan di Wonogiri, Sibolga, Singkarak, Semarang, Pesawaran, Cilacap, Serang, dan Pati; 3) koordinasi lintas instansi pengawasan larangan operasional alat penangkap ikan pukat hela dan pukat Tarik di Pontianak, Kuala Tungkal, dan Serang; 4) supervisi tindak lanjut pengaduan masyarakat di Kuala Tungkal dan Pandeglang, serta 5) penyelesaian konflik nelayan di Kuala Tungkal dan Serang.



b. Pengawasan Unit Usaha Pengolahan Ikan

Pengawasan Unit Usaha Pengolahan Ikan (UPI) dilakukan terhadap UPI skala besar dan skala kecil. Pengawasan UPI skala besar dilakukan dengan memeriksa dokumen Surat



Izin Usaha Perikanan (SIUP)/Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDUP), Surat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi usaha yang memasarkan produknya baik di dalam negeri maupun luar negeri, dan Sertifikat *Hazard Analysis & Critical Control Point* (HACCP) serta Sertifikat Kesehatan/*Health Certificate* (HC) bagi usaha yang mengekspor produk perikanan. Sedangkan pengawasan UPI skala kecil (Usaha Mikro Kecil dan Kelompok Pengolah Pemasar) dilakukan dengan memeriksa dokumen perizinan yaitu Tanda Daftar Perusahaan/ Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDP/TDUP) atau PIRT, serta pengujian terhadap produk perikanan untuk mengetahui adanya Bahan Tambahan

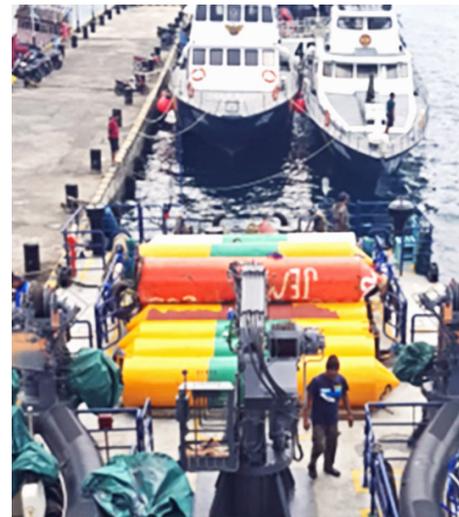
Berbahaya (BTB). Selama tahun 2019 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 715 Unit Usaha Pengolahan Ikan (UPI), yang terdiri atas 310 Unit Usaha Pengolahan Ikan (UPI) skala besar dan 661 Unit Usaha Pengolahan Ikan (UPI) skala kecil. Hasil pemeriksaan terhadap Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Besar, diperoleh tingkat ketaatan sebanyak 92,26% (286 unit). Ketidaktaatan Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Besar sebagian besar karena masa berlaku Surat Kelayakan Pengolahan (SKP) telah habis dan belum dilakukan pengajuan perpanjangan. Adapun hasil pemeriksaan terhadap Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Kecil dinyatakan taat seluruhnya (100%), karena tidak menggunakan bahan



berbahaya dan bahan tambahan pangan yang dilarang. Apabila dibandingkan dengan jumlah yang diperiksa dengan tahun 2018 sebanyak 652, maka tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 9,66% atau sebanyak 63 Unit Pengolahan Ikan (UPI). Begitu halnya dengan tingkat kepatuhan pelaku pengolahan hasil perikanan meningkat sebesar dari 617 pelaku menjadi 661 pelaku atau 7,13%. Kegiatan pendukung utama yang dilaksanakan jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2019 dalam pencapaian kinerja meliputi: 1) Pengawasan UPI di 14 UPT PSDKP, 2) verifikasi UPI di Surabaya, Makassar, Belawan, Yogyakarta, Palabuhan Ratu dan Banten; 3) uji petik pengawasan penggunaan bahan tambahan berbahaya pada hasil pengolahan perikanan di Surabaya, Makassar, Medan, Yogyakarta, Bogor, Palabuhan Ratu, Banten.

c. Pengawasan Distribusi Hasil Perikanan

Kegiatan yang dilaksanakan adalah pengawasan Distribusi hasil perikanan baik peruntukan untuk ekspor maupun domestik. Pada tahun 2019 telah dilakukan pengawasan terhadap 381 unit usaha yang terdiri dari domestik sebanyak 94 unit usaha dan ekspor sebanyak 287 unit usaha. Dari sejumlah tersebut, sebanyak 379 unit usaha terdiri dari 92 unit usaha domestik dan 287 unit usaha ekspor, telah sesuai ketentuan peraturan perundangan dalam melaksanakan kegiatannya. Adapun terhadap 2 Pelaku usaha domestik yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku direkomendasikan untuk melengkapi dokumen perizinan serta melakukan kegiatan sesuai yang ditetapkan dalam dokumen tersebut.



Jumlah unit usaha yang diperiksa menurun sebesar 3,05% dari tahun 2018 (393 UPI), akan tetapi secara persentase kepatuhan meningkat dari 98,92% tahun 2018 menjadi 99,48% pada tahun 2019. Peningkatan kepatuhan menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan pelaku usaha Kelautan dan Perikanan terhadap ketentuan yang berlaku, sebagai dampak pengawasan dan sosialisasi yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

d. Pengawasan Usaha Budidaya

Pencapaian kinerja tahun 2019 diperoleh dari kegiatan Pengawasan terhadap 487 unit usaha budidaya yang terdiri dari 134 unit usaha budidaya peruntukan perairan umum dan air tawar serta 353 unit usaha budidaya peruntukan air laut dan air payau. Dari sejumlah tersebut, 448 unit usaha budidaya telah sesuai ketentuan peraturan perundangan dalam melaksanakan kegiatannya. Pengawasan usaha budidaya difokuskan pada pengawasan penggunaan pakan dan obat ikan.



Jumlah unit usaha budidaya yang diperiksa meningkat sebesar 5,87% atau 27 unit dari tahun 2018 (460 unit), berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan meningkat dari 87,66% (436 unit) tahun 2018 menjadi 94,57% (448 unit) pada tahun 2019. Tingginya tingkat kepatuhan menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan pelaku usaha Kelautan dan Perikanan terhadap ketentuan yang berlaku, sebagai dampak pengawasan dan sosialisasi yang dilakukan oleh jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sementara itu, sebanyak 39 unit usaha budidaya tidak taat disebabkan masa berlaku ijin habis. Terhadap pembudidaya ikan yang tidak taat direkomendasikan kepada instansi terkait antara lain Dinas Kelautan dan Perikanan untuk memberikan peringatan serta pembinaan lebih lanjut.

1. Persentase ketaatan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) dan ruang laut;

Capaian IKU “Persentase Ketaatan Pemanfaatan WP3K (Kawasan konservasi, reklamasi, pasir laut, PPK, wisata bahari, BMKT, usaha garam) dan ruang laut (KSN dan KSNT) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku” sampai tahun 2019 telah tercapai sebesar 89,75%. Capaian kinerja tersebut, melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 62% (persen capaian 120%). Perbandingan dengan capaian tahun 2015- 2019, disajikan pada tabel 26.



TABEL 3.22. PERBANDINGAN TARGET DAN CAPAIAN IKP “ DAN RUANG LAUT TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU” TAHUN 2015- 2019 (%)

SUB INDIKATOR KINERJA	TAHUN									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
(Kawasan konservasi, reklamasi, pasir laut, PPK, wisata bahari, BMKT, usaha garam) dan ruang laut (KSN dan KSNT) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	-	45,84	-	61,50	57,50	91,42	62	92,56	62	89,75

Keterangan : T=Target, R = Realisasi

Capaian kinerja IKP “Persentase Ketaatan Pemanfaatan WP3K (Kawasan konservasi, reklamasi, pasir laut, PPK, wisata bahari, BMKT, usaha garam) dan ruang laut (KSN dan KSNT) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku tahun 2019 merupakan akumulasi dari empat kegiatan utama yaitu :

- a. Pengawasan pemanfaatan ruang laut yang mencakup Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Nasional (KSNT);



- b. Pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pengawasan pemanfaatan produk dan jasa kelautan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pengawasan pemanfaatan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pelaksanaan kegiatan utama yang mendukung pencapaian kinerja IKP tersebut selama tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

TABEL 3.23. CAPAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN UTAMA DALAM RANGKA Mendukung Pencapaian Kinerja Tahun 2018

NO	PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN	TAHUN 2019	
		TERPERIKSA (PELAKU USAHA)	TAAT (PELAKU USAHA)
1	Pengawasan Kawasan konservasi yang diawasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku		
	• Pengawasan pemanfaatan Mangrove dan Terumbu Karang	77	58
	• Pengawasan Destructive Fishing	993	940
2	Pengawasan pengelolaan jasa kelautan yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan		
	• Pengawasan Pasir Laut	30	17
	• Pengawasan Wisata Bahari	59	41
	• Pengawasan BMKT	20	19
3	Pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku		
	• Pengawasan Reklamasi	17	11
	• Pengawasan Pulau-pulau Kecil	45	43
4	Pengawasan pemanfaat ruang laut nasional yang taat terhadap peraturan perundang-undangan		
	• Pengawasan Zonasi	56	43
	• Pengawasan Pencemaran	147	124

Beberapa kegiatan yang dilakukan di tahun 2019 dalam rangka mendukung capaian IKU tersebut antara lain :

- a. Sosialisasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di 34 provinsi
- b. Kampanye dan edukasi penanggulangan *destructive fishing*
- c. Pengawasan pemanfaatan ruang laut nasional



- d. Pengawasan pencemaran perairan
- e. Pengawasan pemanfaatan terumbu karang dan mangrove
- f. Pengawasan pemanfaatan kawasan konservasi
- g. Pengawasan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- h. Pengawasan penangkapan ikan yang ramah lingkungan
- i. Pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
- j. Pengawasan pemanfaatan pasir laut
- k. Pengawasan Barang Berharga Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT)

Menurunnya capaian kinerja pembentuk tersebut di tahun 2019 disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Terdapat penambahan jumlah pelaku usaha baru yang diawasi yang belum sepenuhnya paham dan/atau mendapatkan sosialisasi pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga hasil pengawasannya dikategorikan tidak taat, juga turut menjadi faktor turunnya persentase ketaatan pelaku usaha;
- 2) Hingga periode triwulan IV tidak semua dekonsentrasi melaporkan hasil pengawasan yang telah dilakukan hingga semester 2 tahun 2019, hal ini tentu berpengaruh terhadap capaian kinerja pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada triwulan IV.

Upaya perbaikan terhadap penurunan capaian kinerja tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Inisiasi kegiatan pengawasan yang bersifat persuasif kepada pelaku usaha meliputi:
 - a) Kampanye dan edukasi dalam rangka pengawasan jenis ikan dilindungi;
 - b) Sosialisasi pengawasan kapal perikanan dalam rangka pencegahan pencemaran kolam pelabuhan;
 - c) Media sosialisasi penanggulangan *destructive fishing*;
- 2) Peningkatan kemampuan pengawas perikanan pada kegiatan “peningkatan kemampuan teknik sampling”;
- 3) Forum komunikasi *stakeholders* berupa FGD pengawasan penanggulangan *destructive fishing*;
- 4) jumlah kawasan konservasi perairan yang diawasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan jumlah jenis ikan dilindungi yang diawasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk TA 2020 akan dilakukan perbaikan menjadi salah satu komponen yang dimasukkan sebagai kepatuhan pelaku usaha.



2. Ketaatan Kapal Perikanan yang Mampu Diperiksa di Laut Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Pencapaian Indikator Ketaatan Kapal Perikanan Yang Mampu Diperiksa Di Laut Terhadap Peraturan Perundang-Undangan adalah sebesar 98,09% dari target 96,79%. Perbandingan capaian Tahun 2019 dengan capaian Tahun 2015-2019, sebagai berikut:

TABEL 3.24. CAPAIAN INDIKATOR KINERJAPEMBENTUK KE-3 “KETAATAN KAPAL PERIKANAN YANG MAMPU DIPERIKSA DI LAUT TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN” TAHUN 2015-2019

SASARAN STRATEGIS-1	TERWUJUDNYA KEDAULATAN DALAM PENGELOLAAN SDKP				
IKU-3	PERSENTASE KEPATUHAN (<i>COMPLIANCE</i>) PELAKU USAHA KP TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU (%)				
INDIKATOR KINERJA PEMBENTUK-3	REALISASI				REALISASI
	2015	2016	2017	2018	2019
Ketaatan kapal perikanan yang mampu diperiksa di laut terhadap peraturan perundang-undangan	97,69%	96,07%	98,79%	98,13%	98,09%



Berdasarkan tabel perbandingan diatas, capaian tahun 2019 (98,09%) dibandingkan dengan capaian tahun 2018 (98,13%), terjadi penurunan sebesar 0,04%. Ketaatan Kapal pengawas diperoleh dari kapal yang taat atau sesuai ketentuan dalam melaksanakan kegiatan penangkapan ikan dibagi dengan kapal yang mampu diperiksa di laut oleh kapal pengawas perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kapal yang dihitung adalah kapal dengan kebangsaan Indonesia (KII) sedangkan Kapal Ikan Asing (KIA) tidak termasuk didalam perhitungan.

Pada tahun 2018, Kapal Pengawas mampu memeriksa kapal sebanyak 3.642 Kapal, sedangkan kapal yang patuh sebesar 3.574 kapal. Selanjutnya, sepanjang tahun 2019 Kapal Pengawas Perikanan telah berhasil memeriksa sejumlah 2.518 KII, dari total kapal yang diperiksa tersebut sebanyak 2.470 kapal telah sesuai ketentuan, sedangkan 48 kapal yang dinyatakan tidak patuh.

Kapal tidak patuh dimaksud yaitu kapal yang melanggar peraturan perundangan di bidang perikanan dan diproses lebih lanjut oleh aparat (*adhock*). Berdasarkan data hasil operasi kapal pengawas perikanan selama periode tahun 2019 tersebut, perbandingan jumlah kapal perikanan yang ditangkap terhadap jumlah kapal yang diperiksa sebesar 1,91%. Rendahnya tingkat persentase tersebut menunjukkan meningkatnya tingkat kepatuhan kapal perikanan Indonesia dalam melaksanakan penangkapan ikan di WPPNRI.

Menurunnya kapal perikanan yang diperiksa dari tahun sebelumnya juga disebabkan karena hari operasi Kapal Pengawas tahun 2019 sebanyak 85 hari operasi, menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 121 hari operasi.



3. Ketaatan Kapal Perikanan terhadap Ketentuan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (%)

Indikator Kinerja Pembentuk “Persentase Ketaatan Kapal Perikanan terhadap Ketentuan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan” pada tahun 2019 telah tercapai 88,60% dari target yang telah ditetapkan sebesar 85%. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2018 yaitu sebesar 98,77%, capaian tersebut mengalami penurunan sebesar 10,17%, yang disebabkan adanya perubahan cara penghitungan pada tahun 2019 yaitu menggunakan rata-rata keaktifan selama satu tahun. Sedangkan capaian tahun 2018 tersebut merupakan kepatuhan berdasarkan hasil pemantauan selama periode akhir tahun 2018, yang diperoleh dari hasil kegiatan utama pemantauan kapal perikanan melalui Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP)/*Vessel Monitoring System* (VMS). Penghitungan capaian kinerja perbulan diperoleh dari data kapal perikanan yang mengaktifkan transmitter dibandingkan dengan jumlah kapal yang telah memasang transmitter.

Sampai dengan bulan Desember 2019, jumlah kapal yang terpantau memasang transmitter sebanyak 4.194 unit dari 4.690 unit kapal yang telah terbit izinnya dari Ditjen. Perikanan Tangkap, sehingga terdapat 496 unit kapal perikanan yang diindikasikan tidak taat. Terhadap kapal yang tidak mengaktifkan transmitter, maka diidentifikasi apakah ada unsur kesengajaan menonaktifkan transmitter. Terhadap kapal yang menonaktifkan transmitter dengan sengaja maka diberikan sanksi administrasi berupa peringatan (SP1 – SP3) dan jika tidak mengindahkan Surat peringatan akan direkomendasikan kepada Ditjen. Perikanan Tangkap untuk melakukan pembekuan izin atas kapal tersebut

IKU Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT)

4

Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) merupakan pusat bisnis kelautan dan perikanan terpadu mulai dari hulu sampai ke hilir berbasis kawasan. Tahun 2019 terdapat 13 lokasi SKPT yang penetapannya mengacu pada Permen KP Nomor 42/PERMEN-KP/2017 tentang Penugasan Pelaksanaan Pembangunan SKPT di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan. Pada tahun 2018, KKP melaksanakan pengembangan 13 SKPT yaitu : SKPT Morotai, SKPT Talaud, SKPT Sebatik, SKPT Rote Ndao, SKPT Kota Sabang, SKPT Sumba Timur, SKPT Timika, SKPT Biak dan SKPT Moa.

Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana di SKPT difokuskan pada pelaksanaan konstruksi dan revitalisasi sarana prasarana utama dan penunjang bisnis kelautan dan perikanan. Sarana prasarana yang dibangun diharapkan mendukung secara menyeluruh proses produksi bisnis kelautan dan perikanan, mulai dari hulu hingga hilir.

Sarana prasarana diarahkan untuk memperkuat aspek penyediaan bahan baku, penanganan dan pengolahan, serta pemasaran. Target indikator kinerja tingkat kemandirian SKPT mengalami peningkatan untuk setiap lokasi. Penilaian SKPT dilakukan berdasarkan kriteria aspek fisik, aspek ekonomi dan produksi, aspek kelembagaan dan aspek sosial dan lingkungan.



TABEL 3.25. KRITERIA PENILAIAN PEMBANGUNAN SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU (SKPT) MANDIRI

KRITERIA			
ASPEK FISIK	ASPEK EKONOMI DAN PRODUKSI	ASPEK KELEMBAGAAN	ASPEK SOSIAL DAN LINGKUNGAN
<p>1. Sarana perikanan tangkap dan pengolahan (meliputi (pelabuhan perikanan, kapal perikanan, alat tangkap perikanan, cold storage, ABF, pabrik es, tempat pelelangan, APL);</p> <p>2. Sarana perikanan budidaya dan pengolahan (meliputi balai benih ikan, karamba jaring apung, alat pengering rumput laut, pabrik chip);</p> <p>3. Sarana jasa kelautan (meliputi jetty apung, tracking mangrove, mooring buoy, homestay);</p> <p>4. Sarana pengelola SKPT (meliputi kantor syahbandar, kantor karantina, kantor pengawasan, dan kantor beacukai); dan</p> <p>5. Sarana dan prasarana penunjang SKPT (meliputi runway, jalan, listrik, air bersih, SPDN/ AFMS, dan mobil pendingin).</p>	<p>1. Peningkatan pendapatan nelayan/ pembudidaya;</p> <p>2. Peningkatan produksi hasil perikanan;</p> <p>3. Peningkatan nilai tambah pengolahan hasil perikanan;</p> <p>4. Peningkatan ekspor hasil perikanan dan produk perikanan; dan</p> <p>5. Akses kredit perbankan bagi nelayan/pembudidaya.</p>	<p>1. Dokumen rencana induk (master plan) dan rencana bisnis (business plan) SKPT;</p> <p>2. Kebijakan perencanaan (RPJMD) dan anggaran (APBD) dukungan pengembangan SKPT;</p> <p>3. Sumberdaya manusia dan lembaga pengelola SKPT;</p> <p>4. Kelembagaan usaha nelayan serta kemitraan; dan</p> <p>5. Sistem perijinan dan ekspor hasil perikanan</p>	<p>1. Kesadaran masyarakat untuk konsumsi ikan berkualitas baik di lokasi SKPT;</p> <p>2. Kegiatan perikanan yang ramah lingkungan di lokasi SKPT;</p> <p>3. Pemantauan dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di lokasi SKPT;</p> <p>4. Sistem pengelolaan limbah perikanan di PPI dan unit pengolahan nelayan (waste management) di lokasi SKPT; dan</p> <p>5. Mitigasi bencana dan adaptasi dampak perubahan iklim di lokasi SKPT.</p>

Data dan informasi yang digunakan untuk penilaian SKPT yang mandiri ini diperoleh melalui data primer (pengamatan visual, observasi langsung, interview di lokasi SKPT, laporan), data sekunder, dan *focus group discussion* (FGD). Selanjutnya, untuk mengetahui status pengelolaan SKPT yang mandiri, maka disusunlah instrument dan penilaian status SKPT yang mandiri sebagaimana Tabel 29 dan Tabel 30.



TABEL 3.26. PENILAIAN STATUS PENGELOLAAN SENTRA KELAUTANDAN PERIKANAN TERPADU (SKPT) MANDIRI

STATUS	NILAI	KATEGORI
PraMandiri 1	0.25	PraPersiapan
PraMandiri 2	≥ 0.25 dan < 0.5	Persiapan
PraMandiri 3	≥ 0.5 dan < 0.75	Terbangun
PraMandiri 4	≥ 0.75 dan < 1	Terkelola
Mandiri	1	TerkelolaEfektif

Nilai Kemandirian SKPT didapatkan dari rata-rata nilai tingkat kemandirian SKPT di masing-masing lokasi SKPT di 13 lokasi sebagaimana uraian berikut :

TABEL 3.27. HASIL PENILAIAN TINGKAT KEMANDIRIAN SKPT DI 13 LOKASI SKPT TAHUN 2019

NO	SKPT	REALISASI NILAI KRITERIA/ASPEK				RATA-RATA	TINGKAT KEMANDIRIAN
		FISIK	EKONOMI & PRODUKSI	KELEMBAGAAN	SOSIAL & LINGKUNGAN		
1.	Natuna	0,94	0,85	0,93	0,96	0,92	Pra Mandiri 4
2.	Merauke	0,92	0,82	0,89	0,79	0,86	Pra Mandiri 4
3.	Saumlaki	0,82	0,75	0,81	0,80	0,80	Pra Mandiri 4
4.	Nunukan/Sebatik	0,75	0,81	0,88	0,65	0,77	Pra Mandiri 4
5.	Biak Numfor	0,97	0,65	0,88	0,63	0,78	Pra Mandiri 4
6.	Mimika	0,98	0,96	0,78	0,7	0,86	Pra Mandiri 4
7.	Morotai	0,92	0,92	0,9	0,91	0,91	Pra Mandiri 4
8.	Talau	0,86	0,75	0,79	0,79	0,80	Pra Mandiri 4
9.	Mentawai	0,9	0,77	0,86	1,00	0,88	Pra Mandiri 4
10.	Moa	0,58	0,42	0,41	0,65	0,52	Pra Mandiri 3
11.	Sabang	0,88	0,25	0,61	0,46	0,55	Pra Mandiri 3
12.	Sumba Timur	0,89	0,43	0,94	0,83	0,77	Pra Mandiri 4
13.	Rote Ndao	0,71	0,3	0,68	0,46	0,54	Pra Mandiri 3
Rata-rata Capaian Tingkat Kemandirian SKPT		0,86	0,67	0,80	0,74	0,77	Pra Mandiri 4 (Terkelola)

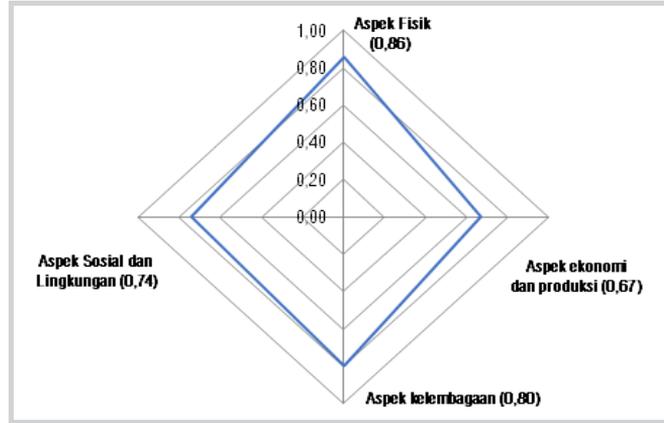
Sumber: KKP (2020)

Berdasarkan hasil penilaian terhadap empat aspek kriteria penilaian tingkat kemandirian pembangunan di 13 lokasi menunjukkan capaian terbesar adalah aspek fisik yaitu 0,86 dan capaian terendah adalah aspek ekonomi dan produksi dengan nilai sebesar 0,67.



Dari 13 lokasi pembangunan SKPT, nilai tertinggi adalah SKPT Natuna yaitu sebesar 0,92 atau termasuk dalam kategori Pra Mandiri 4 (Terkelola) dengan rincian nilai per aspek fisik sebesar 0,94, aspek ekonomi sebesar 0,85, aspek kelembagaan sebesar 0,93 dan aspek sosial dan lingkungan sebesar 0,96.

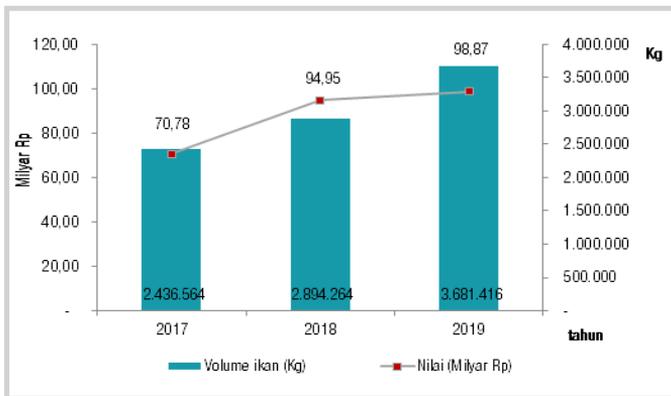
GAMBAR 3.16. GRAFIK RADAR STATUS TINGKAT KEMANDIRIAN SKPT TAHUN 2019



TABEL 3.28. TINGKAT KEMANDIRIAN SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU (SKPT)

SASARAN STRATEGIS-2				TERWUJUDNYA KEDAULATAN DALAM PENGELOLAAN SDKP							
IKU-4				TINGKAT KEMANDIRIAN SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU (SKPT)							
REALISASI				TAHUN 2019					RENSTRA KKP 2015-2019		
2015	2016	2017	2018	TAHUN 2018	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% KENAIKAN 2018-2019	TARGET 2019	% CAPAIAN 2018 THD TARGET 2019	
-	-	3	3	3	4	4	100	33,33	4	100	

GAMBAR 3.17. VOLUME IKAN DAN NILAI EKONOMI LALU LINTAS IKAN DOMESTIK DI SKPT NATUNATAHUN 2019



Berdasarkan data dari BKIPM, pembangunan SKPT di Natuna juga telah meningkatkan lalu lintas domestik ikan sebesar 2.894,3 ton (Rp.94,95 Milyar) pada tahun 2018 menjadi 3.681,4 ton (Rp98,87 Milyar) pada tahun 2019. Selain dipasarkan ke pasar domestik, hasil tangkapan ikan di Natuna dipasarkan

pula ke Malaysia dan Singapura.



Beberapa kendala dalam proses pembangunan di 13 lokasi SKPT antara lain :

1. Masih belum optimalnya peran Kementerian/Lembaga terkait dalam mendukung kegiatan di SKPT serta dukungan sarana dan prasana infrastruktur (jalan, listrik, air, dll).
2. Masih belum optimalnya Pengelolaan sarana dan prasana yang telah dibangun KKP misalnya *Integrated Cold Storage* yang telah dibangun belum optimal karena keterbatasan modal untuk pengelolaan dan keterbatasan ketersediaan es balok sehingga mutu hasil tangkapan ikan nelayan kurang baik.
3. Penerapan Perpres 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat belum sepenuhnya optimal karena ketersediaan SDM yang berkompeten dalam mengikuti pelelangan terbatas, sehingga berdampak pada proses pengadaan yang dilakukan SKPT Biak dan Mimika.
4. Situasi keamanan di Papua sering mengganggu pelaksanaan proses pembangunan SKPT Mimika

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian Nilai Kemandirian SKPT antara lain telah dilaksanakan perjanjian kerjasama dengan KL/instansi/stakeholder terkait sebagai contoh Kerjasama Pemda Talaud dengan BUMN PT Perikanan Nusantara (Persero) sebagai lembaga pengelola atau operator SKPT tentang pemanfaatan gudang beku terintegrasi di lokasi SKPT Talaud yang dilaksanakan pada 13 Agustus 2019.

Untuk kelanjutan pembangunan dan operasionalisasi kedepan beberapa sarana dan prasarana masih diperlukan fasilitas penunjang (akses jalan dan bandar udara), di beberapa lokasi. Selain itu perlu adanya kerjasama dengan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) dalam rangka meningkatkan akses permodalan, fasilitasi dalam kemudahan akses pemasaran hasil perikanan baik dalam negeri maupun upaya mendorong kerjasama dengan negara lain untuk ekspor hasil perikanan, pembentukan kelembagaan SKPT, peningkatan pemanfaatan lahan dan optimalisasi pemanfaatan fasilitas pelabuhan perikanan SKPT serta pendampingan bagi masyarakat serta koordinasi dengan lintas sektor dan KL terkait (Kementerian Koordinator Kemaritiman, Kementerian Perdagangan, Kemendagri, Kementerian Perhubungan, PLN, Pemerintah) dalam rangka optimalisasi SKPT. Selain itu perlu adanya komitmen dan dukungan Pemda setempat terkait pengelolaan asset yang sudah diserahkan.





Zona Inti SKPT Mimika Tahun 2015-2016



Zona Inti SKPT Mimika Tahun 2017



Zona Inti SKPT Mimika Tahun 2015-2018



Zona Inti SKPT Mimika Tahun 2015-2019



Dermaga PPI Paumako Tahun 2015



Dermaga PPI Paumako Tahun 2016-2017



Dermaga PPI Paumako Tahun 2018



Dermaga PPI Paumako Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS (SS-3) “TERWUJUDNYA PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG PARTISIPATIF, BERTANGGUNGJAWAB DAN BERKELANJUTAN

Sasaran ini memiliki lima Indikator Kinerja Utama yaitu : 1. Persentase Pengelolaan Wilayah KP Yang Berkelanjutan, 2. Persentase Peningkatan Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 3. Produksi Perikanan, 4. Produksi Garam Nasional, 5. Nilai Ekspor Hasil Perikanan, 6. Konsumsi ikan, 7. Nilai PNBP dari Sektor Kelautan dan Perikanan.

IKU

5

Persentase Pengelolaan Wilayah KP yang Berkelanjutan

Indikator pengelolaan wilayah KP yang berkelanjutan sebagai salah satu alat ukur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah perairan kelautan dan perikanan yang lestari dan berkelanjutan (*sustain*).

TABEL 3.29. PERSENTASE PENGELOLAAN WILAYAH KP YANG BERKELANJUTAN

SASARAN STRATEGIS - 3				TERWUJUDNYA PENGELOLAAN SDKP YANG PARTISIPATIF, BERTANGGUNGJAWAB, DAN BERKELANJUTAN					
IKU-5				PERSENTASE PENGELOLAAN WILAYAH KP YANG BERKELANJUTAN					
REALISASI				TAHUN 2019				RENSTRA KKP 2015-2019	
2015	2016	2017	2018	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% KENAIKAN 2018-2019	TARGET 2019	% CAPAIAN THD TARGET 2019
33	44,60	60,03	63,47	62,50	66,49	106,38	4,76	72,00	92,35

Sumber: KKP (2020)



Pada tahun 2019, capaian persentase pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan mengalami kenaikan sebesar 4,76% yaitu sebesar 63,47% di tahun 2018 menjadi sebesar 66,49% di tahun 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan wilayah perairan kelautan dan perikanan semakin lestari dan berkelanjutan (*sustain*).

Berdasarkan perhitungan, realisasi IKU-5 Persentase Pengelolaan Wilayah Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan adalah sebesar 66,49% atau telah mencapai 106,38% dari target 2019 yang telah ditetapkan yaitu 62,50. Apabila dibandingkan realisasi tahun 2018 yaitu sebesar 63,47, realisasi tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 4,76%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra KKP Tahun 2015-2019 yaitu 72,00, capaian tahun 2019 mencapai 92,35%. IKU-5. Persentase Pengelolaan

Wilayah KP yang Berkelanjutan terdiri dari 6 Indikator Kinerja Pembentuk yang mencakup :

1. Jumlah WPP NRI yang terkelola sumber daya ikannya (WPP)
2. Jumlah kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang meningkat kualitas pengelolaan efektifnya (kawasan)
3. Jumlah kawasan pesisir rusak yang pulih kembali (kawasan)
4. Jumlah WPP yang terpetakan potensi sumber daya KP untuk pengembangan ekonomi kelautan yang berkelanjutan (WPP)
5. Luas kawasan konservasi (juta hektar)
6. Penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya di wilayah RI (%).

Penjelasan atas capaian indikator kinerja pembentuknya adalah sebagai berikut :

1. Jumlah WPP NRI yang terkelola sumber daya ikannya

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.

TABEL 3.30. JUMLAH WPP NRI YANG TERKELOLA SUMBER DAYA IKANNYA (WPP)TAHUN 2015-2019

SASARAN STRATEGIS - 3				TERWUJUDNYA PENGELOLAAN SDKP YANG PARTISIPATIF, BERTANGGUNGJAWAB, DAN BERKELANJUTAN					
IKU-5				PERSENTASE PENGELOLAAN WILAYAH KP YANG BERKELANJUTAN (%)					
INDIKATOR KINERJA PEMBENTUK (IKP)				JUMLAH WPP NRI YANG TERKELOLA SUMBER DAYA IKANNYA (WPP)					
REALISASI*				TAHUN 2019				RENSTRA KKP 2015-2019	
2015	2016	2017	2018	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% KENAIKAN 2018-2019	TARGET 2019	% CAPAIAN THD TARGET 2019
2	11	7	11	11	11	100	0	11	100

Ket. Tahun 2015-2018 nomenklatur indikator kinerja pembentuk adalah Jumlah WPP yang dikelola sesuai Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP)



GAMBAR 3.18. PETA 11 WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN (WPP)



Adapun WPP-NRI yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. WPP 571, mencakup Perairan Selat Malaka dan Laut Andaman, dengan ditetapkannya rencana pengelolaan perikanan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 75/KEPMEN-KP/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan WPPNRI 571;
- b. WPP 572, mencakup perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda, dengan ditetapkannya rencana pengelolaan perikanan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 76/KEPMEN-KP/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan WPPNRI 572;
- c. WPP 573, mencakup perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timor bagian Barat, dengan ditetapkannya rencana pengelolaan perikanan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 77/KEPMEN-KP/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan WPPNRI 573;
- d. WPP 711, mencakup Perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan, dengan ditetapkannya rencana pengelolaan perikanan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 78/KEPMEN-KP/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan WPPNRI 711;
- e. WPP 712, mencakup perairan Laut Jawa, dengan ditetapkannya rencana pengelolaan perikanan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 79/KEPMEN-KP/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan WPPNRI 712;





- f. WPP 713, mencakup perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali, dengan ditetapkannya rencana pengelolaan perikanan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 80/KEPMEN-KP/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan WPPNRI 713;
- g. WPP 714, mencakup Perairan Teluk Tolo dan Laut Banda, dengan ditetapkannya rencana pengelolaan perikanan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/KEPMEN-KP/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan WPPNRI 714;
- h. WPP 715, mencakup wilayah Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau, dengan ditetapkannya rencana pengelolaan perikanan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 82/KEPMEN-KP/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan WPPNRI 715;
- i. WPP 716, mencakup wilayah Laut Sulawesi sebelah utara Pulau Halmahera, dengan ditetapkannya rencana pengelolaan perikanan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 83/KEPMEN-KP/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan WPPNRI 716;
- j. WPP 717, mencakup wilayah perairan Teluk Cenderawasih dan Samudera Pasifik, dengan ditetapkannya rencana pengelolaan perikanan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 84/KEPMEN-KP/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan WPPNRI 717;
- k. WPP 718 mencakup wilayah Laut Aru, Laut Arafuru dan Laut Tomini bagian Timur, dengan ditetapkannya rencana pengelolaan perikanan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/KEPMEN-KP/2014 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan WPPNRI 718.

Indikator ini menunjukkan jumlah WPP yang telah dikelola sumber daya ikannya melalui kegiatan operasional/upaya pengelolaan perikanan tangkap di laut pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona ekonomi eksklusif Indonesia dan perairan darat serta operasional kelembagaan WPP serta penghitungan alokasi sumber daya ikan. Pada tahun 2019 realisasi indikator ini adalah 11 WPP (100% terhadap target tahun 2019) dengan beberapa hasil evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan WPPNRI yang telah dilaksanakan dalam upaya pengelolaan sebagaimana tabel dibawah ini.



TABEL 3.31. REKAPITULASI EVALUASI DI WPPNRI 571 TAHUN 2019

HASIL KESEPAKATAN	HASIL EVALUASI	ISU PENGELOLAAN WPPNRI 571	TINDAK LANJUT
<ul style="list-style-type: none"> Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Riau menyepakati bahwa data 2018 yang digunakan adalah One data Pusdatin KKP yang masih dalam proses validasi dan akan digunakan sebagai dasar penyusunan alokasi pemanfaatan SDI; Mengoptimalkan koordinasi, harmonisasi dan updating data perikanan tangkap oleh enumerator dan validator pusat, provinsi, serta kabupaten dengan Pusdatin KKP Masing-masing provinsi mendorong perbaikan pendataan perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> Lebih dari 5% jumlah kapal (izin pusat) di pelabuhan perikanan lingkup WPPNRI 571 telah melaksanakan log book penangkapan ikan sedangkan untuk implementasi e-logbook belum terlaksana di Provinsi; Telah dilaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka mengurangi laju kerusakan habitat sumber daya ikan melalui kegiatan identifikasi dan inventarisasi kerusakan habitat, rehabilitasi ekosistem, sosialisasi dan penegakan hukum terhadap kegiatan yang merusak habitat. Meningkatnya pendapatan nelayan dengan upaya melalui peningkatan keterampilan nelayan dan pemberian akses permodalan serta bantuan sarana penangkapan ikan bagi nelayan; Frekuensi konflik antara nelayan andon dengan nelayan tujuan andon semakin berkurang dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh semua pihak; Telah dilaksanakan kegiatan mengurangi laju penggunaan alat penangkapan ilegal lebih dari 10 % diantaranya melalui peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan penggunaan API yang dilarang serta penggantian dengan API ramah lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> Pengisian logbook belum dilakukan sepenuhnya secara baik dan benar, untuk kapal izin pusat baru terimplementasi sebesar 50%; Penetapan alokasi pemanfaatan sumber daya ikan untuk masing-masing provinsi masih dalam proses; Harmonisasi data perizinan kapal perikanan oleh provinsi dengan SIMKADA masih belum optimal; Masih ada kapal yang telah melakukan pengukuran ulang, namun belum melakukan perubahan Gross Akte dan perlu tindak lanjut. 	<ul style="list-style-type: none"> Melibatkan penyuluh perikanan dalam penerapan logbook kepada pemilik dan nahkoda kapal penangkap ikan dan perlu adanya tindakan sanksi yang tegas terhadap kapal yang tidak melakukan pengisian logbook secara benar; Sekretariat LPP WPPNRI 571 berperan aktif melakukan proses koordinasi pengumpulan data perikanan tangkap; Harmonisasi data perikanan tangkap antar Provinsi, Pusdatin KP, atau dengan unit lainnya yang terkait dilakukan saat pertemuan LPP WPPNRI; Pusat akan memfasilitasi penyiapan Kesepakatan Bersama terkait kegiatan andon penangkapan ikan antar provinsi. Masing-masing provinsi akan mengoptimalkan aplikasi SIMKADA untuk kapal - kapal perikanan <30 GT, melalui Operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI; Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.36/PERMEN-KP/2014 tentang Andon Penangkapan Ikan dapat segera dilaksanakan; Menetapkan alokasi sumber daya ikan, sehingga pemberian SIPI oleh setiap provinsi nantinya harus di sesuaikan dengan alokasi pemanfaatan sumber daya ikan di masing-masing provinsi. Proses penetapan alokasi dilakukan melalui Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI; Kajian lebih lanjut mengenai pendapatan untuk nelayan dalam berbagai kategori buruh, pemilik atau ukuran kapal; dan Pengkajian kembali kebijakan penyediaan BBM bersubsidi bagi nelayan.



TABEL 3.32. REKAPITULASI EVALUASI DI WPPNRI 572 TAHUN 2019

HASIL KESEPAKATAN	HASIL EVALUASI	ISU PENGELOLAAN WPPNRI 572	TINDAK LANJUT
<ul style="list-style-type: none"> Data produksi, alat penangkapan ikan, dan data kapal perikanan yang disampaikan oleh Provinsi Sumatera Barat, Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Banten masih perlu divalidasi dan diklarifikasi oleh Pusdatin; Data kapal perikanan berizin yang disampaikan oleh Provinsi berbeda dengan data kapal yang terbit melalui SIMKADA, sehingga perlu sinkronisasi data dengan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan – DJPT; Provinsi Aceh agar segera menggunakan aplikasi SIMKADA khusus yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan otonomi khusus; 	<ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya sinkronisasi dan harmonisasi pengelolaan perikanan dan konservasi sumber daya ikan; Tersusunnya pengaturan alokasi pemanfaatan sumber daya ikan, berupa SK Dirjen PT tentang formulasi dan alokasi Usaha di WPPNRI, penerapan sistem perizinan terintegrasi pusat dan daerah melalui SIMKADA; Berkurangnya laju kerusakan habitat sumber daya ikan; Meningkatnya pendapatan nelayan minimum setara dengan upah minimum provinsi (UMP); Terminalisasinya konflik antara nelayan andon dengan nelayan tujuan andon; Terbentuknya kelembagaan pengelola perikanan di WPPNRI 572; Lebih dari 80% pelaku usaha melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meningkatnya pengawasan dalam mencegah dan memberantas kegiatan <i>IUU fishing</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Banyaknya kapal perikanan yang disalahgunakan untuk mengangkut wisatawan; Belum terintegrasinya data perizinan kapal perikanan daerah dengan aplikasi SIMKADA; Masih banyak kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 GT yang belum terdaftar dan memiliki BPKP; Belum ada berita acara hasil validasi data perikanan antara Provinsi dan Pusdatin KKP; Masih kurangnya informasi tentang pendapatan nelayan. Belum ada integrasi sistem SIMKADA dengan sistem OSS serta petunjuk teknis dan SOP dalam penerapan OSS sehingga produk izin OSS belum diakui oleh aparat penegak hukum. 	<ul style="list-style-type: none"> Penyempurnaan sistem SIMKADA yang disesuaikan khusus untuk Provinsi Aceh terutama untuk perizinan kapal perikanan yang berukuran 30 sampai dengan 60 GT. Melakukan penggantian alat penangkapan ikan yang dilarang oleh pemerintah. Replikasi model terumbu buatan untuk lokasi-lokasi yang perlu direhabilitasi. DJPT dan Pemerintah Provinsi agar melakukan survey untuk menghitung pendapatan nelayan dengan mengikuti metode standar BPS. Integrasi sistem SIMKADA ke dalam sistem OSS dan menyiapkan petunjuk teknis dan SOP pelayanannya. DJPT agar menyusun petunjuk teknis dalam penentuan alokasi dan penempatan alat penangkapan ikan yang bersifat menetap/statis seperti bagan tancap, bagan perahu, dan perangkat sehingga tidak mengganggu alur pelayaran dan nelayan lainnya.

TABEL 3.33. REKAPITULASI EVALUASI DI WPPNRI 573 TAHUN 2019

HASIL KESEPAKATAN	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
<ul style="list-style-type: none"> Koordinator Eksekutif LPP WPPNRI 573 berperan aktif melakukan proses koordinasi pengumpulan data perikanan tangkap di WPPNRI 573 dan DKP Provinsi di WPPNRI 573 bertanggung jawab dalam menyiapkan data perikanan tangkap; 	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya penggunaan SIMKADA di masing-masing Provinsi lingkup WPPNRI 573 serta terdapat kapal aktif dan memiliki izin tetapi belum terdaftar di aplikasi SIMKADA; 	<ul style="list-style-type: none"> DKP Provinsi diharapkan segera bersurat kepada Ditjen. Perikanan Tangkap c.q. Dit. KAPI dengan melampirkan data kapal (by name by address) yang akan didaftarkan guna mempercepat proses pengurusan dokumen kapal. Validasi dan sinkronisasi dalam rangka perbaikan data pemanfaatan perikanan tangkap dapat dilakukan melalui mekanisme Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI 573.



HASIL KESEPAKATAN	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
<ul style="list-style-type: none"> Belum sinkronnya data pemanfaatan sumber daya ikan (data produksi, jumlah API, dan jumlah kapal) antara validator pusat, provinsi dan kabupaten lingkup WPPNRI 573; 	<ul style="list-style-type: none"> Masih ditemukannya pelanggaran diantaranya berupa kapal yang tidak memiliki izin dan BPKP tetapi masih melakukan kegiatan penangkapan sehingga pelaporan hasil tangkapan dari kapal yang memanfaatkan sumber daya ikan di WPPNRI khususnya kapal di bawah 30 GT belum optimal; 	<ul style="list-style-type: none"> Rencana penerapan alokasi pemanfaatan sumberdaya ikan sebagai acuan dalam pemberian izin kapal perikanan di provinsi harus diantisipasi melalui penyiapan data pemanfaatan perikanan yang valid oleh masing-masing provinsi. Percepatan revisi Peraturan Menteri KP No. 36/PERMEN-KP/2014 tentang Andon Penangkapan Ikan

TABEL 3.34. REKAPITULASI EVALUASI DI WPPNRI 711 TAHUN 2019

HASIL KESEPAKATAN	HASIL EVALUASI	ISU PENGELOLAAN WPPNRI 771	TINDAK LANJUT
<ul style="list-style-type: none"> Provinsi Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung dan Kalimantan Tengah menyepakati bahwa data 2018 yang digunakan adalah mengikuti One data Pusdatin KKP yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan alokasi pemanfaatan SDI. Sedangkan untuk Provinsi Riau, datanya bersifat angka sementara dan akan mengikuti One data Pusdatin KKP, kecuali untuk Provinsi Kalimantan Barat, Pusdatin akan mengikuti angka Provinsi, untuk memastikan penggunaan data dari masing-masing provinsi, akan disampaikan kembali data dimaksud kepada masing-masing provinsi; Mendorong Provinsi agar memasukkan data ke aplikasi SIMKADA; Mengoptimalkan koordinasi, harmonisasi dan updating data perikanan tangkap oleh enumerator dan validator pusat, provinsi, serta kabupaten dengan PUSDATIN; 	<ul style="list-style-type: none"> Sudah lebih dari 50% penggunaan alat/cara penangkapan ikan yang legal; Pengaturan alokasi pemanfaatan sumber daya ikan dengan dikeluarkan Surat Keputusan Dirjen No.86/KEP-DJPT/2018 tentang Mekanisme Perhitungan Alokasi Sumber Daya Ikan untuk izin Pusat dengan melakukan pemantauan dan evaluasi. WPPNRI 711 sepakat untuk melakukan uji coba terkait angka alokasi pemanfaatan SDI oleh masing-masing provinsi; Belum ada kajian mengenai perbedaan pendapatan antara nelayan andon dengan nelayan tujuan andon; Frekuensi konflik antara nelayan andon dengan nelayan tujuan andon semakin berkurang; Terlaksananya pertemuan pengelolaan perikanan WPPNRI 711 minimal 2 (dua) kali setiap tahun di semua Provinsi; Partisipasi aktif pemangku kepentingan meningkat dalam mencegah dan memberantas IUU Fishing melalui pertemuan, sosialisasi dan koordinasi; 	<ul style="list-style-type: none"> Perlu identifikasi, inventarisasi dan kajian serta pengawasan terhadap penggunaan API yang illegal di beberapa lokasi; Untuk penggunaan API statis/pasif perlu diatur perizinannya sesuai kewenangan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku sesuai Permen Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan; Perlu program penggantian API yang illegal oleh Pemerintah Pusat karena masih adanya konflik nelayan yang menggunakan API Illegal dan API legal; Perlu revisi Peraturan Menteri KP No. 36/PERMEN-KP/2014 tentang Andon Penangkapan Ikan terkait penerbitan SIPI Andon yaitu dilakukan cek fisik sebelum dikeluarkan SIPI Andon; Pusat Riset Perikanan - BRSDM KP akan melakukan penyusunan Harvest Strategy untuk ikan pelagis kecil di WPPNRI 711; Pengawasan belum optimal karena belum ada pembagian pengawasan yang jelas antara kewenangan pengawasan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota; 	<ul style="list-style-type: none"> Sinkronisasi dalam rangka perbaikan data pemanfaatan perikanan tangkap serta rencana alokasi pemanfaatan SDI dapat dilakukan melalui mekanisme Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI 711; Meningkatkan frekuensi operasi pengawasan secara terpadu; Perlu regulasi untuk mengatur penggunaan izin penggunaan API statis/pasif; Perlu penggantian/ replacement API yang illegal, sosialisasi, pengaturan zona, gelar operasi pengawasan secara terpadu, penegakan hukum dan pembentukan tim terpadu di tingkat Provinsi (SK. Gubernur); Pemerintah Provinsi di WPPNRI 711 perlu mendapat bantuan Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan penggunaan API Illegal; Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.36/PERMEN-KP/2014 tentang Andon Penangkapan Ikan dapat segera dilaksanakan; Perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai kesenjangan ekonomi antara nelayan andon dengan nelayan lokal/tujuan andon;



HASIL KESEPAKATAN	HASIL EVALUASI	ISU PENGELOLAAN WPPNRI 771	TINDAK LANJUT
<ul style="list-style-type: none"> Masing-masing provinsi mendorong perbaikan pendataan perikanan untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan yang lebih baik 		<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya aplikasi SIMKADA di WPPNRI 771 di beberapa lokasi; Pengukuran ulang sudah diterapkan di Provinsi Kalimantan Barat, namun belum dilakukan di Provinsi Sumatera Selatan, Jambi dan Kep. Bangka Belitung; 	<ul style="list-style-type: none"> Masing-masing provinsi segera mengoptimalkan aplikasi SIMKADA untuk kapal perikanan berukuran 5 - 10 GT; Perlu sosialisasi mekanisme pengukuran ulang kapal perikanan untuk beberapa lokasi di WPPNRI 771; Apabila alokasi pemanfaatan SDI di WPPNRI 771 sudah dihitung, maka perlu dilakukan uji coba di WPPNRI 771; Perlu melibatkan perguruan tinggi yang ada di WPPNRI 771 untuk masuk dalam panel ilmiah LPP WPPNRI.

TABEL 3.35. REKAPITULASI EVALUASI DI WPPNRI 712 TAHUN 2019

HASIL KESEPAKATAN	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT
<ul style="list-style-type: none"> Koordinator Eksekutif LPP WPPNRI 712 berperan aktif melakukan proses koordinasi pengumpulan data perikanan tangkap di WPPNRI 712 sebelum setiap pertemuan LPP WPPNRI sesuai dengan form yang sudah disepakati bersama. DKP Provinsi di WPPNRI 712 bertanggung jawab dalam menyiapkan data perikanan tangkap tersebut sebelum pertemuan LPP WPPNRI terkait pendataan dilakukan. Harmonisasi data perikanan tangkap antar Provinsi, Pusdatin KP, atau dengan unit lainnya yang terkait dilakukan saat pertemuan LPP WPPNRI. 	<ul style="list-style-type: none"> Log book penangkapan ikan belum sepenuhnya diimplementasikan; SPDN/SPBN/SPBB sudah tersedia di pelabuhan perikanan sesuai dengan kebutuhan nelayan; Praktek Illegal Fishing masih ditemukan berupa: kapal yang tidak memiliki izin dan BPKP, kapal yang izinnnya sudah habis tetapi tetap beroperasi, kapal yang melanggar jalur penangkapan, penggunaan API yang dilarang, dan markdown; Praktek Unreported Fishing masih ditemukan berupa: tidak melaporkan hasil tangkapan dan tidak melaporkan hasil tangkapan secara benar; Telah dilakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan, pengawasan dan penegakkan hukum; Lebih dari 50% Tempat Pelelangan Ikan (TPI) belum dikelola secara optimal di WPPNRI 712 bahkan ada yang tidak dioperasionalkan; 	<ul style="list-style-type: none"> Akan dilakukan pertemuan khusus tentang struktur kapal perikanan yang memanfaatkan sumber daya ikan di WPPNRI 712



TABEL 3.36. REKAPITULASI EVALUASI DI WPPNRI 713 TAHUN 2019

HASIL KESEPAKATAN	ISU PENGELOLAAN WPPNRI 713	TINDAK LANJUT
<ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan alokasi dan koordinasi perizinan pemanfaatan sumber daya ikan di WPPNRI 713 telah disusun Keputusan Dirjen tentang mekanisme perhitungan alokasi dan tentang alokasi di tingkat WPPNRI, sedangkan untuk alokasi di masing-masing provinsi sedang dalam proses penyusunan. • Dalam kurun waktu 3 tahun, laju kerusakan habitat sumber daya ikan (mangrove, lamun, terumbu karang, dan lingkungan perairan) semakin berkurang; • Frekuensi konflik antara nelayan andon dengan nelayan tujuan andon semakin berkurang; • Frekuensi pengawasan semakin menurun, namun tetap dilakukan pengawasan melalui patroli bersama rutin dengan pihak terkait, peningkatan pelibatan Pokmaswas dalam pengawasan, dan upaya pencegahan seperti sosialisasi dan pendekatan kepada nelayan agar tidak melakukan pelanggaran. • Penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya ikan telah dilakukan melalui penyelesaian kasus pelanggaran serta penambahan PPNS dan hakim adhoc; • Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI 713 telah dibentuk; • Pengelolaan rumpon dilakukan berdasarkan Permen KP no. 26/PERMEN-KP/2014 tentang Rumpon dan saat ini sedang dalam proses revisi; • Berkurangnya penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebesar lebih dari 50%. 	<ul style="list-style-type: none"> • Proses pengurusan dokumen kapal yang melibatkan instansi lain membutuhkan waktu yang lama dan proses yang sulit; • Masih beroperasinya API dan ABPI ilegal; • Percepatan revisi Peraturan Menteri KP No. 36/PERMEN-KP/2014 tentang Andon Penangkapan Ikan; 	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh eselon 1 KKP, dinas provinsi, dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat menjadikan RPP WPPNRI 713 sebagai acuan pengelolaan perikanan di WPPNRI 713; • Dalam rangka perbaikan data kapal dan alokasi pemanfaatan sumber daya ikan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi akan berkoordinasi dengan Ditjen Perhubungan Laut yang akan difasilitasi oleh Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sebagai implementasi PKS antara DJPT dengan Ditjen Perhubungan Laut; • Koordinator Eksekutif LPP WPPNRI 713 berperan aktif melakukan proses koordinasi pengumpulan data perikanan tangkap di WPPNRI 713 sebelum setiap pertemuan LPP WPPNRI sesuai dengan form yang sudah disepakati bersama. • DKP Provinsi di WPPNRI 713 bertanggung jawab dalam menyiapkan data perikanan tangkap tersebut sebelum pertemuan LPP WPPNRI terkait pendataan dilakukan. • Harmonisasi data perikanan tangkap antar Provinsi, Pusdatin KP, atau dengan unit lainnya yang terkait dilakukan saat pertemuan LPP WPPNRI. • Menyiapkan perjanjian penangkapan ikan (PPI) antar provinsi bagi kapal perikanan andon yang beroperasi lintas daerah tanpa disertai SIPI andon.



TABEL 3.37. REKAPITULASI EVALUASI DI WPPNRI 714 TAHUN 2019

HASIL KESEPAKATAN	ISU PENGELOLAAN WPPNRI 714	TINDAK LANJUT
<ul style="list-style-type: none"> • Telah disusun formulasi, legalisasi dan sosialisasi tentang alokasi pemanfaatan sumber daya ikan; • Telah dilaksanakan kegiatan dalam rangka mengurangi laju kerusakan habitat sumber daya ikan (mangrove, terumbu karang dan padang lamun) diantaranya melalui kegiatan identifikasi dan inventarisasi kerusakan habitat, rehabilitasi ekosistem, sosialisasi dan penegakan hukum terhadap kegiatan yang merusak habitat. • Lebih dari 5% jumlah kapal (izin pusat) di pelabuhan perikanan lingkup WPPNRI 714 telah melaksanakan log book penangkapan ikan sedangkan untuk implementasi e-log book belum terlaksana sepenuhnya; • Para pemangku kepentingan telah berpartisipasi aktif dalam melakukan pengelolaan perikanan di WPPNRI 714 antara lain melalui kegiatan patroli bersama (POLAIR, PSDKP, POKMAS-WAS, LANAL, BAKAMLA); • Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI 714 telah dibentuk melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No. 47/KEP-DJPT/2017 tentang Pengelola Perikanan WPPNRI dan telah dibangun Sekretariat Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI 714 di PPS Kendari. • Di Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat inisiasi Forum Pengelolaan Perikanan Daerah dalam rangka mendukung operasionalisasi LPP WPPNRI 714 dimana salah satu programnya adalah PAAP (Pengelolaan Akses Area Perikanan) dengan melibatkan masyarakat adat dan masyarakat lokal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Praktek Illegal Fishing masih ditemukan berupa: kapal yang tidak memiliki izin dan BPKP; kapal yang izinnya sudah habis tetapi tetap beroperasi dan kapal yang melanggar jalur penangkapan; • Praktek Unreported Fishing masih ditemukan berupa: tidak melaporkan hasil tangkapan dan tidak melaporkan hasil tangkapan secara benar; • Rendahnya kesadaran nelayan kecil untuk mendaftarkan kapalnya serta mencatatkan dan melaporkan hasil tangkapannya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinator eksekutif LPP WPPNRI 714 berperan aktif melakukan proses koordinasi pengumpulan data perikanan tangkap; • Menyiapkan perjanjian kerjasama (PKS) antar provinsi bagi kapal perikanan andon yang beroperasi lintas daerah melalui proses koordinasi antar Pemerintah Provinsi. • Melaksanakan dan meningkatkan peran masing-masing provinsi dalam menggunakan sistem SIMKADA untuk perizinan kapal ukuran <30 GT. • Mendorong proses integrasi antara Program Pengelolaan Perikanan Daerah Sulawesi Tenggara dan Program PAAP kedalam RPP dan rencana aksi WPPNRI 714. • Mendorong proses integrasi antara forum pengelolaan perikanan daerah Sulawesi Tenggara dan pokja PAAP Sulawesi Tenggara ke dalam LPP WPPNRI 714. • Mendorong model pengelolaan perikanan berbasis masyarakat seperti PAAP untuk dapat direplikasi di provinsi lain. • Meningkatkan kerjasama antara pemerintah dengan mitra dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas data hasil tangkapan nelayan kecil.



TABEL 3.38. REKAPITULASI EVALUASI DI WPPNRI 715 TAHUN 2019

HASIL KESEPAKATAN	HASIL EVALUASI	ISU PENGELOLAAN WPPNRI 715	TINDAK LANJUT
<ul style="list-style-type: none"> Provinsi menyepakati bahwa data 2018 yang digunakan adalah One data Pusdatin KKP yang sedang dalam proses validasi dan akan digunakan sebagai dasar penyusunan alokasi pemanfaatan SDI; Mengoptimalkan koordinasi, harmonisasi dan updating data perikanan tangkap oleh enumerator dan validator pusat, provinsi, serta kabupaten dengan PUSDATIN; Masing-masing provinsi mendorong perbaikan pendataan perikanan untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan yang lebih baik. 	<ul style="list-style-type: none"> Telah dilaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka mengurangi laju penggunaan alat penangkapan ikan karang yang merusak diantaranya melalui kegiatan sosialisasi dan penegakan hukum terhadap kegiatan penggunaan API yang dilarang dan merusak. Meskipun belum dapat diukur secara kuantitatif, peran dan penerapan kearifan lokal dalam pengelolaan perikanan dinilai mengalami peningkatan; Frekuensi konflik antara nelayan andon dengan nelayan tujuan andon semakin berkurang; Secara umum upaya pengawasan dalam pengelolaan perikanan mengalami peningkatan, hal ini diindikasikan dengan meningkatnya jumlah satuan pengawas di Ditjen PSDKP dan meningkatnya koordinasi dengan instansi terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> Masih adanya penangkapan ikan karang yang ilegal dan tidak ramah lingkungan seperti penggunaan bom ikan dan potassium; Belum adanya penetapan alokasi pemanfaatan sumber daya ikan untuk masing-masing provinsi; Sulit dalam melakukan pengawasan terhadap penyedia bahan baku bom ikan karena bahan baku tersebut berupa pupuk sehingga sulit dalam pembuktian; Harmonisasi data perizinan kapal perikanan oleh provinsi dengan SIMKADA masih belum optimal; Masih banyak kapal penangkapan ikan yang tidak memanfaatkan pelabuhan pangkalan di sekitar daerah penangkapan ikan (DPI), karena adanya kebijakan alokasi pelabuhan pangkalan lebih dari satu, sehingga pelabuhan pangkalan di sekitar DPI tidak optimal. 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinator Eksekutif LPP WPPNRI 715 berperan aktif melakukan proses koordinasi pengumpulan data; Harmonisasi data perikanan tangkap antar Provinsi, Pusdatin KP, atau dengan unit lainnya yang terkait dilakukan saat pertemuan LPP WPPNRI; Pusat akan memfasilitasi penyiapan Kesepakatan Bersama terkait kegiatan andon penangkapan ikan antar provinsi; Masing-masing provinsi akan mengoptimalkan aplikasi SIMKADA untuk kapal - kapal perikanan <30 GT; Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.36/PERMEN-KP/2014 tentang Andon Penangkapan Ikan; Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.26/PERMEN-KP/2014 tentang Rumpun; Penentuan pelabuhan pangkalan untuk kapal perikanan izin pusat yang menangkap ikan di WPPNRI 715 harus mendapat rekomendasi dari LPP WPPNRI 715, proses penetapan dimaksud akan diatur lebih lanjut melalui SOP; Perlu adanya kajian dan pertemuan khusus terkait dengan kearifan lokal dalam pengelolaan perikanan; Perlu segera menetapkan alokasi sumber daya ikan melalui Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI.



TABEL 3.39. REKAPITULASI EVALUASI DI WPPNRI 716 TAHUN 2019

HASIL KESEPAKATAN	HASIL EVALUASI	ISU PENGELOLAAN WPPNRI 716	TINDAK LANJUT
<ul style="list-style-type: none"> Provinsi menyepakati bahwa data 2018 yang digunakan adalah One Data Pusdatin KKP yang sedang dalam proses validasi dan akan digunakan sebagai dasar penyusunan alokasi pemanfaatan SDI; Mengoptimalkan koordinasi, harmonisasi dan updating data perikanan tangkap oleh enumerator dan validator pusat, provinsi, serta kabupaten dengan PUSDATIN; Masing-masing provinsi mendorong perbaikan pendataan perikanan untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan yang lebih baik terutama dalam penentuan dan penetapan alokasi pemanfaatan sumber daya ikan 	<ul style="list-style-type: none"> Semua daerah di WPPNRI 716 sudah berusaha untuk mendapatkan data yang baik, salah satunya dengan melakukan validasi data pertriwulan, melakukan pembinaan teknis pengumpulan data, serta didukung dengan pembinaan teknis penerapan logbook. Data yang ada belum sepenuhnya dapat memenuhi tingkat pengelolaan sumber daya ikan (sekitar 50-60%); Lebih dari 50 % kapal perikanan yang menggunakan API atau cara penangkapan yang legal; Frekuensi konflik antara nelayan andon dengan nelayan tujuan andon semakin berkurang; Sekitar 1% nelayan mampu menerapkan cara penanganan ikan yang baik dan sudah mulai ditingkatkan dengan mengadakan pelatihan penanganan ikan yang baik di beberapa lokasi; Meskipun belum dapat diukur secara kuantitatif, peran dan penerapan kearifan lokal dalam pengelolaan perikanan dinilai mengalami peningkatan. 	<ul style="list-style-type: none"> Masih adanya penggunaan alat penangkapan ikan yang illegal dan tidak ramah lingkungan (Provinsi Kalimantan Utara); Perlu identifikasi, inventarisasi dan kajian terhadap penggunaan API yang tidak ramah lingkungan di beberapa lokasi; Masih rendahnya pengawasan terhadap penggunaan API tidak ramah lingkungan di WPPNRI 716; Masih adanya konflik nelayan yang melakukan Andon dengan Nelayan Lokal; Implementasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) diatas kapal perikanan dan di pelabuhan perikanan masih rendah. 	<ul style="list-style-type: none"> Sinkronisasi dalam rangka perbaikan data pemanfaatan perikanan tangkap serta rencana alokasi pemanfaatan SDI dapat dilakukan melalui mekanisme Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI 716; Perlu dukungan dan operasi intensif pengawasan rutin dan gabungan terhadap penggunaan API yang tidak ramah lingkungan; Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/2014 tentang Andon Penangkapan Ikan; Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.26/PERMEN-KP/2014 tentang Rumpun; Penentuan pelabuhan pangkalan untuk kapal perikanan izin pusat yang menangkap ikan di WPPNRI 716; Sosialisasi penanganan ikan yang baik diatas kapal perikanan dan di pelabuhan perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/ PERMEN-KP/2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik. Tingkat pemanfaatan SDI di WPPNRI 716 dengan penggunaan alat penangkapan ikan yang illegal dibutuhkan analisis dan kajian lebih lanjut; Masing-masing provinsi akan mengoptimalkan aplikasi SIMKADA untuk kapal - kapal perikanan <30 GT, melalui Operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI;



TABEL 3.40A. REKAPITULASI EVALUASI DI WPPNRI 717 TAHUN 2019

HASIL KESEPAKATAN	HASIL EVALUASI	ISU PENGELOLAAN WPPNRI 717	TINDAK LANJUT
<ul style="list-style-type: none"> Provinsi Maluku Utara, Papua dan Papua Barat menyetujui bahwa data yang digunakan adalah One data Pusdatin KKP yang sudah divalidasi dan akan digunakan sebagai dasar penyusunan alokasi pemanfaatan SDI; Optimalisasi koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi serta updating data perikanan tangkap oleh validator pusat, provinsi, dan kabupaten dengan PUSDATIN; Masing-masing provinsi akan mendorong proses perizinan kapal perikanan <30 GT melalui aplikasi SIMKADA; Data kelompok jenis ikan pelagis besar pada One data KKP masih termasuk komoditas Tuna dan Cakalang, sehingga untuk kedepannya kedua komoditas tersebut harus dipisah datanya dari total data pelagis besar; Koordinator Eksekutif LPP WPPNRI 717 harus berperan aktif melakukan proses koordinasi pengumpulan data perikanan tangkap di WPPNRI 717 sebelum pertemuan LPP WPPNRI sesuai dengan format isian yang sudah disepakati bersama. 	<ul style="list-style-type: none"> Lebih dari 5% jumlah kapal (izin pusat) di pelabuhan perikanan lingkup WPPNRI 717 telah melaksanakan logbook penangkapan ikan sedangkan untuk implementasi e-log book belum terlaksana sepenuhnya; Laju kerusakan habitat Sumber Daya Ikan (SDI) sudah berkurang ditandai dengan adanya peningkatan tutupan terumbu karang dan lamun; 	<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan perbedaan data antara Pemerintah Provinsi dan One Data Pusdatin KKP; Pengaturan untuk mengakomodir kearifan lokal (masyarakat hukum adat) untuk meminimalisir konflik dengan nelayan pendatang; Tingkat pemanfaatan SDI di WPPNRI 717 berwarna merah pada komoditas pelagis besar diduga karena adanya keterbatasan data dan penggunaan multi gears sehingga dibutuhkan analisis dan kajian lebih lanjut; Penggunaan API yang tidak ramah lingkungan; Koordinasi untuk pengawasan dan penegakan hukum masih belum efisien (rentang koordinasinya masih jauh) Penambahan pengawas perikanan dari DKP Kabupaten terkendala pengalihan personil, Pendanaan, Sarana/ Prasarana dan Dokumen (P3D) untuk dilimpahkan ke DKP Provinsi; Belum ada Mou dan PKS antara Provinsi Papua Barat dan Papua untuk Andon Penangkapan Ikan, sehingga disinyalir akan menimbulkan konflik; Implementasi dan evaluasi terhadap identifikasi rumpon sudah dilakukan dengan serangkaian pertemuan dengan BRSDM, dengan hasil akan merevisi dan menyiapkan draft SK Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap tentang Pendaftaran Rumpon untuk kapal perikanan ijin pusat; Tidak adanya izin pemasangan rumpon untuk kapal perikanan berukuran <10 GT di Provinsi Papua; 	<ul style="list-style-type: none"> Validasi dan sinkronisasi dalam rangka perbaikan data pemanfaatan perikanan tangkap serta rencana alokasi pemanfaatan SDI dapat dilakukan melalui mekanisme Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI 717; Pusdatin dan pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan dukungan data kepada bagian riset perikanan dan Komnas Kajiskan, sehingga tingkat estimasi yang dihasilkan lebih akurat; Terjadi konflik pemanfaatan sumber daya ikan, sehingga intensitas pengawasan perlu ditingkatkan; Mendorong SIMKADA untuk ditingkatkan dan dioptimalkan di WPPNRI 717.



TABEL 3.40B. REKAPITULASI EVALUASI DI WPPNRI 718 TAHUN 2019

HASIL KESEPAKATAN	HASIL EVALUASI	ISU PENGELOLAAN WPPNRI 718	TINDAK LANJUT
<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi serta updating data perikanan tangkap oleh validator pusat, provinsi, dan kabupaten dengan PUSDATIN. • Masing-masing provinsi akan mendorong proses perizinan kapal perikanan <30 GT melalui aplikasi SIMKADA. • Koordinator Eksekutif LPP WPPNRI 718 harus berperan aktif melakukan proses koordinasi pengumpulan data perikanan tangkap di WPPNRI 718 sebelum pertemuan LPP WPPNRI sesuai dengan format isian yang sudah disepakati bersama. • DKP Provinsi di WPPNRI 718 bertanggung jawab dalam menyiapkan data perikanan tangkap tersebut sebelum pertemuan LPP WPPNRI terkait pendataan dilakukan. • Pemutakhiran data perikanan oleh masing-masing provinsi, mengacu pada hasil validasi One data oleh PUSDATIN yang akan dilaksanakan tanggal 26 Agustus s/d 3 September 2019, selanjutnya akan digunakan sebagai bahan dalam penetapan alokasi sumber daya ikan provinsi. 		<ul style="list-style-type: none"> • Belum sinkronnya data pemanfaatan sumber daya ikan (data produksi, jumlah API, dan jumlah kapal) antara validator pusat, provinsi dan kabupaten lingkup WPPNRI 718; • Belum optimalnya penggunaan SIMKADA di masing-masing Provinsi lingkup WPPNRI 718 serta terdapat kapal aktif dan memiliki izin tetapi terutama kapal <10 GT belum terintegrasi dengan aplikasi SIMKADA; • Data Perikanan one data tahun 2018 pada PUSDATIN belum bisa digunakan dalam pengelolaan karena belum proses validasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan evaluasi batas wilayah administrasi, disepakati bahwa Provinsi Papua Barat tidak menjadi bagian lagi dari WPPNRI 718, sehingga direkomendasikan akan dilakukan penyesuaian dalam dokumen RPP WPPNRI 718 yang akan direview.

Adapun kegiatan yang dilakukan untuk menunjang indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi PERMEN KP Nomor 33/PERMEN-KP/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI;
2. Pembahasan Kepmen KP tentang Susunan keanggotaan Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI;
3. Pelaksanaan panel ilmiah Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI 718;
4. Reviu Rencana Pengelolaan Perikanan WPPNRI 718;
5. Pembahasan Pengelolaan Perikanan Lemuru di WPPNRI 573;
6. Pembahasan pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan di WPPNRI 712;
7. Pembahasan alokasi usaha penangkapan ikan WPPNRI 573;



8. Pembahasan alokasi usaha penangkapan ikan WPPNRI 713;
9. Pembahasan alokasi usaha penangkapan ikan WPPNRI 714;
10. Pembahasan alokasi usaha penangkapan ikan WPPNRI 572;
11. Persiapan Harvest Strategy Technical Workshop ACIAR;
12. Pertemuan ke-5 Technical Harvest Strategy Perikanan Tuna di WPPNRI 713, 714 dan 715;
13. Pertemuan ke-2 Implementasi Harvest Strategy Perikanan Tuna di WPPNRI 713, 714 dan 715;
14. Persiapan Uji Coba Database of Indonesia Vessels Authorized to Fish for Tuna (DIVA-TUNA);
15. Pertemuan Pembahasan Penyusunan draft Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Sidat untuk WPP 572, 573, 713, 715 dan 716;
16. Workshop laporan kegiatan SEAFDEC / IFRDMD tahun 2019;
17. Penghitungan alokasi sumber daya ikan sebagai bentuk pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan. Sampai triwulan IV telah terkirim ke Bagian Hukum, draft Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tentang Mekanisme Penghitungan Kuota Sumber Daya Ikan dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan serta Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tentang Kuota Sumber Daya Ikan dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan melalui Memorandum Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Nomor M. 294/DI.TK/XII/2019 pada tanggal 26 Desember 2019;
18. Penyusunan Draft Kuota tersebut telah melalui Pembahasan Alokasi SDI dan Usaha Penangkapan Ikan untuk Pusat dan Daerah di WPPNRI dengan seluruh Dinas Kelautan Perikanan.

2. Jumlah kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang meningkat efektifitas pengelolannya

Kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil adalah kawasan perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang dilakukan upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya (UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil). Efektivitas pengelolaan kawasan konservasi adalah suatu metode untuk menilai efektivitas Kawasan Konservasi Perairan yang pengukurannya dilakukan melalui Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil (E-KKP3K). E-KKP3K merupakan suatu panduan baku/standar untuk mengevaluasi capaian pengelolaan berkelanjutan suatu kawasan konservasi perairan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor KEP.44/KP3K/2012.



Pengukuran target dilakukan dengan menghitung banyaknya kawasan konservasi perairan nasional/daerah yang meningkat pengelolaan efektifnya berdasarkan penilaian E-KKP3K berupa level pengelolaan kawasan konservasi yaitu merah, kuning, hijau, biru, dan emas. Ukuran keberhasilan kawasan konservasi perairan adalah kawasan konservasi yang sudah dikelola melalui peningkatan persentase setiap level pengelolaan. Sumber data untuk mengetahui jumlah kawasan konservasi yang meningkat efektivitas pengelolaannya berasal dari data base di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tiga puluh lima (35) kawasan yang diukur peningkatan pengelolaan efektifnya pada tahun 2019 adalah 10 KKPN dan 25 KKPD, antara lain: (1) KKPN Pulau Pieh, (2) KKPN Kep. Anambas, (3) KKPN Gili Matra, (4) KKPN Laut Sawu, (5) KKPN Kapoposang, (6) KKPN Aru Tenggara, (7) KKPN Laut Banda, (8) KKPN Kep. Raja Ampat, (9) KKPN Waigeo sebelah Barat, (10) KKPN Padaido, (11) KKPD Pesisir Timur Pulau Weh-Aceh, (12) KKPD Sawo Lahewa-Sumut, (13) KKPD Selat Bunga Laut-Sumbar, (14) KKPD Bintan-Kepri, (15) KKPD Batam-Kepri, (16) KKPD Natuna-Kepri, (17) KKPD Pulau Momparang-Kep. Babel, (18) KKPD Pangumbahan-Jabar, (19) KKPD Batang-Jateng, (20) KKPD Nusa Penida-Bali, (21) KKPD Gili Sulat dan Gili Lawang-NTB, (22) KKPD Gita Nada-NTB, (23) KKPD Gili Balu-NTB, (24) KKPD Kabete-NTB, (25) KKPD Alor-NTT, (26) KKPD Sikka-NTT, (27) KKPD Kepulauan Derawan-Kaltim, (28) KKPD Pangkep-Sulsel, (29) KKPD Banggai Dalaka-Sulteng, (30) KKPD Tatoareng-Sulut, (31) KKPD Kei Kecil-Maluku, (32) KKPD Yamdena-Maluku, (33) KKPD Jeen Womom-Pabar, (34) KKPD Kep. Raja Ampat-Pabar, dan (35) KKPD Biak Numfor-Papua.

TABEL 3.41. JUMLAH KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN YANG MENINGKAT KUALITAS PENGELOLAAN EFEKTIFNYA (KAWASAN)

SASARAN STRATEGIS - 3				TERWUJUDNYA PENGELOLAAN SDKP YANG PARTISIPATIF, BERTANGGUNGJAWAB, DAN BERKELANJUTAN					
IKU-5				PERSENTASE PENGELOLAAN WILAYAH KP YANG BERKELANJUTAN					
INDIKATOR KINERJA PEMBENTUK				JUMLAH KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN YANG MENINGKAT KUALITAS PENGELOLAAN EFEKTIFNYA (KAWASAN)					
REALISASI				TAHUN 2019				RENSTRA KKP 2015-2019	
2015	2016	2017	2018	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% KENAIKAN 2018-2019	TARGET 2019	% CAPAIAN
17	28	30	33	35	35	100	106,06	35	100

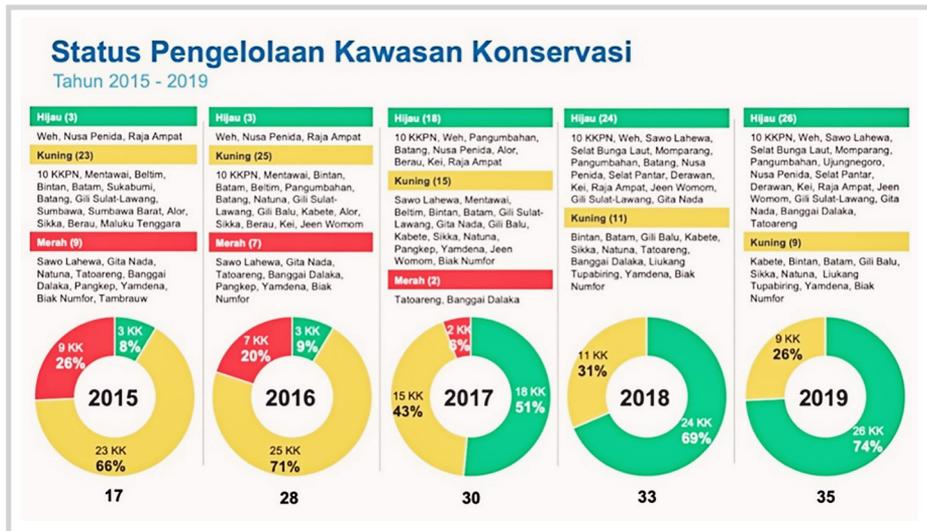
Pada tahun 2019, jumlah kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang meningkat kualitas pengelolaan efektifnya mengalami peningkatan 2 kawasan yaitu sebesar 33 kawasan pada tahun 2018 menjadi 35 kawasan pada tahun 2019.

Dari 35 kawasan konservasi yang diukur, 26 kawasan konservasi berstatus hijau dan 9 kawasan konservasi berstatus kuning. Status hijau menunjukkan bahwa kawasan konservasi tersebut telah dicadangkan oleh Gubernur, telah mempunyai dokumen Rencana Pengelolaan Zonasi, dan telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Status kuning menggambarkan



bahwa kawasan konservasi tersebut telah dicadangkan oleh Gubernur, telah mempunyai dokumen Rencana Pengelolaan Zonasi, dan belum ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Status pengelolaan kawasan konservasi disajikan pada Gambar berikut.

GAMBAR 3.19. STATUS PENGELOLAAN KKP3K SAMPAI DENGAN TAHUN 2019



Detail hasil evaluasi efektifitas pengelolaan kawasan konservasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 3.42. PENILAIAN E-KKP3K TAHUN 2015-2019

NO	NAMA KAWASAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	TWP Pulau Pieh	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100
		76	90	100	100	100
		31	31	76	79	96
		0	0	0	0	0
2	TWP Kep. Anambas	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100
		62	71	100	100	100
		7	7	59	66	97
		0	0	0	0	0



NO	NAMA KAWASAN	2015	2016	2017	2018	2019
3	TWP Gili Matra	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100
		86	90	100	100	100
		24	18	46	63	70
		0	0		0	0
4	TNP Laut Sawu	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100
		86	90	100	100	100
		39	39	51	68	63
		0	0	0	0	0
5	TWP Kapoposang	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100
		43	67	100	100	100
		0	0	32	56	61
		0	0		0	0
6	SAP Kep. Aru Tenggara	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100
		57	67	100	100	100
		16	17	51	54	58
		0	0		0	0
7	TWP Laut Banda	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100
		43	52	100	100	100
		22	22	32	47	52
		0	0	0	0	0
8	TWP Pulau Padaido	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100
		33	90	100	100	100
		0	0	32	49	60
		0	0		0	0



NO	NAMA KAWASAN	2015	2016	2017	2018	2019
9	SAP Kep. Raja Ampat	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100
		19	67	100	100	100
		0	0	46	67	71
		0	0		0	0
10	SAP Kep. Waigeo Sebelah Barat	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100
		43	67	100	100	100
		0	0	46	68	72
		0	0		0	0
11	KKPD Sabang - SAP Pesisir Timur Pulau Weh (2015)	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100
		43	67	100	100	100
		0	0	46	68	72
		0	0		0	0
12	KKPD Nias Utra - TWP Sawo Lahewa	100	100	100	100	100
		27	36	100	100	100
		0	71	95	100	100
		0	0		0	4
		0	0		0	0
13	KKPD Kep. Mentawai - TWP Selat Bunga Laut	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100
		67	71	95	100	100
		0	0	0	4	11
		0	0		0	0
14	KKPD Bintan	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100
		71	81	81	90	90
		7	0	0	0	0
		0	0	0	0	0



NO	NAMA KAWASAN	2015	2016	2017	2018	2019
15	KKPD Batam	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100
		52	67	67	76	81
		0	0		0	0
		33	0		0	0
16	KKPD Natuna (2018)	100	100	100	100	100
		91	100	100	100	100
		0	0	67	71	81
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
17	KKPD Belitung Timur - TWP Gugusan Pulau-Pulau Momparang	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100
		38	52	95	100	100
		11	0		0	13
		0	0		0	0
18	KKPD Sukabumi - TP Pantai Penyu Pangumbahan (2015)	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100
		90	95	100	100	100
		14	29	36	42	61
		0	0		0	0
19	KKPD Batang - TP Ujungnegoro Roban (2015)	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100
		86	90	100	100	100
		18	18	57	63	64
		0	0		0	
20	KKPD Klungkung - TWP Nusa Penida (2015)	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100
		71	75	75	85	92
		0	0	0	0	0



NO	NAMA KAWASAN	2015	2016	2017	2018	2019
21	KKPD Lombok Timur - TWP Gili Sulat dan Gili Lawang (2017)	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100
		48	71	52	100	100
		0	0	0	0	7
		0	0	0	0	0
22	KKPD Lombok Barat - TWP Gili Tangkong, Gili Nanggu, dan Gili Sundak	100	100	100	100	100
		36	73	100	100	100
		29	29	52	100	100
		21	0	0	0	11
		17	0	0	0	
23	KKPD Sumbawa Barat - TPK Gili Balu (2018)	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100
		52	71	81	86	95
		21	0	0	0	0
		17	0	0	0	0
24	KKPD Sumbawa - TPK Keramat Bedil Temudong (2019)	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100
		52	71	81	86	95
		18	18	0	0	0
		17	17	0	0	0
25	KKPD Alor - SAP Selat Pantar (2015)	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100
		86	90	100	100	100
		69	69	69	73	77
		0	0		0	0
26	KKPD Sikka	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100
		67	71	71	81	86
		29	29	0	0	0
		0	0	0	0	



NO	NAMA KAWASAN	2015	2016	2017	2018	2019
27	KKPD Berau - TP dan TPK Kep. Derawan	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100
		90	95	100	100	100
		7	0	32	35	42
		0	0	0	0	67
28	KKPD Kepulauan Sangihe - TPK Tatoareng (2019)	100	100	100	100	100
			17	36	100	100
				0	0	57
				0	0	0
				0	0	0
29	KKPD Sulawesi Tengah - TP dan TPK Banggai Dalaka (2018)	100	100	100	100	100
		0	36	45	100	100
					0	62
					0	0
					0	0
30	KKPD Pangkajene Kepulauan - Liukang Tupabiring (2015)	100	100	100	100	100
		27	73	100	100	100
		0	0	38	48	57
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
31	KKPD Maluku Tenggara - TPK Kei Kecil	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100
		71	86	100	100	100
		59	71	76	76	80
		33	0	0	0	0
32	KKPD Maluku Tenggara Barat - TPK Yamdena (2017)	100	100	100	100	100
				100	100	100
				19	24	29
				0	0	0
				0	0	0



NO	NAMA KAWASAN	2015	2016	2017	2018	2019
33	KKPD Raja Ampat - TWP Kep. Raja Ampat (2015)	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100
		75	79	96	98	99
		19	0	0	0	0
34	KKPD Tambrauw - TP Jeen Womom	100	100	100	100	100
		18	100	100	100	100
		0	43	95	100	100
		0	0	0	6	70
		0	0	0	0	0
35	KKPD Biak Numfor	100	100	100	100	100

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja:

1. **Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN)** melalui : penguatan tata kelola (Layanan perizinan, Bimtek konservasi dan perikanan berkelanjutan untuk pengelola kawasan), pengelolaan sumber daya kawasan (Monitoring penyu, monitoring habitat, Bersih laut dan pantai, Pelepasliaran benih lobster, Monitoring terumbu karang, ikan karang, dan megabenthos, Monitoring cetacean, Pemetaan potensi dan pemanfaatan sumber daya laut, Monitoring pari manta, Pengembangan ekowisata, Monitoring biota laut dilindungi, monitoring biofisik di perairan Kabupaten Sumba Timur dan Sumba Barat Daya, dan pengelolaan sosial ekonomi masyarakat di sekitar kawasan konservasi (Sosialisasi Regulasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi, Monitoring Sosek, Konservasi *Goes to School*, Festival Budaya Bahari Padang Melang, Edukasi kelompok sadar wisata, Sosialisasi biota laut dilindungi dan Monitoring sosial-ekonomi masyarakat.
2. **Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD)** yang dilaksanakan melalui dana dekonsentrasi yang dilakukan di 24 provinsi. Kegiatan yang dilakukan berupa peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan sumber daya di sekitar kawasan konservasi.



TABEL 3.43. RINCIAN KEGIATAN PENGELOLAAN KKPD TAHUN 2019

NO	PROVINSI	KEGIATAN	LOKASI
1	Aceh	Penguatan Pokmaswas	KKPD Aceh Jaya
2	Sumatera Barat	Penguatan Pokmaswas	KKPD Pesisir Selatan
			KKPD Pariaman
3	Sumatera Utara	Penguatan Peran Serta Masyarakat	KKPD Tapanuli Tengah
4	Kepulauan Riau	Persiapan Dan Identifikasi Kelompok	KKPD Bintan
		Pertemuan Kelompok Masyarakat	
		Simulasi Patroli Berbasis Masyarakat	
5	Bangka Belitung	Sosialisasi Kepada Pokmaswas	KKPD Beltim
6	Riau	Penguatan Pokmaswas	KKPD Indragiri Hilir
7	Lampung	Temu Koordinasi Kawasan Konservasi Bagi Masyarakat Pesisir	Pulau Puhawang
			KKPD Teluk Kiluan
8	Bengkulu	Penguatan Pokmaswas	KKPD Kaur
			Kota Bengkulu
9	Jawa Barat	Penguatan Pokmaswas	KKPD Pangumbahan
10	Jawa Tengah	Penguatan Pokmaswas	KKPD Rembang
11	Bali	Penguatan Pokmaswas	KKPD Karangasem
			KKPD Buleleng
12	NTT	Penguatan Pokmaswas	KKPD Selat Pantar, Alor
13	NTB	Penguatan Pokmaswas	KKPD Pulau Liang Dan Pulau Ngali
			KKPD Pulau Lipan Dan Pulau Rakit
14	Kalimantan Utara	Penguatan Pokmaswas	KKPD Tanah Kuning
15	Kalimantan Tengah	Penguatan Pokmaswas	KKPD Senggora
16	Kalimantan Selatan	Penyediaan Data Series	KKPD Tanah Bumbu, KKPD Kotabaru
17	Kalimantan Timur	Penguatan Pokmaswas	KKPD Bontang
18	Sulawesi Selatan	Penguatan Pokmaswas & Patroli	KKPD Liukang Tupfabiring, Pangkep
19	Sulawesi Tengah	Penguatan Pokmaswas	KKPD Banggai Dalaka & KKPD Parigi Muotong
20	Gorontalo	Penguatan Pokmaswas	KKPD Olee
		Penguatan Pokmaswas	KKPD Gorontalo Utara
		Penguatan Pokmaswas	KKPD Botubarani
21	Sulawesi Utara	Penguatan Pokmaswas	KKPD Minahasa Utara
22	Maluku	Penguatan Pokmaswas	KKPD Lease, Maluku Tengah
23	Papua Barat	Penguatan Pokmaswas	KKPD Kep. Raja Ampat
24	Papua	Penguatan Pokmaswas	KKPD Biak Numfor



3. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi

Penyusunan rancangan Permen KP tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi dilakukan berdasarkan kebutuhan di lapangan terkait peraturan pengelolaan kawasan konservasi yang lebih mutakhir menyesuaikan peraturan-peraturan lain. Rancangan Permen KP ini disusun untuk menyederhanakan Permen KP 30 Tahun 2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan, Permen KP 17 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Permen KP 2 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, dan Permen KP 47 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan.

4. Sertifikasi Pengelolaan Kawasan Konservasi

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola kawasan konservasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan Kemenko Bidang Kemaritiman, LIPI, CTC Indonesia, ATSEA-2 UNDP melakukan kegiatan sertifikasi pengelola kawasan konservasi. Jenis sertifikasi yang diujikan antara lain: Sertifikasi Standar Kompetensi Kerja Khusus pengelolaan kawasan konservasi (117 orang), penilaian kondisi terumbu karang (20 orang), penilaian kondisi mangrove (20 orang), penilaian kondisi lamun (21 orang), penilaian kondisi megabenthos (16 orang). Sertifikasi diikuti oleh 194 orang peserta yang berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perguruan Tinggi, dan masyarakat.

5. Pendanaan Berkelanjutan Kawasan Konservasi Perairan Daerah melalui Mekanisme Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah (DID) adalah dana apresiasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atas pencapaian kinerjanya. Alokasi DID didasarkan pada kriteria utama dan kategori kinerja. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut saat ini berinisiatif mengajukan kategori baru kepada Kementerian Keuangan, yaitu kategori kawasan konservasi. Idealnya, pemerintah daerah yang berkinerja dalam pengelolaan kawasan konservasi akan mendapatkan dana ini. Saat ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Kementerian Keuangan, WWF Indonesia, WCS Indonesia sedang menyusun proposal pengajuan DID kategori kawasan konservasi.

6. Penyusunan Pedoman Pembentukan Unit Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD)

Kewenangan pengelolaan KKPD di seluruh provinsi saat ini dikelola bervariasi berdasarkan unit pengelola, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Cabang Dinas, UPTD, maupun



BLUD. Untuk menentukan kapan suatu kawasan dikelola oleh jenis unit pengelola tertentu, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menyusun pedoman pembentukan unit pengelola KKPD agar mempermudah pemerintah provinsi dalam menentukan jenis lembaga pengelola suatu KKPD.

7. Sinkronisasi Muatan Kawasan Konservasi ke dalam Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah

Kegiatan sinkronisasi muatan kawasan ke dalam dokumen perencanaan daerah dilaksanakan dengan melibatkan Kemendagri, WCS Indonesia, WWF Indonesia, dan RARE Indonesia. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka sinkronisasi muatan kawasan konservasi dalam dokumen perencanaan daerah, sehingga pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah dapat dioptimalkan.

8. Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Provinsi Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat Wilayah Kerja SEA Project

Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan USAID Sea Project. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengukur status efektivitas pengelolaan 13 kawasan konservasi di Provinsi Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat di wilayah kerja USAID Sea Project dengan berpedoman Peraturan Dirjen KP3K No.44 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Nilai akhir 13 KKPD tersebut, yaitu: 1). KKPD Seram Utara Barat, 2). KKPD Koon, 3). KKPD Pulau Buano, 4). KKPD Lease, 5). KKPD Pulau Ay dan Pulau Rhun, 6). KKPD Kepulauan Sula, 7). Status KKPD Guraici, 8). Status KKPD Widi, 9). KKPD Mare: Merah 10). KKPD Pulau Rao-Tanjung Dehegila, 11). KKPD Makian-Moti, 12). KKPD Teluk Berau & Teluk Nusalasi, 13). KKPD Sorong Selatan: Merah 100%

9. Kegiatan Hibah *Enabling Transboundary Cooperation for Sustainable Management Indonesian Seas* (ISLME Project)

Kegiatan ini merupakan paket hibah dari GEF-5 dengan sumber dana dari International Waters. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi penerapan pendekatan ekosistem untuk pengelolaan perikanan (EAFM) dan pesisir di wilayah ISLME yang mencakup Indonesia dan Timor Leste untuk menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya melalui *Trans-boundary Diagnostic Analysis* (TDA) dan pengembangan *Strategic Action Programme* (SAP). Wilayah ISLME di Indonesia mencakup WPP 712, 713, 714, dan sebagian 573.

Pedoman teknis E-KP3K digunakan sebagai panduan dalam rangka mengevaluasi tingkat efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan dengan menggunakan indikator-indikator yang telah ditetapkan, dengan 5 kategori sebagaimana berikut :



TABEL 3.44. KRITERIA PENILAIAN EVALUASI EFEKTIFITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (E-KKP3K)

PERINGKAT	KAWASAN KONSERVASI	KRITERIA
Merah (1)	Kawasan Konservasi Diinisiasi	<ul style="list-style-type: none"> • Usulan inisiatif • Identifikasi dan inventarisasi kawasan • Pencadangan kawasan
Kuning (2)	Kawasan konservasi didirikan	<ul style="list-style-type: none"> • Unit organisasi pengelola dengan sumber daya manusia • Rencana Pengelolaan dan zonasi • Sarana dan prasarana pendukung pengelolaan • Dukungan pembiayaan pengelolaan
Hijau (3)	Kawasan konservasi dikelola minimum	<ul style="list-style-type: none"> • Pengesahan rencana pengelolaan dan zonasi • Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan • Pelaksanaan rencana pengelolaan dan zonasi • Penetapan Kawasan konservasi perairan
Biru (4)	Kawasan konservasi dikelola optimum	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan batas kawasan • Pelembagaan • Pengelolaan sumberdaya kawasan • Pengelolaan sosial ekonomi dan budaya
Emas (5)	Kawasan konservasi mandiri	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kesejahteraan masyarakat • Pendanaan berkelanjutan

Sumber: Keputusan Dirjen KP3K Nomor KEP.44/KP3K/2012

3. Jumlah kawasan pesisir rusak yang pulih kembali

Indikator Jumlah Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali dengan satuan kawasan adalah indikator yang didukung oleh (1) Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (kawasan), (2) Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direstorasi (kawasan), dan (3) Jumlah lokasi Gerakan Cinta Laut (lokasi).

TABEL 3.45. JUMLAH KAWASAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL RUSAK YANG PULIH KEMBALI TAHUN 2017 - 2019

SASARAN STRATEGIS - 3				TERWUJUDNYA PENGELOLAAN SDKP YANG PARTISIPATIF, BERTANGGUNGJAWAB, DAN BERKELANJUTAN					
IKU-5				PERSENTASE PENGELOLAAN WILAYAH KP YANG BERKELANJUTAN					
INDIKATOR KINERJA PEMBENTUK				JUMLAH KAWASAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL YANG RUSAK DAN PULIH KEMBALI (KAWASAN)					
REALISASI				TAHUN 2019				RENSTRA KKP 2015-2019	
2015	2016	2017	2018	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% KENAIKAN 2018-2019	TARGET 2019	% CAPAIAN
-	-	-	25	18	40	222,22	60,00	-	-



Pada tahun 2019 target Indikator Kinerja Pembentuk jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali (kawasan) adalah 18 kawasan yang terdiri dari a) 7 kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim, b) 4 kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direstorasi, c) 7 lokasi Gerakan Cinta Laut, dengan realisasi tahun 2019 mencapai 40 Kawasan dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 3.46. RINCIAN INDIKATOR KINERJA PEMBENTUK JUMLAH KAWASAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL RUSAK YANG PULIH KEMBALI TAHUN 2017 - 2019

SASARAN STRATEGIS - 3		TERWUJUDNYA PENGELOLAAN SDKP YANG PARTISIPATIF, BERTANGGUNGJAWAB, DAN BERKELANJUTAN					
IKU-5		PERSENTASE PENGELOLAAN WILAYAH KP YANG BERKELANJUTAN					
INDIKATOR KINERJA PEMBENTUK		JUMLAH KAWASAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL YANG RUSAK DAN PULIH KEMBALI (KAWASAN)					
NO.	INDIKATOR KINERJA	2017		2018		2019	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
	Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali (kawasan)	23	25	20	25	18	40
1	Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (kawasan)	18	16	11	11	7	12
2	Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direstorasi (kawasan)	4	9	4	4	4	6
3	Jumlah lokasi Gerakan Cinta Laut (lokasi)	-	-	6	10	7	22

Pada tahun 2019, rincian Indikator Kinerja Pembentuk Jumlah Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang rusak dan pulih kembali (kawasan) adalah sebagai berikut :

TABEL 3.47. KAWASAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL RUSAK DANPULIH KEMBALI TAHUN 2019

NO	KEGIATAN	JUMLAH KAWASAN	JUMLAH KAWASAN
1.	Struktur Hybrid	3 (1.975 m)	1. Struktur Hybrid Lombok Timur (275 m) 2. Struktur Hybrid Bombana (1.100 m) 3. Struktur Hybrid Bone (600 m)
2.	Sekolah Pantai Indonesia	9	4. SMKN 2 Painan, Sumatera Barat 5. SMKN 1 Meranti, Riau 6. SMAN 2 Bengkalis, Riau 7. SMPN 1 Manggar, Bangka Belitung 8. SMAN 69 P. Pramuka, DKI Jakarta 9. SMP Satap Lontar, Banten 10. SMKN 7 Palu, Sulawesi Tengah 11. SUPM Bone, Sulawesi Selatan 12. Madrasah Aliyah Malaka, Lombok, Nusa Tenggara Barat



NO	KEGIATAN	JUMLAH KAWASAN	
3.	Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir / PRPEP	6	13. Serdang Bedagai 14. Berau 15. Sukabumi 16. Tanjung Jabung Barat 17. Pandeglang 18. Lampung Selatan
4.	Gerakan Bersih Pantai dan Laut / GBPL	12	19. GBPL Prigi 5 Februari 2019 20. GBPL Pandeglang 28 Februari 2019 21. GBPL Kepulauan Seribu, 24-25 April 2019 22. GBPL Merthasari, 10 Mei 2019 23. GBPL di Cilincing, 18 Agustus 2019 24. GBPL di Nizam Zachman, 18 Agustus 2019 25. GBPL di Ancol, 18 Agustus 2019 26. Beach & underwater clean-up di Kep. Seribu (26 Agustus 2019) 27. Sail Nias (12 September 2019) 28. GBPL di Pohnuwo, Gorontalo (24 September 2019) 29. GBPL Manado, 31 Oktober 2019 30. GBPL dalam rangka Hari Nusantara, Kota Pariaman, (13 Desember 2019)
5.	Jambore Pesisir	2	31. Jambore Pesisir Lampung Selatan 15 Maret 2019 32. Jambore Pesisir dalam rangka Bakti Kemah Pramuka di Bali, 10 – 11 Desember 2019
6.	Pelatihan / Sosialisasi Pengolahan Sampah Plastik	4	33. Pelatihan Pengolahan Sampah Plastik, Sukabumi 11 April 2019 34. Pelatihan Pengolahan Sampah Plastik di Sukabumi, 11 Juli 2019 35. Pelatihan Pengolahan Sampah Plastik di PPS Nizam Zachman 13 November 2019 36. Sosialisasi Pengelolaan Sampah Laut dari Alat Penangkapan Ikan, 26 Desember 2019
7.	Bantuan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah	4	37. Bantuan Mesin Diesel Alat Press Plastik di Kenjeran 38. Bantuan Alat Press di Pekalongan 39. Bantuan Alat Press di Nusa Penida, 40. Bantuan Bangunan Alat Pencacah Plastik di Sukabumi, Minggu ke-4 Desember 2019
JUMLAH		40	

Terdapat kendala atau permasalahan pada pembangunan struktur hybrid antara lain terjadinya gagal lelang pekerjaan pembangunan Hybrid di Indramayu dan adanya putus kontrak karena kemajuan pembangunan yang lambat dari pihak pelaksana/kontraktor di Kabupaten Pekalongan, Lombok Timur (namun demikian untuk pekerjaan di Lombok Timur telah diselesaikan sepanjang 275 m dari 425 m).





Disamping pembangunan struktur hybrid, kegiatan lain yang dilakukan adalah pelaksanaan Sekolah Pantai Indonesia (SPI). SPI merupakan program yang bertujuan untuk mengembangkan rasa memiliki dan kepedulian untuk menjaga kelestarian laut, menumbuhkan kecintaan pada budaya bahari sebagai jati diri bangsa maritim, dan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pengendalian sampah khususnya sampah plastik yang masuk ke laut dan mengenalkan upaya-upaya penanggulangan dan pengendalian sampah untuk nantinya dapat diadopsi oleh masyarakat. Kegiatan SPI ini meliputi: Sosialisasi, Amati, Analisa, Ajarkan, dan Aksi.

GAMBAR 3.20. STRUKTUR HYBRID DI KAB. BONE



GAMBAR 3.21. PRPEP KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



Pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP) merupakan lokasi yang diarahkan sebagai pusat pemulihan dan restorasi ekosistem pesisir sekaligus dikembangkan menjadi sarana edukasi, penelitian dan laboratorium alam yang sudah dirintis oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2015 yang awalnya dikenal dengan nama Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove (PRPM). Perubahan numenklatur ini dilakukan untuk melakukan upaya restorasi terhadap ekosistem pesisir lainnya tidak hanya terfokus pada ekosistem mangrove, namun juga dilakukan ekosistem terumbu karang dan ekosistem lamun. Tujuan Pengembangan PRPEP adalah:

- a. Mempertahankan keberadaan ekosistem pesisir dari kerusakan.
- b. Memulihkan kembali atau merestorasi ekosistem pesisir yang rusak.
- c. Pembelajaran bagi masyarakat dalam mengenal fungsi dan manfaat ekosistem pesisir serta upaya restorasinya
- d. Pusat laboratorium alam untuk penelitian dan pendidikan
- e. Meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar melalui ekowisata
- f. Meningkatkan produksi perikanan baik melalui wanamina di dalam PRPEP maupun perikanan tangkap disekitarnya.
- g. Menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

Pada Tahun 2019 ini PRPEP mempunyai target 4 lokasi yaitu Kab. Serdang Bedagai, Kab. Berau, Kab. Sukabumi, dan Kab. Tanjung Jabung Barat. Dengan adanya program bantuan korban tsunami Selat Sunda maka lokasi PRPEP ditambah 2 lokasi yaitu pada Kab. Pandeglang dan Kab. Lampung Selatan. Sehingga total kegiatan PRPEP pada TA 2019 menjadi 6 lokasi, yaitu 1). Serdang Bedagai, (2). Berau, (3). Sukabumi, (4). Tanjung Jabung Barat, (5). Pandeglang, dan (6). Lampung Selatan.

Gerakan Cinta Laut

Gerakan Cinta Laut (Gita Laut) merupakan suatu gerakan yang bertujuan untuk mengembangkan rasa memiliki dan kepedulian untuk menjaga kelestarian laut, menumbuhkan kecintaan pada budaya bahari sebagai jati diri bangsa maritim, dan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pengendalian sampah khususnya sampah plastik yang masuk ke laut dan mengenalkan upaya-upaya penanggulangan dan pengendalian sampah untuk nantinya dapat diadopsi oleh masyarakat. Gerakan Cinta Laut ini mencakup Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL), Jambore Pesisir, Pelatihan/ Sosialisasi Pengolahan Sampah Plastik, dan Bantuan Sarana Prasarana Pengolah Sampah. Sampai dengan akhir tahun 2019, telah dilaksanakan kegiatan di 22 lokasi. Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL) juga merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut yang mengamanatkan dilaksanakan pada 24 lokasi dari 2018 – 2025. Faktor penunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan GITA LAUT ini antara lain:



- a. Adanya kerjasama yang baik dengan Pemerintah Daerah setempat, NGO, komunitas penggiat lingkungan, dan swasta.
- b. Adanya komitmen Pemerintah Indonesia dalam penanganan sampah laut sehingga seluruh *stakeholder* pemerintah pusat mendukung pelaksanaan Gerakan Cinta Laut.
- c. Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut 2018 – 2025 yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan Gerakan Cinta Laut
- d. Komitmen bersama lintas K/L dan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya untuk menjaga sumberdaya laut dan pesisir Indonesia dari kerusakan akibat pencemaran lingkungan.

GAMBAR 3.22. PRPEP DI KABUPATEN SUKABUMI



GAMBAR 3.23. PRPEP DI KABUPATEN BERAU



GAMBAR 3.24. PRPEP KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



GAMBAR 3.25. PRPEP DI KAB. PANDEGLANG



GAMBAR 3.26. PRPEP DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



4. Jumlah WPP yang terpetakan potensi sumber daya KP untuk pengembangan ekonomi kelautan yang berkelanjutan

Jumlah wilayah pengelolaan perikanan (WPP) yang terpetakan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan secara terintegrasi untuk pengembangan ekonomi kelautan yang berkelanjutan telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan target 3 WPP dan 1 KPP-PUD dengan capaian sebesar 3 WPP dan 1 KPP PUD. Hal ini diperoleh dari data Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang terpetakan secara terintegrasi pada tahun 2019 meliputi WPP 715,717, 572 dan KPP-PUD 431.

TABEL 3.48. JUMLAH WPP YANG TERPETAKAN POTENSI SUMBER DAYA KP UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI KELAUTAN YANG BERKELANJUTAN

SASARAN STRATEGIS - 3				TERWUJUDNYA PENGELOLAAN SDKP YANG PARTISIPATIF, BERTANGGUNGJAWAB, DAN BERKELANJUTAN					
IKU-5				PERSENTASE PENGELOLAAN WILAYAH KP YANG BERKELANJUTAN					
INDIKATOR KINERJA PEMBENTUK				JUMLAH WPP YANG TERPETAKAN POTENSI SUMBER DAYA KP UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI KELAUTAN YANG BERKELANJUTAN					
REALISASI				TAHUN 2019				RENSTRA KKP 2015-2019	
2015	2016	2017	2018	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% KENAIKAN 2018-2019	TARGET 2019	% CAPAIAN
3	4	3	3	4	4	100,00	33,33	3	133,33

Jumlah wilayah pengelolaan perikanan (WPP) yang terpetakan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan secara terintegrasi untuk pengembangan ekonomi kelautan yang berkelanjutan telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan target 4 WPP dengan capaian sebesar 3 WPP dan 1 KPP PUD atau telah mencapai 100%. Hal ini diperoleh dari data Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang terpetakan potensi sumber daya kelautan dan perikanan pada WPP 715 (perairan Laut Aru, Laut Arafura dan Laut Timur), WPP 717 (perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik), 572 (Samudera Hindia sebelah barat Sumatera dan Selat Sunda) dan KPP-PUD 431 (Jawa Timur).

Pada tahun 2019, jumlah WPP yang terpetakan potensi sumber daya kelautan dan perikanan untuk pengembangan ekonomi kelautan yang berkelanjutan mengalami peningkatan yaitu dari 3 WPP di tahun 2018 menjadi 4 di tahun 2019 yang terdiri dari 3 WPP (WPP 715, 717, dan 572) dan 1 KPP PUD (KPP-PUD 431).

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian untuk indikator ini meningkat dengan capaian sebanyak 4 WPP/KPP sesuai dengan Perjanjian Kinerja hanya terdapat perubahan lokasi pada tahun 2018 (711,712,573) dan penambahan pada KPP-PUD 1 wilayah. Kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai indikator tersebut mencakup dukungan hasil riset pada masing-masing WPP dan KPP PUD yang mencakup WPP 715 (perairan Laut Aru, Laut Arafura dan Laut Timur), WPP 717 (perairan

Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik), WPP 572 (Samudera Hindia sebelah barat Sumatera dan Selat Sunda) dan KPP-PUD 431 (Jawa Timur).



Kegiatan Riset di lokasi WPP dan KPP PUD tersebut telah menghasilkan pemetaan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan; *harvest strategy* bagi sumberdaya ikan; kajian pengelolaan dan dinamika sumber daya ikan; karakteristik biologi perikanan, habitat sumber daya dan potensi produksi sumber daya ikan; dan didukung hasil riset tahun-tahun sebelumnya.

Indikator kinerja ini dapat tercapai disebabkan oleh kolaborasi antar bidang riset mulai dari riset perikanan, kelautan, sosial ekonomi dan bioteknologi serta pemetaan sumberdaya perikanan untuk pengembangan ekonomi perikanan dengan riset kajian status perikanan tangkap di WPP dan KPP PUD dengan berdasarkan kajian stok dan potensi produksi sumber daya ikan; dan didukung hasil riset tahun-tahun sebelumnya.

5. Luas kawasan konservasi

Indikator Kinerja Utama Jumlah Luas Kawasan Konservasi merupakan luas kawasan konservasi yang dikelola dan dimanfaatkan selama tahun 2019. Penghitungan target dilakukan dengan menjumlahkan total luas kawasan konservasi tahun sebelumnya dan luas kawasan konservasi baru yang dicadangkan/ditetapkan tahun 2019. Realisasi luas kawasan konservasi sampai pada Tahun 2019 yaitu seluas 23.146.374,81 ha atau sebesar 107,67% dari target 21,50 juta ha. Capaian jumlah luas kawasan konservasi disajikan pada Tabel 54.

TABEL 3.49. LUAS KAWASAN KONSERVASI (JUTA HEKTAR)

SASARAN STRATEGIS - 3				TERWUJUDNYA PENGELOLAAN SDKP YANG PARTISIPATIF, BERTANGGUNGJAWAB, DAN BERKELANJUTAN					
IKU-5				PERSENTASE PENGELOLAAN WILAYAH KP YANG BERKELANJUTAN					
INDIKATOR KINERJA PEMBENTUK				LUAS KAWASAN KONSERVASI (JUTA HEKTAR)					
REALISASI				TAHUN 2019				RENSTRA KKP 2015-2019	
2015	2016	2017	2018	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% KENAIKAN 2018-2019	TARGET 2019	% CAPAIAN
17,30	17,98	19,15	20,88	21,5	23,14	107,67	10,82	20	115,70

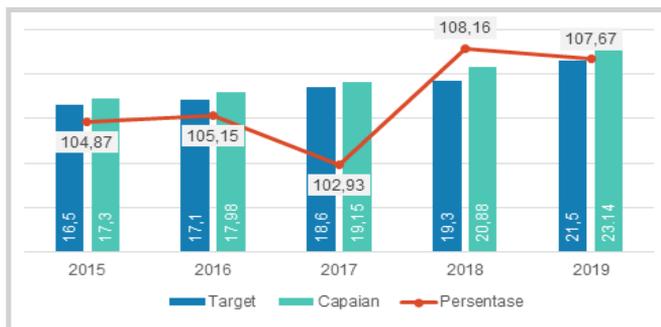
Luas kawasan 23,14 juta ha tersebut terdiri dari 196 kawasan konservasi kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau yang disebut Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) sejumlah 10 kawasan dengan luasan 5,34 juta ha, kawasan konservasi kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sejumlah 30 kawasan dengan luasan 4,63 juta ha, dan kawasan konservasi kewenangan pemerintah provinsi atau yang disebut Kawasan Konservasi Perairan Daerah sejumlah 156 kawasan dengan luasan 13,17 juta ha. Rincian luas kawasan konservasi disajikan pada tabel berikut :



TABEL 3.50. LUAS KAWASAN KONSERVASI TAHUN 2019

NO	KAWASAN KONSERVASI	JUMLAH	LUAS (HA)
A	Dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan	10	5.342.023,02
1	Taman Nasional Perairan	1	3.355.352,82
2	Suaka Alam Perairan	3	445.630,00
3	Taman Wisata Perairan	6	1.541.040,20
B	Dikelola Pemerintah Provinsi	155	13.172.342,49
4	Kawasan Konservasi Perairan Daerah	156	13.172.342,49
C	Dikelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	30	4.632.009,30
5	Taman Nasional Laut	7	4.043.541,30
6	Taman Wisata Alam Laut	14	491.248,00
7	Suaka Margasatwa Laut	4	5.400,00
8	Cagar Alam Laut	5	91.820,00
JUMLAH TOTAL		196	23.146.374,81

Realisasi tahun 2019 terhadap realisasi Tahun 2018: tahun 2019 berarti telah menambah kawasan konservasi seluas 2.315.254,37 hektar dari luas kawasan konservasi tahun 2018 yaitu 20.875.134,08 hektar, dan jika disandingkan dengan penambahan luasan pada tahun 2018 sebesar 1.730.439,8 capaian luasan jauh lebih besar. Secara rinci, luas kawasan konservasi tahun 2015-2019 disajikan pada Gambar berikut :

GAMBAR 3.27. CAPAIAN LUAS KAWASAN KONSERVASI TAHUN 2015 - 2019


Target renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan KP adalah 20 juta hektar, dengan adanya realisasi tahun 2019 adalah 23,14 juta hektar, maka persen capaiannya adalah 115,75%. Tercapainya luasan ini merupakan keberhasilan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam penyampaian program kawasan konservasi sebagai prioritas nasional maupun global kepada Pemerintah Daerah sehingga Pemerintah Daerah mengalokasikan



ruang lautnya sebagai kawasan konservasi, kuatnya koordinasi dan kolaborasi antara Pusat dan Daerah, pemerintah provinsi, kementerian/lembaga terkait, dan mitra di masing-masing wilayah kerjanya, Keterlibatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dan mitra di masing-masing wilayah kerjanya terbukti sangat meningkatkan keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini. Selain itu Kementerian Kelautan dan Perikanan juga terus-menerus melakukan kerja sama dengan instansi terkait dan mitra potensial sehingga pengelolaan kawasan konservasi dapat didanai dari berbagai sumber pendanaan.

Tantangan dalam pencapaian luas kawasan konservasi adalah pengelolaan kawasan konservasi secara terintegrasi, dimana sebelum ditetapkan dan dikelola, sebuah kawasan konservasi harus disusun zonasi dan rencana pengelolannya. Oleh karena itu, pendampingan pemerintah provinsi dalam penyusunan zonasi dan rencana pengelolaan terus dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan serta mitra terkait. Setelah zonasi dan rencana pengelolaan disusun, pemerintah provinsi dapat segera mengusulkan penetapannya ke Menteri Kelautan dan Perikanan. Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja ini selama tahun 2019 antara lain:

- a. Penyusunan atau review Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) 63 Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) sebagai dokumen kelengkapan pengusulan penetapan kawasan konservasi perairan.

TABEL 3.51. DAFTAR RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI (RPZ) KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DAERAH (KKPD) YANG DISUSUN/DIREVIEW TAHUN 2019

NO.	PROVINSI	JUMLAH	KAWASAN KONSERVASI	UPT + MITRA
1	Aceh	5	KKPD Aceh Barat Daya, KKPD Aceh Besar, KKPD Aceh Jaya, KKPD Aceh Selatan, KKPD Simeulue	BPSPL Padang, WCS Indonesia, WWF
2	Sumut	3	KKPD Sitardas-Tapanuli Tengah, KKPD Sorkam Barat-Tapanuli Tengah, KKPD Sifitu Ewali-Nias Selatan	BPSPL Padang
3	Sumatera Barat	4	KKPD Pesisir Selatan, KKPD Kota Padang, KKPD Padang Pariaman, KKPD Kota Pariaman	BPSPL Padang
4	Riau	2	KKPD Suaka Perikanan Terubuk, KKPD Aruah Rokan Hilir	BPSPL Padang
5	Kepri	4	KKPD Bintan, KKPD Batam, KKPD Lingga, KKPD Natuna	BPSPL Padang
6	Kep. Babel	1	KKPD Belitung	LPSPL Serang
7	Jawa Barat	2	KKPD Pangandaran, KKPD Biawak	LPSPL Serang, Pusriskel



8	Jawa Tengah	3	KKPD Karang Jeruk-Tegal, KKPD Pulau Panjang-Jepara, KKPD Pulau Gede-Rembang	LPSPL Serang
9	Jawa Timur	7	KKPD Pulau Pitu Timur, Sidoarjo, KKPD Pulau Gili Ketapang, Probolinggo, KKPD Pasuruan, KKPD Situbondo, KKPD Tulungagung, KKPD Pulau Sepanjang, Sumenep, KKPD Banyuwangi	BPSPL Denpasar
10	NTB	6	KKPD Pulau Liang dan Ngali, KKPD Teluk Cempi, KKPD Gili Banta, KKPD Pulau Lipan dan Rakit, KKPD Penyulun Linyuk Tatar Sepang, KKPD Gili Balu	BPSPL Denpasar, WCS
11	NTT	3	KKPD Flores Timur, KKPD Sikka, KKPD Lembata	BPSPL Denpasar, WWF
12	Kalimantan Barat	4	KKPD Paloh-Sambas, KKPD Randayan-Bengkayang, KKPD Kubu Raya, KKPD Kendawangan-Ketapang	BPSPL Pontianak, WWF
13	Kalimantan Selatan	1	KKPD Kotabaru-Tanah Bumbu	BPSPL Pontianak
14	Sulawesi Utara	3	KKPD Tatoareng, KKPD Kepulauan Sitaro, KKPD Minahasa Utara	BPSPL Makassar, WCS
15	Sulawesi Tengah	4	KKPD Doboto, KKPD Banggai Dalaka, KKPD Teluk Tomini, KKPD Morowali	BPSPL Makassar
16	Sulawesi Tenggara	2	KKPD Provinsi Sultra, KKPD Pulau Wawonii	BPSPL Makassar, RARE
17	Maluku	2	KKPD Kepulauan Lease-Maluku Tengah, KKPD Pulau Ay dan Pulau Rhun	LPSPL Sorong, CTC
18	Maluku Utara	6	KKPD Guraici Halmahera Selatan, KKPD Pulau Mare Kota Tidore Kep, KKPD Pulau Widi Halmahera Selatan, KKPD Pulau Rao, Pulau Morotai, KKPD Kepulauan Sula, KKPD Pulau Makian Halmahera Selatan	LPSPL Sorong, WCS, CTC
19	Papua Barat	1	KKPD Fam	LPSPL Sorong, CI
TOTAL		63		

- b. Pengusulan penetapan 27 KKPD antara lain: 1) KKPD Senggora, 2) KKPD Kaimana, 3) KKPD Teluk Kiluan, 4) KKPD Fakfak, 5) KKPD Banggai Dalaka, 6) KKPD Teluk Tomini, 7) KKPD Morowali, 8) KKPD Doboto, 9) KKPD Gili Banta, 10) KKPD Pulau Liang-

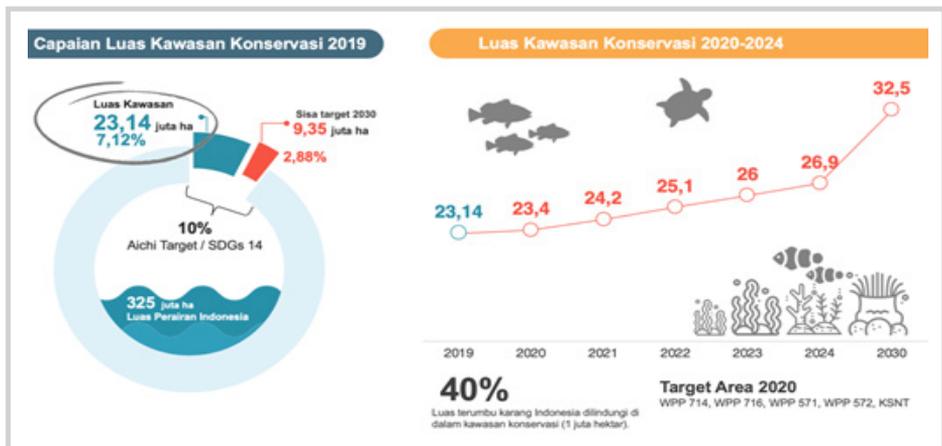


- Ngali, 11) KKPD Teluk Cempi, 12) KKPD Tatoareng, 13) KKPD Banyuwangi, 14) KKPD Situbondo, 15) KKPD Probolinggo, 16) KKPD Pasuruan, 17) KKPD Sidoarjo, 18) KKPD Sumenep, 19) KKPD Tulungagung, 20) KKM Teluk Bena, dan 21) KKPD Provinsi Kalsel, 22) KKPD Kramat, Bedil, dan Temudong, 23) KKPD Penyu Tatar Sepang-Lunyuk, 24) KKPD Pulau Lipan, 25) KKPD Koon, 26) KKPD Tapanuli Tengah, dan 27) KKPD Nias Selatan. Dari 27 kawasan yang telah diusulkan, 9 kawasan konservasi telah ditetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan, yaitu KKPD Senggora, KKPD Kaimana, KKM Teluk Bena, dan KKPD Teluk Kiluan, KKPD Banggai Dalaka, KKPD Parigi Muotong, KKPD Morowali, KKPD Doboto, dan KKPD Tatoareng.
- c. Dari 156 KKPD, 24 KKPD telah ditetapkan Menteri KP dan 132 KKPD masih berstatus dicadangkan oleh Gubernur/Bupati. Pencadangan tersebut ditindaklanjuti dengan pembuatan zonasi kawasan. Dokumen rencana pengelolaan dan zonasi (RPZ) yang telah disusun sampai dengan tahun 2019 sebanyak 72 kawasan, dimana 34 dokumen telah disahkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Setelah dokumen RPZ disusun, pemerintah provinsi mengusulkan penetapan kawasan konservasi oleh Gubernur kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pada tahun 2019, luas kawasan konservasi mengalami kenaikan sebesar 10,82% yaitu seluas 20,88 juta ha pada tahun 2018 menjadi 23,14 juta ha di tahun 2019.

Apabila dibandingkan dengan target *Aichi* yaitu sebesar 32,5 juta ha atau 10% dari luas perairan Indonesia, capaian tahun 2019 masih mencapai 71,20% (23,14 juta ha) atau masih diperlukan luasan konservasi sebesar 9,35 juta ha untuk mencapai target *Aichi* sampai tahun 2030.

GAMBAR 37. PETA CAPAIAN LUASAN KAWASAN KONSERVASI TAHUN 2019



6. Penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya di wilayah RI.

Upaya pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK (Hama, dan Penyakit Ikan Karantina) di Indonesia didasarkan pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Kepmen KP Nomor 91/2019 dan Kepmen KP Nomor 58/2016. Berdasarkan Keputusan Menteri tersebut,



terdapat 23 jenis penyakit Ikan Karantina dari kategori virus, 5 jenis dari golongan bakteri, 6 jenis golongan parasit dan 3 jenis golongan jamur yang dicegah pemasukannya ke dalam wilayah RI dan dari HPIK terdapat 13 jenis Penyakit Ikan Karantina yang tersebar di 141 lokasi kabupaten/kota di 34 Provinsi seluruh Indonesia. Indikator penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya ke wilayah RI diukur dengan membandingkan jumlah lokasi sebaran HPIK yang baru dan jumlah total lokasi sebaran HPIK berdasarkan Kepmen KP No.58/2016 dan Kepmen KP Nomor 91/2019.

Berdasarkan hasil kegiatan dan pemantauan sebaran HPIK yang dilakukan oleh UPT KIPM di seluruh Indonesia semester 1 dan semester 2 di 134 lokasi Kabupaten/Kota dari target 124 lokasi Kabupaten/Kota tidak ditemukan penyebaran penyakit ikan eksotik dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia, sehingga realisasi penyakit ikan yang dicegah penyebarannya tahun 2019 adalah sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap komoditas perikanan yang dilalulintaskan telah dilakukan pemeriksaan/uji laboratorium terhadap ancaman HPIK sesuai dengan arah yang dituju.

Realisasi pencapaian indikator ini dari sejak tahun 2015 hingga 2019 selalu mencapai target yang ditetapkan. Bahkan pada beberapa tahun capaiannya mencapai 100% atau dengan kata lain tidak ditemukan penyebaran penyakit ikan eksotik dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia maupun penyebaran penyakit ikan karantina baru dari zona positif (tidak bebas) ke zona negatif (bebas). Pencapaian ini diperoleh berdasarkan hasil kegiatan dan pemantauan sebaran HPIK yang dilakukan oleh UPT Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di seluruh Indonesia. Ini menunjukkan bahwa setiap komoditas perikanan yang dilalulintaskan telah dilakukan pemeriksaan/uji laboratorium terhadap ancaman HPIK sesuai dengan daerah yang dituju. Khusus untuk tahun 2016 yang pencapaiannya tidak 100%, hanya 83,33% karena dari laporan kegiatan impor di 18 UPT Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, di mana terdapat penyebaran 4 jenis penyakit ikan eksotik yang tidak dilakukan pencegahan pemasukannya, yaitu: IPNV, VHSV, IHNV, dan *Infection with Ostreid Herpesvirus-1* pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (KIPM) Jakarta II serta VHSV pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (KIPM) Semarang. Permasalahan tidak dilakukannya pencegahan terhadap 4 jenis penyakit tersebut adalah karena belum tersedianya bahan uji laboratorium untuk penyakit pada kedua lokasi UPT tersebut. Hal itu telah ditindaklanjuti dengan mengalokasikan bahan uji pada UPT tersebut pada Tahun Anggaran 2017 sehingga tahun berikutnya capaian indikator ini berhasil mencapai 100%. Pencapaian ini didukung oleh kinerja pengawasan dan pengendalian HPIK melalui kegiatan operasional karantina ikan, yang didukung oleh kinerja laboratorium UPT Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (KIPM) yang telah terakreditasi ISO17025 (standar persyaratan kompetensi untuk laboratorium).



TABEL 3.52. CAPAIAN PERSENTASE PENYAKIT IKAN KARANTINA YANG DICEGAH PENYEBARANNYA DI WILAYAH RI

SASARAN STRATEGIS - 3				TERWUJUDNYA PENGELOLAAN SDKP YANG PARTISIPATIF, BERTANGGUNGJAWAB, DAN BERKELANJUTAN					
IKU-5				PERSENTASE PENGELOLAAN WILAYAH KP YANG BERKELANJUTAN (%)					
INDIKATOR KINERJA PEMBENTUK (IKP)				PENYAKIT IKAN KARANTINA YANG DICEGAH PENYEBARANNYA DI WILAYAH RI					
REALISASI				TAHUN 2019				RENSTRA KKP 2015-2019	
2015	2016	2017	2018	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% KENAIKAN 2018-2019	TARGET 2019	% CAPAIAN THD TARGET 2019
100	83,33	100	100	100	100	100	-	100	100

Pada tahun 2019, persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya di wilayah RI tercapai 100%. Pencapaian ini didukung oleh kinerja pengawasan dan pengendalian Hama, dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) melalui kegiatan operasional karantina ikan, yang didukung oleh kinerja laboratorium Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan yang telah terakreditasi ISO17025”.

GAMBAR 3.28. PETA SEBARAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Upaya dalam meningkatkan capaian Penyakit Ikan Karantina yang dicegah penyebarannya di wilayah RI antara lain dengan mengikuti perkembangan penyakit ikan, inang rentan dan sebaran didunia (*list aquatic animal disease*) yang sifatnya sangat dinamis sehingga perlu diwaspadai dalam rangka mengantisipasi masuk dan tersebarnya penyakit ikan



melalui kegiatan lalu lintas media pembawa antar negara dan antar area didalam wilayah RI. Selain itu, KKP juga meningkatkan kompetensi pegawai lingkup Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang tersebar di 47 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di 34 provinsi dan 122 kab/kota melalui peningkatan kompetensi yang mencakup kegiatan pelatihan/workshop/seminar.

IKU
6

Persentase Peningkatan Ekonomi KP

Nilai peningkatan ekonomi kelautan dan perikanan diformulasikan dari tiga parameter yaitu penambahan jumlah nominal investasi di sektor kelautan dan perikanan, jumlah kredit yang disalurkan serta tingkat kesesuaian bantuan pemerintah yang diberikan kepada kelompok penerima bantuan.

TABEL 3.53. PERSENTASE PENINGKATAN EKONOMI KP

SASARAN STRATEGIS - 3				TERWUJUDNYA PENGELOLAAN SDKP YANG PARTISIPATIF, BERTANGGUNGJAWAB, DAN BERKELANJUTAN					
IKU-6				PERSENTASE PENINGKATAN EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN					
REALISASI				TAHUN 2019				RENSTRA KKP 2015-2019	
2015	2016	2017	2018	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% KENAIKAN 2018-2019	TARGET 2019	% CAPAIAN 2018 THD TARGET 2019
72,00	54,31	60,00	61,71	71,50	68,22	95,41	13,70	96,00	71,06

Capain IKU Nilai Peningkatan Ekonomi Kelautan dan Perikanan selama tahun 2015 s.d 2019 mengalami fluktuatif, yaitu tahun 2015 realisasinya 72, tahun 2016 sebesar 54,31, tahun 2017 sebesar 60,00, tahun 2018 mencapai 61,71 dan tahun 2019 mencapai 68,22 atau mencapai 95,41%. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra KKP 2015-2019 yaitu sebesar 96 realisasi indikator kinerja utama Persentase Peningkatan Ekonomi KP telah mencapai 71,06%. IKU-6 Persentase Peningkatan Ekonomi KP, mempunyai tiga indikator pembentuk yaitu nilai investasi hasil KP, nilai pembiayaan usaha kelautan dan perikanan dan nilai kesesuaian bantuan pemerintah dengan capaian masing-masing indikator kinerja pembentuk dari IKU.6 Persentase Peningkatan Ekonomi KP dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Pembentuk 1. Nilai Investasi Hasil Kelautan dan Perikanan

Secara garis besar nilai investasi hasil kelautan dan perikanan dapat berasal dari investasi pemerintah dan investasi masyarakat. Investasi pemerintah merupakan kontribusi pemerintah terhadap pembangunan perikanan yang dialokasikan melalui anggaran negara baik pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sedangkan investasi masyarakat dapat berasal dari PMA, PMDN, dan UMKM. Realisasi investasi hasil KP dihitung melalui penjumlahan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang bersumber dari data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta Kredit Investasi yang bersumber dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



Investasi yang berasal dari PMA merupakan kontribusi perusahaan swasta asing (menggunkan modal asing dan/atau tenaga kerja asing) terhadap pembangunan perikanan, sedangkan PMDN merupakan kontribusi perusahaan swasta dalam negeri (menggunkan fasilitas penanaman modal dalam negeri dan/atau tenaga kerja lokal) terhadap pembangunan perikanan. Sedangkan investasi dari kredit investasi merupakan kredit jangka menengah/panjang yang berasal dari perbankan dan non perbankan untuk pembelian barang-barang modal dan jasa yang diperlukan antara lain guna rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, dan relokasi proyek dan atau pendirian usaha baru, misalnya untuk pembelian mesin-mesin, bangunan dan tanah untuk pabrik. Realisasi dari kredit investasi mengakomodir investasi masyarakat yang berasal dari UMKM. Investasi masyarakat yang berasal dari UMKM merupakan kontribusi swasta dan masyarakat pengolah hasil kelautan dan perikanan (menggunkan modal sendiri dan/atau tenaga kerja sendiri).

TABEL 3.54. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PEMBENTUK PERSENTASE PENINGKATAN EKONOMI KP

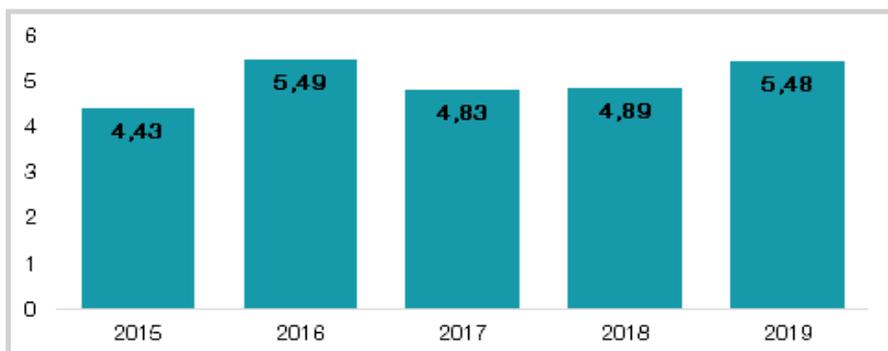
SASARAN STRATEGIS - 3				TERWUJUDNYA PENGELOLAAN SDKP YANG PARTISIPATIF, BERTANGGUNGJAWAB, DAN BERKELANJUTAN						
IKU-6				PERSENTASE PENINGKATAN EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN						
INDIKATOR KINERJA PEMBENTUK (IKP)				NILAI INVESTASI HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN (Rp. Triliun)						
REALISASI				TAHUN 2019				RENSTRA KKP 2015-2019		
2015	2016	2017	2018	TARGET	REALISASI*	% CAPAIAN	% KENAIKAN 2018-2019	TARGET 2019	% CAPAIAN 2018 THD TARGET 2019	
4,43	5,49	4,83	4,89	5,63	5,48	97,34	12,07	6,69	81,91	

*angka prognosa

Sumber : OJK & BKPM (Diolah)

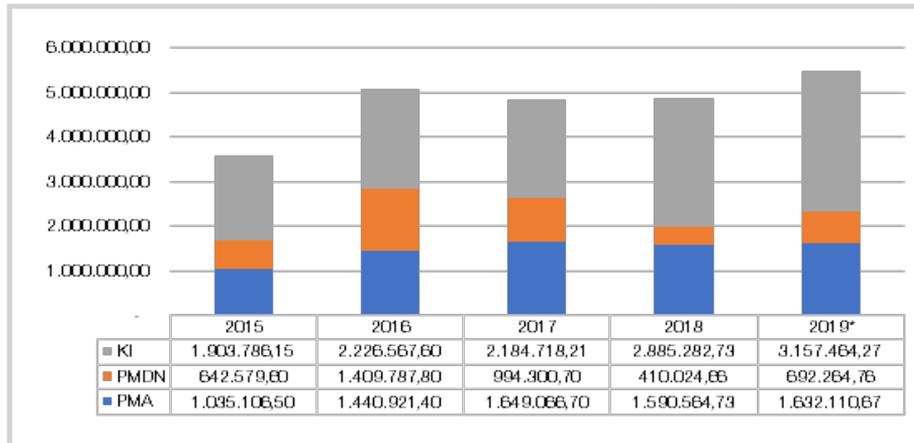
Nilai investasi hasil kelautan dan perikanan Tahun 2019 mencapai Rp 5,48 triliun atau mencapai 97,34% terhadap target tahun 2019 yakni Rp 5,63 triliun. Terjadi peningkatan realisasi nilai investasi sebesar Rp 0,59 triliun atau tumbuh positif sebesar 12,07% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar Rp 4,89 triliun.

GAMBAR 3.29. GRAFIK CAPAIAN NILAI INVESTASI TAHUN 2015 S.D TAHUN 2019



Berdasarkan data BKPM total realisasi investasi nasional (PMA dan PMDN) tahun 2019 sebesar Rp 2,32 triliun atau meningkat 16,18% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp 2,00 triliun. Total realisasi investasi PMA tahun 2019 sebesar Rp 1,63 triliun mengalami peningkatan sebesar 2,61% dibandingkan realisasi investasi PMA tahun 2018 sebesar Rp 1,59 triliun. Total realisasi investasi PMDN tahun 2019 mencapai Rp 692 miliar menunjukkan peningkatan sebesar 68,83% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp 410 miliar.

GAMBAR 3.30. CAPAIAN NILAI INVESTASI HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BERDASARKAN SUMBER PERMODALAN TAHUN 2019 (RP JUTA)



*Angka Prognosa

Sumber : OJK & BKPM (Diolah)

Kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2019 antara lain:

- 1) Penyelenggaraan *Marine and Fisheries Business and Investment Forum* (MFBIF) sebagai forum bisnis dan promosi investasi sektor kelautan dan perikanan
- 2) Penyusunan informasi potensi usaha dan peluang investasi kelautan dan perikanan
- 3) Kerjasama promosi usaha dan investasi dengan K/L terkait (BKPM, Kemlu, dan KBRI/ KJRI)
- 4) Fasilitasi pelayanan usaha dan investasi
- 5) Fasilitasi penyelesaian hambatan investasi

Target investasi tahun 2019 hanya tercapai 97,34%. Kecenderungan perlambatan pertumbuhan realisasi investasi dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kecenderungan perlambatan pertumbuhan realisasi investasi di bidang usaha pengolahan yang bersumber dari PMDN.



2. Transisi perizinan ke sistem OSS (*Online Single Submission*) sedikit banyak mempengaruhi tren perlambatan realisasi investasi.
3. Disamping itu, sejak tahun 2018 sd Triwulan III 2019 telah masuk dalam eskalasi tahun politik. Para investor cenderung bersikap *wait and see* dan menunda realisasi investasi yang telah direncanakan.
4. Karakteristik investasi dari tahap rencana investasi sampai dengan realisasi investasi (tahap komersial) biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama, artinya apabila suatu perusahaan mengajukan rencana investasi di tahun 2019 tidak serta merta perusahaan tersebut akan melakukan realisasi investasi di tahun yang sama, bahkan kecenderungannya akan melakukan realisasi investasi paling cepat di tahun berikutnya.
5. Disamping itu, sistem usaha perikanan memiliki hubungan yang sangat erat antara usaha di hulu dan hilir. Usaha di hulu (penangkapan dan budidaya) sangat menentukan keberadaan usaha di hilir dan pemasaran. Hal ini terjadi karena industri pengolahan ikan memiliki ketergantungan akan ketersediaan bahan baku. Tentunya hal ini juga mempengaruhi keseimbangan investasi di hulu dan hilir. Kondisi ini diduga mempengaruhi pergeseran investasi antar bidang usaha KP. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan guna mengatasi kendala-kendala tersebut adalah:
 1. Penyelenggaraan promosi usaha dan investasi sebagai media untuk memperkenalkan potensi usaha dan peluang investasi kelautan dan perikanan di Indonesia
 2. Pendampingan dan pemantauan realisasi investasi
 3. Fasilitasi pelayanan usaha dan investasi

Indikator Kinerja Pembentuk 2. Nilai Pembiayaan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan dari Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank

Indikator kinerja ini menunjukkan jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga perbankan dan non perbankan kepada UMKM hasil kelautan dan perikanan (KP). Pembiayaan ini berupa permodalan dari Perbankan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit komersil, serta pembiayaan dari lembaga keuangan non perbankan seperti lembaga pembiayaan dan pegadaian.

Adapun metode penghitungan capaian indikator kinerja ini adalah dengan menghitung pertumbuhan *outstanding* pembiayaan usaha hasil KP, baik yang bersumber dari perbankan dan non perbankan, dibandingkan dengan posisi *outstanding* per 2018 sebagai basis dasar perhitungan. Definisi *outstanding* adalah akumulasi pembiayaan yang disalurkan lembaga keuangan kepada usaha hasil KP pada akhir suatu periode. Untuk mendapatkan nilai realisasi pembiayaan usaha hasil KP tahun 2019, maka dihitung nilai selisih/pertumbuhan dari *outstanding* tahun 2019 dibandingkan dengan *outstanding* tahun 2018.

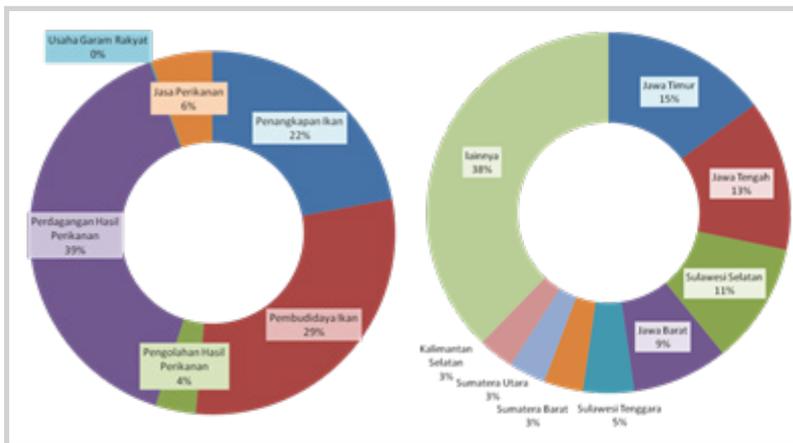


TABEL 3.55. NILAI PEMBIAYAAN USAHA HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN DARI LEMBAGA KEUANGAN BANK DAN BUKAN BANK TAHUN 2019

SASARAN STRATEGIS - 3		TERWUJUDNYA PENGELOLAAN SDKP YANG PARTISIPATIF, BERTANGGUNGJAWAB, DAN BERKELANJUTAN							
IKU-6		PERSENTASE PENINGKATAN EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN							
INDIKATOR KINERJA PEMBENTUK (IKP)	TARGET	CAPAIAN					PERSENTASE TERHADAP TARGET (%)	PERTUMBUHAN (%)	
	2019	2015	2016	2017	2018	2019		2015-2019	2018-2019
Nilai Pembiayaan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan dari Lembaga Keuangan Bank dan Bukan Bank	5,04	3,41	3,11	4,37	3,71	3,55	70,44	2,46	-4,31

Berdasarkan data OJK, Nilai Pembiayaan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan dari Lembaga Keuangan Bank dan Bukan Bank tahun 2019 adalah sebesar Rp.3,55 triliun. Nilai atau mencapai 70,51% terhadap target tahun 2019 (Rp.5,04 triliun). Jika dibandingkan capaian tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar 4,31%. Walaupun begitu selama 5 tahun terakhir trendnya selalu meningkat.

GAMBAR 3.31. PROPORSI NILAI PEMBIAYAAN USAHA HASIL KP DARI LEMBAGA KEUANGAN BANK DAN NON BANK BERDASARKAN PROVINSI DAN BIDANG USAHA TAHUN 2019



Kegiatan yang telah dilakukan guna meningkatkan capaian nilai pembiayaan usaha hasil kelautan dan perikanan antara lain :

1. *Marine and Fisheries Business and Investment Forum (MFBIF)* pada tanggal 29 Januari 2019 dengan peserta sebanyak 13 pelaku usaha Jepang, pelaku usaha KP Indonesia, serta asosiasi. Kegiatan ini bukan hanya untuk menumbuhkan minat investasi terhadap sektor KP tetapi juga agar pelaku jasa keuangan (bank dan non bank) dapat memberikan perlindungan/asuransi dan penyaluran pembiayaan kepada pelaku usaha sektor KP. Dari hasil pelaksanaan MFBIF teridentifikasi potensi nilai bisnis senilai USD 155.000.
2. *Marine and Fisheries Business and Investment Forum (MFBIF)* dengan tema “Menuju UMKM Kelautan dan Perikanan berdaya saing melalui Akses Digital” pada tanggal 12



September 2019 dengan menggandeng perusahaan *ecommerce* seperti Tokopedia, Bukalapak, Gojek Indonesia, Aruna, SiCepat, Go UKM dan Java Seafood. Peserta yang terlibat terdiri atas pelaku usaha mikro kecil kelautan dan perikanan wilayah Jabodetabek.

3. Koordinasi dengan Kemenko Perekonomian, OJK, Kementerian Keuangan, pelaku jasa keuangan tentang strategi untuk meningkatkan aksesibilitas pelaku UMKM terhadap layanan Jasa Keuangan serta monitoring dan evaluasi penyaluran pembiayaan sektor kelautan dan perikanan.
4. Fasilitasi permodalan usaha kelautan dan perikanan di daerah yang melibatkan lembaga keuangan dan Non Bank (LPMUKP, Jasindo, Forbiz Indonesia, PT.Pegadaian, Bank BRI, Baznas, e-Fishery, PT Angkasa Pura, Bank NTB Syariah, Bank Jateng, Fintech Ammana, Dompot Dhuafa, Permodalan Madani) di 13 lokasi, yaitu : Pandeglang, Sidoarjo, Tangerang, Kulonprogo, Kota Mataram, Tasikmalaya, Kota Banjarbaru, Cianjur, Bogor, Sukabumi, Pekalongan, Badung, Boyolali.
5. Penguatan daya saing usaha KP melalui pelatihan Digitalisasi Bisnis UMKM Kelautan dan Perikanan dengan melibatkan instruktur Go UKM dan peserta pelaku usaha di wilayah Jabodetabek.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

1. Melemahnya pertumbuhan kredit perbankan nasional yaitu sebesar 7,05% (per November, *year on year*), menurun dibandingkan tahun 2018 sebesar 11,9%. Lemahnya kredit ini juga diikuti peningkatan kredit macet (*Non Performing Loan*) sebesar 2,77%.
2. Peningkatan NPL serta adanya momen pemilu mendorong industri jasa keuangan untuk lebih berhati-hati dalam menyalurkan permodalan.
3. Industri Jasa Keuangan Perbankan dan Non Perbankan membutuhkan informasi terkait kebutuhan permodalan dan struktur biaya masing-masing bidang usaha, dan sebaran pelaku usaha KP yang ingin memanfaatkan Jasa Keuangan;
4. Minimnya informasi tentang program KUR yang diterima oleh pelaku usaha;
5. Pelaku usaha sektor KP masih memerlukan pendampingan dan peningkatan *soft skill* (manajemen usaha, keuangan, dan pemasaran) agar dapat menaikkan kelayakan usahanya;
6. Proses penyaluran kredit Bank dan Non Bank membutuhkan waktu yang lebih lama dengan persyaratan administrasi yang dinilai lebih sulit dibandingkan dengan kredit non resmi (bank keliling dan lainnya);
7. KUR khusus belum dapat direalisasikan secara maksimal karena adanya persyaratan kemitraan dengan *offtaker*/penampung produk;
8. KKP masih mengembangkan database UKM sektor KP melalui program KUSUKA (Kartu Usaha Kelautan dan Perikanan) yang diharapkan dapat diintegrasikan dengan SIKP Kemenkeu sehingga mempermudah industri jasa keuangan untuk menyalurkan KUR;
9. Belum optimalnya penyaluran pembiayaan dengan skema syariah ke UMK sektor KP.

Adapun rekomendasi untuk peningkatan akses permodalan ke depan, antara lain :



1. Peningkatan sosialisasi skema permodalan (konvensional dan syariah) melalui bank maupun non bank pada pelaku usaha perikanan.
2. Peningkatan pemahaman pelaku jasa keuangan tentang proses dan potensi bisnis sektor kelautan dan perikanan melalui forum diskusi.
3. Pembinaan manajemen usaha bagi pelaku usaha secara rutin.
4. Mendorong ketersediaan data debitur potensial usaha kelautan dan perikanan

Sektor kelautan dan perikanan selain mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan bank dan non bank sebagaimana dijelaskan diatas, Sejak November 2017 juga mendapatkan pembiayaan dari dana bergulir Badan Layanan Umum (BLU) yang disalurkan melalui Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP). Kinerja pengelolaan dana bergulir LPMUKP tahun 2019 cenderung positif.

GAMBAR 3.32. PERKEMBANGAN PERSETUJUAN PLAFON PINJAMAN/PEMBIAYAAN MENURUT JENIS USAHA SEKTOR KP TAHUN 2017-2019

No	Jenis Usaha KP	2017				2018				2019						
		Plafon (Rp) (Juta)	Persentase (%)	Jumlah Debitur Pemanfaat (Orang)	Persentase (%)	Rata-Rata Plafon (Rp/Orang)	Plafon (Rp) (Juta)	Persentase (%)	Jumlah Debitur Pemanfaat (Orang)	Persentase (%)	Rata-Rata Plafon (Rp/Orang)	Plafon (Rp) (Juta)	Persentase (%)	Jumlah Debitur Pemanfaat (Orang)	Persentase (%)	Rata-Rata Plafon (Rp/Orang)
1	Penangkapan ikan	11.771	35,80	1606	68,40	7.329.390	125.575,3	37,7	8.455	60,5	14.813.653	44.666,3	34,85	3.641	64,47	12.267.591
2	Pembudidaya ikan	7.310	22,23	254	10,82	28.779.528	159.645,4	47,9	3.588	25,8	44.149.712	65.973,96	51,48	1.394	24,68	47.327.088
3	Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	6.924	21,06	331	14,10	20.918.429	38.013	11,4	1.421	10,2	26.563.941	16.310	12,73	573	10,15	28.464.223
4	Usaha Garam Rakyat	3.500	10,64	85	3,62	41.176.471	8.220	2,5	409	2,9	20.097.800	800	0,62	23	0,41	34.782.609
5	Usaha Masyarakat Pesisir Lainnya (Kedai Pesisir, Wisata Bahari, dll)	3.375	10,26	72	3,07	46.875.000	1.995	0,6	64	0,5	26.959.459	400	0,31	17	0,30	23.529.412
Total		32.880	100,00	2.348	100,00	14.003.407	333.448,7	100,00	13.937	100,00	23.805.861	128.150,26	100	5.648	100	22.689.494



PENANGKAPAN IKAN
Plafon persetujuan : 182.352.600.000
Jumlah Pemanfaat : 13.702



PEMBUDIDAYA IKAN
Plafon persetujuan : 232.929.360.000
Jumlah Pemanfaat : 5.236



PENGOLAH DAN PEMASAR IKAN
Plafon persetujuan : 61.247.000.000
Jumlah Pemanfaat : 2.325



USAHA GARAM RAKYAT
Plafon persetujuan : 12.520.000.000
Jumlah Pemanfaat : 537



USAHA MASYARAKAT PESISIR LAINNYA
Plafon persetujuan : 5.770.000.000
Jumlah Pemanfaat : 133

GAMBAR 43. REKAPITULASI REALISASI PENCAIRAN PINJAMAN BERGULIR LPMUKP (S.D 31 DESEMBER 2019)

No	Tahun	Pencairan (Rp)	Debitur	Pemanfaat (Orang)	BANK MITRA BRI (Debitur)	Pencairan (Rp)	BANK MITRA BNI (Debitur)	Pencairan (Rp)
1	2017	11.125.000.000	7	417	7	11.125.000.000	-	-
2	2018	215.732.780.000	293	8.675	290	214.967.780.000	3	765.000.000
3	2019	182.530.860.000	400	3.937	368	170.963.860.000	32	11.567.000.000
TOTAL		409.388.640.000	700	13.029	665	397.056.640.000	35	12.332.000.000

Sampai dengan tahun 2019, jumlah persetujuan pinjaman melalui dana bergulir bidang kelautan dan perikanan sebesar Rp. 409,38 miliar dan tersalurkan kepada lima kategori sektor usaha bidang kelautan dan perikanan yaitu penangkapan ikan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan, usaha garam rakyat dan usaha masyarakat pesisir lainnya (kedai



pesisir, wisata bahari). Dana bergulir yang disalurkan melalui LPMUKP tersebut telah disalurkan di 34 provinsi yang mencakup 199 kab/kota. Lima Kab/kota dengan tingkat penyaluran terbesar yaitu di Lombok Tengah, Indramayu, Cilacap, Kota Tarakan dan Bima. Jumlah pemanfaat dana bergulir LPMUKP s.d tahun 2019 mencapai 13.029 orang.

TABEL 3.56. RINCIAN PENYALURAN DANA BERGULIR MELALUI LPMUKP S.D TAHUN 2019

NO	SEKTOR USAHA	JUMLAH DANA BERGULIR	JUMLAH PEMANFAAT	RERATA PLAFON /ORANG
1.	Penangkapan Ikan	144.750.440.000	6.982	20.731.945
2.	Pembudidaya Ikan	190.657.000.000	3.916	48.686.670
3.	Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	58.144.200.000	1.775	32.757.296
4.	Usaha Garam Rakyat	3.695.000.000	47	78.617.021
5.	Usaha Masyarakat Pesisir Lainnya (Kedai Pesisir)	12.142.000.000	317	38.302.839

Sumber: LPMUKP, KKP (Januari 2020)

Indikator Kinerja Pembentuk 3. Persentase Kesesuaian Bantuan Pemerintah

Nilai Kesesuaian Bantuan Pemerintah merupakan suatu ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi bantuan pemerintah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada masyarakat/pemda/BUMN/D berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Indikator kinerja ini diharapkan untuk menjawab pengendalian atas realisasi bantuan pemerintah dari KKP agar sesuai dengan target yang ditetapkan dan bermanfaat. Target IKU ini pada Tahun 2019 adalah sebesar 87,50% dan diukur secara tahunan.

Indikator kinerja kesesuaian bantuan pemerintah ini dilaksanakan pengukurannya sejak tahun 2017 untuk menggambarkan pencapaian kesesuaian bantuan KKP. Penilaian indikator ini dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan untuk mengukur implementasi dari penyaluran bantuan pemerintah lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

TABEL 3.57. CAPAIAN NILAI KESESUAIAN BANTUAN PEMERINTAH TAHUN 2019

SASARAN STRATEGIS - 3				TERWUJUDNYA PENGELOLAAN SDKP YANG PARTISIPATIF, BERTANGGUNGJAWAB, DAN BERKELANJUTAN					
IKU-6				PERSENTASE PENINGKATAN EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN					
INDIKATOR KINERJA PEMBENTUK (IKP)				NILAI KESESUAIAN BANTUAN PEMERINTAH					
REALISASI				TAHUN 2019				RENSTRA KKP 2015-2019	
2015	2016	2017	2018	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% KENAIKAN 2018-2019	TARGET 2019	% CAPAIAN 2018 THD TARGET 2019
-	-	90,18	92,15	87,50	91,91	105,04	-0,26	-	-



Penilaian pada tingkat penerima bantuan dilaksanakan menggunakan metode *purposive sampling* yang mempertimbangkan sebaran, keterwakilan jenis bantuan serta karakteristik penerima bantuan di delapan provinsi yaitu Sumatera Utara, Riau, Riau, Kep. Bangka Belitung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Penilaian dilakukan pada 13 jenis bantuan kepada kelompok sasaran penerima diantaranya bantuan kapal perikanan, alat tangkap, bantuan premi asuransi, *Ice Flake Machine* 1,5 ton dan 5 ton, *chest freezer*, kendaraan berpendingin, dermaga apung, struktur hybrid, *excavator*, budidaya ikan sistem bioflok, pengelolaan irigasi tambak partisipatif (PITAP), mesin pakan mandiri, bantuan sarana prasarana budidaya perikanan dan sebagainya. Berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan oleh Tim Itjen KKP, hasil penilaian kesesuaian bantuan pemerintah untuk level KKP sebesar 91,91% atau telah mencapai 105,04% dari target tahun 2019 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 87,50% dengan rincian hasil penilaian di masing-masing unit kerja sebagai berikut:

TABEL 3.58. CAPAIAN NILAI KESESUAIAN BANTUAN PEMERINTAH TAHUN 2019

INDIKATOR KINERJA	REALISASI
Nilai Kesesuaian Bantuan Pemerintah:	91,91
Ditjen PRL	89,58
Dermaga apung	87,92
Struktur Hybrid	91,25
Ditjen Perikanan Tangkap	94,68
Kapal penangkap ikan	96,24
Alat penangkap ikan	92,45
Bantuan Premi Asuransi Nelayan	95,36
Ditjen Perikanan Budidaya	90,09
Excavator	85,31
Budidaya Ikan Sistem Bioflok	84,99
Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif	100,00
Mesin Pakan Mandiri	90,07
Ditjen Penguatan Daya Saing	92,82
Ice Flake Machine 1,5 ton	95,14
Ice Flke Machine 5 ton	87,70
Chest Freezer	91,76
Kendaraan Berpendingin	96,67

Berdasarkan hasil perhitungan, menunjukkan bahwa nilai kesesuaian bantuan pemerintah untuk masing-masing unit kerja eselon I adalah sebagai berikut : Ditjen Perikanan Tangkap sebesar 94,68%, Ditjen Perikanan Budidaya sebesar 90,09%, Ditjen PRL sebesar 89,58% dan Ditjen PDSPKP sebesar 92,82%. Nilai tertinggi kesesuaian bantuan pemerintah adalah Ditjen Perikanan Tangkap dengan nilai capaian sebesar 94,68. Secara umum Bantuan Pemerintah tahun 2019 telah memenuhi kriteria kesesuaian, namun terdapat jenis bantuan pemerintah yang memperoleh nilai kesesuaian dibawah target yaitu dermaga apung (87,92%), *excavator* (85,31%), budidaya ikan sistem bioflok (84,99%), *ice flake machine* 5 ton (87,70%). Tidak tercapainya target nilai kesesuaian bantuan antara lain

Secara umum bantuan pemerintah tahun 2019 telah memenuhi kriteria kesesuaian, namun demikian perlu dilakukan upaya perbaikan kedepan terutama pada aspek keberlanjutan pemanfaatan dan ketertiban pelaporan dari penerima bantuan.



disebabkan bantuan escavator belum mulai dimanfaatkan karena belum tersedia BAST, target panen bioflok belum dapat optimal karena SDM penerima belum memahami teknologi yang digunakan, serta hasil pekerjaan penyedia yang kurang optimal. Pembangunan IFM 5 ton dan dermaga masih belum sesuai dengan waktu dan spesifikasi yang telah ditetapkan serta IFM 5 ton belum didukung dengan ketersediaan listrik yang memadai. Rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan bantuan pemerintah kedepan antara lain :

1. Meningkatkan pengendalian kegiatan bantuan pemerintah melalui monitoring dan evaluasi bantuan pemerintah, khususnya mengenai keberlanjutan usaha penerima bantuan pemerintah dan kepatuhan di bidang pelaporan.
2. Melakukan seleksi calon penerima bantuan pemerintah dan calon lokasi bantuan pemerintah secara cermat dengan berpedoman pada Perunjuk Teknis dan menetapkan Juknis paling lambat triwulan I tahun berjalan.
3. Melakukan seleksi penyedia barang/jasa secara ketat.
4. Melaksanakan pengadaan bantuan pemerintah sesuai jadwal paling lambat triwulan I serta menyalurkannya sesuai rencana.



Produksi Perikanan

Jumlah produksi perikanan merupakan gabungan produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap. Jumlah hasil produksi perikanan budidaya merupakan produksi yang dihasilkan oleh seluruh kabupaten/kota yang meliputi perikanan tawar, payau dan laut (termasuk rumput laut), sedangkan untuk jumlah produksi perikanan tangkap berasal dari produksi perikanan tangkap laut dan perairan umum daratan.

Produksi perikanan tahun 2019 ditargetkan 38,30 juta ton, dan realisasinya sebesar 23,86 juta ton atau mencapai 62,31%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yaitu sebesar 23,13 juta ton, realisasi tahun 2019 telah mengalami kenaikan sebesar 3,16%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra KKP tahun 2015-2019 yaitu sebesar 39,97 juta ton, realisasi tahun 2019 baru mencapai 59,70%, sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMN 2015-2019 realisasi produksi perikanan tahun 2019 yaitu sebesar 24,86 juta ton, realisasi produksi tahun 2019 telah mencapai 95,99%.

TABEL 3.59. CAPAIAN PRODUKSI PERIKANAN

SASARAN STRATEGIS-3				TERWUJUDNYA PENGELOLAAN SDKP YANG PARTISIPATIF, BERTANGGUNGJAWAB, DAN BERKELANJUTAN							
IKU-7				PRODUKSI PERIKANAN (JUTA TON)							
REALISASI				TAHUN 2019**				RENSTRA KKP 2015-2019		TARGET 2019 (RPJMN 2015-2019)	
2015	2016	2017	2018*	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% KENAIKAN 2018-2019	TARGET 2019	% CAPAIAN 2018 THD TARGET 2019	TARGET	
22,31	22,58	23,01	23,13	38,30	23,86	62,31	3,16	39,97	59,70	24,86	95,99

*Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber : Aplikasi satudata KKP,2020



Realisasi produksi perikanan tersebut berasal dari produksi tangkap dan produksi budidaya. Peningkatan produksi tersebut merupakan dampak dari berbagai kebijakan pengelolaan perikanan baik di perikanan tangkap maupun budidaya yang sudah dilakukan oleh KKP pada tahun 2015-2019, yang salah satunya menyebabkan semakin berlimpahnya stok ikan di perairan. Produksi perikanan Indonesia tahun 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 2,34 persen dibandingkan tahun 2018, terdiri dari perikanan tangkap yang mengalami pertumbuhan sebesar 4,17 persen dan perikanan budidaya mengalami pertumbuhan sebesar 3,54 persen. Pertumbuhan perikanan tangkap tahun 2019 sebesar 2,34 persen disumbangkan oleh pertumbuhan perikanan tangkap di laut sebesar 4,17 persen dan pertumbuhan perikanan tangkap di perairan umum yang melambat sebesar 16,33 persen.

TABEL 3.60. PRODUKSI PERIKANAN TAHUN 2015-2019

KOMODITAS	2015	2016	2017	2018*	2019**	PERTUMBUHAN 2019-2019
Perikanan Tangkap						
Perikanan Laut	6.204.668	6.115.469	6.424.114	6.701.834	6.981.505	4,17
Perairan Umum	473.134	464.722	467.822	659.287	551.605	-16,33
JUMLAH (A)	6.677.802	6.580.191	6.891.936	7.361.121	7.533.110	2,34
Perikanan Budidaya						
Ikan	4.364.751	4.952.018	5.568.071	5.591.668	6.412.068	14,67
Rumput Laut	11.269.342	11.050.301	10.546.920	10.177.603	9.918.455	-2,55
JUMLAH (B)	15.634.093	16.002.319	16.114.991	15.769.271	16.330.523	3,56
Jumlah Produksi Perikanan	22.311.895	22.582.510	23.006.927	23.130.392	23.863.633	3,17

*Angka Sementara, ** angka sangat sementara

Sumber: Aplikasi satudata KKP, 2020

Produksi Perikanan Tangkap

Produksi tahun 2019 sebesar 7,53 juta ton atau mencapai 76,64% dari target tahun 2019 yaitu sebesar 8,40 juta ton. Volume produksi perikanan tangkap tersebut berasal dari 92,68% produksi perikanan tangkap di laut yaitu sebesar 6,98 juta ton dan sisanya sebesar 7,32% atau mencapai 0,55 juta ton berasal dari perairan umum daratan.

TABEL 3.61. VOLUME PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP TAHUN 2018 MENURUT KOMODITAS UTAMA

SASARAN STRATEGIS - 3				TERWUJUDNYA PENGELOLAAN SDKP YANG PARTISIPATIF, BERTANGGUNGJAWAB, DAN BERKELANJUTAN					
IKU-7				PRODUKSI PERIKANAN (JUTA TON)					
IKU PEMBENTUK				PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP					
REALISASI				TAHUN 2019**				RENSTRA KKP 2015-2019	
2015	2016	2017	2018*	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% KENAIKAN 2018-2019	TARGET 2019	% CAPAIAN 2018 THD TARGET 2019
6,68	6,58	6,89	7,36	8,40	7,53	76,64	9,30	10,47	71,95

*: angka sementara

** :sangat sementara

Sumber : Aplikasi satudata KKP, 2019



Peningkatan produksi perikanan tangkap disebabkan oleh: (1) Nilai komoditas hasil penangkapan ikan di laut lebih tinggi dibandingkan di perairan umum; (2) Implementasi cara penanganan ikan yang baik (CPIB) di atas kapal dan di pelabuhan perikanan menyebabkan kualitas hasil tangkapan di laut lebih baik; (3) Infrastruktur yang mendukung akses terhadap pasar di kawasan pesisir lebih baik dibandingkan dengan fasilitas yang tersedia di sekitar perairan umum daratan; (4) Usaha penangkapan ikan di perairan umum bukan merupakan mata pencaharian utama bagi masyarakat sekitar. Beberapa hal yang diperkirakan menjadi penyebab terjadinya pertumbuhan angka produksi perikanan tangkap adalah : Terjadinya kelimpahan ikan di beberapa lokasi di berbagai daerah, Cuaca seperti ombak dan angin masih dalam kondisi tenang sehingga mendukung kegiatan penangkapan ikan dan meningkatkan jumlah kapal yang berlabuh di pelabuhan dan pangkalan pendaratan ikan, kegiatan tersebut juga telah dapat tercatat dengan baik, Bantuan sarana penangkapan ikan berupa kapal perikanan (ukuran 5 GT dan < 5GT) di 19 provinsi 52 Kab./Kota sejumlah 562 unit dan alat penangkap ikan sejumlah 720 unit di 30 provinsi yang telah disalurkan di tahun 2018, yang merupakan salah satu bantuan stimulus dalam rangka meningkatkan produksi perikanan tangkap.

Upaya kedepan yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan produksi perikanan tangkap antara lain (1) optimalisasi operasional bantuan sarana penangkapan ikan, (2) peningkatan

Pada tahun 2019, produksi perikanan tangkap mengalami kenaikan sebesar 9,30% yaitu sebesar 7,36 juta ton pada tahun 2018 menjadi sebesar 7,53 juta ton pada tahun 2019. Kenaikan produksi perikanan tangkap disumbang oleh meningkatnya produksi perikanan laut sebesar 4,17%.

sarana dan prasarana serta pengoperasian TPI perairan darat, (3) optimalisasi pendataan produksi perikanan tangkap di pusat-pusat pendaratan termasuk tangkahan, (4) penguatan pendataan dan penambahan SDM pengumpulan data di area Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, (5) fasilitasi kemudahan akses permodalan bagi nelayan.

Produksi Perikanan Budidaya

Capaian realisasi produksi perikanan budidaya tahun 2019 adalah sebanyak 16,33 juta ton atau mencapai 54,61 persen dari target tahun 2019 yaitu sebesar 29,9 juta ton. Produksi perikanan budidaya terdiri dari 39,25 persen produksi ikan (6,41 juta ton) dan sisanya sebesar 60,74 persen berasal dari produksi rumput laut (9,92 juta).

TABEL 3.62. VOLUME PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA TAHUN 2015-2019

SASARAN STRATEGIS - 3				TERWUJUDNYA PENGELOLAAN SDKP YANG PARTISIPATIF, BERTANGGUNGJAWAB, DAN BERKELANJUTAN					
IKU-7				PRODUKSI PERIKANAN (JUTA TON)					
IKU PEMBENTUK				PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA					
REALISASI				TAHUN 2019**			KENAIKAN 2018-2019 (%/TAHUN	TAHUN 2019 (RENSTRA KKP TAHUN 2015-2019)	
2015	2016	2017	2018*	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN		TARGET 2019	% CAPAIAN
15,63	16,00	16,11	15,77	29,9	16,33	54,61	3,56	29,9	54,61



Selama periode 2015 s.d 2019 capaian produksi perikanan budidaya meningkat rata-rata per tahunnya sebesar 1,12 persen dari 15,63 juta ton di tahun 2015 menjadi 16,33 juta ton di tahun 2019 **).

TABEL 3.63. PERKEMBANGAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA TAHUN 2015-2019

KOMODITAS	VOLUME (TON)					PERTUMBUHAN %	
	2015	2016	2017	2018*	2019**	2018-2019	2015-2019
Rumput Laut	11.269.342	11.050.301	10.546.920	10.177.603	9.918.455	(2,55)	(3,14)
Udang	615.871	698.138	920.051	931.338	1.053.205	13,09	14,86
Bandeng	672.196	747.445	700.894	873.601	810.867	(7,18)	5,61
Kerapu	16.795	11.504	70.283	8.622	18.490	114,45	126,54
Kakap	6.558	7.890	8.177	5.198	7.686	47,86	8,85
IkanMas	461.546	497.208	320.941	536.349	584.496	8,98	12,09
Nila	1.084.281	1.114.156	1.288.733	1.125.149	1.474.742	31,07	9,20
Lele	719.619	764.797	1.101.232	1.005.530	1.224.360	21,76	15,84
Patin	339.069	392.918	319.548	373.245	476.208	27,59	10,40
Gurame	113.407	132.334	234.032	172.821	227.469	31,62	24,75
Lainnya	335.410	585.627	604.178	559.814	534.544	(4,51)	16,48
TOTAL	15.634.093	16.002.319	16.114.991	15.769.271	16.330.523	3,56	1,12

Sumber : Aplikasi satu data KKP (5 Feb 2020)

*angka sementara

**angka sangat sementara

Beberapa komoditas yang mempengaruhi peningkatan produksi pada tahun 2019 adalah peningkatan komoditas udang sebesar 13,09%, nila sebesar 31,07%, lele sebesar 21,76%, patin sebesar 27,59%, gurame 31,62%. Faktor lain yang mendukung peningkatan adalah membaiknya harga komoditas budidaya, meningkatnya produktifitas pembudidaya, meningkatnya kualitas benih dan induk ikan, dampak keberhasilan dari kegiatan prioritas, serta pengembangan pola usaha budidaya yang berbasis segmentasi.

Pencapaian volume produksi perikanan budidaya secara keseluruhan untuk semua komoditas utama didukung oleh kegiatan - kegiatan sebagai berikut :



- Industrialisasi perikanan budidaya, dengan fokus pada komoditas udang, bandeng, rumput laut dan ikan patin. Kegiatan utama dalam industrialisasi, khususnya untuk usaha udang dan bandeng adalah bantuan sarana, perbaikan saluran tersier, perbaikan tambak, fasilitasi sistem kemitraan serta pembinaan dan pendampingan teknis budidaya
- Pengembangan sistem perbenihan melalui penguatan *broodstock center* : i) Pelepasan jenis dan/atau varietas ikan unggul bekerjasama dengan unit kerja lainnya, yaitu telah dilakukan pelepasan sebanyak 10 varietas induk unggul (Udang vaname “Global Gen”, Ikan Batak “Tor Soro”, Nila Nirwana II, Nila Sultana, Nila Srikandi, Kerapu Cantang, Nila Anjani, Nila Merah Nilasa, Nila Jantan Pandu dan Nila Betina Kunti, Lele Sangkuriang dua, Udang Windu Domestikasi); ii) Gerakan Penggunaan Induk Ikan Unggul; iii) Penyusunan regulasi dan perbanyak protokol induk ikan unggul; serta iv) Pengembangan jaringan informasi dan distribusi ikan.
- Pengembangan sistem produksi melalui (i) Pengembangan input teknologi yang sesuai standar (teknologi anjuran), aplikatif, efektif dan efisien berbasis wawasan lingkungan; (ii) Meningkatkan daya saing produk hasil produksi budidaya melalui percepatan pelaksanaan kegiatan sertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB); (iii) Pengembangan percontohan usaha perikanan budidaya sebagai upaya dalam mensosialisasikan model pengelolaan budidaya berkelanjutan; (iv) Pengembangan minapadi sebagai bagian dari upaya mendapatkan nilai tambah ganda.
- Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan melalui kegiatan terobosan utama: (i) Pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana UPTD Provinsi; (ii) Normalisasi saluran irigasi tambak bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum; (iv) Penataan dan rehabilitasi kawasan tambak dalam rangka Gerakan Revitalisasi Tambak; (v) Pemberdayaan pembudidaya ikan melalui pengelolaan jaringan irigasi tambak partisipatif (PITAP) di kawasan industrialisasi; (vi) Pengembangan kawasan dan penguatan operasional industrialisasi perikanan budidaya di Kab/Kota Minapolitan/Industrialisasi; dan (vii) Pemberian bantuan sarana dan prasarana lainnya seperti KJA, ekskavator dan mesin pellet
- Pengembangan budidaya rumput laut kultur jaringan
- Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan, dengan terobosan utama adalah (i) Pembangunan Posikandu (Pos Pelayanan Ikan Terpadu); (ii) Pengembangan *National Residu Monitoring Plan* (NRMP) yang merupakan suatu panduan/perencanaan untuk mengontrol residu obat kimia dan bahan biologis lainnya; dan (iii) Pengembangan vaksin untuk mengatasi penyakit ikan.
- Pengawasan dan Penerapan Teknologi Adaptif Perikanan Budidaya yang dilakukan oleh 15 UPT Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya.



IKU
8

Produksi Garam Nasional

Kebutuhan garam akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan perkembangan industri pengguna garam. Kebutuhan garam dalam negeri sampai saat ini belum bisa dipenuhi dari produksi garam nasional karena beberapa faktor yaitu teknologi yang masih tradisional, alih fungsi lahan tambak menjadi kawasan industri atau permukiman, serta produksi garam yang sangat dipengaruhi cuaca. Ada dua langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas garam yaitu ekstensifikasi atau pembukaan lahan baru dan intensifikasi dengan inovasi teknologi dan manajemen lahan pegaraman. Pembukaan lahan baru yang difokuskan di Provinsi NTT sampai saat ini masih sulit dilakukan karena berbagai faktor, antara lain sosial budaya masyarakat setempat dan status lahan yang belum clear.

TABEL 3.64. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PRODUKSI GARAM NASIONAL

SASARAN STRATEGIS-3				TERWUJUDNYA PENGELOLAAN SDKP YANG PARTISIPATIF, BERTANGGUNGJAWAB, DAN BERKELANJUTAN							
IKU-8				PRODUKSI GARAM (JUTA TON)							
REALISASI				TAHUN 2019				RENSTRA KKP 2015-2019		RPJM 2015-2019	
2015	2016	2017	2018*	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% KENAIKAN TAHUN 2018-2019	TARGET 2019	% CAPAIAN 2018 THD TARGET 2019	TARGET 2019	% CAPAIAN 2018 THD TARGET 2019
2,48	0,168	1,11	2,71	4,5	2,85	63,33	5,17	4,5	63,33	4,5	63,33

Sumber: Kerjasama KKP dan BPS

Produksi garam tahun 2019 sebesar 2,85 juta ton atau mencapai 63,33% terhadap target tahun 2019 yaitu 4,5 juta ton. Produksi garam tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 5,17% apabila dibandingkan produksi tahun 2018. Sedangkan apabila dibandingkan dengan Renstra KKP Tahun 2015-2019 dan RPJMN Tahun 2015-2019, produksi tersebut baru mencapai 63,33%.

Produksi garam nasional pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 5,17% yaitu 2,71 juta ton pada tahun 2018 menjadi 2,85 juta ton pada tahun 2019”.

Target 4,5 juta ton sulit terpenuhi karena program ekstensifikasi lahan belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Di sisi lain teknologi pergaraman yang telah dikembangkan belum mampu meningkatkan produksi garam secara signifikan. Target produksi 2019 sebesar 4,5 juta ton terdiri dari 4 juta ton garam rakyat (PUGaR dan

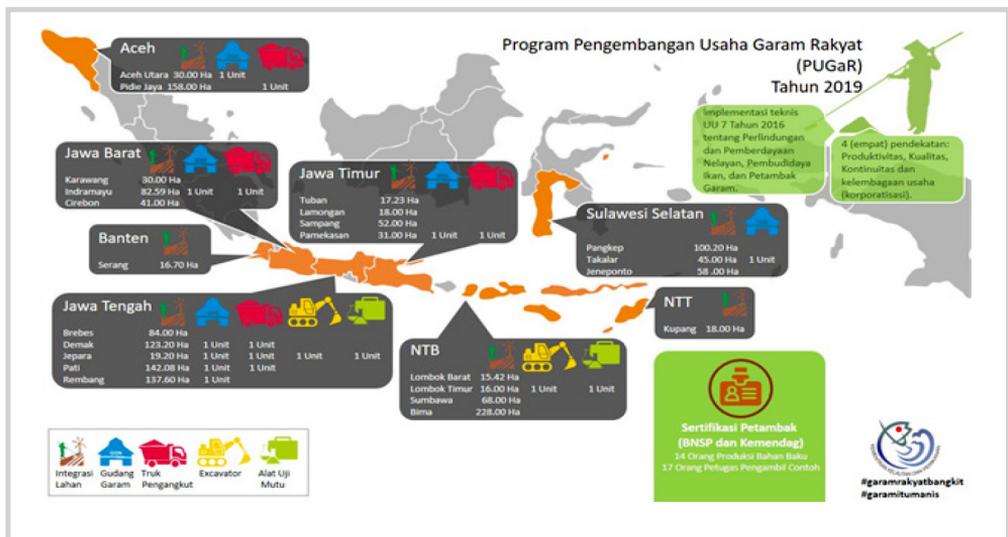
non PUGAR) serta 0,5 juta ton hasil produksi PT. Garam. Jumlah produksi garam tahun 2019 sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 karena musim panas yang lebih panjang. Upaya yang telah dilakukan dalam mendukung capaian produksi garam, yaitu melalui Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR). PUGaR merupakan program nasional yang bertujuan untuk mensejahterakan petambak garam rakyat dan mendorong terwujudnya Swasembada Garam Nasional. Program ini diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejak tahun



2011 dan terus dilaksanakan sampai sekarang. Program nasional ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petambak garam rakyat dan membuka lapangan usaha guna mendukung pertumbuhan ekonomi berdasarkan potensi kelautan negara kita. Dalam implementasinya, Program PUGaR menggunakan 4 (empat) pendekatan, yaitu: (1) produktivitas; (2) kualitas; (3) kontinuitas; dan (4) kelembagaan usaha. Empat pendekatan ini dilakukan berdasarkan fakta bahwa petambak garam cenderung masih berusaha secara individual dengan kepemilikan lahan yang terfragmentasi (terpisah-pisah) dengan pemanfaatan teknologi sederhana. Hal ini yang kemudian menyebabkan pola produksi garam cenderung menghasilkan garam dengan produktivitas dan kualitas dan kuantitas yang rendah, yang pada akhirnya secara luas mempengaruhi jaminan stok garam nasional. Sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi tersebut, arah kebijakan dan strategi pengembangan usaha garam nasional adalah meningkatkan produktivitas dan kualitas garam rakyat melalui:

- a. manajemen lahan yaitu integrasi pegaraman dan penggunaan geomembran;
- b. pembentukan koperasi garam; dan
- c. pembangunan Gudang Garam Nasional (GGN) yang menerapkan Sistem Resi Gudang komoditas garam.

Selain itu untuk mendukung produksi garam, Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2019 juga mengalokasikan kegiatan integrasi lahan pergaraman di 23 kabupaten dalam melalui Tugas Pembantuan dengan luasan lahan yang terintegrasi dan kegiatan yang telah dilakukan sebagaimana Gambar berikut :



Kegiatan tugas pembantuan tersebut meliputi integrasi lahan, pengadaan geomembran, Gudang Garam Nasional (GGN), dan sarana prasarana pendukungnya. Pada tahun 2019, KKP menargetkan integrasi lahan garam seluas 1.000 Ha dan terealisasi seluas 1.549,54 Ha. Sampai dengan akhir tahun 2019, 22 kabupaten Tugas Pembantuan telah selesai melakukan



rekonsiliasi/integrasi lahan garam yang dilengkapi dengan geomembran. Satu kabupaten, yaitu Sabu Rajua tidak terlaksana kegiatan integrasi lahan garamnya disebabkan ketidaksesuaian lokasi. Selain itu untuk menjaga kontinuitas stok garam, KKP pada tahun 2019 juga telah membangun Gudang Garam Nasional sebanyak 6 unit yang tersebar di 6 kab/kota dan Proses pengadaan sarana prasarana di 22 kabupaten TP. Disamping kegiatan melalui mekanisme Tugas Pembantuan, integrasi lahan garam juga difasilitasi pelaksanaannya di Serang seluas 16,7 Ha dan pembangunan rumah tunnel garam di Bantul dan Kebumen. Kegiatan pendukung lain dalam mendukung pencapaian produksi garam nasional antara lain :

1. Pelatihan LPK Uji Mutu Garam, bertempat di Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu (Ditstandalitu) – Kementerian Perdagangan, Ciracas-Jakarta Timur.
2. Pemantapan Pelatihan LPK Uji Mutu Garam dilaksanakan bertempat di Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan.
3. Penyusunan SOP Produksi Garam Metode Tunel. Keunggulan metode tunel adalah: dapat memproduksi air tua di musim hujan, meningkatkan metode kristalisasi menjadi 6 bulan di musim kemarau, dapat berproduksi sepanjang tahun, dan meningkatkan hasil produksi garam.
4. Pelatihan Produksi Garam

Meskipun produksi garam nasional telah mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2018, namun masih terdapat beberapa kendala dalam pencapaian target produksi garam antara lain : 1) produksi garam masih tergantung dengan cuaca, teknik produksi masih tradisional dengan kemampuan SDM yang terbatas, disini lain inovasi teknologi masih terbatas dan memerlukan biaya tinggi; 2) Program ekstensifikasi di Nusa Tenggara Timur belum berjalan dengan baik; 3) Lahan integrasi yang dilaksanakan di tahun 2019, beberapa daerah masih belum berproduksi hingga akhir musim sehingga proses rekonsiliasi/penataan lahan terlambat 4) Implementasi Manajemen Stok belum berjalan dengan baik.

Solusi terhadap kendala pencapaian kinerja di atas, yaitu: Implementasi rumah tunnel dan rumah prisma di beberapa daerah melalui dana APBN/APBD agar produksi garam dapat dilakukan pada musim penghujan; peningkatan kapasitas SDM dibidang produksi garam dan marketing; ekstensifikasi lahan dengan melibatkan BUMN dan swasta (proses karena melibatkan instansi lainnya); memfungsikan Gudang Garam Nasional sebagai Gudang statis (menjamin sekuriti asset yang dapat dikapitalisasi dalam bentuk surat berharga) dan dinamis yang bisa memenuhi kebutuhan garam. Beberapa hal sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan produk garam nasional antara lain Percepatan penyelesaian rekonsiliasi/penataan lahan integrasi agar dapat berproduksi secara optimal, manajemen stok dengan melibatkan gudang-gudang rakyat yang telah mendapatkan SNI berkoordinasi dengan gudang garam nasional (GGN) yang telah ada dengan skema resi gudang, ekstensifikasi lahan dengan melibatkan BUMN dan Swasta, dan perencanaan integrasi lahan dilakukan sebelum tahun pelaksanaan kegiatan (T-1).



TABEL 3.65. JUMLAH PRODUKSI GARAM (TON) TAHUN 2019

NO	PROVINSI	NON PUGAR *	PUGAR **	TOTAL
1	Aceh	9.701,86	225,60	9.927,46
2	Jawa Barat	438.183,60	26.528,23	464.711,83
3	Jawa Tengah	662.636,43	89.677,34	752.313,77
4	DI Yogyakarta	12,08	0,00	12,08
5	Jawa Timur	812.073,05	44.376,40	856.449,45
6	Banten	1.838,16	0,00	1.838,16
7	Bali	3.893,64	0,00	3.893,64
8	Nusa Tenggara Barat	165.627,66	42.393,52	208.021,18
9	Nusa Tenggara Timur	17.069,28	140,50	17.209,78
10	Sulawesi Tengah	693,70	0,00	693,70
11	Sulawesi Selatan	98.989,43	10.412,45	109.401,88
12	Gorontalo	2.954,51	0,00	2.954,51
SUB TOTAL		2.213.673	213.754,04	2.427.427,43
PT GARAM				424.698,00
TOTAL PRODUKSI NASIONAL				2.852.125,43



Nilai Ekspor Hasil Perikanan

Nilai ekspor hasil perikanan adalah jumlah komoditas produk perikanan, baik hidup, segar, dingin, maupun olahan yang dikategorikan dalam kode HS (*Harmonized System*) tahun 2017 sebanyak 482 kode HS dalam 8 digit yang dijual ke luar negeri yang dikonversi dalam bentuk uang (US Dollar). Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik.

TABEL 3.66. CAPAIAN NILAI EKSPOR HASIL PERIKANAN (MILIAR USD)

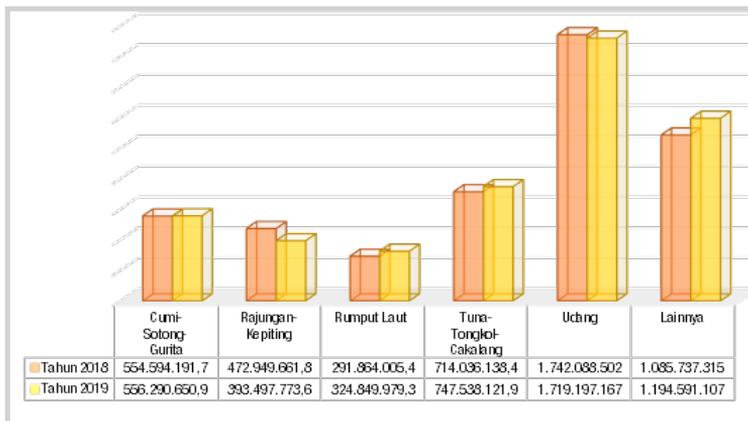
SASARAN STRATEGIS - 3				TERWUJUDNYA PENGELOLAAN SDKP YANG PARTISIPATIF, BERTANGGUNGJAWAB, DAN BERKELANJUTAN						
IKU-9				NILAI EKSPOR HASIL PERIKANAN (Rp. MILIAR USD)						
REALISASI				TAHUN 2019				RENSTRA KKP 2015-2019		
2015	2016	2017	2018	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% KENAIKAN TAHUN 2018-2019	TARGET 2019	% CAPAIAN	
3,95	4,17	4,52	4,86	9,5	4,94	51,96	1,56	9,50	51,96	

Sumber: BPS diolah oleh Ditjen PDS, 2020

Nilai ekspor hasil perikanan sampai dengan bulan Desember 2019 telah mencapai USD 4,94 Miliar. Capaian tersebut setara dengan 51,96% terhadap target tahun 2019. Meskipun demikian, capaian ini mengalami kenaikan sebesar 1,56% terhadap capaian tahun 2018 dan jika dilihat dari trendnya selama 5 tahun terakhir, nilai ekspor hasil perikanan mengalami kenaikan 5,76%. Peningkatan nilai ekspor hasil perikanan dari tahun 2018-2019 dapat dilihat pada Gambar 3.33. (BPS).



GAMBAR 3.33. PERBANDINGAN NILAI EKSPOR PRODUK PERIKANAN BERDASARKAN KOMODITAS UTAMA TAHUN 2018-2019



Pada tahun 2019, Nilai ekspor hasil perikanan telah mencapai USD 4,94 Miliar. Capaian tersebut setara dengan 51,96% terhadap target tahun 2019. Meskipun demikian, capaian ini mengalami kenaikan sebesar 1,56% terhadap capaian tahun 2018 dan jika dilihat dari trendnya selama 5 tahun terakhir, nilai ekspor hasil perikanan mengalami kenaikan 5,76%.

TABEL 3.67. VOLUME DAN NILAI EKSPOR PRODUK PERIKANAN BERDASARKAN KOMODITAS UTAMA TAHUN 2019

KOMODITAS	VOLUME (KG)	%	NILAI (USD)	%
Cumi-Sotong-Gurita	143,847,343.07	12.15	556,290,650.98	11.27
Rajungan-Kepiting	25,942,911.49	2.19	393,497,773.68	7.97
Rumput Laut	209,241,303.11	17.67	324,849,979.30	6.58
Tuna-Tongkol-Cakalang	184,130,234.06	15.55	747,538,121.98	15.14
Udang	207,704,831.41	17.54	1,719,197,167.57	34.83
Lainnya	413,329,067.04	34.90	1,194,591,107.98	24.20
TOTAL	1,184,195,690.17		4,935,964,801.49	

Sumber: BPS, diolah KKP

TABEL 3.68. VOLUME DAN NILAI EKSPOR PRODUK PERIKANAN BERDASARKAN NEGARA TUJUAN EKSPOR TAHUN 2019

NEGARA TUJUAN EKSPOR	VOLUME (KG)	%	NILAI (USD)	%
China	405,955,097.36	34.28	828,364,025.64	16.78
Japan	120,235,826.22	10.15	665,191,377.54	13.48
United States	210,990,298.01	17.82	1,828,978,696.76	37.05
Lainnya	447,014,468.58	37.75	1,613,430,701.56	32.69
TOTAL	1,184,195,690.17		4,935,964,801.49	

Data BPS, diolah Ditjen PDSPKP

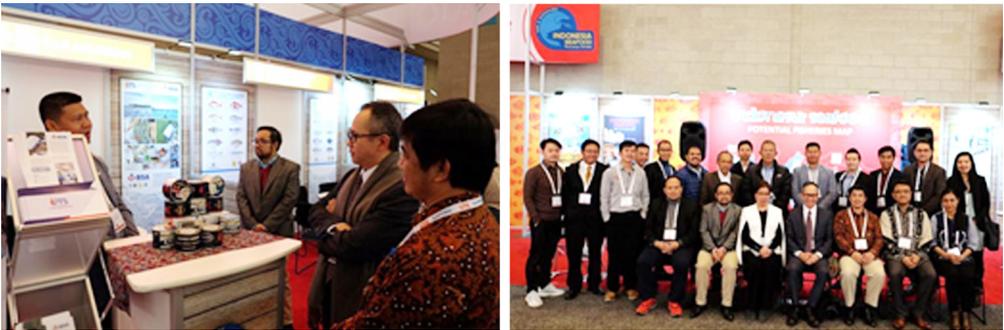
Jika dilihat dari komoditas utama ekspor perikanan Indonesia (udang, tuna-cakalang-tongkol, rumput laut, rajungan-kepiting dan rumput laut), komoditas udang masih menjadi primadona dengan menyumbangkan *share* sebesar 34,83% dari total nilai ekspor, sementara Tuna-Cakalang-Tongkol dan cumi-sotong gurita mampu memberikan *share* sebesar 15,35% dan 11,27%. Sedangkan komoditas rumput laut dan komoditas perikanan lainnya memberikan *share* sebesar 6,58% dan 23,99%.



Kegiatan yang telah dilaksanakan guna meningkatkan capaian nilai ekspor hasil perikanan antara lain :

- Partisipasi aktif dalam pameran di pusat-pusat pasar seafood dunia seperti *Seafood Expo North America* (SENA) di Boston pada tanggal 17-19 Maret 2019. Pameran tersebut diikuti oleh 1.340 *exhibitors* yang berasal dari 56 negara dan dikunjungi oleh lebih dari 22,200 *buyers*. Sebanyak 15 eksportir dan 1 asosiasi perikanan Indonesia bergabung dalam Paviliun Indonesia. Produk yang diminati *buyers* antara lain: udang, gurita, tuna, kepiting, mahi-mahi, kerapu, cumi-cumi, kakap merah, swordfish, kingfish, oilfish dan *value added products*.

GAMBAR 3.34. PAMERAN SEAFOOD EXPO NORTH AMERICA (SENA) TAHUN 2019



- Partisipasi aktif dalam pameran *Seafood Expo Global* (SEG) yang diselenggarakan di Brussels, Belgia pada tanggal 7 – 9 Mei 2019. Sebanyak 12 eksportir dan 1 asosiasi pelaku usaha yaitu Asosiasi Perikanan Pole and Line dan Handline Indonesia (AP2HI) bergabung dalam Paviliun Indonesia dengan menampilkan produk frozen tuna, udang, cumi, sotong, gurita, kakap merah, kerapu, dan produk ikan dan kepiting/rajungan dalam kaleng, serta green caviar - produk rumput laut jenis *Caulerpa*. Adapun produk yang diminati para *buyers* antara lain : udang jenis vanname dan windu, tuna, gurita, kakap merah, kerapu, daging kepiting dalam kaleng, dan green caviar. Para *buyers* tersebut berasal dari UK, Spanyol, Jerman, Belgia, Cina, Belanda, Turki, Perancis, Itali, Portugal, Rusia, AS, Yunani, Meksiko, Australia, dan Vietnam.

GAMBAR 3.35. PAMERAN SEAFOOD EXPO GLOBAL (SEG) TAHUN 2019



- Partisipasi aktif dalam pertemuan pertama perundingan *National Fisheries Institute* (NFI) dan *National Oceanic and Atmospheric Administration* (NOAA).
- Partisipasi pada pertemuan Working Group on Marine and Fisheries (WGMAF) RI-Rusia yang dilakukan di sela-sela pameran *The III Global Fishery and Seafood Expo* di St. Peterburg, Federasi Rusia pada tanggal 10-12 Juli 2019. Hasil penting WGMAF antara lain kesepakatan untuk adakan kerja sama IUUF, meminta kembali tambahan 13 UPI dan komitmen Rusia untuk menyelesaikan masalah teknis perijinan karantina di pertemuan terkait lainnya. Pameran diikuti 25 negara dan 300 perusahaan dari Rusia serta negara-negara lain seperti Maroko, Turki, dan China. Keikutsertaan Indonesia yang pertama kali ke pameran ini didorong keinginan Indonesia membuka pasar lebih luas ke Rusia yang selama ini mengalami pembatasan akses dari unit pengolahan ikan (UPI) yang siap ekspor ke negara tersebut (dari 168 UPI tahun 2013, menjadi hanya 15 UPI tahun 2014 hingga sekarang).

GAMBAR 3.36. THE III GLOBAL FISHERY AND SEAFOOD EXPO TAHUN 2019



- Partisipasi dalam Pameran *Japan International Seafood and Technology Expo* (JISTE) pada tanggal 21-23 Agustus 2019 di *Tokyo International Exhibition Center* (*Tokyo Big Sight*). Peserta pameran dari Indonesia sebanyak 8 eksportir yaitu PT. Perikanan Nusantara, Perum Perikanan Indonesia, PT. Jawa Suisan Indah, PT. Samudra Mandiri Sentosa, CV. Tuna Kieraha Utama, PT. Suri Tani Pemuka, PT. Toba Surimi Industries, dan CV. Anugerah Artha Abadi.

GAMBAR 3.37. PAMERAN JAPAN INTERNATIONAL SEAFOOD AND TECHNOLOGY EXPO (JISTE) TAHUN 2019



- Partisipasi pada *Trade Expo Indonesia* (TEI) yang digelar pada tanggal 16-20 Oktober 2019 di *Indonesia Convention Exhibition* (ICE) BSD, Tangerang, Banten. Dalam even tersebut KKP melalui Paviliun Indonesia Seafood menghadirkan 12 pelaku usaha untuk mempromosikan sekaligus melakukan transaksi perdagangan produk perikanan Indonesia. Adapun ragam produk perikanan yang dipromosikan berupa ikan kaleng, udang, tuna, cephalopods, ikan demersal dan pelagis, *value added*, rajungan, patin/pangasius, serta unagi kabayaki. negara-negara *buyer* yang telah melakukan transaksi antara lain Afrika, Timur Tengah, Vietnam, Inggris, China, Meksiko, Jepang, Maldives, Rusia, Myanmar, Thailand, Brazil, Hongkong, Spanyol, Rumania, India, Kazakhstan, Azerbaijan, Maldives, Aljazair, Malaysia, Kolombia, Korea Selatan, dan Kanada, serta Turki. Nilai transaksi perdagangan produk perikanan yang berhasil dibukukan dalam pameran tersebut adalah sebesar 10,43 juta USD. Jumlah ini meningkat 7,26% dibandingkan nilai transaksi produk perikanan pada TEI 2018.

GAMBAR 3.38. TRADE EXPO INDONESIA (TEI) TAHUN 2019



- Partisipasi pada *Food Ingredients Europe* (FIE) di Paris, Perancis pada tanggal 3-5 Desember 2019. FIE merupakan pameran industri bahan tambahan makanan terbesar di dunia yang diselenggarakan 2 tahun sekali di kota-kota besar di Eropa. Tidak kurang 1700 peserta berpartisipasi dalam pameran ini. Keikutsertaan Indonesia dalam pameran ini mengangkat tema *Indonesia Seaweed : Natural Binding Solution to the World* yang merupakan branding rumput laut Indonesia yang dikembangkan oleh KKP, UNIDO, dan ASTRULI melalui Program *SMART-Fish* Indonesia. Pada keikutsertaan dalam FIE 2019, KKP bekerjasama dengan Swisscontact dalam mempromosikan perusahaan dan produk rumput laut Indonesia melalui kerja sama *Swiss Import Promotion Program* (SIPPO), yaitu:
 - a. Promosi pavilion Indonesia kepada buyer prospektif di luar negeri
 - b. Kegiatan konsultasi melalui pendampingan *buyer outreach*
 - c. Pengembangan materi promosi
 - d. *Inbound* dan *outbound promotion*

Sebanyak 10 eksportir yang difasilitasi dalam ajang pameran ini, yaitu: PT. Surya Indoalgas, PT. Java Biocolloid, PT. Agar Swallow, PT. Buanatama Fajar Abadi, PT. Cahaya Cemerlang, PT. Galic Artabahari, PT. Karagen Indonesia, PT. Indoflora Cipta Mandiri,



PT. Amarta Carrageenan Indonesia dan PT. Segara Sumber Kahuripan. Produk yang ditawarkan antara lain agar, karaginan dan seaweed caviar.

- Peningkatan mutu produk kelautan dan perikanan untuk komoditas ekspor yang bernilai ekonomis penting melalui sertifikasi kelayakan UPI (telah diterbitkan sebanyak 2.973 SKP s.d. Desember 2019).

Kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

1. Beberapa produk perikanan Indonesia dinilai belum memenuhi standar kualitas pasar Jepang.
2. Kebutuhan ikan untuk konsumsi dalam negeri meningkat dengan ditandai peningkatan konsumsi ikan sebesar 10,38% dari 50,69 kg/kapita (tahun 2018) menjadi 54,49 kg/kapita (angka sementara tahun 2019).
3. Amerika Serikat semakin memperketat kriteria dan kualitas produk impornya, seperti jaminan keamanan produk perikanan dan *non-IUU*, *sustainability* dan *traceability*.
4. Potensi diversifikasi tujuan pasar non-tradisional (Afrika, Timur Tengah, Rusia, dan Amerika Latin) masih mengalami hambatan, mengingat Indonesia belum mempunyai *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) sehingga akses pasar ke kawasan tersebut belum terbuka secara maksimal.

Untuk mengatasi kendala tersebut, tindak lanjut yang akan dilakukan ke depan, antara lain:

1. Mendorong penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas kapal perikanan dan supplier dan Cara Budidaya Ikan yang Baik.
2. Peningkatan jejaring internasional melalui promosi dagang seperti partisipasi dalam pameran internasional. Pameran produk perikanan skala internasional dapat menjadi salah satu ajang yang penting untuk eksportir unjuk diri.
3. Peningkatan mutu produk kelautan dan perikanan untuk komoditas ekspor yang bernilai ekonomis penting seperti udang, tuna, rajungan dll melalui pengembangan sistem rantai dingin, sertifikasi mutu, dan pemenuhan persyaratan dari negara pengimpor.
4. Pengembangan diversifikasi dan penguatan branding produk ekspor yang didukung dengan hasil riset dan *market intelligence*.
5. Percepatan penyelesaian hambatan ekspor dan perluasan pasar ekspor.
6. Berpartisipasi aktif dalam kerjasama dengan organisasi perdagangan internasional dan pemerintah negara tujuan ekspor dalam rangka peningkatan akses pasar produk perikanan Indonesia melalui forum perundingan perdagangan, baik secara bilateral, regional maupun multilateral.



7. Memanfaatkan peluang pasar ekspor di Timur Tengah, Afrika dan Rusia.
8. Memperbaiki distribusi pasokan bahan baku.



Konsumsi Ikan Per Kapita Nasional

Konsumsi ikan adalah jumlah kebutuhan/permintaan ikan yang menggambarkan fungsi dari jumlah penduduk dan necara permintaan ikan untuk konsumsi domestik. Ikan mencakup ikan segar dan olahan sesuai dengan ketentuan dari BPS. Tingkat konsumsi ikan dalam negeri tahun 2019 disajikan pada Tabel 74.

TABEL 3.69. TINGKAT KONSUMSI IKAN DALAM NEGERI (KG/KAPITA/TAHUN)

SASARAN STRATEGIS - 3					TERWUJUDNYA PENGELOLAAN SDKP YANG PARTISIPATIF, BERTANGGUNGJAWAB, DAN BERKELANJUTAN						
IKU-10					KONSUMSI IKAN (KG/KAPITA/TAHUN)						
REALISASI					TAHUN 2019				RENSTRA KKP 2015-2019		
2015	2016	2017	2018	2019	TARGET	REALISASI*	% CAPAIAN	% KENAIKAN 2018-2019	TARGET 2019	% CAPAIAN 2018 THD TARGET 2019	
41,11	43,94	47,34	50,69	50,69	54,49	54,49	100,00	7,50	54,49	100,00	

Sumber: Ditjen PDS, KKP, (2019)* angka sangat sementara

Pada tahun 2019, Tingkat konsumsi ikan mengalami kenaikan sebesar 7,50% yaitu sebesar 50,69 kg/kapita/tahun pada tahun 2018 menjadi 54,49 kg/kapita/tahun di tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kegemaran masyarakat Indonesia dalam mengkonsumsi ikan, serta berhasilnya Program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) yang telah dilaksanakan.

Meningkatnya produksi ikan nasional telah mendorong meningkatnya ketersediaan ikan untuk konsumsi nasional. Presiden juga telah memerintahkan para Menteri untuk mengkampanyekan gemar makan ikan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Sehat, dengan melibatkan seluruh komponen/elemen bangsa dengan membangun kesadaran gizi individu maupun kolektif masyarakat agar gemar mengkonsumsi ikan melalui Gerakan

Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan). KKP dalam berbagai kesempatan juga terus mengkampanyekan gemar makan ikan kepada ibu hamil dalam rangka memberikan kualitas kehidupan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Jika dibandingkan capaian tahun 2018, yakni 50,69 kg/kapita/tahun maka capaian tahun ini meningkat sebesar 7,5%. Selama lima tahun terakhir, angka konsumsi ikan nasional terus meningkat sebesar 5,84%. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya kegemaran masyarakat Indonesia dalam mengkonsumsi ikan. Selain menunjukkan meningkatnya preferensi masyarakat terhadap ikan. Hal ini juga menunjukkan bahwa produksi perikanan diserap pasar dalam negeri dan industri perikanan bergerak. Untuk meningkatkan angka konsumsi ikan, juga dilakukan promosi peningkatan konsumsi ikan didalam negeri yang dilaksanakan melalui Gemarikan



dengan target tahun 2019 mencakup 34 provinsi dan 32 kabupaten/kota lokasi stunting dan dilaksanakan melalui berbagai komponen kegiatan diantaranya Safari Gemarikan, pemberian paket Gemarikan (makanan berbahan baku ikan), dan penghitungan angka konsumsi ikan di wilayah stunting.

Untuk mendukung program nasional penanganan stunting, KKP melalui Safari Gemarikan di wilayah stunting sekaligus melakukan edukasi kepada masyarakat tentang sumber daya ikan, kandungan gizi dan manfaat ikan, menumbuhkan kreativitas dalam mengolah dan usaha kuliner ikan untuk mendorong perbaikan gizi masyarakat melalui peningkatan asupan protein yang bersumber dari ikan. Kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2019 antara lain :

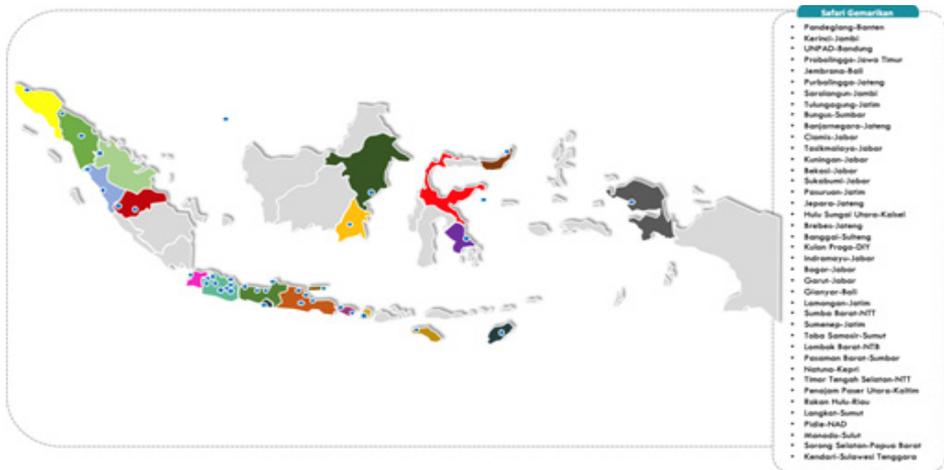
- 1) Bazar produk perikanan.

GAMBAR 3.39. PELAKSANAAN BAZAR PERIKANAN DI KKP



- 2) Safari Gemarikan di Pandeglang-Banten, Kerinci-Jambi (11 Februari 2019 dan 9 Maret 2019), UNPAD-Bandung (25-26 Februari), Probolinggo-Jawa Timur (28 Februari), Jembrana-Bali (18 Maret 2019), Purbalingga-Jateng (15 maret 2019), Sarolangun-Jambi (25 Maret 2019), Tulungagung-Jatim (28 Maret 2019), Bungus-Sumbar (2 April 2019), Banjarnegara-Jateng (7 April 2019), Ciamis-Jabar (8 April 2019), Tasikmalaya-Jabar (10 April 2019), Kuningan-Jabar (11 April 2019), Bekasi-Jabar (16 April 2019), Sukabumi-Jabar (21 Mei 2019), Pasuruan-Jatim (25 Mei 2019), Jepara-Jateng (25 Juni 2019), Hulu Sungai Utara-Kalsel (8 Juli 2019), Brebes-Jateng (11 Juli 2019), Banggai-Sulteng (24-26 Juli 2019), Kulon Progo-DIY (1 Agustus 2019), Indramayu-Jabar (8 Agustus 2019), Bogor-Jabar (7 Agustus 2019), Garut-Jabar (7 Agustus 2019), Gianyar-Bali (21 Agustus 2019), Lamongan-Jatim (13 Agustus 2019), Sumba Barat-NTT (20 September 2019), Sumenep-Jatim (15 Agustus 2019), Toba Samosir-Sumut (15 September 2019), Lombok Barat-NTB (17 September 2019), Pasaman Barat-Sumbar (3 Oktober 2019), Natuna-Kepri (7 Oktober 2019), Timor Tengah Selatan-NTT (8 Oktober 2019), Penajam Paser Utara-Kaltim (10 Oktober 2019), Rokan Hulu-Riau (15 Oktober 2019), Langkat-Sumut (17 Oktober 2019), Pidie-NAD (22 Oktober 2019), Manado-Sulut (29 Oktober 2019), Sorong Selatan-Papua Barat (31 Oktober 2019) dan safari gemarikan dalam rangka peringatan Hari Pangan Sedunia di Kendari (2-5 November 2019)





GAMBAR 3.40. SAFARI GEMARIKAN DI KABUPATEN KULON PROGO, PROVINSI DI YOGYAKARTA PADA TANGGAL 1 AGUSTUS 2019



- 3) Pameran IISM di Jiexpo Jakarta, Hari Pangan Sedunia di Kendari, Pameran SIAL di Jiexpo, dan Pameran *Indonesia Seafood Expo* di JCC Jakarta.
- 4) Keikutsertaan pada Pameran KOWANI Fair

GAMBAR 3.41. PAMERAN KOWANI FAIR PADA TANGGAL 4-7 APRIL 2019



- 5) Telah dibentuk kemitraan dalam rangka mendukung pelaksanaan Gemarikan sebanyak 38 Mitra.



Adapun kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan konsumsi ikan per kapita nasional adalah :

- 1) Di beberapa wilayah masih kebiasaan masyarakat untuk makan ikan yang rendah,
- 2) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang gizi dan manfaat protein ikan bagi kesehatan dan kecerdasan,
- 3) Rendahnya suplai ikan di beberapa wilayah,
- 4) Sarana pemasaran dan distribusi masih terbatas,
- 5) Diversifikasi produk hasil perikanan yang bisa memenuhi tuntutan konsumen masih belum berkembang.

Guna mendukung peningkatan konsumsi ikan, telah diinisiasi berbagai program/kegiatan pembangunan yang dititikberatkan pada 3 (tiga) aspek utama, yaitu :

- 1) Penguatan *demand* melalui kampanye meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kandungan gizi & manfaat ikan, menumbuhkan kreativitas dalam mengolah ikan & usaha kuliner sebagai sumber pendapatan keluarga. Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah:
 - KKP gencar dalam melaksanakan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) yang dilaksanakan di 34 provinsi.
 - Promosi melalui bazar produk perikanan setiap bulan dan lomba memasak menu ikan.
 - Pengadaan peralatan sarana pengolahan bagi UMKM dan pembangunan sentra kuliner di daerah potensial.
 - Meningkatkan keanekaragaman produk olahan hasil perikanan untuk memenuhi tuntutan selera konsumen.
- 2) Penguatan *supply* ikan melalui program peningkatan produksi perikanan tangkap & budidaya yang didukung penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk penyediaan ikan dengan jumlah cukup, mutu baik & harga terjangkau. Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah:
 - Pembangunan *Cold Storage*, pembangunan *Integrated Cold Storage (ICS)*, dan pengadaan sarana sistem rantai dingin (*Chest Freezer dan Thermal Ice Gel*).
 - Kegiatan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) diharapkan dapat menjamin ketersediaan ikan sepanjang tahun baik di sentra produksi maupun di sentra konsumen/industri dengan mutu baik dan harga stabil.
 - Pembangunan pasar ikan di daerah potensial.
 - Pengadaan kendaraan berpendingin roda 4 dan roda 6.
- 3) Penguatan kerja sama dengan mitra dari instansi pemerintah, institusi pendidikan, organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat. Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah :
 - telah dilakukan kerjasama dengan 38 mitra dengan bentuk kerjasama diantaranya yaitu: 1) Partisipasi pada Pameran Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG); 2)



- Partisipasi pada Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) yang diselenggarakan oleh BKKBN; 3) Pelaksanaan kegiatan Gemarikan KKP bersinergi dengan Gatra; 4) Safari Gemarikan untuk Mendukung MURI Bakso Ikan Sinergi dengan BSN; 5) Keikutsertaan pada pameran KOWANI FAIR;
- Sosialisasi Gemarikan bersama TP PKK di Kepulauan Seribu; 6) Safari Gemarikan pada Car Free Day (CFD) KKP-IBM; dan 7) Bazar Produk Perikanan dalam rangka Hari Ulang Tahun KOSTRAD.

IKU

11

Nilai PNBP dari sektor KP

PNBP sektor KP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat sektor KP yang bukan berasal dari penerimaan perpajakan. Nilai PNBP sektor kelautan dan perikanan adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat pada sektor KP melalui enam unit kerja eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen Perikanan Budidaya, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, Ditjen PDSPKP, BRSDM KP, BKIPM dan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan. Penerimaan PNBP dari sektor KP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan tarif atas jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Kementerian teknis pengelolaan PNBP memiliki dua kategori jenis PNBP yaitu PNBP yang berasal dari Sumber Daya Alam (SDA) dan Non Sumber Daya Alam (Non-SDA). Penerimaan PNBP SDA perikanan berupa Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) dan Pungutan Hasil Perikanan (PHP).

TABEL 3.70. NILAI PNBP SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN STRATEGIS - 3				TERWUJUDNYA PENGELOLAAN SDKP YANG PARTISIPATIF, BERTANGGUNGJAWAB, DAN BERKELANJUTAN					
IKU-11				NILAI PNBP DARI SEKTOR KP (Rp. MILIAR)					
REALISASI				TAHUN 2019				RENSTRA KKP 2015-2019	
2015	2016	2017	2018	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% KENAIKAN TAHUN 2018-2019	TARGET 2019	% CAPAIAN
137,10	457,69	625,57	647,47	820,00	756,51	92,26	16,84	583,90	129,56

Sumber: OMSPAN, Kementerian Keuangan, 13 Januari 2020

Realisasi penerimaan PNBP sektor KP tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 16,84% yaitu sebesar Rp.647,47 miliar pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp. 756,51 miliar pada tahun 2019.

PNBP sektor kelautan dan perikanan realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 756,51 miliar atau telah mencapai 92,26% dari target yang telah ditetapkan di tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 820miliar. Apabila dibandingkan dengan target

akhir Renstra KKP Tahun 2015-2019, realisasi tahun 2019 telah melampaui target atau telah



mencapai 129,56%. Tidak tercapainya penerimaan PNBP Sektor perikanan disebabkan beberapa hal antara lain :

1. Kewenangan penerbitan izin usaha dan kapal perikanan sehingga ukuran kapal di dominasi oleh kapal dengan ukuran < 100GT.
 - Kapal 10–30 GT menjadi kewenangan daerah dan pungutan hasil perikanan pun menjadi kewenangan daerah.
 - Kapal > 30 GT menjadi kewenangan pemerintah Pusat (KKP).
2. Kapal-kapal perikanan yang tidak memperpanjang izin selama 2 tahun terakhir sebanyak 1.252 kapal, sedangkan perpanjangan izin dapat dilakukan 3 bulan sebelum masa berlaku izin habis.
3. Penetapan target dengan asumsi yang kurang tepat dan perumusan formula PHP. Kemungkinan besar target yang ditetapkan dalam APBN akan terealisasi. Nelayan atau pemilik kapal sebelum beroperasi untuk menangkap ikan sudah membayar di mua PNBP (PHP). Bila hasil tangkapan melebihi kapasitas dan trip, PNBP yang diperoleh tidak akan mengalami perubahan. Belum dilakukannya pemutakhiran HPI setiap tahunnya sesuai harga pasar di masing-masing daerah pendaratan ikan.
4. Perbaikan laporan kegiatan usaha dan penangkapan ikan, selama ini pemegang izin kapal > 30 GT melaporkan hasil tangkapannya di bawah hasil tangkapan sesungguhnya dan dampaknya Negara mengalami kerugian dari tingkat pemanfaatan SDI dan Penerimaan Negara. Apabila pelaku usaha tidak melaporkan secara benar Laporan Kegiatan Usaha (LKU) dan Laporan Hasil Kegiatan Penangkapan (LKP), maka izin tidak akan diterbitkan.

TABEL 3.71. RINCIAN REALISASI PNBP SEKTOR KP TAHUN 2019

NO	URAIAN	REALISASI 2019 (RP)
I.	PNBP	684.729.115.881
	Sumber Daya Alam (SDA)	522.380.105.263
	• Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Perikanan Tangkap (PPP)	521.382.097.905
	• Pungutan Hasil Perikanan (PHP)	443.889.828
	• Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Perikanan Budidaya (PPP)	554.117.530
	Non Sumber Daya Alam (SDA)	162.349.010.618
1	Perikanan Tangkap	39.046.943.183
2	Perikanan Budidaya	19.275.149.749
3	Pengelolaan Ruang Laut	5.532.901.063
4	Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	4.184.356.763
5	Riset dan Sumber Daya Manusia KP	14.951.101.215
6	Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu B	79.358.558.645
II.	BADAN LAYANAN UMUM (BLU)	71.785.649.043
1	LPMUKP	71.785.649.043
	JUMLAH	756.514.764.924

Sumber: OMSPAN, Kementerian Keuangan, 13 Januari 2020

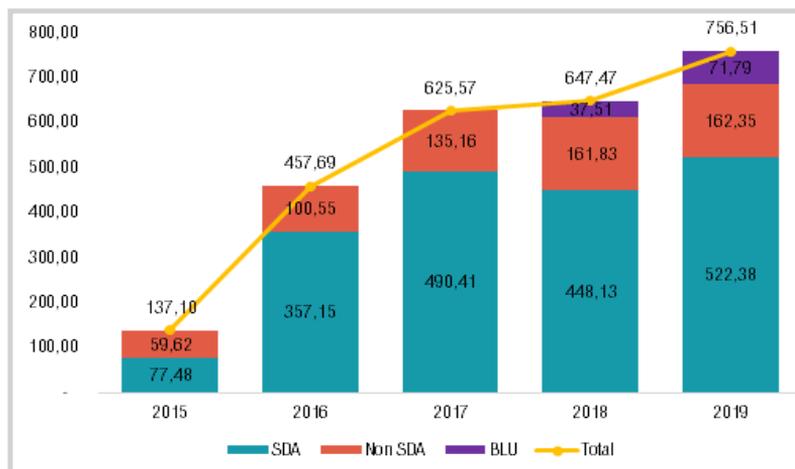


Penerimaan PNBP Sektor Perikanan bersumber dari PNBP Sumber Daya Alam (SDA), Non SDA dan Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada Tahun 2019, sumber PNBP terbesar berasal dari Sumber Daya Alam yang mencapai 69,05% atau sebesar Rp. 522,38 miliar. Penerimaan yang berasal dari SDA tersebut mencakup Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Perikanan Tangkap (PPP), Pungutan Hasil Perikanan (PHP) dan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Perikanan Budidaya. Komponen terbesar dari PNBP SDA berasal dari Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Perikanan Tangkap (PPP) sebesar Rp.521,38 miliar yang merupakan salah satu penerimaan PNBP SDA sektor perikanan berupa pungutan PNBP kepada setiap orang dalam rangka memperoleh Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk melakukan usaha penangkapan ikan.

Sedangkan untuk penerimaan yang bersumber dari Non SDA mencapai 21,46% dari keseluruhan PNBP Sektor Perikanan atau sebesar Rp. 162,34 miliar yang mencakup Penjualan Hasil Budidaya, Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya, Pendapatan Perizinan Lainnya, Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan lainnya, Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya, Pendapatan Jasa Karantina Perikanan, Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan, Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek Lainnya, serta Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tugas dan Fungsi unit kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Selain bersumber dari SDA dan Non SDA, Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2018 telah menjadi salah satu sumber penerimaan PNBP Sektor Perikanan. Pada tahun 2019, PNBP yang berasal dari Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Kelautan dan Perikanan mencapai 9,49% dari total PNBP Sektor Perikanan atau sebesar Rp. 71,78 miliar yang mencakup Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral, Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya, serta Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, Nilai PNBP Sektor Perikanan yang bersumber dari Sumber Daya Alam capaian tahun 2019 masih jauh dibawah sektor lainnya sebagaimana gambar berikut :

GAMBAR 3.42. GRAFIK PENERIMAAN SEKTOR KP TAHUN 2015-2019



Apabila dilihat dari grafik, PNBPN Sektor Kelautan dan Perikanan selama tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan yaitu dari sebesar Rp. 137,10 miliar di tahun 2015 menjadi Rp. 756,51 miliar di tahun 2019. Peningkatan tersebut mencerminkan semakin meningkatnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan peran sektor kelautan dan perikanan dalam pembangunan nasional. Beberapa hal yang telah dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian Nilai PNBPN Sektor Perikanan antara lain :

1. Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang lebih optimal, bebas *Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing*;
2. Ekstensifikasi tempat pemasukan dan pengeluaran ikan dengan pembukaan satuan kerja/wilayah kerja yang Potensial sebagai Sumber PNBPN;
3. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang produksi perikanan;
4. Pelaksanaan bantuan untuk nelayan/masyarakat kelautan dan perikanan;
5. Pemindahan daerah penangkapan ikan dari wilayah padat tangkap ke WPP yang potensial;
6. Optimasi penangkapan ikan sesuai jumlah penangkapan ikan yang diperbolehkan (JTB);
7. Peningkatan program produksi perikanan budidaya melalui penyediaan benih dan induk unggul;
8. Pembinaan terhadap unit-unit produksi perikanan budidaya;
9. Peningkatan mutu produksi perikanan budidaya yang berdaya saing;
10. Pengelolaan kawasan konservasi perairan yang lebih efektif dan berkelanjutan;
11. Perencanaan ruang laut nasional dan kawasan strategis sesuai dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K);
12. Peningkatan permintaan pelayanan pengujian dan sertifikasi pengolahan produk kelautan dan perikanan;
13. Optimalisasi pemeriksaan lalu lintas ekspor-impor perikanan;
14. Peningkatan kegiatan penjualan hasil perikanan terutama benih unggul hasil litbang KP yang telah dirilis, penjualan perbanyak vaksin/test kit yang sudah mendapatkan paten, jasa analisis laboratorium, pelayanan jasa riset dengan memanfaatkan SDM dan sarpras litbang yang tersedia;
15. Peningkatan pemanfaatan lahan/tambak/kolam ikan melalui kerjasama dengan petani/pihak ketiga serta peningkatan sarana alih teknologi dari peneliti kepada *stakeholder*;
16. Pembukaan peluang pendidikan kelautan dan perikanan secara luas bagi keluarga para nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan serta aparatur kelautan dan perikanan;
17. Kepatuhan wajib bayar atas pembayaran PNBPN berdasarkan PP No 75 Tahun 2015;
18. Peningkatan pelayanan kepada pelaku usaha perikanan;
19. Sosialisasi terkait pelayanan yang efektif dan efisien kepada nelayan;



20. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pengelolaan PNBP berbasis Wilayah Kerja Bebas Korupsi (WKBK);
21. Pelatihan dan pembinaan para pengelola keuangan dalam rangka peningkatan pelayanan;
22. Peningkatan profesionalisme personel kelautan dan perikanan.

C. INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

SASARAN STRATEGIS (SS-4) “TERWUJUDNYA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG EFEKTIF”

Sasaran Strategi ini memiliki satu indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Indeks Efektivitas kebijakan Pemerintah

IKU

12

Indeks Efektifitas Kebijakan Pemerintah

Indeks Efektivitas kebijakan Pemerintah merupakan suatu ukuran untuk menilai sejauh mana kebijakan yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat diterima oleh stakeholder KP, serta mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan tujuan pembuatan kebijakan. Penilaian indikator kinerja ini dilakukan melalui survey terhadap *stakeholder/customer*/kelompok sasaran. Pada tahun 2019, KKP ditargetkan dapat mencapai angka indeks efektivitas kebijakan bidang kelautan dan perikanan sebesar 7,90 atau termasuk kategori sangat baik dan realisasinya sebesar 8,24 atau termasuk dalam kategori sangat baik dan telah mencapai 104,30%.

TABEL 3.72. CAPAIAN INDEKS EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH

SASARAN STRATEGIS - 3				TERWUJUDNYA PENGELOLAAN SDKP YANG PARTISIPATIF, BERTANGGUNGJAWAB, DAN BERKELANJUTAN					
IKU-12				INDEKS EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH					
REALISASI				TAHUN 2019				RENSTRA KKP 2015-2019	
2015	2016	2017	2018	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% KENAIKAN TAHUN 2018-2019	TARGET 2019	% CAPAIAN
-	-	8,22	8,20	7,90	8,24	104,30	0,43	7,90	104,30

Sumber : KKP (diolah), 2020

Berdasarkan hasil perhitungan survey kebijakan yang dilakukan oleh unit kerja eselon I, rata-rata nilai efektivitas kebijakan lingkup adalah 8,24, hal ini menandakan bahwa tingkat efektivitas kebijakan lingkup KKP "Sangat Baik", dengan rincian nilai per unit kerja eselon I sebagaimana tabel berikut :

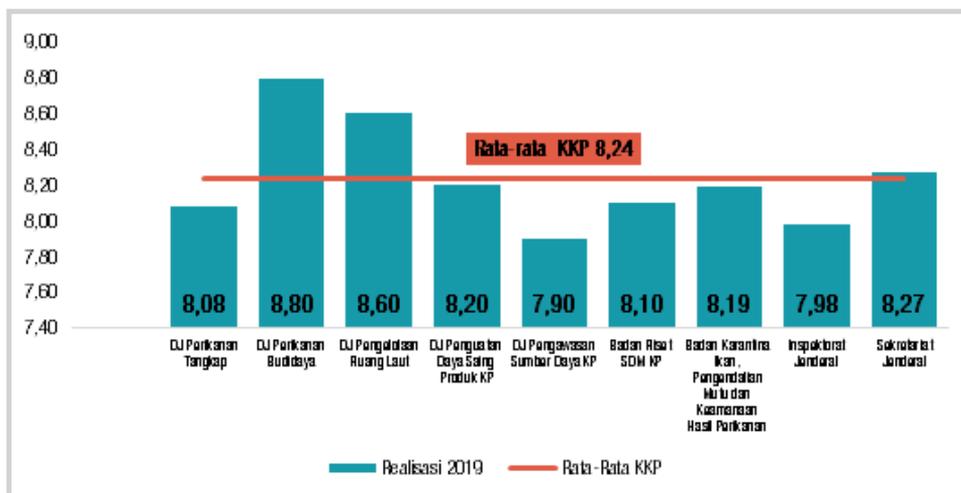


TABEL 3.73. HASIL PERHITUNGAN ATAS PELAKSANAAN SURVEY INDEKS EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH TAHUN 2019

NO	UNIT KERJA	REALISASI 2017	REALISASI 2018	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN
1	Ditjen Perikanan Tangkap	8,40	7,86	7,90	8,08	102,28%
2	Ditjen Perikanan Budidaya	8,30	8,81	7,90	8,80	111,39%
3	Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	8,08	8,58	7,90	8,60	108,86%
4	Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP	8,06	8,17	7,90	8,20	103,80%
5	Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP	8,05	7,85	7,90	7,90	100,00%
6	Badan Riset SDM KP	7,89	7,85	7,90	8,10	102,48%
7	Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	8,07	8,33	7,90	8,19	103,67%
8	Inspektorat Jenderal	8,34	8,24	7,90	7,98	101,01%
9	Sekretariat Jenderal	7,80	8,20	7,90	8,27	104,68%
	KKP	8,22	8,20	7,90	8,24	104,30%

Sumber: KKP, diolah (2020)

Perhitungan efektifitas kebijakan dilakukan terhadap pengujian atas 30 kebijakan yang telah diterbitkan oleh KKP. Berdasarkan hasil perhitungan terhadap sembilan unit kerja eselon I, rata-rata enam unit kerja eselon I memiliki tingkat efektifitas kebijakan dibawah rata-rata KKP yaitu (DJ Perikanan Tangkap, DJ Penguatan Daya Saing, DJ Pengawasan Sumber Daya KP, Badan Riset SDM KP, Badan Karantina, Inspektorat Jenderal, Badan Riset SDM KP). Sedangkan 3 eselon I memiliki tingkat efektifitas kebijakan dibawah rata-rata KKP (DJ Perikanan Budidaya, DJ Pengelolaan Ruang Laut dan Setjen).

GAMBAR 3.43. TINGKAT EFEKTIVITAS KEBIJAKAN KKP TAHUN 2019


TABEL 3.74. DAFTAR KEBIJAKAN/PERATURAN YANG DILAKUKAN SURVEY TAHUN 2019

UNIT KERJA ESELON I		KEBIJAKAN YANG DISURVEY
Ditjen Perikanan Tangkap	1.	Permen KP Nomor 3/PER-DJPT/2019 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Fasilitas Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan
	2.	Permen KP Nomor 4/PER-DJPT/2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Penangkapan Ikan pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
Ditjen Perikanan Budidaya	3.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2018 tentang Pakan Ikan;
	4.	Perdirjen-PB Nomor 12/PER-DJPB/2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Benih Ikan Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Perdirjen-PB Nomor 71/PER-DJPB/2019.
Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP	5.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2018 tentang Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan Selain Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri Perikanan,
	6.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan
	7.	Keputusan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Nomor 103/KEP-DJP2HP/2015 tentang Pedoman Umum Lomba Masak Serba Ikan
	8.	Keputusan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Nomor 101/KEP-DJP2HP/2016 tentang Pedoman Teknis Inkubator Mina Bisnis.
Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	9.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/PERMEN-KP/2016 tentang Pengelolaan Data dan Informasi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
	10.	Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 11/PER-DJPRL/2018 Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1B/PERDIRJEN-PRL/2018 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Usaha Garam Rakyat Tahun 2018
Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	11.	KEP. BRSDM KP Nomor 135/KEP=BRSDMKP/218 tentang Penetapan Pelatihan Mandiri KP
	12.	Kepmen KP No.77/KEPMEN-KP/2014 tentang Rekomendasi Teknologi Produksi asap Cair dan Aplikasinya pada Pengolahan Ikan Asap



UNIT KERJA ESELON I		KEBIJAKAN YANG DISURVEY
	13.	Kepmen KP Nomor 51/KEPMEN-KP/2018 tentang Pelepasan Ikan Gurami Galunggung Super
	14.	Permen KP Nomor 13/PERMEN-KP/2018 tentang Tugas Belajar bagi PNS di Lingkungan KKP
Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu	15.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11/PERMEN-KP/2019 tentang Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan
Sekretariat Jenderal	16.	Keputusan Menteri KP Nomor 117/KEPMEN-KP/SJ/2018 tentang Rencana Kebutuhan Tugas Belajar Bagi PNS di Lingkungan Tahun 2019
	17.	Keputusan Menteri KP NOMOR 118/KEPMEN-KP/SJ/2018 tentang Rencana Kebutuhan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan KKP Tahun 2019
	18.	PERMEN KP Nomor 29/PERMEN-KP/2018 Monitoring Dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Kelautan Dan Perikanan
	19.	Permen KP Nomor 39/PERMEN-KP/2017 Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan
	20.	Permen KP Nomor 44/Permen-KP/2016 Tentang Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
	21.	Permen KP Nomor 6/Permen-KP/2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
	22.	Permen KP Nomor 62/Permen-KP/2018 tentang Analisis Beban Kerja
	23.	SE B.258/SJ/III/2018 tentang Penetapan Tarif Perjalanan Dinas Angkutan Darat di Lingkungan KKP Tahun 2018
	24.	Kebijakan atas Pelaksanaan Pengawasan Intern oleh Itjen KKP (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2014).
	25.	Kebijakan atas Program Penanganan Gratifikasi (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27/PERMEN-KP/2014).



UNIT KERJA ESELON I		KEBIJAKAN YANG DISURVEY
	26.	Kebijakan atas Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Lingkup KKP (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2016).
	27.	Kebijakan tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan KKP (Peraturan Menteri KP Nomor 13/Permen-KP/2016).
	28.	Kebijakan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Peraturan Menteri KP Nomor 10/Permen-KP/2016).
	29.	Kebijakan tentang Penanganan Pengaduan Whistleblower dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Peraturan Menteri KP Nomor 31/Permen-KP/2013).
	30	Permen KP Nomor 68/Permen-KP/2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan

Upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai nilai indek efektivitas kebijakan pemerintah antara lain melibatkan *stakeholder* dalam proses penyusunan kebijakan, sosialisasi intensif kepada seluruh *stakeholder* di daerah, menyusun *policy brief* atas kebijakan yang telah diambil dan mengevaluasi dampak kebijakan tersebut untuk dilakukan penyempurnaan lebih lanjut, survei peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan peningkatan kualitas layanan di lapangan. Disamping itu, telah digunakannya fasilitas media sosial untuk menyerap aspirasi *stakeholder*.

SASARAN STRATEGIS (SS-5) “TERSELENGGARANYA TATA KELOLA PEMANFAATAN SDKP YANG ADIL, BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN”

Sasaran Strategis ini mempunyai 1 Indikator Kinerja Utama yaitu Efektivitas Tata Kelola Pemanfaatan SDKP yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan.

IKU

13

Efektivitas Tata Kelola Pemanfaatan SDKP yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan.

Indikator Kinerja Utama ini adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat pemanfaatan SDKP yang dikelola secara adil, berdaya saing dan berkelanjutan. IKU ini diukur secara tahunan dan memiliki 11 Indikator Kinerja Pembentuk (IKP) yaitu :

- 1). Utilitas UPI (Unit Pengolahan Ikan), 2). Jumlah SDM KP yang dididik, dilatih, disuluh untuk



mendukung tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan (orang), 3). Jumlah rekomendasi dan inovasi litbang yang diusulkan untuk menjadi bahan kebijakan (rekomendasi), 4). Sertifikasi HACCP (*Hazard Analytical Critical Control Point*), 5). Jumlah SKP yang diterbitkan bagi unit pengolahan ikan (SKP), 6). Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor, 7). Jumlah Laut Pedalaman, Teritorial, Perairan Kepulauan, ZEEI Dan Perairan Darat Yang Terkelola Sumber Daya Ikannya; 8). Jumlah lokasi kawasan laut, wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi dan atau *masterplan, businessplan*, yang ditetapkan menjadi peraturan perundangan (kawasan), 9). Jumlah pembentukan kelembagaan pengelolaan perikanan WPP, 10). Unit pembudidaya ikan bersertifikat CBIB untuk komoditas ekspor, 11). Sertifikat CPIB/cara perbenihan untuk komoditas ekspor.

TABEL 3.75. EFEKTIVITAS TATA KELOLA PEMANFAATAN SDKP YANG ADIL, BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN

SASARAN STRATEGIS - 5			TERSELENGGARANYA TATA KELOLA PEMANFAATAN SDKP YANG ADIL, BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN					
IKU-13			EFEKTIVITAS TATA KELOLA PEMANFAATAN SDKP YANG ADIL, BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN					
REALISASI			TAHUN 2019				RENSTRA KKP 2015-2019	
2015	2016	2017	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% KENAIKAN TAHUN 2018-2019	TARGET 2019	% CAPAIAN
78,2	85,25	81,09	77,00	87,09	113,10	7,40	96	90,72

Sumber: KKP, diolah (2019)

Target Efektifitas Tata Kelola Pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan pada tahun 2019 ditargetkan 77,00 dan realisasinya sebesar 87,09 atau mencapai 113,10%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yaitu sebesar 81,09 realisasi tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 7,40%. Capaian tahun 2019 tersebut apabila dibandingkan dengan target tahun 2019 pada Renstra KKP Tahun 2015-2019 yaitu sebesar 96, capaian tersebut mencapai 90,72%.

Capaian IKU-13. Efektifitas Tata Kelola Pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan tersebut berasal dari nilai capaian Indikator Kinerja Pembentuknya yang terdiri dari sebelas Indikator Kinerja Pembentuk, dengan penjelasan capaian masing-masing indikator kinerja pembentuk sebagai berikut :

a. Utilitas Unit Pengolahan Ikan (UPI)

Utilitas Unit Penanganan dan Pengolahan Hasil KP diartikan sebagai jumlah produksi saat ini dibanding dengan kapasitas produksi terpasang pada setiap UPI. Indikator ini menggambarkan kondisi pencapaian produksi terhadap kapasitas terpasangnya. Melalui indikator ini, maka dapat terlihat kinerja sektor industri pengolahan perikanan khususnya skala menengah dan besar Indonesia. Sektor industri pengolahan perikanan memiliki peranan yang cukup penting dalam memberikan kontribusi pembangunan bangsa oleh sebab itu pemerintah memiliki kepentingan dalam menjaga keberlangsungan sektor



usaha tersebut. Utilitas UPI Tahun 2019 sebesar 65,37 atau telah mencapai 100,57% terhadap target tahun 2019 yaitu sebesar 65. Nilai utilitas yang tinggi menunjukkan kinerja membaik dari suatu unit pengolahan. Apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2015-2019 yaitu sebesar 65%, capaian utilitas UPI telah mencapai 100,57%

TABEL 3.76. CAPAIAN UTILITAS UPI

SASARAN STRATEGIS - 5				TERSELENGGARANYA TATA KELOLA PEMANFAATAN SDKP YANG ADIL, BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN					
IKU-13				EFEKTIVITAS TATA KELOLA PEMANFAATAN SDKP YANG ADIL, BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN					
IKU PEMBENTUK				UTILITAS UNIT PENANGANAN DAN PENGOLAHAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN					
REALISASI				TAHUN 2019				RENSTRA KKP 2015-2019	
2015	2016	2017	2018	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% KENAIKAN TAHUN 2018-2019	TARGET 2019	% CAPAIAN
70,00	66,80	60,89	62,40	65,00	65,37	100,57	4,76	65,00	100,57

Pada tahun 2019 utilitas UPI mengalami kenaikan sebesar 4,76% yaitu sebesar 62,40% di tahun 2018 menjadi sebesar 65,37% di tahun 2019. Hal ini menunjukkan semakin naiknya kinerja unit pengolahan ikan seiring dengan ketersediaan bahan baku dengan harga yang terjangkau.

Nilai utilitas tahun 2019 diperhitungkan dari data utilitas 134 UPI aktif yang diperoleh dengan metode *purposive sampling* nasional berdasarkan jenis Olahan pada lokasi-lokasi yang terdapat banyak UPI Skala Menengah Besar. Analisis terhadap hasil perhitungan utilitas menunjukkan beberapa hal antara lain:

1. Rentang nilai utilitas UPI di Indonesia per jenis olahan antara 59,62 % - 70,40%
2. Utilitas rata-rata tertinggi sebesar 70,40% dicapai oleh UPI dengan jenis olahan lainnya (*pre-cooked*, fermentasi, dll)
3. Utilitas rata-rata terendah sebesar 59,62 % terjadi pada UPI Penanganan Ikan Segar
4. Nilai Utilitas terendah UPI sampel sebesar 59,62%, sehingga dapat diketahui dengan utilitas 59% UPI masih aktif dan bisa beroperasi dengan baik.

GAMBAR 3.44. UTILITAS UNIT PENANGANAN DAN PENGOLAHAN PRODUK HASILKELAUTAN DAN PERIKANAN BERDASAR JENIS OLAHAN TAHUN 2019



Tercapainya target utilitas unit penanganan dan pengolahan produk hasil kelautan dan perikanan tahun 2019 dipengaruhi oleh :

1. Pembangunan *Cold Storage* di dekat sentra produksi perikanan (termasuk yang dibangun di SKPT) membantu UPI dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas produk olahannya terutama UPI yang bergerak di bidang usaha pembekuan ikan yang selama ini mendominasi usaha pengolahan ikan di Indonesia.
2. Pengadaan Kendaraan Berpendingin membantu mempertahankan kuantitas dan kualitas bahan baku ikan yang akan disuplai ke UPI terutama yang bergerak di bidang pembekuan, pengalengan, dan pelumatan daging ikan.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain :

1. Telah dilakukan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Ketersediaan Bahan Baku, dan Perhitungan Utilitas UPI yang bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan.
2. Kegiatan dilakukan dengan melakukan pendataan utilitas dengan melibatkan beberapa UPI di beberapa lokasi, antara lain yaitu Bali, Banten, Jawa Timur, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan;
3. Selain itu, juga telah dilakukan koordinasi internal dalam upaya mendapatkan data Produksi UPI. Saat ini sedang dilaksanakan pendataan dan verifikasi data produksi dan kapasitas terpasang di lokasi lainnya sehingga diharapkan hasil perhitungan akan lebih akurat.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam melakukan pengambilan data dan perhitungan utilitas industri skala menengah dan besar, antara lain:

1. UPI khususnya skala menengah besar sulit untuk memberikan data produksinya. Belum ada peraturan yang mengatur tentang keharusan UPI skala Menengah dan Besar untuk dapat melaporkan produksinya secara berkala kepada Pemerintah (KKP).
2. UPI skala menengah besar sangat heterogen. Misal dalam satu UPI skala menengah besar dari segi jenis olahan terdapat beberapa macam seperti beku, kaleng, segar, asap, surimi, kering, dan lainnya, sedangkan dari segi jenis komoditas terdapat beberapa macam seperti tuna, cakalang, udang, kepiting/rajungan, ikan demersal, ikan pelagis, cephalopoda dan lainnya, selain itu range kapasitas terpasang UPI skala menengah besar mulai dari ± 200 ton per tahun sampai dengan ± 100.000 ton per tahun. Heterogenitas tersebut membuat jumlah sampel yang harus diambil agar dapat mewakili setiap kelompok homogenitas sangat banyak hampir mendekati sensus. Sedangkan saat ini hanya mampu melakukan sampling dengan sumber daya yang sangat terbatas.
3. Belum ada sistem secara efektif dan efisien untuk memonitoring data UPI skala menengah besar secara berkala.



b. Jumlah SDM yang dididik, dilatih, disuluh, untuk mendukung tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing, dan berkelanjutan

Indikator Jumlah SDM KP yang dididik, dilatih, disuluh dan diberdayakan untuk mendukung tata kelola pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang adil berdaya saing dan berkelanjutan telah mencapai target yaitu 590.404 orang (137,13%) dari target 430.543 orang. Pencapaian ini diperoleh dari jumlah peserta didik yang kompeten, jumlah SDM KP yang dilatih untuk mendukung tata kelola pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang adil berdaya saing dan berkelanjutan serta Jumlah kelompok yang disuluh. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian indikator ini mengalami kenaikan sebanyak 127.042 orang (27,42%). Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan jumlah target pada tahun 2019.

Realisasi Jumlah SDM yang dididik, dilatih, disuluh untuk mendukung tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan tahun 2019 sebanyak 590.404 orang terdiri dari pelatihan masyarakat kelautan dan perikanan sebanyak 22.650 orang, Sertifikasi Kompetensi sebanyak 3.500 orang, Pelaku utama/usaha yang disuluh sebanyak 556.003 orang dan peserta didik kelautan dan perikanan sebanyak 8.251 orang.

TABEL 3.77. JUMLAH SDM YANG DIDIDIK, DILATIH, DISULUH UNTUK Mendukung TATA KELOLA PEMANFAATAN SDKP YANG ADIL, BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN

SASARAN STRATEGIS				TERSELENGGARANYA TATA KELOLA PEMANFAATAN SDKP YANG ADIL, BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN						
INDIKATOR KINERJA PEMBENTUK (IKP)-2				JUMLAH SDM YANG DIDIDIK, DISULUH UNTUK Mendukung TATA KELOLA PEMANFAATAN SDKP YANG ADIL, BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN						
REALISASI				TAHUN 2019				RENSTRA KKP 2015-2019		
2015	2016	2017	2018	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% KENAIKAN 2018-2019	TARGET 2019	% CAPAIAN	
603.368	664.648	393.158	463.362	430.543	590.404	137,13	27,42	428.603	137,75	

TABEL 3.78. RINCIAN JUMLAH SDM YANG DIDIDIK, DILATIH, DISULUH UNTUK Mendukung TATA KELOLA PEMANFAATAN SDKP YANG ADIL, BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN TAHUN 2019

NO.	KEGIATAN	TARGET 2019 (ORANG)	REALISASI 2019 (ORANG)	% CAPAIAN
1.	Pelatihan masyarakat	22.720	22.650	99,69
2.	Sertifikat Kompetensi	3.500	3.500	100,00
3.	Pelaku utama/usaha yang disuluh	400.000	556.003	139,00
4.	Peserta Didik	8.000	8.251	103,14
	JUMLAH	434.220	590.404	135,97

Pada tahun 2019, Jumlah SDM KP yang dididik, dilatih, disuluh dan diberdayakan untuk mendukung tata kelola pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang adil berdaya saing dan berkelanjutan mengalami kenaikan sebanyak 127.042 orang atau mencapai (27,42%) yaitu sebesar 463.362 orang di tahun 2018 menjadi 590.404 orang di tahun 2019.



GAMBAR 3.45. SEBARAN PESERTA DIDIK PENDIDIKAN KP TAHUN 2019



Apabila dibandingkan dengan tahun 2018, jumlah peserta didik tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 3,14%. Kontribusi bidang Pendidikan KP terhadap pencapaian Indikator Kinerja Pembentuk ini, dapat dilihat dari keragaan jumlah peserta didik tahun 2019 pada satuan pendidikan KP yang mencapai 8.251 orang, sebagaimana gambar berikut:

TABEL 3.79. SEBARAN PESERTA DIDIK PENDIDIKAN KP TAHUN PELAJARAN 2019/2020

NO	SATUAN PENDIDIKAN	JUMLAH PESERTA DIDIK YANG KOMPETEN	
		TAHUN PELAJARAN 2018/2019	TAHUN PELAJARAN 2019/2020
1	STP JAKARTA	1.526	1.544
2	POLITEKNIK KP SIDOARJO	436	451
3	POLITEKNIK KP BITUNG	432	433
4	POLITEKNIK KP SORONG	320	348
5	POLITEKNIK KP KARAWANG	215	240
6	POLITEKNIK KP BONE	231	260
7	POLITEKNIK KP KUPANG	215	234
8	POLITEKNIK KP DUMAI	150	210
9	POLITEKNIK KP PANGANDARAN	150	225
10	POLITEKNIK KP JEMBRANA	150	240
11	POLITEKNIK KP ACEH	-	168
12	POLITEKNIK KP PARIAMAN	-	169
13	POLITEKNIK KP MALUKU	-	191
14	AK WAKATOBI	50	51
15	SUPM LADONG	397	205



NO	SATUAN PENDIDIKAN	JUMLAH PESERTA DIDIK YANG KOMPETEN	
		TAHUN PELAJARAN 2018/2019	TAHUN PELAJARAN 2019/2020
16	SUPM PARIAMAN	469	299
17	SUPM KOTAAGUNG	432	413
18	SUPM TEGAL	521	504
19	SUPM PONTIANAK	499	472
20	SUPM BONE	512	507
21	SUPM WAIHERU	540	350
22	SUPM SORONG	501	493
23	SUPM KUPANG	254	244
JUMLAH		8.000	8.251

Penyebab keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Pembentuk ini antara lain adalah :

1. Penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan yang dilaksanakan pada awal tahun, yang bertujuan untuk menyiapkan SDM calon maupun penerima program bantuan KKP dan untuk mendukung program-program prioritas KKP.
2. Dukungan Penyuluh Perikanan sebanyak 4.939 orang, terdiri dari Penyuluh Perikanan PNS sebanyak 2.843 orang, dan Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) sebanyak 2.096 orang, dimana sampai dengan akhir tahun 2019, para Penyuluh Perikanan tersebut telah melakukan pendampingan kepada 40.000 kelompok yang tersebar di 34 Provinsi, dengan rata-rata jumlah anggota per. kelompok sebanyak 10 orang, sehingga pada tahun 2019 beberapa anggota kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh telah dapat dilakukan pendataan dan pelaporan, yang selanjutnya akan dilakukan penilaian berdasarkan kelas kelompoknya.
3. Peningkatan kapasitas peserta didik di satuan pendidikan KP dengan adanya penambahan gedung pendidikan KP;
4. Efektivitas sistem pembelajaran;
5. Peningkatan jumlah peserta didik di satuan pendidikan KP, dimana 3 politeknik KP baru (Politeknik KP Dumai, Pangandaran, dan Jembrana) tetap menerima peserta didik baru, dan belum meluluskan peserta didik.
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja pembentuk ini adalah tersedianya database penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan, baik melalui SIMLAT KP maupun SIMLUH KP, serta dari aplikasi sistem pelaporan online penyuluh perikanan yang dilaporkan oleh penyuluh dalam melaporkan capaian kinerja dalam pendampingan kelompok sedangkan untuk bidang pendidikan penerimaan taruna baru, pendidikan



karakter, kegiatan perkuliahan, bahan makan taruna, sertifikasi, dan lain sebagainya yang menjadi bagian dari proses pembelajaran.

Jumlah rekomendasi dan inovasi riset yang diusulkan untuk menjadi bahan kebijakan

Indikator kinerja jumlah rekomendasi dan/atau inovasi riset yang diusulkan untuk dijadikan bahan kebijakan ini bertujuan untuk menunjukkan kontribusi riset dalam memberikan masukan atau rumusan kebijakan berbasis ilmiah untuk pengelolaan sumberdaya KP yang lestari dan berkelanjutan. Capaian Indikator Kinerja Jumlah rekomendasi dan/atau inovasi riset yang diusulkan untuk dijadikan bahan kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 3.80. JUMLAH REKOMENDASI DAN/ATAU INOVASI RISET YANG DIUSULKAN UNTUK DIJADIKAN BAHAN KEBIJAKAN

SASARAN STRATEGIS				TERSELENGGARANYA TATA KELOLA PEMANFAATAN SDKP YANG ADIL, BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN						
IKU-13				EFEKTIVITAS TATA KELOLA PEMANFAATAN SDKP YANG ADIL, BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN						
INDIKATOR KINERJA PEMBENTUK (IKP-3)				JUMLAH REKOMENDASI DAN/ATAU INOVASI RISET YANG DIUSULKAN UNTUK DIJADIKAN BAHAN KEBIJAKAN						
REALISASI				TAHUN 2019				RENSTRA KKP 2015-2019		
2015	2016	2017	2018	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% KENAIKAN TAHUN 2018-2019	TARGET 2019	% CAPAIAN 2018 THD TARGET 2019	
21	21	22	43	35	37	105,71	-13,95	49	75,51	

Pada tahun 2019, jumlah rekomendasi dan/atau inovasi riset yang diusulkan untuk dijadikan bahan kebijakan sebanyak 37 rekomendasi/inovasi riset atau telah tercapai sebesar 105,71% dari target yang telah ditetapkan sebanyak 35 rekomendasi/kebijakan.

Jumlah rekomendasi dan/atau inovasi riset yang diusulkan untuk dijadikan bahan kebijakan telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan target 35 rekomendasi dengan capaian sebesar 37 rekomendasi atau mencapai 105,71%. Hal ini diperoleh dari data rekomendasi, bahan kebijakan/

informasi terapan, *policy brief*, dan naskah akademik yang disampaikan oleh Kepala Badan dan/atau Kepala Pusat (tembusan Kepala Badan) kepada *stakeholder* (MKP, Eselon I KKP, Pemda, K/L lain) melalui dokumen penyampaian resmi (Surat, Memorandum, Nota Dinas).

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian indikator ini mengalami penurunan sebanyak 5 rekomendasi atau sebesar 13,59%. Hal ini disebabkan terjadi penyesuaian target dan alokasi anggaran di tahun 2019 sesuai dengan target yang telah dicantumkan dalam Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.



IKU rekomendasi dan inovasi litbang yang diusulkan untuk dijadikan bahan kebijakan yang tercapai sebanyak 37 buah rekomendasi akan dimanfaatkan eselon I lain atau *stakeholder* lainnya. Rekomendasi dan inovasi litbang yang diusulkan berupa data informasi, model riset, *policy brief* hingga naskah akademis rekomendasi kebijakan. Rekomendasi yang diterima digunakan sebagai acuan maupun referensi pedoman maupun penyusunan kegiatan yang akan datang. Rekomendasi yang telah dihasilkan dan dimanfaatkan ini juga tidak lepas dari pemantauan dan evaluasi kebijakannya setiap semesternya.

TABEL 3.81. JUMLAH REKOMENDASI DAN/ATAU INOVASI RISET YANG DIUSULKAN UNTUK DIJADIKAN BAHAN KEBIJAKAN TAHUN 2019

NO	JUDUL REKOMENDASI KEBIJAKAN	BIDANG	STAKEHOLDER
1	Langkah Pengelolaan Sumber Daya Ikan Pelagis Kecil di WPPNRI(Pelagis Kecil di WPP NRI 711)	Riset Perikanan	DJPT
2	Dampak Moratorium dan Strategi Membangun Kembali Perikanan Udang di Laut Arafura (WPP-718)	Riset Perikanan	DJPT
3	Peluang Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Pelagis Besar di WPP NRI-717	Riset Perikanan	DJPT
4	Optimasi Pemanfaatan Rawa Gambut di KPP 435 untuk Penungkatan Produksi Ikan	Riset Perikanan	DJPT
5	Kajian Pemilihan Lokasi dan Daya Dukung Perairan untuk Budidaya Ikan Laut di Natuna	Riset Perikanan	DJPB
6	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan kawasan pesisir kecamatan gerokgak, kabupaten buleleng untuk penyusunan perda kawasan perbenihan (HSRT)	Riset Perikanan	DJPB
7	Kajian Kebijakan Pengembangan Budidaya Sidat	Riset Perikanan	DJPB
8	Optimasi Perlindungan Hiu dan Pari Untuk Pemanfaatan Berkelanjutan di Indonesia	Riset Perikanan	DJPT dan DJPRL
9	Optimasi pemanfaatan perairan mandeh untuk pengembangan taman terumbu karang di kabupaten pesisir selatan	Riset Perikanan	DJPRL
10	Kajian Teknologi RAS Mikrobubble Untuk Budidaya Udang Vaname	Riset Perikanan	DJPB
11	Pengembangan dan Potensi Aplikasi Realtime Monitoring Lingkungan dan E-Learning/Training Budidaya Laut dan Perikanan Tangkap, Kerjasama SATREPS Mariculture	Riset Perikanan	DJPB dan DJPT
12	Kajian dan Monitoring Perkembangan Ikan Dewa di Telaga Sarangan Kabupaten Magetan Jawa Timur	Riset Perikanan	DJPB dan DJPT
13	Risiko cemaran bakteri patogen di makanan siap konsumsi (sushi mentah) di ritel domestik di wilayah jabodetabek dan rekomendasj pengendaliannya	Riset Pengolahan Produk dan Biotek	Ditjen PDSPKP dan BKIPM



14	Cemaran kimia organik dan anorganik pada produk perikanan tangkap	Riset Pengolahan Produk dan Biotek	BKIPM
15	Kajian risiko aflatoksin B1 pada produk olahan perikanan (ikan asin)	Riset Pengolahan Produk dan Biotek	Ditjen PDSPKP
16	Model Keberlanjutan Ekonomi Rumah Tangga Kelautan dan Perikanan	Riset Sosial Ekonomi	Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
17	Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Pemenuhan Persyaratan Ekolabeling Komoditas Udang dan Tuna di Pasar Internasional	Riset Sosial Ekonomi	Jensi Sartin (Dir. National Project Coordinator Global Marine Commodities)
18	Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Tahun 2018	Riset Sosial Ekonomi	Setjend
19	Estimasi Kontribusi Sampah Laut Dari Sentra Perikanan dan Strategi Penangganya	Riset Sosial Ekonomi	Setjend, DJPT
20	Proyeksi Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024	Riset Sosial Ekonomi	Setjend
21	Strategi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Sektor Kelautan dan Perikanan	Riset Sosial Ekonomi	Setjend
22	Analisis Dampak Pelarangan Penangkapan Ikan Tuna Sirip Kuning di WPP 714 (Permen No.4/2015): Tinjauan Kepentingan Ekonomi dan Keberlanjutan Sumber Daya Ikan	Riset Sosial Ekonomi	DJPT
23	Analisis Kebijakan Peta Supply Chain Ikan Sidat Di Pantai Selatan Jawa	Riset Sosial Ekonomi	SDI DJPT
24	Analisis Kebijakan Aspek Sosial Ekonomi dan Kelembagaan RPP TCT	Riset Sosial Ekonomi	DJPT
25	Analisis Kebijakan Kajian Pola Impor Komoditas Perikanan	Riset Sosial Ekonomi	DJPDSPPK
26	Kajian Potensi dan Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKP) Sebagai Kawasan Ekowisata, Studi Kasus KKPN Gili Matra	Riset Kelautan	Pemerintah Kabupaten Lombok Utara
27	Implementasi Teknologi AIS (Automatic Identification System) untuk Kapal Perikanan	Riset Kelautan	Pemda wakatobi, LPTK
28	Pemanfaatan Hasil Prediksi Pada Sentra Produksi Garam Berbasis Web	Riset Kelautan	Ditjen PRL, BMKG
29	Analisis Sistem Peringatan Dini dan Mitigasi Selat Sunda	Riset Kelautan	BNBP, BPBD
30	Pemanfaatan Karung Geotekstil Memanjang (KGM) Untuk Perlindungan Pantai	Riset Kelautan	Ditjen PRL
31	Kajian Evaluasi Konservasi Kawasan Perairan Pulau Biawak, Indramayu, Provinsi Jawa Barat	Riset Kelautan	Pemerintah kota Indramayu



32	Penilaian Hasil (Outcome Assesment) Rehabilitasi Pantura Jawa	Riset Kelautan	Pemerintah kota Serang, Banten, Pati, Brebes, Indramayu, Probolinggo
33	Estimasi Kerugian Ekonomi Akibat Genangan ROB di Kecamatan Muara Gembong	Riset Kelautan	Pemda Bekasi
34	Kajian Kelayakan dan Desain Teknis Lokasi Rehabilitasi Pesisir Muara Gembong	Riset Kelautan	Pemda Bekasi
35	Kajian Potensi Situs Kapal Karam dan Lansekap Maritim Bersejarah untuk Model Wisata Arkeo Bahari	Riset Kelautan	Ditjen PRL, Pemda Rembang-Jawa Tengah, Pemda Karawang-Jawa Barat, Pemda Bengkalis-Riau
36	Analisis kebijakan : Resiliensi Spasial Pulau-Pulau Kecil Kawasan Kapoposang, Selat Makasar	Riset Kelautan	Makassar
37	Peluang Ekstensi Wilayah Landas Kontinen Indonesia Utara Papua Dan Eksplorasi Dasar Laut Internasional	Riset Kelautan	DJPRL KKP

Tercapainya indikator kinerja pada tahun 2019 ini didukung dengan adanya peneliti yang kompeten, tersedianya laboratorium yang terstandar. Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai IKU ini yaitu penyusunan proposal teknis (memuat latar belakang, tujuan, keluaran, studi pustaka, metodologi, anggaran dan jadwal pelaksanaan kegiatan), persiapan survei/sampling, pengambilan sampel, pengujian laboratorium, pengolahan data, penyusunan laporan, FGD, dan penyusunan dokumen rekomendasi dalam bentuk *policy brief*, penyampaian *policy brief* kepada *stakeholder*.

c. Sertifikasi HACCP hasil perikanan

HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik pada hasil perikanan untuk konsumsi manusia. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu bahaya yang mungkin akan muncul di dalam proses pengolahan (*in process inspection*) dapat dilakukan sehingga tindakan pengendalian dan pemantauan terhadap

Pada tahun 2019, sertifikasi HACCP yang diterbitkan mengalami kenaikan sebesar 18,43% yaitu 2.702 sertifikat di tahun 2018 menjadi 3.200 sertifikat di tahun 2019.

bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan.

Sertifikat penerapan HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikanan. Sertifikasi penerapan HACCP mengacu kepada tata cara penerbitan HACCP sesuai Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011.



Indikator sertifikat penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan diukur dengan menghitung jumlah sertifikat HACCP yang diterbitkan pada tahun berjalan. Pada tahun 2019, target IKU sertifikasi HACCP hasil perikanan sebesar 2.200 sertifikat dengan realisasi sebesar 3.200 sertifikat atau capaiannya sebesar (145,45%). Hal ini dikarenakan:

- Terdapat permohonan sertifikasi HACCP oleh UPI Baru
- Terdapat permohonan sertifikasi HACCP penambahan ruang lingkup produk
- Terdapat permohonan sertifikasi HACCP kenaikan grade

Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2018 yaitu sebesar 2.702 sertifikat, realisasi tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 18,43%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra KKP Tahun 2015-2019 yaitu sebesar 2.200 sertifikat HACCP, capaian kinerja di tahun 2019 telah melampaui target atau mencapai 145,45%.

TABEL 3.82. CAPAIAN SERTIFIKASI HACCP HASIL PERIKANAN

SASARAN STRATEGIS				TERSELENGGARANYA TATA KELOLA PEMANFAATAN SDKP YANG ADIL, BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN					
IKU-13				EFEKTIVITAS TATA KELOLA PEMANFAATAN SDKP YANG ADIL, BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN					
INDIKATOR KINERJA PEMBENTUK				SERTIFIKASI HACCP (HAZARD ANALYTICAL CRITICAL CONTROL POINT) HASIL PERIKANAN (UNIT)					
REALISASI				TAHUN 2019				RENSTRA KKP 2015-2019	
2015	2016	2017	2018	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% KENAIKAN TAHUN 2018-2019	TARGET 2019	% CAPAIAN
1.451	2.037	2.452	2.702	2.200	3.200	145,45	18,43	2.200	145,45

GAMBAR 3.46. PETA SEBARAN PENERBITAN SERTIFIKAT HACCP PADA UPI TAHUN 2019



GAMBAR 3.47. INSPEKSI HACCP DI UPI KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH

Jumlah SKP yang diterbitkan bagi unit pengolahan ikan

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 pasal 20 ayat 3 bahwa setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, dan ayat 4 bahwa setiap orang yang memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, memperoleh Sertifikat Kelayakan Pengolahan.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2019 pasal 1 ayat 3 bahwa Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha terhadap setiap unit pengolahan ikan yang telah menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi. Hal ini dimaksudkan agar produk perikanan yang dihasilkan mempunyai mutu yang baik serta terjamin keamanannya dalam rangka memenuhi tuntutan pasar dalam negeri dan pasar luar negeri.



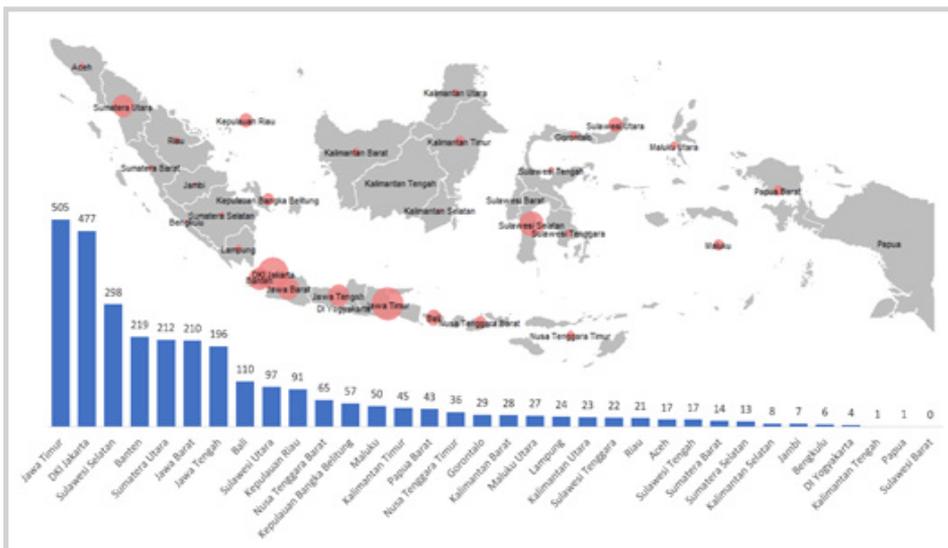
TABEL 3.83. ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA JUMLAH SKP YANG DITERBITKAN BAGI UNIT PENGOLAHAN IKAN

SASARAN STRATEGIS - 5				TERSELENGGARANYA TATA KELOLA PEMANFAATAN SDKP YANG ADIL, BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN					
IKU-13				EFEKTIVITAS TATA KELOLA PEMANFAATAN SDKP YANG ADIL, BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN					
IKU PEMBENTUK				JUMLAH SKP YANG DITERBITKAN BAGI UNIT PENGOLAHAN IKAN					
REALISASI				TAHUN 2019				RENSTRA KKP 2015-2019	
2015	2016	2017	2018	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% KENAIKAN TAHUN 2018-2019	TARGET 2019	% CAPAIAN
1.084	1.933	2.107	2.872	2.000	2.973	148,65	3,52	2.000	148,65

Capaian indikator jumlah SKP yang diterbitkan bagi Unit Pengolahan Ikan (UPI) pada Tahun 2019 adalah sejumlah 2.973 SKP atau 148,65% dari target penerbitan SKP Tahun 2019 sebesar 2.000 SKP. Capaian ini terdiri dari 1.963 SKP perpanjangan (66,03%) dan 1.010 SKP baru (33,97%). Dari 1.010 SKP baru yang diterbitkan terdiri dari 206 SKP baru (20,40%) yang merupakan penambahan ruang lingkup produk dari 597 UPI yang telah memiliki SKP sebelumnya dan 804 SKP baru lainnya (79,60%) diberikan kepada 272 UPI baru yang belum pernah memiliki SKP sebelumnya.

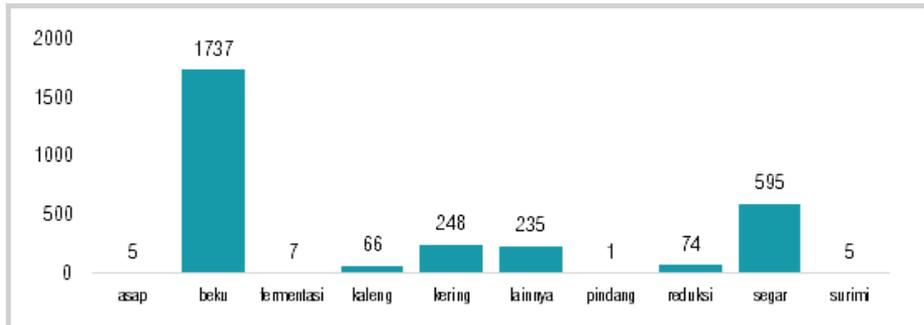
Jika dibandingkan dengan tahun 2018 maka capaian ini meningkat sebesar 3,52%. Pertumbuhan capaian ini sejak tahun 2015-2019 adalah sebesar 25,43%. Jumlah SKP yang diterbitkan terbanyak berada di Provinsi Jawa Timur (505 SKP) sementara yang paling sedikit di Provinsi Papua (1 SKP) dan Kalimantan Tengah (1 SKP). Hal ini tergambar pada peta sebaran di bawah ini.

GAMBAR 3.48. SEBARAN SKP YANG DITERBITKAN BAGI UPI PADA TAHUN 2019



Sementara berdasarkan jenis olahannya, jumlah SKP yang diterbitkan didominasi jenis olahan beku yakni sebanyak 1.737 SKP atau 58,42% dari jumlah SKP yang telah diterbitkan pada Tahun 2019. Hal ini tergambar pada gambar di bawah ini.

GAMBAR 3.49. JUMLAH SKP YANG DITERBITKAN BAGI UPI TAHUN 2019 BERDASAR JENIS OLAHANNYA



Kenaikan jumlah SKP yang diterbitkan di tahun 2019 dapat melebihi target disebabkan oleh:

1. Program kegiatan pembinaan mutu yang telah dilakukan KKP dan pembinaan Pra-SKP oleh Dinas KP Provinsi/Kab/Kota telah berhasil mendukung dan meningkatkan capaian penerbitan SKP.
2. Tingginya tingkat penerbitan SKP perpanjangan sebanyak 1.963 SKP perpanjangan (66,03%) di tahun 2019 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 1.463 SKP perpanjangan (50,94%) menunjukkan tingkat kesadaran dan komitmen UPI tentang pentingnya memiliki SKP dalam rangka menjaga konsistensi penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi.

Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut antara lain :

1. Supervisi dan verifikasi SKP ke UPI di 34 Provinsi;
2. Rapat penyusunan target dan rencana kerja penerbitan SKP dengan 34 provinsi;
3. Sosialisasi Regulasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan dan *Online Single Submission* di Daerah (5 lokasi);
4. Pembekalan SKP bagi sekretariat SKP dan Pembina Mutu Daerah;
5. Pembekalan Budaya Pelayanan Prima Guna Pelayanan SKP di PTSP KKP;
6. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan SKP Serta Sosialisasi SKP dan *Online Single Submission* (OSS) di 2 lokasi;
7. Pembekalan ISO 19011 : 2018 Audit Internal dan BRC Global Standards;
8. Sarasehan Pelayanan Publik, Industri Inovatif dan Pemenuhan Gizi;
9. Harmonisasi SKP dan Izin Edar;
10. Operasional dan Pemeliharaan Layanan SKP Online



Unit usaha perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor

Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor merupakan unit usaha yang telah menerapkan prinsip-prinsip HACCP dan CKIB. Pada unit usaha yang menerapkan prinsip HACCP dilakukan verifikasi terhadap pelaksanaan SSOP/GMP dan penerapan HACCP minimal satu kali dalam setahun. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa UPI tersebut secara konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sebagaimana diamanatkan pada Permen KP No.19/2010. Sedangkan unit usaha yang menerapkan prinsip Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) adalah unit usaha pembudidayaan ikan (UUPI) yang telah melaksanakan manajemen kesehatan ikan berdasarkan standar biosekuriti untuk menjamin ikan bebas dari HPIK/HPI. Indikator Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah bersertifikasi HACCP dan unit usaha pembudidayaan ikan yang bersertifikasi CKIB. Pada tahun 2019, realisasi indikator ini sebesar 1.409 unit dari target 1.050 atau sebesar 134,19%. Angka realisasi tahun ini terdiri dari realisasi UPI yang bersertifikasi HACCP sejumlah 909 unit dan UUPI yang telah disertifikasi CKIB sejumlah 500 unit.

Pada tahun 2019, jumlah Unit usaha perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor mengalami kenaikan sebesar 27,40% yaitu sebesar di 1.050 unit tahun 2018 menjadi sebesar 1.409 di tahun 2019.

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2018 yaitu sebesar 1.106 unit, realisasi tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 27,39%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir tahun 2019 dalam dokumen Renstra KKP Tahun 2015-2019 yaitu sebesar 925 unit, realisasi

tahun 2019 telah melampaui target atau mencapai 152,32%.

Tercapainya realisasi unit usaha perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor merupakan komitmen bersama KKP dan *stakeholder* dalam rangka memenuhi jaminan mutu dan melengkapi persyaratan ekspor dari negara tujuan sesuai dengan amanat perundang-undangan. Selain itu pencapaian ini didukung peningkatan registrasi UPI ke negara mitra, salah satunya ke Negara China, yang mengalami peningkatan 103 UPI atau sebesar 18,36% dari capaian tahun 2018. Hal ini akibat adanya adanya perang dagang antara AS dan China. Dampak perang dagang itu berpengaruh terhadap permintaan produk perikanan. Beberapa produk perikanan yang biasanya didapat China dari AS, kini mengarah ke Indonesia. Selain itu, adanya perubahan otoritas kompeten sehingga persetujuan registrasi UPI baru di China lebih dipermudah.

TABEL 3.84. JUMLAH UNIT USAHA PERIKANAN YANG MEMENUHI PERSYARATAN EKSPOR (UNIT)

SASARAN STRATEGIS				TERSELENGGARANYA TATA KELOLA PEMANFAATAN SDKP YANG ADIL, BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN					
IKU-13				EFEKTIVITAS TATA KELOLA PEMANFAATAN SDKP YANG ADIL, BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN					
INDIKATOR KINERJA PEMBENTUK (IKP-1)				UNIT USAHA PERIKANAN YANG MEMENUHI PERSYARATAN EKSPOR (UNIT)					
REALISASI				TAHUN 2019				RENSTRA KKP 2015-2019	
2015	2016	2017	2018	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% KENAIKAN TAHUN 2018-2019	TARGET 2019	% CAPAIAN 2018 THD TARGET 2019
574	667	1.001	1.106	1.050	1.409	134,19	27,40	925,00	152,32

Sumber: BKIPM, Kementerian Kelautan dan Perikanan (2019)



Jumlah Laut Pedalaman, Teritorial, Perairan Kepulauan, ZEEI Dan Perairan Darat Yang Terkelola Sumber Daya Ikannya

Laut Pedalaman adalah bagian laut yang terletak pada sisi darat dari garis penutup, pada sisi laut dari garis air rendah. (UU No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia). Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. (UU No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia). Sedangkan menurut UNCLOS 1982, Laut Teritorial adalah garis baseline atau garis pangkal dasar yang lebarnya sekitar 12 mil laut. Perairan Kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. (UU No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia). Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.



Laut Lepas adalah semua bagian laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, dalam laut teritorial atau dalam perairan pedalaman suatu negara, atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan (Unclos 1982). Laut ZEEI adalah laut dengan zona ekonomi eksklusif yang merupakan kawasan yang berjarak 200 mil dari pulau terluar Indonesia (Unclos 1982). Perairan Darat adalah segala perairan yang terletak pada sisi darat dari garis penutup mulut sungai. Kegiatan perikanan di perairan darat telah lama berperan khususnya dalam hal ketahanan pangan dan mata pencaharian terutama bagi masyarakat dan nelayan yang ada di sekitar perairan. Hal ini didukung oleh sumber daya ikan perairan darat Indonesia yang memiliki lebih dari 5.500 sungai dan 1700 danau/waduk serta keanekaragaman hayati terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Namun keberlanjutan pemanfaatan tersebut menghadapi tantangan, terutama penurunan daya dukung serta peningkatan tuntutan kebutuhan pangan.

Indikator ini menunjukkan gambaran tentang upaya pengelolaan sumber daya ikan, meliputi (1) Lembaga pengelola perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan yang operasional; (2) Tersedianya aturan/pedoman pengelolaan perikanan di Laut Pedalaman Teritorial dan Perairan Kepulauan (WPP); (3) kegiatan operasional/upaya pengelolaan bidang perikanan tangkap di ZEEI dan laut lepas yang berdampak dengan ZEEI; (4) Tata kelola dan pemanfaatan Laut ZEEI dan Laut Lepas, dan (5) Tata kelola dan pemanfaatan Perairan Darat. Adapun kriteria terkelola adalah apabila semua upaya pengelolaan dilaksanakan.



TABEL 3.85. CAPAIAN JUMLAH LAUT PEDALAMAN, TERITORIAL, PERAIRAN KEPULAUAN, ZEEI DAN PERAIRAN DARAT YANG TERKELOLA SUMBER DAYA IKANNYA TAHUN 2019

SASARAN STRATEGIS - 3	TERWUJUDNYA PENGELOLAAN SDKP YANG PARTISIPATIF, BERTANGGUNGJAWAB, DAN BERKELANJUTAN							
	IKU-5							
REALISASI 2018	TAHUN 2019*			% KENAIKAN THD 2018-2019	PERJANJIAN KINERJA		RENSTRA KKP 2015-2019	
	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN		TARGET 2019	% REALISASI THD TARGET PK	TARGET 2019	% REALISASI THD TARGET RENSTRA
-	11	11	100%	-	11	100	11	100

Pada tahun 2019 terealisasi 11 WPP yang telah dikelola melalui pelaksanaan upaya pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial, Perairan Kepulauan, ZEEI dan Perairan Darat atau telah mencapai 100%. Adapun kegiatan yang menunjang indikator tersebut, yaitu:

- a. Pembahasan kertas posisi DELRI untuk kegiatan *Pre Senior Official Meeting (SOM)* EAFM dan SOM ke-15 CTI CFF di Solomon Island;
- b. Pelaksanaan *Pre Senior Official Meeting (SOM)* EAFM dan SOM ke-15 CTI CFF di Solomon Island;
- c. Pengelolaan perikanan rajungan di WPPNRI 712 (Khususnya Provinsi Jawa Barat);
- d. Pembahasan rencana pengelolaan perikanan kakap dan kerapu di WPPNRI;
- e. Pembahasan Harvest strategi Kakap dan kerapu di WPPNRI;
- f. Konsultasi Publik Dokumen strategi pemanfaatan perikanan kakap dan kerapu di WPPNRI 713;
- g. Pembahasan tindak lanjut *PSC Meeting GEF 5* di Dili, Timor Leste;
- h. Pembahasan *Project Inception Workshop* dan *Regional Steering Committee Project ATSEA 2*;
- i. Pendaftaran kapal di RFMOs. Sampai dengan Tahun 2019, rincian kapal-kapal berbendera Indonesia yang telah didaftarkan ke RFMO adalah sebagai berikut:
 - *IOTC Record of Authorised Vessel* terdaftar 296 unit kapal
 - *CCSBT Record of Authorised Vessel* terdaftar 209 unit kapal
 - *WCPFC Record of Authorised Vessel* terdaftar 7 unit kapal
- j. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Moratorium Laut Banda dan Penguatan Implementasi *Logbook* Melalui Pemanfaatan Data Oseanografi di Bali tanggal 24-25 Oktober 2019;
- k. *The Thirteenth Session of Finance and Administration Committee and the Sixteenth Regular Session of the Commission for the Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stocks in the Western and Central Pacific Ocean* di Port Moresby - Papua Nugini;
- l. Pembahasan Distribusi Kuota Southern Bluefin Tuna (SBT) tahun 2020;



- m. Pemanfaatan Kuota *Southern Bluefin Tuna* (SBT) melalui *Catch Documentation Scheme*. Jumlah tangkapan Tuna Sirip Biru Selatan (SBT) sampai dengan Triwulan IV Tahun 2019 tercatat yang menggunakan Form CDS, jumlah SBT yang tertangkap sebesar 983.869,85 Kg;
- n. Pembahasan petunjuk teknis EAFM di Perairan Darat;
- o. Melaksanakan Serah Terima Hasil Pengadaan Bantuan Pemerintah Rehab Fasilitas Pendukung Tempat Pelelangan Ikan di Perairan Darat Jakabaring Provinsi Sumatera Selatan di WPP 711;
- p. Pertemuan Koordinasi Pengelolaan Perikanan Perairan Darat (P3D).

Jumlah lokasi kawasan laut, wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi dan atau masterplan, bussines plan, yang ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan

Jumlah lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi dan/atau masterplan dan bisnisplan yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundangan merupakan banyaknya Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan/atau Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) yang memiliki dokumen rencana zonasi dan/atau master plan dan bisnisplan. Kawasan strategis nasional dan KSNT meliputi kawasan laut, selat, teluk antar wilayah, dan pulau-pulau kecil terluar (PPKT). Dasar hukum pelaksanaan indikator kinerja ini adalah UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Pasal 43 ayat 4 (Perencanaan zonasi kawasan laut merupakan perencanaan untuk menghasilkan rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan rencana zonasi kawasan antar wilayah) dan Pasal 4 ayat 4 (Penyusunan RTRLN, RZ KSN, RZ KSNT, dan rencana zonasi Kawasan Antar wilayah dilaksanakan dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait). Sedangkan untuk KSNT dasar hukumnya, selain UU No. 32 Tahun 2014 yaitu Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan PPKT, bahwa dalam pemanfaatan PPKT dilakukan berdasarkan Rencana Zonasi (RZ) yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

TABEL 3.86. CAPAIAN JUMLAH LOKASI KAWASAN LAUT, WILAYAH PESISIR YANG MEMILIKI RENCANA ZONASI DAN/ATAU MASTERPLAN BUSINES PLAN, YANG DITETAPKAN MENJADI PERATURAN-PERUNDANGAN

SASARAN STRATEGIS - 5				TERSELENGGARANYA TATA KELOLA PEMANFAATAN SDKP YANG ADIL, BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN					
IKU-13				EFEKTIVITAS TATA KELOLA PEMANFAATAN SDKP YANG ADIL, BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN					
INDIKATOR KINERJA PEMBENTUK (IKP-8)				JUMLAH LOKASI KAWASAN LAUT, WILAYAH PESISIR YANG MEMILIKI RENCANA ZONASI DAN ATAU MASTERPLAN BUSINES PLAN, YANG DITETAPKAN MENJADI PERATURAN-PERUNDANGAN					
REALISASI				TAHUN 2019				RENSTRA KKP 2015-2019	
2015	2016	2017	2018	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PERTUMBUHAN 2018-2019	TARGET 2019	% CAPAIAN
-	14	7	24	36	38	105,56	58,33	50	76



Pada tahun 2019, jumlah lokasi kawasan laut, wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi dan atau masterplan/ busines plan, yang ditetapkan menjadi peraturan perundangan mengalami kenaikan yaitu sebanyak 24 lokasi di tahun 2018 menjadi 38 lokasi di tahun 2019”.

Pada tahun 2019, jumlah lokasi kawasan laut, wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi dan atau *masterplan busines plan*, yang ditetapkan menjadi peraturan perundangan ditargetkan sebanyak 36 lokasi, dan realisasinya sebanyak 38 lokasi atau mencapai 105,56%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yaitu sebesar 24 lokasi, capaian tahun 2019 mengalami kenaikan

sebesar 58,33%. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra KKP Tahun 2015-2019, realisasi tahun 2019 yaitu sebanyak 50 lokasi, telah mencapai 76%.

TABEL 3.87. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA JUMLAH LOKASI KAWASAN LAUT DAN WILAYAH PESISIR YANG MEMILIKI RENCANA ZONASI DAN/ATAU MASTERPLAN DAN BISNISPLAN YANG AKAN DITETAPKAN MENJADI PERATURAN PERUNDANGAN (KAWASAN) TAHUN 2018-2019

NO	INDIKATOR/KEGIATAN	CAPAIAN 2018	TARGET 2019	CAPAIAN 2019
1	Tanggapan dan Saran Dok Final RZWP3K	14	12	12
2	Rencana Zonasi di KSN dan KSNT	24	20	22
3	Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (Selat, Teluk dan Laut)	3	4	4
JUMLAH		41	36	38

TABEL 3.88. RINCIAN KAWASAN CAPAIAN RZ TAHUN 2019

NO	DOKUMEN RZ	JUMLAH	KAWASAN
1	RZKAW	4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laut Maluku 2. Selat Malaka 3. Teluk Bone 4. Laut Flores
2	RZKSN	6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Strategis Nasional Selat Sunda (Banten-Lampung) 2. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Manado-Bitung (Sulut) 3. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan (Kaltim) 4. Kawasan Biak (Papua) 5. Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat (Papua Barat) 6. Kawasan SARBAGITA (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan)
3	RZKSNT		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pulau Moff/Budd (Papua Barat) 2. Pulau Fani (Papua Barat) 3. Pulau Kawiyo (Sulawesi Utara) 4. Pulau Kawaluso (Sulawesi Utara) 5. Pulau Marore (Sulawesi Utara) 6. Pulau Batu Bawaikang (Sulawesi Utara) 7. Pulau Rote (Nusa Tenggara Timur)



NO	DOKUMEN RZ	JUMLAH	KAWASAN
8.			8. Pulau Ndana (Nusa Tenggara Timur) 9. Pulau Pagai Utara (Sumatera Barat) 10. Pulau Niau (Sumatera Barat) 11. Pulau Sibaru-Baru (Sumatera Barat) 12. Pulau Weh (Aceh) 13. Pulau Rondo (Aceh) 14. Pulau Batebelah (Aceh) 15. Pulau Enggano (Bengkulu) 16. Pulau Mega (Bengkulu)
4	RZWP3K	12	1. Provinsi Jambi 2. Provinsi Aceh 3. Provinsi Papua Barat 4. Provinsi Banten 5. Provinsi Riau 6. Provinsi Sumatera Selatan 7. Provinsi Bali 8. Provinsi DKI Jakarta 9. Provinsi Kalimantan Timur 10. Provinsi Bangka Belitung 11. Provinsi Papua 12. Provinsi Kepulauan Riau
JUMLAH		38	

Keberhasilan capaian ini didukung oleh dengan adanya upaya antara lain:

- a. Koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengetahui keadaan cuaca.
- b. Pelaksanaan survey dilakukan secara kluster sehingga dapat meminimalisir belanja perjalanan.
- c. Pengumpulan data sekunder dimaksimalkan, sehingga pengambilan data primer dapat berkurang.
- d. Pada saat survey dengan menggunakan drone mempermudah untuk mengetahui kondisi eksisting di pulau-pulau kecil.
- e. Penyusunan rencana zonasi memperhitungkan RTR KSN, RZWP3K yang sudah ada.
- f. Penentuan alokasi ruang melibatkan seluruh *stakeholder* yang ada di kawasan strategis nasional.
- g. Pelaksanaan Rapat Kerja Teknis diawal dan akhir tahun pada penyusunan RZWP3K untuk mengetahui permasalahan dan tindaklanjut dalam penyusunan PERDA RZWP3K.
- h. Penentuan alokasi ruang dan konsultasi publik melibatkan *stakeholder* yang masuk kedalam Kawasan Antar Wilayah.
- i. Pertemuan yang dilaksanakan menghasilkan Berita Acara yang disepakati, sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan.



Unit Pembudidaya Ikan Bersertifikat CBIB untuk komoditas ekspor

Tuntutan permintaan negara *buyer* terhadap kebutuhan pangan khususnya produk hasil perikanan budidaya semakin meningkat dari tahun ke tahun dan hal ini diikuti juga dengan ketatnya persyaratan yang harus dipenuhi produsen. Indonesia sebagai salah satu negara produsen produk perikanan budidaya harus mampu menyiapkan produk-produk yang berkualitas, berdaya bersaing dan memenangkan persaingan di pasar regional maupun di tingkat internasional. Target Jumlah unit pembudidayaan ikan bersertifikat CBIB skala kecil skala besar untuk komoditas ekspor pada Tahun 2019 adalah 2.000 unit dengan realiasi tahun 2019 adalah sebesar 2.002 unit atau mencapai 100,1 persen. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 21,85%.

TABEL 3.89. CAPAIAN JUMLAH UNIT PEMBUDIDAYA IKAN BERSERTIFIKAT CBIB (CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK) UNTUK KOMODITAS EKSPOR

SASARAN STRATEGIS - 5				TERSELENGGARANYA TATA KELOLA PEMANFAATAN SDKP YANG ADIL, BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN					
IKU-13				EFEKTIVITAS TATA KELOLA PEMANFAATAN SDKP YANG ADIL, BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN					
INDIKATOR KINERJA PEMBENTUK				JUMLAH UNIT PEMBENIHAN BERSERTIFIKAT CBIB (CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK)					
REALISASI				TAHUN 2019				RENSTRA KKP 2015-2019	
2015	2016	2017	2018	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% KENAIKAN TAHUN 2018-2019	TARGET 2019	% CAPAIAN THD TARGET 2019
10.672	-	-	1.643	2.000	2.002	100,1	21,85	2.000	100,1

Peningkatan kualitas daya saing produk sektor perikanan budidaya di Indonesia dilakukan melalui penerapan standar dan sertifikasi CBIB yang merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing produk budidaya dalam hal jaminan keamanan pangan dan kualitas, serta perwujudan perikanan budidaya yang bertanggung jawab. Untuk itu Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya selaku Otoritas Kompeten (OK) Bidang Perikanan Budidaya terus mengembangkan sistem mutu dan meningkatkan standar CBIB dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing baik dari kualitas Sertifikasi CBIB maupun produk hasil perikanan budidaya yang telah disertifikasi CBIB.

TABEL 3.90. JUMLAH UNIT PEMBENIHAN BERSERTIFIKAT CBIB

NO	PROVINSI	TARGET	TERBIT SERTIFIKAT DI TAHUN 2019	%
1	Aceh	80	179	223,75
2	Sumut	80	1	1,25
3	Sumbar	0	15	~
4	Riau	80	104	130,00



NO	PROVINSI	TARGET	TERBIT SERTIFIKAT DI TAHUN 2019	%
5	Sumsel	80	82	102,50
6	Bengkulu	80	39	48,75
7	Lampung	130	8	6,15
8	Babel	0	12	~
9	Kepri	0	23	~
10	Jawa Barat	170	105	61,76
11	Jawa Tengah	170	39	22,94
12	DIY	50	77	154,00
13	Jawa Timur	170	93	54,71
14	Banten	80	49	61,25
15	Bali	50	1	2,00
16	NTB	130	124	95,38
17	NTT	0	1	~
18	Kalbar	80	108	135,00
19	Kalteng	80	42	52,50
20	Kalsel	0	30	~
21	Kaltim	80	62	77,50
22	Kaltara	80	42	52,50
23	Sulut	0	15	~
24	Sulteng	0	202	~
25	Sulsel	170	413	242,94
26	Sultra	80	32	40,00
27	Maluku	80	104	130,00
JUMLAH		2.000	2.002	100,10

Sertifikat CPIB/Cara perbenihan untuk komoditas ekspor

Tuntutan pembudidaya terhadap benih bermutu dapat dipenuhi dengan penyediaan benih bermutu oleh unit pembenihan. Benih bermutu dapat dihasilkan dari induk unggul dan proses pembenihan yang memenuhi persyaratan SNI Perbenihan Perikanan, manajemen mutu, keamanan pangan dan ramah terhadap lingkungan. Proses tersebut dinamakan proses yang memenuhi Cara Pembenihan Ikan yang Baik.



Target Jumlah unit pembudidayaan ikan bersertifikat CPIB skala kecil skala besar untuk komoditas ekspor pada Tahun 2019 adalah 230 (dua ratus tiga puluh) unit dengan realiasi tahun 2019 adalah sebesar 236 unit atau mencapai 102,61 persen.

TABEL 3.91. JUMLAH UNIT PEMBENIHAN IKAN BERSERTIFIKAT CPIB (CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK) UNTUK KOMODITAS EKSPOR

SASARAN STRATEGIS - 5				TERSELENGGARANYA TATA KELOLA PEMANFAATAN SDKP YANG ADIL, BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN					
IKU-13				EFEKTIVITAS TATA KELOLA PEMANFAATAN SDKP YANG ADIL, BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN					
INDIKATOR KINERJA PEMBENTUK				JUMLAH UNIT PEMBENIHAN BERSERTIFIKAT CPIB (CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK)					
REALISASI				TAHUN 2019				RENSTRA KKP 2015-2019	
2015	2016	2017	2018	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% KENAIKAN TAHUN 2018-2019	TARGET 2019	% CAPAIAN THD TARGET 2019
608	805	832	203	230	236	102,61	16,26	230,00	102,61

Sumber: Ditjen Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (2019)
 Tahun 2015-2017 capaian dihitung secara kumulatif dari tahun sebelumnya
 Tahun 2018 capaian dihitung secara non kumulatif berdasarkan capaian tahun 2018

Penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik oleh unit pembenihan harus didorong melalui sosialisasi dan pembinaan penerapan CPIB. Unit pembenihan yang menerapkan CPIB dilakukan penilaian sertifikasi CPIB untuk menentukan kesesuaian penerapan yang dilakukan terhadap persyaratan SNI Perbenihan, Manajemen Mutu, Keamanan Pangan dan Lingkungan. Penilaian Sertifikasi CPIB dilakukan oleh auditor CPIB terhadap unit pembenihan yang telah dilakukan pembinaan dan memiliki personil bersertifikat MPM yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

TABEL 3.92. CAPAIAN SERTIFIKASI CPIB KOMODITAS EKSPOR TAHUN 2019

NO	PROVINSI	TARGET	TOTAL	NO	PROVINSI	TARGET	TOTAL
1	Aceh		-	18	Nusa Tenggara Barat	-	3
2	Sumatera Utara	10	18	19	Nusa Tenggara Timur	-	-
3	Sumatera Barat	10	12	20	Kalimantan Barat	10	3
4	Riau	17	30	21	Kalimantan Tengah	-	5
5	Bengkulu	-	-	22	Kalimantan Timur	-	28
6	Kep. Riau	-	2	23	Kalimantan Utara	-	-
7	Jambi	-	3	24	Kalimantan Selatan	-	-
8	Sumatera Selatan	-	3	25	Sulawesi Utara	-	1
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	26	Sulawesi Selatan	15	8
10	Lampung	24	2	27	Sulawesi Tengah	-	-
11	Banten	-	11	28	Gorontalo	-	-
12	Dki Jakarta	-	-	29	Sulawesi Tenggara	10	6
13	Jawa Barat	29	19	30	Sulawesi Barat	-	-
14	Jawa Tengah	34	13	31	Maluku Utara	-	-
15	Yogyakarta	15	15	32	Maluku	-	-
16	Jawa Timur	47	49	33	Provinsi Papua	-	-
17	Bali	9	5	34	Papua Barat	-	-
JUMLAH						230	236

Sumber: Ditjen Perikanan Budidaya, KKP (2020)



SASARAN STRATEGIS (SS-6) “TERSELENGGARANYA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SDKP YANG PROFESSIONAL DAN PARTISIPATIF”

Sasaran Strategis ini mempunyai dua IKU yaitu 1). Persentase Penyelesaian Tindak Pidana KP secara Akuntabel dan Tepat Waktu dan 2). Tingkat Keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan, dengan penjelasan capaian masing-masing indikator kinerja utama sebagai berikut :

IKU

14

Persentase penyelesaian tindak pidana KP yang disidik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Nilai kinerja Persentase penyelesaian tindak pidana KP yang disidik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku” diperoleh dari perbandingan jumlah kasus yang telah terselesaikan sampai tahap P-21 dengan jumlah kasus yang dilakukan proses hukum.

Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggung-jawabkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku mengalami peningkatan sebesar 3,17% yaitu sebesar 93,44% di tahun 2018 menjadi 96,40% di tahun 2019. Hal ini menunjukkan semakin tingginya komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan.

Pada tahun 2019, persentase Penyelesaian Tindak Pidana KP Secara Akuntabel dan Tepat Waktu pada tahun 2019 sebesar 96,40% atau telah mencapai 104,78%. Apabila dibandingkan dengan target Renstra KKP Tahun 2015-2019 yaitu sebesar 92% realisasi tahun 2019 telah mencapai 104,78%. Jumlah kasus yang dihitung adalah kasus tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani oleh PPNS Perikanan yang ada di UPT/ Satker Pengawasan SDKP maupun Dinas Kelautan

dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota meliputi kasus pelanggaran dalam bidang penangkapan ikan, pemasaran ikan yang dilarang maupun bidang kelautan.

TABEL 3.93. PERSENTASE PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG DISIDIK, DAN DAPAT DIPERTANGGUNG-JAWABKAN SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU

SASARAN STRATEGIS - 6				TERSELENGGARANYA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SDKP YANG PROFESIONAL DAN PARTISIPATIF					
IKU-14				PERSENTASE PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG DISIDIK, DAN DAPAT DIPERTANGGUNG-JAWABKAN SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU (%)					
REALISASI				TAHUN 2019				RENSTRA KKP 2015-2019	
2015	2016	2017	2018	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% KENAIKAN TAHUN 2018-2019	TARGET 2019	% CAPAIAN 2019 THD TARGET 2019
93,29	85,29	92,02	93,44	92,00	96,40	104,78	3,17	92,00	104,78





Tahun 2019 jumlah kasus yang masuk sebanyak 151 kasus yang terdiri dari Kasus Tindak pidana perikanan (TPP) sebanyak 124 kasus dan tindak pidana kelautan (TPK) sebanyak 27 kasus. Progres penanganan kasus tersebut terdiri dari pemeriksaan pendahuluan 4 kasus, tindakan administrasi 32 kasus, 4 tindakan lain dan 111 kasus proses hukum (84 TPP, 27 TPK). Dari

sejumlah yang telah masuk dalam proses hukum sebanyak 104 kasus sudah dinyatakan selesai.

Rekapitulasi perkembangan penanganan kasus tindak pidana kelautan dan perikanan sebagai berikut:

TABEL 3.94. PERKEMBANGAN PENANGANAN TINDAK PIDANA KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	PENANGANAN KASUS	JUMLAH
1	Pemeriksaan Pendahuluan	4
2	Tindakan administrative	32
3	Tindakan lain	4
4	Proses Hukum	111
	- SP3	3
	- Penyidikan	4
	- P21	9
	- Tahap II	-
	- Proses Sidang	4
	- Banding	12
	- Kasasi	2
	- Peninjauan Kembali	
	- Inkracht	77
TOTAL		151

Tingginya pencapaian kinerja tersebut, didorong oleh peningkatan kapasitas PPNS perikanan dalam menyelesaikan kasus TPKP sebagai dampak positif dari pendidikan dan pelatihan secara regular dan crash program. Pada tahun 2019, telah dilakukan pendidikan PPNS Perikanan sebanyak 30 orang yang berasal dari pengawas perikanan UPT pengawasan SDKP, selanjutnya diusulkan untuk dapat dilakukan pelantikan oleh Kemenkumham. Sehingga total PPNS perikanan seluruh Indonesia yang dimiliki sebanyak 523 orang bertambah sebanyak 10 orang dari tahun 2018. Sebaran PPNS Perikanan sampai dengan Tahun 2019, disajikan pada Tabel 82.



TABEL 3.95. SEBARAN PPNS PERIKANAN DI INDONESIA SAMPAI DENGAN TAHUN 2019

INSTANSI	JENIS KELAMIN		BIDANG TUGAS		TOTAL
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TEKNIS PENGAWASAN SDKP	DI LUAR TEKNIS PENGAWASAN SDKP	
Pusat	84	9	89	4	93
UPT PSDKP	185	4	177	12	189
Dinas Kelautan dan Perikanan	227	14	221	20	241
JUMLAH	496	27	487	36	523

Pada tahun 2019, telah terselenggara Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan Tingkat Pusat sebanyak 2 (kali) di 5 (lima) provinsi. Kegiatan tersebut, menjadi wadah forum koordinasi agar ada pemahaman/persepsi yang sama antar aparat penegak hukum tindak pidana perikanan terhadap penerapan pendekatan multi rezim hukum dalam penanganan tindak pidana perikanan dan tindak pidana terkait lainnya. Sehingga akan diperoleh solusi kongkrit bersama dalam menegakkan hukum dibidang kelautan dan perikanan yang ditangani diseluruh Indonesia.



Peningkatan capaian kinerja ini juga didukung oleh kegiatan pemusnahan barang bukti berupa kapal pelaku *illegal fishing* sejak tahun 2014 yang dilaksanakan oleh KKP. Khusus selama tahun 2019, sebanyak 68 kapal pelaku *Illegal Fishing* telah ditenggelamkan dengan rincian 1 Kapal Ikan Indonesia (KII) dan 67 Kapal Ikan Asing (KIA). Secara total sejak tahun 2014 s/d 2019 telah ditenggelamkan sebanyak 556 kapal pelaku *illegal fishing*.

Berikut data pemusnahan barang bukti/barang rampasan negara berupa kapal tahun 2014 sampai dengan Desember 2019.

TABEL 3.96. REKAP DATA PEMUSNAHAN BARANG BUKTI/BARANG RAMPASAN NEGARA TAHUN 2014 S.D DESEMBER 2019

NO	TAHUN	NEGARA									TOTAL
		MALAYSIA	FILIPINA	VIETNAM	INDONESIA	THAILAND	P N G	R R T	NIGERIA	BELIZE	
1	2014	-	1	3	-	2	2	-	-	-	8
2	2015	12	35	36	10	19	-	1	-	-	113
3	2016	27	22	59	5	-	-	-	1	1	115
4	2017	12	18	90	6	1	-	-	-	-	127
5	2018	22	15	83	4	1	-	-	-	-	125
6	2019	16	1	49	1	1	-	-	-	-	68
JUMLAH		89	96	332	29	24	2	1	1	1	556



IKU
15

Tingkat Keberhasilan Pengawasan di Wilayah Perbatasan

Pada tahun 2019 telah dilakukan verifikasi tingkat keberhasilan pengawasan di 31 lokasi titik perbatasan baik secara langsung atau secara *on desk*. Verifikasi langsung dilaksanakan di Jagoibabang, Aruk, Entikong, Wini, Motamasin, Motaain, Dumai, Panipahan, Skouw, Miangas, Tanjung Balai Karimun dan Morotai. Sisanya dilaksanakan secara *on desk*. Hasil verifikasi keberhasilan wilayah perbatasan adalah sebagai berikut :

TABEL 3.97. HASIL VERIFIKASI KEBERHASILAN WILAYAH PERBATASAN

NO	WILKER	KEGIATAN LALU LINTAS UMUM	FASILITAS SARANA PRASARANA PELAYANAN DAN PENGAWASAN	PELAYANAN	PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK	MONITORING DAN EVALUASI UPT KE WILKER	KOMUNIKASI KERJA SAMA DAN KOORDINASI (K3)	SDM PERBATASAN	NILAI TOTAL
1	Jagoi Babang - Entikong	5,67	14,80	24,05	12,00	9,00	10,00	7,60	83,12
2	Aruk - Entikong	5,67	15,20	20,72	12,00	9,33	9,60	5,60	78,12
3	PLBN Entikong - Entikong	7,00	15,20	23,27	12,00	9,33	10,00	9,20	86,00
4	Wini - Kupang	6,33	14,00	19,92	12,75	9,33	9,20	5,20	76,74
5	Motamasin - Kupang	6,00	15,20	19,96	12,75	9,33	10,00	6,00	79,24
6	Motaain - Kupang	6,00	17,20	19,65	11,25	8,33	9,20	7,60	79,24
7	Dumai - Pekanbaru	9,00	10,80	20,71	9,75	9,33	8,80	9,20	77,60
8	Panipahan - Pekanbaru	10,00	8,00	22,50	10,50	9,33	8,80	7,20	76,33
9	Skouw - Jayapura	6,67	14,80	20,24	9,75	8,00	9,60	7,20	76,26
10	Miangas - Tahuna	6,00	17,20	21,57	10,50	8,33	10,00	5,60	79,20
11	Tj, Balai Karimun – Tj. Pinang	8,33	16,40	23,33	12,00	7,67	7,60	6,00	81,33
12	Morotai - Ternate	5,67	16,00	18,57	12,00	9,00	9,60	6,00	76,84
13	Sebatik - Tarakan	8,33	18,40	20,24	9,75	7,33	9,20	6,40	79,66
14	Nunukan - Tarakan	8,00	17,60	20,48	9,00	8,00	10,00	6,40	79,48
15	Natuna – Tj. Pinang	8,33	17,20	21,07	12,00	8,33	8,00	6,00	80,94
16	Anambas – Tj. Pinang	8,33	15,20	23,10	12,00	7,67	9,20	5,20	80,70
17	Lagoi Bintang – Tj.Pinang	8,33	17,20	21,07	12,00	8,33	8,00	6,80	81,74
18	Selat Panjang - Pekanbaru	8,33	16,00	22,14	13,50	4,67	10,00	6,00	80,64
19	Bengkalis - Pekanbaru	9,00	16,80	23,36	12,00	6,00	6,00	6,00	79,16
20	Tembilahan - Pekanbaru	8,67	14,40	20,36	11,25	9,00	9,60	6,00	79,27
21	Sabang - Aceh	8,33	15,60	21,43	9,75	8,33	8,80	6,80	79,05
22	Simeuleu - Aceh	8,33	16,00	22,86	12,75	7,33	9,60	5,20	82,07
23	Belakang Padang - Batam	8,33	15,60	22,86	12,00	7,33	8,40	6,40	80,92



NO	WILKER	KEGIATAN LALU LINTAS UMUM	FASILITAS SARANA PRASARANA PELAYANAN DAN PENGAWASAN	PELAYANAN	PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK	MONITORING DAN EVALUASI UPT KE WILKER	KOMUNIKASI KERJA SAMA DAN KOORDINASI (K3)	SDM PERBATASAN	NILAI TOTAL
24	Sagulung - Batam	8,33	16,00	21,79	13,50	4,67	10,00	5,20	79,49
25	Batu Ampar - Batam	9,00	17,20	18,57	11,25	8,33	8,80	7,60	80,75
26	Saumlaki - Ambon	8,33	15,60	22,86	12,00	8,00	9,20	4,80	80,79
27	Mentawai - Padang	8,33	14,40	24,29	10,50	6,67	10,00	6,80	80,99
28	Nanga Badau - Entikong	8,67	14,00	20,00	11,25	8,67	10,00	6,80	79,38
29	Sota - Merauke	5,33	17,60	17,86	12,75	8,00	9,20	4,00	74,74
30	Kuala Tanjung – Tj. Balai Asahan	6,00	17,20	20,50	10,50	9,00	9,60	6,00	78,80
31	Marore - Tahuna	5,33	14,40	18,57	12,75	9,03	10,00	8,80	78,88
NILAI RATA-RATA									79,60

Pada tahun 2019, tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan mengalami peningkatan sebesar 1,38% yaitu 78,52% di tahun 2018 menjadi 79,60 di tahun 2019. Tercapainya tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan merupakan komitmen bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta jajarannya dan instansi terkait dalam rangka pengawasan kegiatan lalu lintas hasil perikanan di pulau-pulau terluar dan kawasan perbatasan Indonesia.

Berdasarkan tabel di atas wilayah kerja yang memiliki nilai keberhasilan di *exit-entry* point tertinggi yaitu Entikong dengan 86% dan nilai terendah yaitu Sota dengan 74,74%, Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2018 yaitu sebesar 78,52%, realisasi tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 1,38%. prasarana layanan kantor wilker di perbatasan dan percepatan layanan melalui PPK *online* melalui peningkatan sarana internet. Wilker perbatasan yang memiliki nilai kegiatan lalu lintas umum paling tinggi adalah Panipahan sedangkan yang paling rendah adalah Sota. Fasilitas sarana dan prasarana yang paling baik adalah Sebatik, Pelayanan dengan nilai paling baik adalah Jagoi Babang. Sedangkan SDM yang paling baik nilainya adalah PLBN Entikong

TABEL 3.98. CAPAIAN TINGKAT KEBERHASILAN PENGAWASAN DI WILAYAH PERBATASAN

SASARAN STRATEGIS - 6				TERSELENGGARANYA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SDKP YANG PROFESIONAL DAN PARTISIPATIF					
IKU-15				TINGKAT KEBERHASILAN PENGAWASAN DI WILAYAH PERBATASAN					
REALISASI				TAHUN 2019				RENSTRA KKP 2015-2019	
2015	2016	2017	2018	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% KENAIKAN TAHUN 2018-2019	TARGET 2019	% CAPAIAN THD TARGET 2019
-	75,40	75,95	78,52	78,00	79,60	102,05	1,38	78,00	102,05

Realisasi pencapaian indikator ini dari sejak tahun 2016 terus mengalami peningkatan dan selalu melebihi dari target yang telah ditetapkan. Tercapainya tingkat keberhasilan pengawasan di



wilayah perbatasan merupakan komitmen bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta jajarannya dan instansi terkait dalam rangka pengawasan kegiatan lalu lintas hasil perikanan di pulau-pulau terluar dan kawasan perbatasan Indonesia melalui kegiatan verifikasi pengawasan *exit entry* perbatasan untuk meminimalisir konsekuensi meningkatnya risiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan berbahaya serta masuknya hasil perikanan yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia melalui peningkatan sistem jaminan kesehatan ikan mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan kawasan perikanan budidaya yang bebas hama penyakit ikan berbahaya serta terjaminnya hasil perikanan yang aman untuk konsumsi manusia.

GAMBAR 3.50. APEL BERSAMA DI PERBATASAN RI-MALAYIA (PLBN ENTIKONG)



Perlunya Kementerian Kelautan dan Perikanan menjaga keamanan di wilayah perbatasan tidak terlepas dari tingginya potensi terjadinya kejahatan di wilayah tersebut. Ada beberapa bentuk kejahatan (lintas batas) yang potensial terjadi di wilayah perbatasan, di antaranya: *illegal fishing*, dan penyelundupan (*smuggling*). Dalam perkembangannya, kejahatan lintas batas ini mengalami peningkatan yang relatif tajam serta menimbulkan kerugian yang sangat besar baik bagi masyarakat maupun Negara, seperti yang terjadi pada kasus *illegal fishing*, penyelundupan (*smuggling*) benih lobster maupun kepiting bertelur. Hal ini terjadi karena masih terdapat beberapa kekurangan diantaranya adalah :

1. Masih banyaknya pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran yang tidak resmi yang tidak terawasi oleh petugas sehingga memungkinkan masih adanya masyarakat yang melewati jalan/pintu tersebut untuk melalulintaskan MP/hasil perikanan.
2. Masih kurangnya jumlah personil yang terdapat di daerah perbatasan khususnya daerah perbatasan yang memiliki frekuensi lalu lintas media pembawa/hasil perikanan yang cukup tinggi



3. Masih kurangnya dan belum updatenya pemahaman petugas terhadap perubahan regulasi/kebijakan dari pusat.
4. Masih kurangnya monitoring dan evaluasi yang dilakukan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan induk ke wilker perbatasan.

Untuk mengamankan wilayah perbatasan dari kemungkinan terjadinya berbagai aktivitas ilegal, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan berbagai upaya konkrit, di antaranya:

- a) Melakukan patroli perbatasan dan/atau operasi gabungan secara rutin, dengan melibatkan instansi lain, seperti TNI, Polri, Bea Cukai, Imigrasi serta instansi terkait lainnya;
- b) Meningkatkan pengawasan terhadap *Illegal fishing*, penyelundupan komoditi perikanan.
- c) Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah yang terkait dalam pengamanan daerah perbatasan seperti TNI, Polri, Kantor Imigrasi dan Bea Cukai.
- d) Meningkatkan kualitas pengawasan di pos-pos lintas batas terhadap lalu lintas komoditi perikanan. Peningkatan pengawasan meliputi penambahan pos-pos pengawasan dan personil di pos lintas batas.

D. LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE

SASARAN STRATEGIS (SS-7) “TERWUJUDNYA ASN KKP YANG KOMPETEN, PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS”

Sasaran strategis-7 terdiri dari satu IKU yaitu Indeks Kompetensi dan integritas dengan penjelasan capaian sebagai berikut:

Indeks Profesionalitas ASN KKP

IKU

16

Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis ini adalah Indeks Profesionalitas ASN KKP. Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. IKU ini merupakan indikator baru di tahun 2019 penyempurnaan dari Indeks kompetensi dan integritas sehingga nilainya tidak dapat dibandingkan dengan nilai pada tahun sebelumnya.

Indeks Profesionalitas ASN meliputi dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Penilaian dimensi kualifikasi menggambarkan informasi kualifikasi pendidikan formal PNS dari



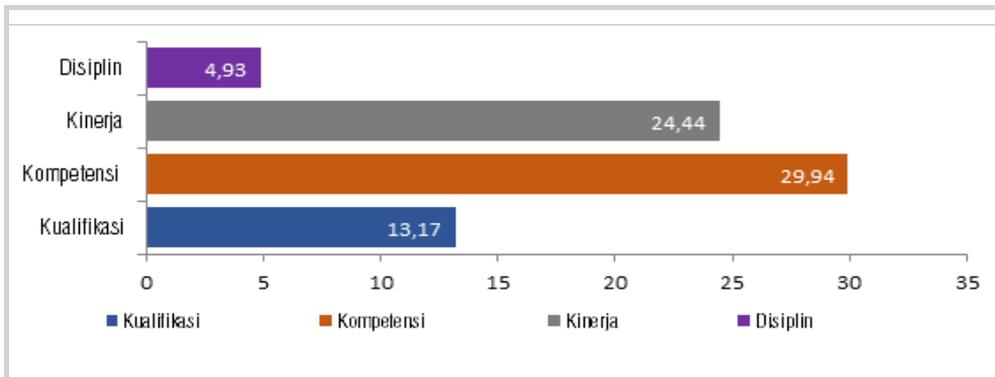
jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Sedangkan dimensi kompetensi merupakan informasi yang menggambarkan riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, mulai dari diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis maupun seminar/workshop/magang/kursus. Dimensi kinerja menilai kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Indikator yang digunakan adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang berupa Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai (PKP). Informasi ke pegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS ditunjukkan melalui dimensi disiplin. Pengolahan data diambil dari database kepegawaian SIMPEG Online KKP.

TABEL 3.99. INDEKS PROFESIONALITAS ASN

SASARAN STRATEGIS - 7			TERWUJUDNYA ASN KKP YANG KOMPETEN, PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS					
IKU-16			INDEKS PROFESIONALITAS ASN					
REALISASI			TAHUN 2019				RENSTRA KKP 2015-2019	
2016	2017	2018	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% KENAIKAN 2018 THD 2019	2019	% CAPAIAN 2018 THD TARGET 2019
-	-	-	71,00	72,48	102,08		-	-

Ket. IKU Indeks ASN merupakan IKU baru di tahun 2019

GAMBAR 3.51. EMPAT KOMPONEN DALAM PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (IP ASN)



Pada tahun 2019, Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) sebesar 72,48% atau telah mencapai 102,08%.

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN KKP tahun 2019 adalah sebesar 72,48 dengan capaian nilai per dimensi yaitu dimensi disiplin sebesar 4,93, dimensi kinerja sebesar 24,44, dimensi kompetensi sebesar 29,94 dan dimensi kualifikasi sebesar 13,17. Penyumbang nilai terbesar dalam pencapaian nilai Indeks Profesionalitas KKP yaitu dimensi kompetensi. Dimensi kompetensi diukur dengan menggunakan

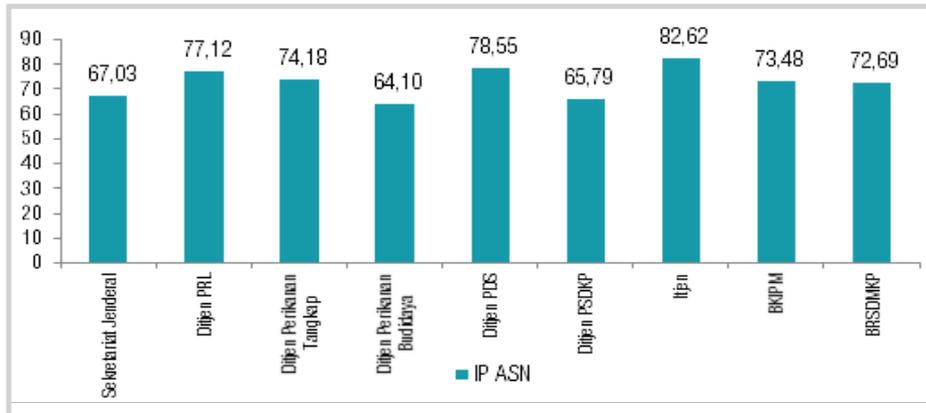


riwayat pengembangan kompetensi. Untuk Indeks Profesionalitas per Unit Eselon 1, IP ASN tertinggi dicapai oleh Inspektorat Jenderal dengan nilai sebesar 82,57 dengan capaian dimensi kualifikasi sebesar 15,94, dimensi kompetensi sebesar 36,81, dimensi kinerja sebesar 24,95 dan dimensi disiplin sebesar 4,83.

TABEL 3.100. CAPAIAN KOMPONEN PEMBENTUK INDEKS PROFESIONALITAS PER UNIT ESELON 1 DI KKP TAHUN 2019

NO	UNIT KERJA	KOMPONEN IP ASN				TOTAL
		KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	
1	Sekretariat Jenderal	13,82	25,06	25,71	4,96	69,54
2	Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	15,99	31,20	25,37	4,98	77,54
3	Ditjen Perikanan Tangkap	11,97	33,99	24,72	4,86	75,54
4	Ditjen Perikanan Budidaya	12,12	21,83	25,09	4,92	63,96
5	Ditjen PDS	15,40	33,36	25,32	4,99	79,07
6	Ditjen PSDKP	12,00	26,34	24,46	4,96	67,76
7	Itjen	15,94	36,81	24,98	4,83	82,57
8	BKIPM	13,62	31,11	23,95	4,94	73,62
9	BRSDMKP	12,35	31,24	24,44	4,93	72,96

GAMBAR 3.52. CAPAIAN INDEKS PROFESIONALITAS PER UNIT ESELON 1 DI KKP TAHUN 2019



Adapun kendala yang dihadapi untuk pencapaian IKU ini salah satunya adalah terkait sisi pemutakhiran database kepegawaian. Dimana masih banyak data yang belum diperbaharui secara berkala oleh pengelola aplikasikepegawaian Sistem Kepegawaian (SIMPEG) online KKP. Selain itu, kendala lain yang dihadapi adalah dari dimensi kompetensi. Dimana masih banyak pejabat struktural yang belum melaksanakan diklatpim sesuai levelnya, diklat teknis 20 Jam Pelajaran (JP) dan seminar serta untuk staf pun masih banyak yang belum melaksanakan diklat 20 JP dan mengikuti seminar. Untuk mengantisipasi kendala-kendala tersebut, beberapa upaya telah dilakukan di antaranya dengan terus melakukan updating secara berkala, koordinasi



dan bimtek updating data SIMPEG, serta mengembangkan aplikasi SIMPEG secara lebih *user friendly*. Sedangkan dari dimensi kompetensi, upaya koordinasi telah dilakukan dengan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP untuk merencanakan pelatihan bagi pegawai KKP, diklat pelatihan dan pendidikan bagian pegawai di tahun 2020.

SASARAN STRATEGIS (SS-8) “TERSEDINYA MANAJEMEN PENGETAHUAN YANG HANDAL DAN MUDAH DIAKSES”

Sasaran Strategis ini mempunyai satu indikator kinerja utama yaitu persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar.

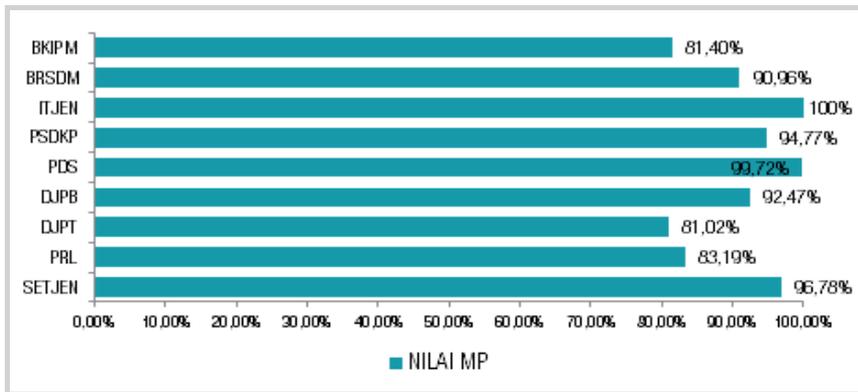
IKU

17

Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar

Sistem Manajemen Pengetahuan merupakan suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Perhitungan indikator ini berasal dari rata-rata persentase unit kerja level 1-2 yang tergabung dan mendistribusikan informasi dalam sistem informasi manajemen pengetahuan terpilih dengan menggunakan aplikasi Bitrix21.

TABEL 3.101. CAPAIAN PERSENTASE UNIT KERJA YANG MENERAPKAN SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN YANG TERSTANDAR



SASARAN STRATEGIS - 8			TERSEDINYA MANAJEMEN PENGETAHUAN YANG HANDAL DAN MUDAH DIAKSES					
IKU-17			PERSENTASE UNIT KERJA YANG MENERAPKAN SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN YANG TERSTANDAR					
REALISASI			TAHUN 2019				RENSTRA KKP 2015-2019	
2016	2017	2018	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% KENAIKAN 2018 THD 2019	TARGET 2019	% CAPAIAN 2018 THD TARGET 2019
60,92	48,89	81,92	80,00	91,14	113,93	11,25	80	113,93



Pada tabel terlihat bahwa realisasi Manajemen Pengetahuan yang Handal dan Mudah Diakses lingkup KKP tahun 2019 sebesar 91,14%, hal ini menunjukkan bahwa capaiannya sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 80%, yang disebabkan karena sebagian besar pejabat di level 1 dan 2 telah tergabung dalam aplikasi *Bitrix* dan aktif dalam *sharing* informasi. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018, realisasi pada tahun 2019 telah mengalami kenaikan sebesar 11,25%. Perhitungan ini merupakan persentase rata-rata dari realisasi aspek keikutsertaan dan aspek keaktifan pada setiap Eselon I lingkup KKP, dengan nilai masing-masing Eselon I seperti gambar di bawah ini.

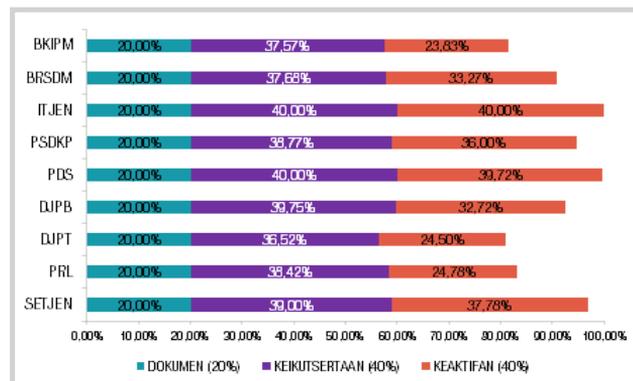
Pada tahun 2019, Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar mengalami kenaikan sebesar 11,26% yaitu 81,92% di tahun 2018 menjadi 91,14% di tahun 2019. Hal ini menunjukkan semakin tingginya pemanfaatan teknologi informasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk *sharing* informasi dan pengetahuan.

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa nilai Manajemen Pengetahuan tertinggi pada Inspektorat Jenderal senilai 100%, dengan nilai keikutsertaan 100% dan keaktifan 100%. Sedangkan nilai Manajemen Pengetahuan yang rendah yaitu Ditjen

Perikanan Tangkap dengan nilai 81,02%, hal ini disebabkan karena pejabat dan pelaksana lingkup Ditjen Perikanan Tangkap yang tergabung dalam aplikasi *Bitrix* keaktifannya hanya 61,25%. Untuk keberlanjutannya, upaya yang akan ditempuh adalah melakukan sosialisasi dan melakukan evaluasi penggunaan *bitrix* di lingkup KKP terutama unit eselon I yang capaiannya masih rendah. Hal-hal yang akan dilakukan untuk peningkatan Manajemen Pengetahuan, adalah:

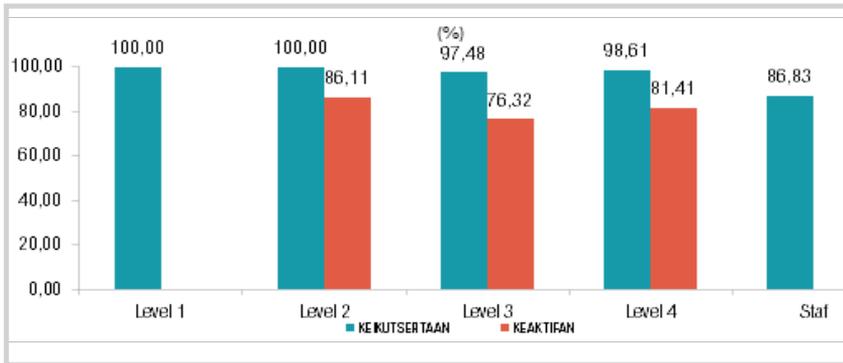
1. Penyempurnaan manual IKU dan pentunjuk teknis.
2. Penyeragaman format nama dan jabatan.
3. Optimalisasi fitur aplikasi.
4. Sosialisasi secara lebih menyeluruh dan membuat media komunikasi untuk PIC yang sudah ditunjuk oleh masing-masing Unit Eselon I lingkup KKP, serta memberikan sosialisasi kembali kepada Unit Eselon I Lingkup KKP yang masih mempunyai nilai MP rendah.
5. Pembangunan aplikasi *bitrix* tersendiri lingkup KKP.

GAMBAR 3.53. GRAFIK MANAJEMEN PENGETAHUAN CAPAIAN PER KOMPONEN BERDASARKAN ASPEK DOKUMEN, ASPEK KEIKUTSERTAAN DAN ASPEK KEAKTIFAN PER ESELON I LINGKUP KKP TAHUN 2019



Gambar di atas merupakan persentase Manajemen Pengetahuan yang ditinjau dari per komponen berdasarkan aspek dokumen, aspek keikutsertaan dan keaktifan per eselon I lingkup KKP. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa unit eselon I yang sangat baik dalam aspek keikutsertaan adalah Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing sebesar 40%, sedangkan unit kerja yang aspek keikutsertaannya paling rendah adalah Ditjen Perikanan Tangkap sebesar 36,52%. Selain itu unit kerja yang sangat baik dalam aspek keaktifan dalam manajemen pengetahuan adalah Inspektorat Jenderal sebesar 40%, sedangkan unit kerja yang rendah nilai keaktifannya adalah Badan Karantina Ikan dan Pengawasan Mutu sebesar 23,83%.

GAMBAR 3.54. SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN YANG TERSTANDAR BERDASARKAN ASPEK KEIKUTSERTAAN DAN ASPEK KEAKTIFAN DI SETIAP LEVEL TAHUN 2019



Berdasarkan Grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Keikutsertaan, seluruh pejabat level 1 dan level 2 telah tergabung dalam aplikasi *bitrix*, pejabat pada level 3 sebanyak 97,48%, dan level 4 sebanyak 98,61% juga telah tergabung dalam aplikasi *bitrix*, namun pada level staf, persentase keikutsertaan baru mencapai 86,83%. Sedangkan pada aspek keaktifan, pejabat level 2 yang aktif dalam *sharing* informasi sebesar 86,11%, pejabat level 3 sebesar 76,32%, dan pejabat level 4 sebesar 81,41% yang aktif *sharing* informasi pada aplikasi *bitrix*.

Untuk mencapai IKU manajemen pengetahuan ini, terdapat kegiatan yang mendukung hal tersebut yaitu rasionalisasi *platform* sistem informasi KKP, sosialisasi aplikasi *bitrix* kepada unit Eselon I lingkup KKP sebagai media *sharing* informasi. Pada dasarnya nilai Manajemen Pengetahuan pada tahun 2019 sudah melebihi dari target yang telah ditetapkan, namun untuk keberlanjutannya dalam pencapaian target terhadap Rancangan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024, diperlukan adanya penyempurnaan manual IKU dan petunjuk teknis, penyeragaman format nama dan jabatan, optimalisasi fitur aplikasi, sosialisasi secara lebih menyeluruh dan membuat media komunikasi untuk *Personal in Charge* (PIC) yang sudah ditunjuk oleh masing-masing Unit Eselon I lingkup KKP, memberikan sosialisasi kembali kepada Unit Eselon I Lingkup KKP yang masih mempunyai nilai realisasi nilai Manajemen Pengetahuan rendah.



SASARAN STRATEGIS (SS-9) “TERWUJUDNYA BIROKRASI KKP YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN BERORIENTASI PADA LAYANAN PRIMA”

Sasaran Strategis-8 ini mempunyai dua IKU yaitu 1). Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi KKP dan 2). Level Maturitas SPIP.

IKU

18

Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi KKP

Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek: kelembagaan atau organisasi; ketatalaksanaan atau business process; dan sumber daya manusia aparatur, dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Nilai penerapan Reformasi Birokrasi KKP adalah tingkat proses pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup KKP untuk mewujudkan birokrasi yang lebih baik sehingga aparatur KKP mampu bekerja secara lebih profesional, efektif, dan akuntabel di dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan program pembangunan bidang KP. Evaluasi RB pada setiap K/L dilaksanakan tahunan oleh Kementerian PAN dan RB.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Desain* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang road map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 dan Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 2015 Tahun 2015 tentang Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN). Kementerian PAN dan RB telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Instansi Pemerintah. Evaluasi difokuskan pada upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan KKP.

Nilai kinerja reformasi birokrasi KKP diperoleh dari indeks reformasi birokrasi hasil penilaian Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terhadap 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi, yaitu:

- a. Manajemen perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur yaitu birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi;
- b. Peraturan perundang-undangan yaitu regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif;



- c. Penataan organisasinya yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*);
- d. Tata laksana yang meliputi sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*;
- e. SDM aparatur yaitu sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera;
- f. Akuntabilitas yaitu meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
- g. Pengawasan yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
- h. Pelayanan publik yang meliputi pemberian pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Nilai kinerja reformasi birokrasi KKP dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

TABEL 3.102. CAPAIAN NILAI KINERJA REFORMASI BIROKRASI KKP TAHUN 2019

SASARAN STRATEGIS - 9			TERWUJUDNYA BIROKRASI KKP YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN BERORIENTASI PADA PELAYANAN PRIMA						
IKU-18			NILAI KINERJA REFORMASI BIROKRASI KKP						
REALISASI			TAHUN 2019				RENSTRA KKP 2015-2019		
2016	2017	2018	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PERTUMBUHAN 2018 THD 2019	% CAPAIAN THD TARGET PK	TARGET 2019	% CAPAIAN THD TARGET RENSTRA
70,51	78,51	78,95	A (81)	BB (78,6)	97,04	-0,44	97,04	81	97,04

Pada tabel terlihat bahwa realisasi sebesar 78,60 termasuk kategori BB, belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu A(81). Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 untuk penilaian RB tahun 2017 (78,95), realisasi nilai kinerja RB KKP tahun 2019 untuk penilaian RB tahun 2018 mengalami penurunan 0,35%. Berdasarkan perhitungan capaian per area, terdapat 3 area yang belum mencapai 80% yakni, 1). Manajemen Perubahan dengan capaian 72,60%, 2). Penataan Peraturan Perundang-undangan 62,60%, 3). Penataan dan Penguatan Organisasi 68,17%, 4). Penataan Tata Laksana dengan capaian 75,60%, 5). Penguatan Akuntabilitas 72,50 dan 6) Penguatan Pengawasan 69,17%. Pada tabel 88 terlihat bahwa realisasi Reformasi Birokrasi KKP Tahun 2018 yang penilaiannya diterbitkan pada tahun 2019 adalah sebesar 78,60, atau belum mencapai target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2017 yang penilaiannya terbit pada tahun 2018 mengalami penurunan yaitu dari 78,95 pada tahun 2017 menjadi 78,60 di tahun 2018. Berdasarkan Surat Menteri PAN dan RB Nomor B/2018.M.RB.05/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2018, Indeks Reformasi Birokrasi KKP adalah 78,60 dengan kategori BB dengan hasil evaluasi sebagai berikut :

1. Walaupun terdapat peningkatan kualitas penerapan Reformasi Birokrasi di tingkat lembaga, namun belum diikuti dengan perbaikan yang setara di tingkat unit kerja baik di pusat maupun daerah, dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut :



2. Beberapa upaya yang telah dilakukan demi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan KKP selama tahun 2019 antara lain :
 - a) *Agent of Change* telah menyusun rencana aksi dalam upaya percepatan internalisasi pelaksanaan RB dengan melibatkan UPT;
 - b) Telah melakukan identifikasi/analisis peraturan perundangan yang tidak harmonis terhadap sebagian peraturan di lingkungan KKP serta menindaklanjuti sebagian besar hasil identifikasi tersebut;
 - c) Telah menindaklanjuti evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dengan merevisi peraturan terkait pembentukan peraturan perundang-undangan.
 - d) Telah melakukan *assessment* terhadap 86,18% pegawai KKP dan mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi dengan baik;
 - e) Pengukuran tingkat efektifitas penerapan SPIP, pengendalian gratifikasi, penanganan pengaduan masyarakat, *Whistle-Blowing System*, dan benturan kepentingan telah dilakukan melalui mekanisme survei internal dan eksternal;
 - f) Survey kepuasan masyarakat dan tindaklanjut hasil survey telah dilakukan di sebagian besar unit kerja.

3. Beberapa hal yang masih harus diperhatikan yang dapat menghambat upaya untuk menjalankan program reformasi birokrasi antara lain :
 - a. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi lebih banyak dilakukan pada tingkat Kementerian. Kondisi pelaksanaan reformasi birokrasi pada tingkat unit kerja belum setara dengan kondisi pelaksanaan di tingkat kementerian dan belum terlihat perubahan yang signifikan.
 - b. Evaluasi atas kinerja *Agent of Change* dalam meningkatkan budaya kerja dan perubahan mindset di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan belum sepenuhnya mendorong perubahan di level unit kerja/UPT. Komitmen pimpinan di level pusat harus diikuti komitmen pimpinan di level dibawahnya sehingga satu kesatuan yang mampu menggerakkan pelaksanaan reformasi birokrasi di unit kerja.
 - c. Evaluasi atas sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan masih belum sepenuhnya mengukur efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan.
 - d. Pengendalian internal terkait pelaporan keuangan belum berjalan dengan baik.
 - e. Belum optimalnya implementasi pelayanan publik khususnya unit kerja dalam hal pemberian *reward and punishment* dan pemberian kompensasi terhadap penerima layanan yang tidak sesuai standar.

Dalam rangka meningkatkan kualitas birokrasi serta menumbuhkembangkan budaya kinerja, KKP selama tahun 2019 telah melakukan beberapa upaya perbaikan reformasi birokrasi sesuai dengan rekomendasi Kementerian PAN dan RB antara lain :



1. Mewujudkan budaya kerja positif dengan menugaskan *Agen of Change* dengan target-target perubahan nyata, serta meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi atas keberhasilan kinerja AoC;
2. Meningkatkan komitmen pimpinan;
3. Melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan secara berkala;
4. Melakukan evaluasi atas sistem pengendalian untuk mencegah ketidaktercapaian tujuan keandalan pelaporan keuangan dan memperkuat mekanisme pengendalian internal;
5. Meningkatkan tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN;
6. Menetapkan dan melaksanakan mekanisme pemberian *reward dan punishment* bagi seluruh pelaksana layanan, serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.

Hasil penilaian implementasi RB KKP oleh Kementerian RB dan PAN dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 3.103. HASIL PENILAIAN MANDIRI IMPLEMENTASIREFORMASI BIROKRASI KKP TAHUN 2015-2019

NO.	KOMPONEN PENILAIAN	NILAI MAX	2015		2016		2017		2018		2019
			PMPRB	RB	PMPRB	RB	PMPRB	RB	PMPRB	RB	PMPRB
A. Pengungkit											
1	Manajemen Perubahan	5.00	5.00	3.24	5.00	3.44	4.87	3.44	4.63	3.63	4.82
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5.00	5.00	2.71	5.00	3.13	4.38	3.13	4.38	3.13	5
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6.00	6.00	3.84	6.00	4.01	6.00	4.01	4.01	4.09	5.01
4	Penataan Tata Laksana	5.00	4.88	3.60	5.00	3.72	4.88	3.72	4.88	3.78	4.54
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15.00	14.06	10.52	14.81	12.7	14.86	13.35	14.89	13.53	14.75
6	Penguatan Akuntabilitas	6.00	5.80	4.15	6.00	4.35	5.52	4.35	5.77	4.35	5.85
7	Penguatan Pengawasan	12.00	10.25	8.42	11.73	8.51	11.28	8.51	10.64	8.30	11.33
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6.00	4.59	4.25	5.60	4.41	5.42	4.41	5.63	4.86	5.79
Sub Total Komponen Pengungkit		60.00	55.58	40.73	59.14	44.31	57.21	44.92	54.83	45.67	57.09
B. Hasil											
1	Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20.00	15.16	15.11	16.60	16.6	16.57	17.99	16.84	16.56	16.84
2	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10.00	7.72	7.35	7.35	9.15	9.15	7.78	7.78	7.80	9.3
3	Kualitas Pelayanan Publik	10.00	7.95	7.32	7.95	8.74	8.74	8.26	8.26	8.58	8.58
Sub Total Komponen Hasil		40.00	30.83	29.78	31.90	34.44	34.46	34.03	32.88	32.94	34.72



Beberapa langkah dan upaya perbaikan yang telah dilakukan KKP pada 8 area reformasi birokrasi s.d Desember tahun 2019 adalah sebagai berikut :

a. Manajemen Perubahan

Dalam rangka manajemen perubahan, KKP telah melakukan pembentukan *Agent of Change* dengan menetapkan Kepmen KP nomor 333/KEPMEN-KP/SJ/2017 tentang Pengangkatan Agen Perubahan di Lingkungan KKP sebanyak 171 agen perubahan. Selain itu KKP juga melakukan internalisasi Program RB sampai dengan level UPT melalui pelaksanaan briefing pagi terkait Pelaksanaan RB di setiap UPT yang dilaksanakan setiap minggu.

Pelaksanaan RB yang akuntabel membutuhkan komitmen tinggi dari seluruh pimpinan di tingkat Kementerian sampai dengan pimpinan level terendah. Pimpinan di KKP telah berkomitmen secara penuh sehingga menjadi kesatuan yang mampu menggerakkan pelaksanaan RB di unit kerja.

b. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Penataan Peraturan Perundang-undangan di KKP dilaksanakan berbasis *Regulatory Impact Analysis* dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan. Selain itu KKP juga telah melakukan simplifikasi regulasi di bidang kelautan dan perikanan. Pada tahun 2019, KKP mendapatkan penghargaan sebagai Instansi Pemerintah yang Memiliki Inisiatif Membangun Kualitas Kebijakan Publik yang Baik dari Lembaga Administrasi Negara (LAN).

c. Penataan dan Penguatan Organisasi

KKP sebagai organisasi Pemerintah terus menerus melakukan perbaikan dan penataan organisasi menuju organisasi yang ramping namun kaya fungsi. Hal ini sesuai dengan tujuan Reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan. Penataan organisasi di pusat dilaksanakan menuju organisasi KKP yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran. Sepanjang tahun 2015-2019, KKP telah melakukan penataan dan penguatan organisasi melalui penajaman tugas dan fungsi organisasi pada tahun 2015, efisiensi eselonering dengan penggabungan Balitbang dengan BPSDM KP, pembentukan unit kerja layanan pengadaan barang dan jasa yang bersifat permanen. Keseluruhan evaluasi kelembagaan di lingkup KP dilaksanakan dengan mengacu pada Permen PAN RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah.

d. Penguatan Tata Laksana

Penguatan Tata Laksana dilakukan melalui penyusunan bisnis proses dan prosedur operasional (SOP), implementasi *e-government*, keterbukaan informasi publik dan peningkatan kualitas pengelolaan arsip. Beberapa capaian dalam area Penguatan Tata Laksana antara lain :

- a. Telah dilaksanakan pemetaan bisnis proses untuk masing-masing unit kerja eselon I dan UPT.



- b. Telah ditetapkan bisnis proses level 0 melalui Kepmen KP No.60/KEPMEN-KP/SJ/2019 tentang Bisnis Proses KKP, Kepmen KP Nomor 87/KEPMEN-KP/SJ/2019 tentang Bisnis Proses Ditjen PSDKP dan Keputusan Kepala BRSDM KP Nomor 72/KEP BRSDM KP/2019 tentang Proses Bisnis BRSDM KP.
- c. Telah disusun rencana pengembangan *e-government* di lingkungan KKP tahun 2018-2022.
- d. Telah dilakukan dilakukan pengembangan dan integrasi dalam rangka mendukung proses birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- e. Nilai SPBE KKP termasuk kategori sangat baik (3,57)
- f. Telah diterbitkannya Permen KP No.4/MEN/2019 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- g. KKP mendapatkan penghargaan penilaian keterbukaan informasi publik dengan kategori cukup informatif (68,82) dari Komisi Informasi Pusat.
- h. Nilai hasil pengawasan Kearsipan Tahun 2019 adalah 92,75 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan) atau mengalami peningkatan sebesar 9,68 dari hasil pengawasan tahun 2018 sebesar 83,07 dengan kategori Baik.
- i. Telah dilakukan pembentukan Tim Pengawas Internal Kearsipan lingkup KKP.
- j. Telah dilakukan perbaikan kualitas sarana dan prasarana

e. Penataan Sistem Manajemen SDM

Dalam rangka penataan sistem manajemen SDM, telah dilakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui tahapan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan dan e-formasi. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN menyatakan bahwa Kamus Kompetensi Teknis disusun dan ditetapkan PPK KL sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya setelah mendapat persetujuan Menteri PAN dan RB. Pada tanggal 5 Juli 2019 telah dilakukan pembahasan dan finalisasi Kamus SKT bidang KP sebanyak 2 kompetensi umum dan 83 kompetensi khusus. Selain itu KKP juga melakukan promosi jabatan yang dilakukan secara terbuka.

KKP juga melakukan penyusunan *talent pool* sejak tahun 2015, diterapkan dalam menjangkau kandidat dengan dua parameter yaitu kompetensi dan kinerja.

Hampir seluruh pegawai telah dipetakan dengan metode *talent pool* dan telah didokumentasikan dalam Aplikasi *Talent Management*.

f. Penguatan Akuntabilitas

Penguatan akuntabilitas dilaksanakan melalui :

- Partisipasi dan Komitmen seluruh Level Pimpinan dalam penyusunan rancangan teknokratik RPJM & Renstra, Rakorpim Kinerja, Monitoring Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja 2015 - 2019



- Peningkatan Budaya Kinerja melalui: Forum Manajemen Kinerja, Peningkatan kapasitas SDM, Pemasangan Akrilik Perjanjian Kinerja di meja kerja
- Pengelolaan Dana Dekonsentrasi berbasis Kinerja dan prioritas nasional
- Pengintegrasian sistem anggaran, kegiatan dan kinerja organisasi & pegawai
- Penajaman output-komponen dan efisiensi anggaran
- Mendorong inovasi aspek manajerial

g. Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan dilakukan dalam rangka memperkuat pelaksanaan pengawasan internal di lingkup KKP dalam rangka mewujudkan RB KKP yang akuntabel. Capaian untuk area ini antara lain:

- Telah dilakukan penilaian risiko untuk seluruh unit kerja lingkup KKP s.d level eselon II dan level UPT.
- Telah dilakukan penilaian mandiri maturitas SPI unit kerja eselon I
- Pembentukan Pokja Laporan Keuangan
- Telah dilakukan inventarisasi dan revaluasi aset KKP 2015 s.d 2018

h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dilakukan dalam rangka memperkuat pelaksanaan pengawasan internal di lingkup KKP dalam rangka :

- Inovasi Pelayanan “PASTI” Balai KIPM Semarang ikut serta dalam *United Nations Public Service Awards* pada tahun 2015. (Meraih penghargaan TOP 9 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tahun 2014)
- KKP mendapat Predikat Kepatuhan Standar Layanan Publik KKP berada pada Zona Hijau dengan Nilai 91,13 dari Ombudsman pada tahun 2017
- Meraih Penghargaan TOP 99 dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik:
- Jesika Imut Pisan - Stasiun KIPM Bandung (2018)
- One Stop Service Quarantine* - Balai KIPM Surabaya II (2019)
- Digitalisasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- KKP meraih anuegrah Keterbukaan Badan Publik Informatif tahun 2019
- Penghargaan Top 30 Instansi Pemerintah Penyelenggara Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2019
- TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik “*One Stop Service – Quarantine (OSS-Q)*” dari UPT KIPM Surabaya II”
- KKP Raih Penghargaan sebagai Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik Tahun 2019



IKU

19

Level Maturitas SPIP

Level Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) KKP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern di lingkungan KKP. Target Level Maturitas SPIP di Lingkungan KKP pada Tahun 2019 adalah pada level 3 dengan mengadopsi langsung hasil penilaian dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Hasil penilaian dari tim BPKP terhadap implementasi SPI di lingkungan KKP Tahun 2019 yaitu berada pada level 3 atau terdefinisi dengan perolehan nilai sebesar 3,507. Hal ini berdasarkan Surat Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Ekonomi dan Kemaritiman BPKP Nomor SP-127/D1/2/2019, 30 Desember 2019 dan Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor LHV-227/D102/1/2019 tanggal 31 Desember 2019. Hal ini berarti bahwa target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan Renstra KKP Tahun 2015-2019 telah tercapai 100%, dengan capaian nilai lebih baik yaitu dari 3,105 pada tahun 2017, 3,462 pada tahun 2018 dan menjadi 3,507 di tahun 2019 sebagaimana tersaji pada Tabel.

TABEL 3.104. CAPAIAN LEVEL MATURITAS SPIP

SASARAN STRATEGIS - 9				TERWUJUDNYA BIROKRASI KKP YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN BERORIENTASI PADA LAYANAN PRIMA				
IKU-19				LEVEL MATURITAS SPIP				
REALISASI				TAHUN 2019			RENSTRA KKP 2015-2019	
2015	2016	2017	2018	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET 2019	% CAPAIAN 2018 THD TARGET 2019
-	3	3	3	3	3	100	3	100

Sumber: Hasil Penilaian BPKP

TABEL 3.105. HASIL PENCAPAIAN NILAI EVALUASI LEVEL MATURITAS SPIP LINGKUP KKP TAHUN 2019 PER ASPEK KOMPONEN

NO	UNSUR SPIP	NILAI MAKS	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019	
			CAPAIAN	(%)	CAPAIAN	(%)	CAPAIAN	(%)	CAPAIAN	(%)
1	Lingkungan Pengendalian	1,50	0,900	60,00	0,900	60,00	1,089	72,60	1,087	72,47
2	Penilaian Risiko	1,00	0,600	60,00	0,600	60,00	0,800	80,00	0,800	80,00
3	Kegiatan Pengendalian	1,25	0,682	54,57	0,705	56,36	0,748	59,84	0,795	63,60
4	Informasi dan Komunikasi	0,50	0,250	50,00	0,300	60,00	0,300	60,00	0,300	60,00
5	Pemantauan	0,75	0,500	80,00	0,600	80,00	0,525	70,00	0,525	70,00
	Jumlah	5,00	3,032	60,64	3,105	62,09	3,462	69,24	3,507	70,14
LEVEL MATURITAS			3		3		3		3	



Pada tahun 2019, pencapaian nilai Maturitas SPIP mengalami kenaikan yaitu 3,46 (level 3/terdefinisi) di tahun 2018 menjadi 3,507 (level 3/terdefinisi) di tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa KKP secara terus menerus telah melakukan perbaikan dalam mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengelolaan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan-perundangan.

Pencapaian level 3 (terdefinisi) atas tingkat implementasi SPI di lingkungan KKP dapat berarti bahwa KKP telah melaksanakan praktik pengendalian intern yang telah terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa disertai dengan dokumentasi yang

memadai. Pencapaian ini menunjukkan bahwa KKP telah cukup baik mengimplementasikan SPI, namun demikian masih terdapat catatan terkait evaluasi atas pengendalian intern masih lemah dalam hal dokumentasinya. Data kinerja BPKP terkait perkembangan penilaian maturitas SPIP secara nasional per Desember 2018 menunjukkan, terdapat 50 KL dari 86 K/L (termasuk KKP), 23 dari 34 Pemerintah Daerah Provinsi, dan 229 dari 508 Kab/Kota yang telah mencapai level 3. Pengukuran tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP ini bukan sekedar pencapaian target kinerja tetapi lebih pada mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih, dan akuntabel.

TABEL 3.106. TINGKAT MATURITAS IMPLEMENTASI SPIP DAN KARAKTERISTIKNYA

LEVEL	TINGKAT	RENTANG NILAI	KARAKTERISTIK SPIP
0	Belum ada	0<skor<1,0	K/L/Pemda sama sekali belum memiliki kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan praktek-praktek pengendalian intern
1	Rintisan	1,0<skor<2,0	Ada praktik pengendalian intern, namun pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat ad hoc dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan sehingga kelemahan tidak teridentifikasi.
2	Berkembang	2,0< skor< 3,0	K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasikan dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektifitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak kelemahan tidak diidentifikasi
3	Terdefinisi	3,0<skor<4,0	K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai
4	Terkelola dan terukur	4,0<skor<4,5	K/L/P telah menerapkan pengendalian internal yang efektif, masing-masing personel pelaksana kegiatan yang selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan K/L/Pemda. Evaluasi formal dan terdokumentasi
5	Optimum	4,5<skor<5	K/L/Pemda telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer



Untuk meningkatkan maturitas dari kategori terdefinisi atau level 3 menjadi terkelola dan terukur atau level 4 beberapa hal yang perlu dilakukan kedepan sesuai rekomendasi BPKP adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan yang bisa menghambat pencapaian tujuan organisasi, maka daftar risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) untuk kegiatan utama harus selalu diperbarui.
- b. Evaluasi atas kebijakan/SOP dan implementasinya diseluruh satker dan UPT agar dilaksanakan secara berkala, formal, dan terdokumentasi yang ditunjukkan denan adanya perintah/mandat, bukti proses evaluasi, laporan hasil evaluasi dan hasil evaluasinya ditindaklanjuti agar dapat menghasilkan kinerja pengendalian intern yang lebih baik dan dapat memberikan keyakinan memadai untuk mencapai tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- c. Proses evaluasi atas Kebijakan dan SOP dilakukan secara lebih mendalam dengan mengkaitkan antar sub unsur SPIP, karena penerapan unsur dan sub unsur SPIP sifatnya satu kesatuan saling terkait/saling mempengaruhi.
- d. Meningkatkan fungsi pemantauan terhadap semua unsur SPIP, sehingga dapat diperoleh informasi terbaru mengenai efektifitas penyelenggaraan SPIP dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi dengan cara melakukan *Control Self Assesment (CSA)*.
- e. Meningkatkan kompetensi SDM pada semua unit kerja dalam mengembangkan dan mengimplementasikan SPIP serta secara berkelanjutan membangun awareness semua pihak untuk mengimplementasikan SPIP dilingkungan unit kerjanya.
- f. Meningkatkan kepedulian dalam menyelesaikan temuan BPK dan APIP, agar temuan tersebut tidak berulang di tahun berikutnya dengan secara berkala dilakukan pemutakhiran tindak lanjut hasil pemeriksaan sehingga dapat diidentifikasi hambatan dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan.

SASARAN STRATEGIS (SS-10) “TERKELOLANYA ANGGARAN PEMBANGUNAN KKP SECARA EFISIEN DAN AKUNTABEL”

Sasaran kinerja ini mempunyai dua indikator kinerja utama yaitu Nilai kinerja anggaran KKP dan Opini atas Laporan Keuangan KKP



Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran KKP

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan suatu ukuran kuantitatif yang mencerminkan aspek teknis dan administratif dan tata kelola pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh satker K/L. IKPA dapat dijadikan alat managerial untuk mendukung ketercapaian *output (output delivery)* atas penggunaan anggaran pemerintah secara tepat waktu dan tepat sasaran.



IKPA terdiri dari 12 indikator yang mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan yaitu revisi anggaran, deviasi halaman III DIPA (rencana penarikan dana), pagu minus, pengelolaan Uang Persediaan (UP), penyampaian data kontrak, penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara, dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM), penyerapan anggaran, penyelesaian tagihan, retur SP2D, perencanaan kas dan pengembalian/kesalahan SPM. Indikator ini disampaikan setiap bulannya melalui aplikasi Monev Pelaksanaan Anggaran dalam menu OMSPAN Kementerian Keuangan dengan harapan agar :

1. Pengelolaan APBN menjadi semakin baik dan berkualitas;
2. Adanya upaya pencapaian terbaik dari setiap Satker;
3. Terwujudnya pembangunan dan kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan anggaran yang pruden dan berkualitas.

GAMBAR 3.55. FORMULA PENILAIAN INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) TAHUN 2019



TABEL 3.107. CAPAIAN NILAI KINERJA ANGGARAN KKP

SASARAN STRATEGIS - 10			TERKELOLANYA ANGGARAN PEMBANGUNAN SECARA EFISIEN DAN AKUNTABEL					
IKU-20			NILAI KINERJA ANGGARAN KKP					
REALISASI			TAHUN 2019				RENSTRA KKP 2015-2019	
2016	2017	2018	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% KENAIKAN 2018-2019	TARGET 2019	CAPAIAN 2018 THD TARGET 2019
-	-	-	87,00	94,62	108,76	-	-	

Ket : merupakan Indikator baru di tahun 2019

Selanjutnya, nilai IKPA ini digunakan sebagai salah satu perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2019 yang disampaikan setiap triwulan. Nilai target Triwulan I s.d IV Tahun 2019 ditetapkan sebesar 87,00 dan Triwulan IV Tahun 2019 sebesar 86. Dimana nilai target ini berlaku sama untuk KKP, dan seluruh Unit Kerja Eselon I



Lingkup KKP, serta Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (nilai rata-rata seluruh Satker pada Dinas KP Provinsi yang bersangkutan). Nilai capaian IKPA KKP Tahun 2019 menurut Unit Kerja Eselon I adalah sebagai berikut (data OMSPAN per 20 Januari 2020) :

TABEL 3.108. NILAI CAPAIAN PELAKSANAAN ANGGARAN UNIT KERJA ESELON I TAHUN 2019

NO.	UNIT KERJA	INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN												NILAI AKHIR
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1.	Setjen	9,20	13,50	5,40	5,99	3,28	5,00	14,41	4,61	4,87	19,52	3,99	3,80	93,58
2.	Itjen	9,60	15,00	5,40	6,00	4,11	5,00	15,00	5,00	5,00	20,00	4,00	4,00	98,11
3.	Ditjen PT	9,30	12,00	5,40	5,99	3,76	5,00	13,97	4,83	4,80	20,00	3,95	4,00	93,00
4.	Ditjen PB	9,40	13,65	5,40	5,98	3,92	5,00	14,32	4,76	4,89	20,00	4,00	4,00	95,33
5.	Ditjen PSDKP	9,20	12,60	5,10	5,99	3,91	5,00	14,70	4,77	4,79	20,00	4,00	3,80	93,86
6.	Ditjen PDSKP	8,20	13,20	5,40	5,99	3,11	5,00	14,34	4,70	4,87	20,00	4,00	4,00	92,82
7.	Ditjen PRL	8,70	13,65	5,10	5,97	3,62	5,00	14,55	4,71	5,00	19,14	3,99	4,00	93,43
8.	BRSDM KP	9,60	13,50	4,80	5,97	4,31	5,00	14,60	4,94	5,00	20,00	4,00	3,80	95,52
9.	BKIPM KHP	9,70	13,95	4,80	5,99	4,12	5,00	14,67	4,88	5,00	20,00	4,00	4,00	96,10
TOTAL KKP		9,20	13,35	5,10	5,99	4,03	5,00	14,48	4,78	4,91	20,00	3,99	3,80	94,62

Keterangan :

(1) Pengelolaan UP, (2) Data Kontrak, (3) Pengembalian/Kesalahan SPM, (4) Retur SP2D, (5) Halaman III DIPA, (6) Revisi DIPA, (7) Penyelesaian Tagihan, (8) Rekon LPJ Bendahara, (9) Perencanaan Kas, (10) Penyerapan Anggaran, (11) Pagu Minus, (12) Dispensasi Penyampaian SPM

Nilai Capaian IKPA KKP Tahun 2019 sebesar 94,62 dari target sebesar 87,00. Itjen mendapat nilai tertinggi sebesar 98,11. Secara keseluruhan nilai capaian IKPA KKP tahun 2019 telah melewati target, akan tetapi masih terdapat 5 (lima) Unit Kerja Eselon I lingkup KKP yang berada dibawah rata-rata nilai total KKP, yaitu Sekretariat Jenderal, Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Ditjen Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dan Ditjen Pengelolaan Ruang Laut.



IKPA KKP sebesar 94,62 telau melampaui rata-rata nilai IKPA nasional yaitu sebesar 91,48, dan melampaui IKPA KL setara lainnya seperti Kementerian Pertanian (93,26), KLHK (93,21), Kementerian PAN dan RB (92,69), Kementerian Perhubungan (92,63), dan Kementerian PUPERA (90,82). Namun demikian capaian KKP masih berada dibawah capaian Kementerian Keuangan yaitu sebesar 97,05. Penyebab utama yang mempengaruhi rendahnya capaian nilai akhir IKPA pada 4 Unit Kerja Eselon I tersebut adalah masih rendahnya pengelolaan UP, data kontrak, penyelesaian tagihan, pengembalian SPM, halaman III DIPA, penyelesaian tagihan, rekon LPJ bendahara masih dibawah target yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, kurang disiplin dalam penyelesaian tagihan kontraktual, Ketidaktepatan waktu periode pengajuan SPM GUP dengan pertanggungjawaban, serta kurang tertibnya Satker terhadap ketepatan waktu penyampaian data kontrak.

Langkah-langkah strategis dalam rangka peningkatan nilai IKPA atas kendala dalam capaian nilai IKPA KKP Tahun 2019 adalah :

1. Pengelolaan UP (1)

Setiap Satker memperhatikan periode pengajuan SPM GUP dari SP2D UP/GUP terakhir paling lambat dalam rentang 30 hari kalender (pengajuan GUP minimal sekali dalam sebulan ke KPPN) dan tidak menambah frekuensi SPM GUP yang terlambat.
2. Data kontrak (2)

Setiap Satker agar selalu meningkatkan kedisiplinan, ketertiban dan ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak sebelum 5 hari kerja setelah ditandatangani dan dipastikan verifikasi kebenaran data kontraknya oleh KPPN.
3. Pengembalian/kesalahan SPM (3)

Setiap Satker agar senantiasa meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM terutama kebenaran dan data supplier yang telah dicocokkan dengan data yang ada pada OMSPAN maupun data identitas supplier yang terkonfirmasi dengan pihak bank agar SPM yang diajukan tidak tertolak oleh KPPN.
4. Retur SP2D (4)

Teliti dalam memproses dokumen pembayaran, terutama kebenaran dan keakuratan nama dan nomor rekening penerima. Jika terdapat Retur SP2D, berkoordinasi dengan KPPN untuk penyelesaiannya max 7 hari kerja
5. Halaman III DIPA (5)
 - a. Seluruh satker yang memiliki deviasi tinggi, agar melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggaran dengan mengajukan revisi administratif penyesuaian Halaman III DIPA ke Kanwil DJPb pada triwulan berjalan;
 - b. Satker agar lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dananya, dan menjadikan RPD pada Halaman III DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan secara internal pada Satker.



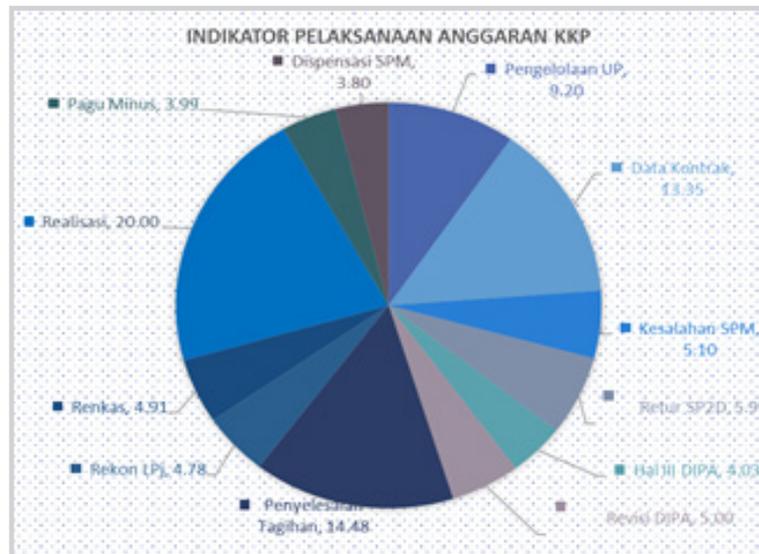
6. Revisi DIPA (6)
Selektif dalam revisi DIPA kategori Pagu Tetap, Batasan frekuensi revisi 1x setiap triwulan
7. Penyelesaian Tagihan (7)
 - a. Disiplin menyelesaikan tagihan kontraktual paling lambat 17 hari kerja setelah BAST/BAPP
 - b. Teliti dalam mengisi uraian SPM (terutama informasi tanggal BAST/BAPP)
8. LPj Bendahara (8)
Disiplin menyampaikan LPJ sebelum tanggal 10 bulan berikutnya dan Memastikan data LPJ telah di-approve KPPN pada aplikasi SPRINT
9. Renkas (9)
Disiplin dalam penyampaian Renkas (RPD Harian) sebelum mengajukan pencairan dana kategori besar
10. Penyerapan anggaran (10)
 - a. Setiap Satker agar selalu memperhatikan progres penyerapan anggaran secara proporsional dari pagu DIPA efektif;
 - b. Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.
11. Pagu minus (11)
Satker yang memiliki pagu minus agar dapat segera menyelesaikan pagu minus dengan mempersiapkan revisi anggaran untuk menutup pagu minus tersebut.
12. Dispensasi SPM (12)
Selektif dalam pemberian dispensasi SPM yang terlambat

Setiap unit kerja memiliki kewajiban untuk melakukan Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja sesuai dengan kewenangannya baik di level Satker dan level Eselon I terhadap capaian nilai IKPA masing-masing, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Nilai Akhir Indikator Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan per komponen indikator adalah sebagai berikut:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA		KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN																
INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN TINGKAT K/L																		
Sesuai Dengan DESEMBER																		
No	Kode K/L	Nama K/L	Keterangan	Pengelolaan UP	Data Kontrak	Kesalahan SPM	Retur SP2D	Hal II DIPA	Revisi DIPA	Penyelesaian Tagihan	Rekon LPJ	Renkas	Realisasi	Pagu Minus	Dispensasi SPM	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
1	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai Bobot (%) Nilai Akhir	92.00 9.20	89.00 13.35	85.00 5.10	99.75 5.99	80.53 4.03	100.00 5.00	96.50 14.48	95.53 4.78	98.27 4.91	100.00 20.00	99.79 3.99	95.00 3.80	94.62	100%	94.62

Disclaimer:
Per 17 Juli 2018, Satker BLU dikeluarkan dari Perhitungan IKPA.
Sehubungan dengan transisi aplikasi LPJ bendahara tahun 2018, indikator LPJ tidak dimasukkan dalam perhitungan nilai akhir IKPA tahun 2018





IKU

21

Opini atas Laporan Keuangan KKP

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat lima jenis opini yang dapat diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, yakni:

- **Opini Wajar tanpa pengecualian (WTP)** adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.
- **WTP Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP)**. Opini WTP-DPP dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya.
- **Opini Wajar dengan pengecualian (WDP)** adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian.
- **Opini tidak wajar adalah** opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
- **Opini tidak menyatakan pendapat (TMP)** oleh sebagian akuntan dianggap bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan.



IKU-21. Opini atas Laporan Keuangan KKP tahun 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau telah tercapai sebesar 166,67%. Karena dalam aplikasi kinerja persentase capaian dibatasi maksimal 120%, maka dalam aplikasi kinerja capaian kinerja IKU-21. Opini atas Laporan Keuangan KKP sebesar 120%.

TABEL 3.109. CAPAIAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN KKP

SASARAN STRATEGIS - 10				TERKELOLANYA ANGGARAN PEMBANGUNAN SECARA EFISIEN DAN AKUNTABEL					
IKU-21				OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN KKP					
REALISASI				TAHUN 2019				RENSTRA KKP 2015-2019	
2015	2016	2017	2018	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% KENAIKAN TAHUN 2018-2019	TARGET 2019	% CAPAIAN
5 (WTP)	5 (WTP)	1 (TMP)	1 (TMP)	3 (WDP)	5 (TMP)	166,67	400	5 (WTP)	100

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2018

Beberapa strategi yang telah dilakukan oleh KKP dalam rangka meraih opini Laporan Keuangan WTP antara lain: (1) Penguatan Sistem Pengendalian Intern dalam pengelolaan Keuangan, (2) Melakukan penilaian resiko atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bersifat strategis, (3) Menyusun rencana dan kegiatan pengendalian atas timbulnya resiko pada kegiatan strategis, dan (4) melakukan pemantauan dan evaluasi untuk kegiatan pengendalian pada kegiatan strategis. Berdasarkan Ringkasan Eksekutif Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018, status Laporan Keuangan 87 Kementerian dan Lembaga adalah sebagai berikut : 82 KL berpredikat WTP, 4 KL berpredikat WDP (Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemilihan Umum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Pemuda dan Olahraga) dan 1 KL berpredikat TMP yaitu Badan Keamanan Laut (Bakamla).

GAMBAR 3.56. PENGHARGAAN TERHADAP OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN KKP PADA 11 JUNI 2019



Beberapa kegiatan pendukung dalam pencapaian IKU-21. Opini atas Laporan Keuangan KKP terutama terkait Sistem Pengendalian Internal (SPI) antara lain:

1. Penyelesaian seluruh rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2018 dilengkapi dengan bukti-bukti pendukungnya.
2. Penyelesaian saldo utang kepada pihak ketiga.
3. Penertiban penatausahaan persediaan, penyajian persediaan dalam neraca yang telah dilengkapi dengan inventarisasi oleh masing-masing unit kerja eselon I serta pencatatan persediaan dalam aplikasi.
4. Meningkatkan peran aktif Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KKP.

Konsistensi KKP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab dan akuntabel telah diakui dan mendapat kepercayaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Hal ini dibuktikan dengan berhasilnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2018.





KINERJA ANGGARAN TAHUN 2019

APBN KKP Tahun 2015 sampai 2019 digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap eselon I lingkup KKP baik yang dilaksanakan oleh Kantor Pusat, Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis), Dinas KP Provinsi (dekonsentrasi) maupun Dinas KP Kabupaten/Kota (Tugas Pembantuan). Alokasi anggaran tahun 2019 digunakan untuk membiayai belanja rutin (belanja pegawai dan operasional perkantoran), kegiatan pendukung, belanja untuk *stakeholder* KP secara langsung melalui penyaluran bantuan pemerintah dan *stakeholder* KP secara tidak langsung. Perkembangan pagu dan realisasi anggaran KKP sebagaimana tabel berikut :

TABEL 4.1. PAGU DAN REALISASI APBN KKP TAHUN 2015-2019

URAIAN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pagu Awal (DIPA terbit) (Rp)	6.726.015.251.000	13.801.192.731.000	9.299.605.431.000	7.287.582.609.000	5.483.013.769.000
Pagu APBN-P (Rp)	10.667.773.520.000	10.614.735.547.000	9.138.308.737.000	-	-
Pagu Pasca Revisi (Rp)	-	-	-	7.632.526.314.000	-
Pagu Akhir	-	-	-	-	5.510.787.032.000
Realisasi (Rp)	9.276.348.654.000	6.482.382.769.886	6.111.447.049.060	6.097.370.854.000	5.055.152.554.205
% Realisasi	86,96	61,07	66,88	79,89	91,73

Sumber: OMSPAN, Kementerian Keuangan (18 Januari 2019)

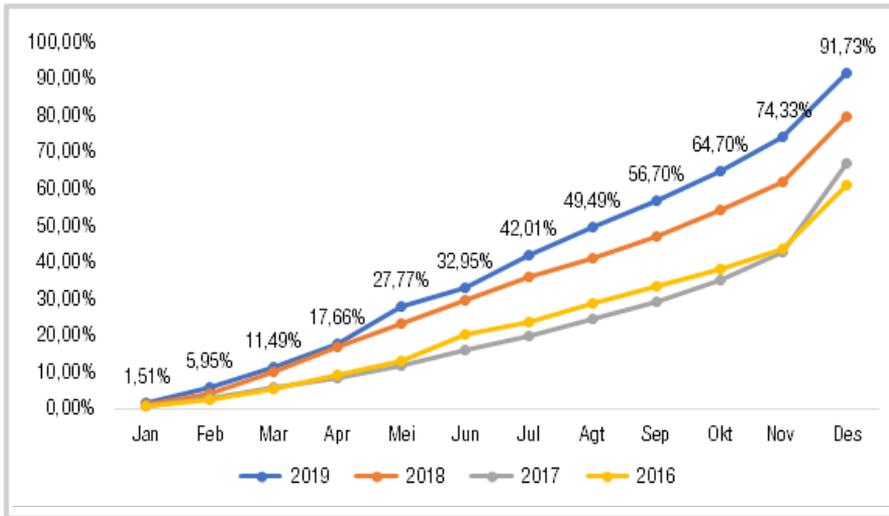
Pagu Awal KKP sebagaimana DIPA Nomor Nomor : SP DIPA-032/2019 tanggal 5 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 5,483 triliun, namun terdapat pergerakan pagu sebesar Rp. 27,77 miliar sehingga pagu akhir KKP menjadi sebesar Rp. 5,51 triliun. Pergerakan pagu tersebut antara lain bersumber dari Hibah Langsung Luar Negeri (HLLN), dan penambahan pagu PNPB di beberapa satker. Pada tahun 2019, KKP melaksanakan 9 Program, 51 Kegiatan, 229 output kegiatan yang tersebar di 411 Satker (51 Satker Pusat, 196 Satker Dekonsentrasi, 141 Satker Unit Pelaksana Teknis, dan 23 Satker Tugas Pembantuan)

Penyerapan anggaran KKP tahun 2019 menunjukkan hasil yang cenderung positif yaitu sebesar 91,73%. Penyerapan tersebut terus mengalami peningkatan apabila dibandingkan



dengan realisasi tahun 2018 atau mengalami peningkatan sebesar 4,64%. Selain itu realisasi KKP Tahun 2019 juga menunjukkan kualitas penyerapan anggaran KKP semakin baik hal ini terlihat dari pola grafik penyerapan anggaran tahun 2019 yang semakin mendekati garis lurus dibandingkan pola penyerapan anggaran per bulan di tahun 2016-2017 yang masih berbentuk kurva (mengoelombung di akhir tahun) sebagaimana tersaji dalam grafik penyerapan anggaran tahun 2016-2019 sbb:

GAMBAR 4.1. GRAFIK TREND PENYERAPAN ANGGARAN KKP TAHUN 2016-2019



TABEL 4.2. REALISASI ANGGARAN KKP TAHUN 2019 PER UNIT KERJA ESELON I

PROGRAM	UNIT KERJA	DIPA AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI	% REALISASI
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP	Sekretariat Jenderal	523.438.939.000	528.228.939.000	419.012.813.148	79,32%
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP	Inspektorat Jenderal	73.381.988.000	76.446.563.000	75.921.421.789	99,31%
Pengelolaan Perikanan Tangkap	Ditjen Perikanan Tangkap	619.122.765.000	624.298.722.000	563.016.153.029	90,18%
Pengelolaan Perikanan Budidaya	Ditjen Perikanan Budidaya	656.379.044.000	657.650.602.000	605.821.514.373	92,12%
Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	646.521.072.000	646.521.072.000	590.467.574.144	91,33%
Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	362.218.547.000	363.458.756.000	343.412.626.959	94,48%

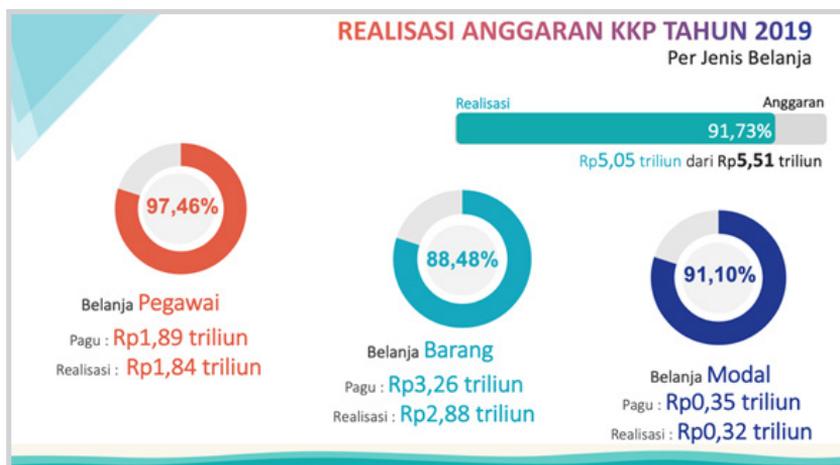


PROGRAM	UNIT KERJA	DIPA AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI	% REALISASI
Pengelolaan Ruang Laut	Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	436.249.762.000	439.034.380.000	378.208.774.925	86,15%
Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Badan Riset dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1.635.981.255.000	1.623.862.918.000	1.542.991.988.622	95,02%
Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	529.720.397.000	551.285.080.000	536.299.687.216	97,28%
JUMLAH		5.483.013.769.000	5.510.787.032.000	5.055.152.554.205	91,73%

Sumber: OMSPAN Feb 2020

Penyerapan anggaran tertinggi di tahun 2019 dihasilkan oleh Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal (99,31%) sedangkan penyerapan terendah adalah oleh Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal (79,32%).

APBN KKP tahun 2019 terbagi dalam 3 jenis belanja yaitu 1). belanja pegawai dengan anggaran sebesar Rp. 1,89 triliun, dengan realisasi sebesar Rp. 1,84 triliun atau mencapai 97,46%; 2). belanja barang sebesar Rp. 3,26 triliun dengan realisasi sebesar Rp. 2,88 triliun atau mencapai 88,48%, 3). belanja modal dengan anggaran sebesar Rp. 0,35 triliun, dengan realisasi sebesar Rp. 0,32 triliun atau mencapai 91,10%. Sisa anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 0,45 triliun yang berasal dari sisa lelang, sisa kegiatan serta kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2019.



Kinerja realisasi APBN KKP tahun 2019 menunjukkan kinerja yang semakin positif, hal ini terlihat dari semakin meningkatnya realisasi anggaran pada tahun 2019 dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2015 mencapai 86,96%, tahun 2016 mencapai 61,07%, tahun 2017 mencapai 66,88% tahun 2018 mencapai 79,89% serta tahun 2019 mencapai 91,73%.



Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan anggaran tahun 2019 diantaranya :

1. Adanya gagal lelang untuk beberapa kegiatan fisik
2. Adanya revisi anggaran yang disebabkan oleh perubahan rencana kerja (Renja) dalam rangka mengakomodir anggaran yang belum teralokasi di tahun 2019;
3. Adanya kendala pelaksanaan pekerjaan di lapangan antara lain ketersediaan bahan, keterbatasan SDM, kesiapan pihak penyedia, banjir, dan cuaca buruk;
4. Adanya perubahan atau jadwal pelaksanaan kegiatan yang mundur sehingga menyebabkan keterlambatan pengembalian UP/TUP, deviasi lembar III DIPA, keterlambatan rekon LPJ Bendahara dan penyerapan anggaran;
5. Adanya pekerjaan fisik yang tidak dilaksanakan oleh beberapa unit eselon I lingkup KKP.

Dalam rangka peningkatan kualitas anggaran di lingkup KKP, telah dilakukan rapat koordinasi secara rutin untuk melakukan *refocusing*/penajaman kegiatan prioritas yang dilakukan melalui penyederhanaan nomenklatur *output* kegiatan, efisiensi belanja perjalanan dinas dan rapat diluar kantor disesuaikan dengan urgensi kegiatan, pengurangan anggaran pendukung yang tidak perlu, pengurangan honorarium tim dan kegiatan, penundaan pelaksanaan kegiatan yang tidak mendesak atau dapat ditunda pada tahun berikutnya, integrasi pelaksanaan kegiatan secara bersamaan, pembatalan kegiatan yang dapat dibiayai melalui dana CSR atau dapat dikoordinasikan dengan instansi Kementerian/Lembaga terkait lainnya dan efisiensi harga satuan. KKP terus melakukan perbaikan kualitas pelaksanaan anggaran diantaranya dengan semakin meningkatkan proporsi belanja untuk kepentingan *stakeholder*. Selain itu dalam rangka perbaikan kualitas pelaksanaan anggaran, KKP melalui Sekretariat Jenderal telah menerbitkan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan Nomor 2322/SJ.XI/2019 tanggal 30 November 2019 tentang Langkah-Langkah Strategis dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran yang antara lain berisi tentang :

- a. Mepedomani Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 13/PB/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun 2019.
- b. Melakukan identifikasi kebutuhan belanja gaji dan tunjangan lainnya guna menghindari adanya pagu minus.
- c. Meningkatkan ketertiban penyampaian data kontrak
- d. Meminta ketertiban penyampaian data kontrak
- e. Meminta kesanggupan penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.
- f. Melakukan penyelesaian tagohan tepat waktu
- g. Memastikan seluruh pekerjaan dibayar sesuai dengan penyelesaian fisiknya



- h. Apabila dalam proses pembayaran terdapat kendala, agar melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN mitra kerjanya.
- i. Untuk pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan agar mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Penyelesaian Pekerjaan yang tidak terselesaikan s.d akhir tahun anggaran.
- j. Melakukan identifikasi kegiatan yang belum dapat diselesaikan 100% atau tidak dapat dilaksanakan pekerjaan fisiknya pada tahun 2019 agar dapat dialokasikan anggarannya di tahun 2020.
- k. Memastikan seluruh kegiatan yang akan dilanjutkan pekerjaannya tahun 2020 telah mendapatkan persetujuan kontak tahun jamak dan akan dialokasikan anggarannya pada tahun 2020.
- l. Melakukan pengendalian terhadap penyelesaian barang yang diserahkan kepada masyarakat atau Bantuan Pemerintah (BP) telah sesuai dengan ketentuan dan kelengkapan BAST.
- m. Memastikan seluruh administrasi pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran belanja telah sesuai dengan ketentuan.
- n. Seluruh bagian monev Eselon I lingkup KKP dan Itjen turut melakukan pendampingan secara aktif terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada unit kerja/mitranya masing-masing.

Untuk perbaikan pelaksanaan anggaran KKP tahun berikutnya, beberapa langkah strategis yang dilakukan antara lain :

1. penyusunan anggaran telah memperhatikan urutan prioritas, diantaranya: kebutuhan anggaran untuk biaya operasional yang sifatnya mendasar; program dan kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah; kebutuhan anggaran untuk kegiatan lanjutan yang bersifat tahun jamak (multi years); dan penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundangan.
2. Alokasi anggaran KKP ke depan diarahkan untuk memberikan nilai tambah bagi sektor kelautan dan perikanan. Salah satunya untuk pengembangan sektor budidaya sebagaimana diamanatkan Presiden. Tak hanya budidaya, nilai tambah di sektor penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pengelolaan ruang laut, riset dan pengembangan SDM, pengawasan perkarantinaian, pengawasan keuangan juga akan ditingkatkan.
3. Alokasi anggaran mengutamakan kegiatan prioritas (*money follow program*). Pengalokasian anggaran tidak lagi berbasis pada pelaksanaan tugas dan fungsi yang seluruhnya harus diberikan anggarannya, tetapi berdasarkan pada program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Presiden.



4. Melaksanakan lelang kegiatan sejak awal tahun untuk mendorong percepatan pembangunan sebagaimana arahan Presiden pada saat Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Istana Negara pada tanggal 14 November 2019.
5. Memastikan dan mengawal terlaksananya berbagai program prioritas yang sudah dicanangkan, dengan didukung oleh birokrasi yang efisien, melayani, dan mampu bekerja secara tim.
6. Kebijakan pengendalian dan pembatasan alokasi anggaran, meliputi:
 - a. Penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, lokakarya, peresmian kantor/proyek dan sejenisnya dibatasi pada hal-hal yang sangat penting dan dilakukan sesederhana mungkin;
 - b. Pembangunan gedung baru yang sifatnya tidak langsung menunjang untuk pelaksanaan tugas dan fungsi satker;
 - c. Pengadaan kendaraan bermotor, kecuali kendaraan fungsional seperti kendaraan roda dua untuk petugas lapangan, penggantian kendaraan operasional yang benar-benar rusak berat;
 - d. Membatasi pemberian honorarium tim; dan
 - e. Membatasi belanja profesi.
7. Melakukan penyesuaian terhadap perencanaan dengan pelaksanaan anggaran melalui :
 - a. Mereviu RKAKL pada awal tahun anggaran sesuai rencana kegiatan dan melakukan revisi DIPA apabila ada perubahan kebijakan program/kegiatan;
 - b. Mempersiapkan dokumen terkait dan mengusulkan revisi DIPA apabila terdapat blokir anggaran;
 - c. Memastikan alokasi pagu anggaran tersedia dan tidak melakukan revisi yang berakibat pada pengurangan alokasi pagu yang sudah dikontrakan;
 - d. Melakukan revisi anggaran apabila terjadi pagu minus.
8. Menyusun dan menetapkan dokumen pendukung pelaksanaan anggaran melalui percepatan penyusunan penyelesaian dokumen pendukung (dokumen pengadaan barang/jasa).
9. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran melalui :
 - a. Mengajukan UP secara rasional sesuai kebutuhan operasional bulanan Satker dengan mengoptimalkan LS dan *revolving* UP;
 - b. Memanfaatkan TUP hanya untuk kegiatan mendesak dan sesuai rencana kegiatan yang diajukan;
 - c. Memastikan penyampaian laporan keuangan telah lengkap, benar dan tepat waktu;



- d. Meningkatkan kedisiplinan dalam penyampaian data keuangan dan dokumen pembayaran.
10. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan melalui :
 - a. Menyelesaikan tagihan yang telah selesai terminnya atau telah selesai pelaksanaannya;
 - b. Memberikan teguran kepada Pejabat Perbendaharaan Satker yang terlambat menyelesaikan tagihan;
 - c. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proposional setiap berdasarkan Rencana Penarikan Dana (RPD);
 - d. Memastikan dokumen pembayaran telah benar.
11. Mendorong efisiensi pelaksanaan kegiatan melalui pengajuan dokumen pembayaran secara benar dan tepat waktu.
12. Meningkatkan ketertiban penyampaian data supplier dan data kontrak melalui :
 - a. Menandatangani kontrak pengadaan dan menyampaikan data kontrak termasuk addendum kontrak ke KPPN;
 - b. Meningkatkan koordinasi antar pejabat Perbendaharaan dengan KPPN.
13. Memastikan penyaluran bantuan pemerintah tepat waktu dan sasaran melalui :
 - a. Menetapkan pedum/juknis/operasional pelaksanaan pembayaran;
 - b. Melakukan verifikasi dan segera menyalurkan bantuan.
14. Melakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan dan pendampingan khususnya pekerjaan fisik dengan monitoring antara rencana dan realisasinya;
15. Melakukan koordinasi dengan Pemda, Instansi terkait dan Pihak Penyedia dalam rangka mengatasi kendala pekerjaan di lapangan;
16. Melibatkan peran aktif bagian yang menangani Monev dan Keuangan seluruh unit eselon I lingkup KKP untuk memantau perkembangan pelaksanaan anggaran belanja;
17. Dukungan dari Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal dalam mendorong terjadinya percepatan pelaksanaan anggaran belanja KKP Tahun 2020.

Kementerian Kelautan dan Perikanan terus melakukan upaya perbaikan pengelolaan anggaran yang berkualitas antara lain dengan memastikan bahwa alokasi anggaran difokuskan untuk memberikan nilai tambah bagi sektor kelautan dan perikanan, melaksanakan lelang dini serta melakukan pengendalian dan pembatasan alokasi anggaran untuk beberapa kegiatan berdasarkan prioritas program/kegiatan.

Selain itu, untuk perbaikan dan percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Tahun 2020 di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Inspektorat Jenderal KKP sejak November hingga Desember 2019 telah melaksanakan pendampingan dini dalam bentuk reviu terhadap DIPA/RKA-KL Tahun 2020 dan terhadap Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun 2020. Melalui pendampingan sejak dini dalam pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang



dan jasa Tahun 2020 tersebut diharapkan realisasi anggaran tahun 2020 dapat lebih optimal dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi Kementerian/Lembaga dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target. Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya meliputi:

- data capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis;
- data pagu anggaran; dan
- data realisasi anggaran.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya. Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian target yang telah ditetapkan. Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian target yang telah ditetapkan. dengan hasil sebagai berikut :

TABEL 4.3. EFISIENSI KKP TAHUN 2019 BERDASARKAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA

SASARAN STRATEGIS	PAGU	REALISASI	% REALISASI	NPSS	% Efisiensi
01-Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat KP	189.786.469.000	158.633.560.891	83,59%	76,99%	-6,60%
02-Terwujudnya Kedaulatan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	502.379.741.216	462.173.547.146	92,00%	103,78%	11,78%
03-Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan	1.338.341.286.000	1.194.120.736.463	89,22%	83,32%	-5,90%
04-Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Efektif	17.159.772.000	16.376.911.560	95,44%	104,30%	8,86%
05-Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang adil, berdaya saing, dan berkelanjutan	67.719.026.000	63.838.360.727	94,27%	113,10%	18,83%
06-Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang profesional dan partisipatif	69.106.392.000	49.213.032.477	71,21%	103,42%	32,21%
07-Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang kompeten, profesional, dan berkepribadian	246.564.685.000	232.558.992.255	94,32%	102,08%	7,76%



SASARAN STRATEGIS	PAGU	REALISASI	% REALISASI	NPSS	% Efisiensi
08-Tersedianya Manajemen Pengetahuan yang handal dan mudah diakses	107.686.814.000	102.280.937.774	94,98%	113,93%	18,95%
09-Terwujudnya Pranata dan Kelembagaan Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	2.482.482.028.784	2.366.143.736.893	95,31%	98,52%	3,21%
10-Terkelolanya Anggaran Pembangunan Secara Efesien dan Akuntabel	489.560.818.000	409.812.738.019	83,71%	114,38%	30,67%
JUMLAH	5.510.787.032.000	5.055.152.554.205	91,73%	96,18%	4,45%

Sumber : Aplikasi kinerjajaku dan Aplikasi OMSPAN, Kementerian Keuangan, diolah (Februari 2020)

Berdasarkan tabel diatas, nilai efisiensi Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sebesar 4,45% yang didapatkan dari selisih pencapaian NPSS sebesar 96,18% terhadap realisasi anggaran yaitu sebesar 91,73%.







PENUTUP

Laporan Kinerja KKP Tahun 2019 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis tahun 2019 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Capaian kinerja KKP tahun 2019 secara keseluruhan termasuk berhasil, karena nilai pencapaian sasaran strategis yang mencapai 96,18%. Meskipun masih terdapat 7 indikator yang belum tercapai atau sebesar 33,33% terhadap jumlah indikator yang diperjanjikan di tahun 2019. Namun secara keseluruhan capaian Kinerja KKP tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk mencapai sasaran tersebut berbagai upaya telah dilakukan seperti koordinasi pelaksanaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana aksi dalam rangka mencapai indikator kinerja utama. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerja sama dengan unit kerja di lingkungan KKP, K/L terkait, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kab/Kota serta lembaga terkait lainnya akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap jajaran di KKP, KL/instansi terkait serta stakeholder terkait .

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja KKP Tahun 2019 beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain bahwa:

1. Secara umum Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) KKP Tahun 2019 sebesar 96,18%. Dari 10 Sasaran Strategis, terdapat 3 Sasaran Strategis yang capaiannya masih di bawah 100% atau mencapai 30% dari keseluruhan jumlah Sasaran Strategis yang telah ditetapkan, sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

KODE SS	NAMA SASARAN STRATEGIS	NSS
SS1	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP	76,99%
SS2	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP	103,78%
SS3	Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan	83,32%
SS4	Tersedianya kebijakan pembangunan KP yang efektif	104,30%
SS5	Tersedianya tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan	113,10%



KODE SS	NAMA SASARAN STRATEGIS	NSS
SS6	Tersedianya pengendalian dan pengawasan SDKP yang professional dan partisipatif	103,42%
SS7	Terwujudnya ASN KKP yang kompeten, professional dan berintegritas	102,08%
SS8	Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses	113,93%
SS9	Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	98,52%
SS10	Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel	114,38%

2. Dari 21 (dua puluh satu Indikator Kinerja Utama KKP Tahun 2019, terdapat 7 (tujuh) IKU yang capaiannya dibawah 100% atau mencapai 33,33% dari keseluruhan jumlah IKU KKP yakni:

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2019
1.	IKU-2. Pertumbuhan PDB Perikanan	52,82%
2.	IKU-6. Persentase peningkatan ekonomi KP	95,41%
3.	IKU-7. Produksi Perikanan	62,30%
4.	IKU-8. Produksi garam	63,33%
5.	IKU-9. Nilai Ekspor Hasil Perikanan	51,89%
6.	IKU-11. Nilai PNB Sektor Perikanan	92,26%
7.	IKU -18. Nilai Reformasi Birokrasi KKP	97,04%

3. Pada tahun 2019, KKP mengelola anggaran sebesar Rp. 5,510 triliun dengan realisasi sebesar Rp.5,05 triliun atau mencapai 91,73% yang terbagi menjadi 9 program pembangunan, 51 kegiatan dan tersebar di 411 satker (pusat, Unit Pelaksana Teknis, dekonstrasi dan tugas pembantuan).

Rencana Tindak Lanjut

Memperhatikan analisis capaian kinerja sebagaimana diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya dan dalam rangka upaya untuk meningkatkan kinerja KKP pada Tahun 2019 beberapa rekomendasi dan upaya tindak lanjut yang bisa dilakukan dalam rangka perbaikan kedepan:

1. Perlu adanya integrasi antara pelaksanaan program pembangunan di sektor kelautan dan perikanan dengan capaian nilai Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP) yaitu berfokus pada wilayah yang perlu ditingkatkan nilai capaian IKMKPnya. Untuk menjaga kontinuitas perhitungan diperlukan konsistensi pengukuran/ ketersediaan data terhadap data terukur yang menjadi data dukung dalam perhitungan



IKMKP agar terdistribusi merata di seluruh unit kerja lingkup KKP. Reformulasi metode penghitungan IKMKP perlu dilakukan dengan mempertimbangkan penggunaan bobot yang disesuaikan antar wilayah. Untuk mendorong penguatan pada dimensi sosial dan kelembagaan melalui penumbuhan dan pengembangan kelompok pelaku utama usaha perikanan perlu dilakukan penguatan kelembagaan dan keberdayaan pelaku utama usaha perikanan sehingga dapat mempercepat proses adopsi inovasi dan teknologi. Selain itu, juga perlu dilakukan upaya peningkatan pada dimensi ekonomi melalui kemudahan akses permodalan, penyederhanaan regulasi dan kemudahan berusaha sehingga dapat meningkatkan usahanya.

2. Untuk meningkatkan capaian IKU-8. Produksi Garam, kedepan perlu dilakukan percepatan pelaksanaan integrasi lahan garam, dan pembangunan gudang garam nasional yang menerapkan sistem resi gudang.
3. Untuk meningkatkan PNBPN Sektor perikanan, meningkatkan monitoring dan pengawasan kapal penangkap ikan melalui pemberian kewenangan yang lebih besar bagi kantor Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) dan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang berada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Selain itu, penggunaan logbook (buku pencatatan hasil penangkapan ikan per trip) dapat dijadikan sebagai syarat utama bagi nelayan saat mendaratkan ikan di pelabuhan.

Selain itu perlu dilakukan percepatan penyelesaian Usulan perbaikan formula perhitungan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) yang telah diusulkan sejak tahun 2012. Besarnya PNBPN yang berasal dari PHP diperkirakan akan meningkat dengan memperbaiki (*update*) HPI setiap tahunnya sesuai harga pasar di masing-masing daerah pendaratan ikan.

4. Indikator Kinerja Pembentuk Nilai Pembiayaan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan dari Lembaga Keuangan Bank dan Bukan Bank agar memperhitungkan nilai pembiayaan dari dana bergulir LPMUKP .
5. Untuk meningkatkan nilai ekspor hasil perikanan perlu dilakukan peningkatan mutu produk kelautan dan perikanan untuk komoditas ekspor yang bernilai ekonomis, serta menjaga hubungan baik dengan negara lain khususnya negara tujuan ekspor dan berpartisipasi aktif dalam kerjasama dengan organisasi perdagangan internasional.
6. Setiap unit kerja agar melakukan perbaikan/tindak lanjut atas aspek-aspek yang perlu ditingkatkan terhadap kebijakan yang telah disurvei berdasarkan hasil survey Indeks Efektivitas Kebijakan.
7. IKU-16. Persentase unit kerja KKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar dan IKU-21. Persentase unit kerja lingkup Setjen yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar, agar dilakukan penyesuaian manual IKU antara lain *sharing knowledge* tidak hanya sebatas upload dokumentasi namun juga dilakukan *sharing knowledge* melalui pembuatan *content* video yang substansinya meningkatkan kompetensi ASN KKP. Selain itu, untuk keselarasan agar disusun peraturan yang mengatur tentang Pedoman Pemanfaatan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar.



8. Koordinasi dengan Kementerian PAN dan Badan Kepegawaian Negara terkait adanya perbedaan perhitungan khususnya untuk komponen pelatihan 20 jam pelajaran apakah menggunakan kriteria 2 tahun atau sudah/tidak pernah mengikuti pelatihan. Hal ini akan digunakan sebagai dasar dalam penyesuaian manual IKU dalam perhitungan IKU. IP ASN Tahun 2020.
9. Target Renstra KKP Tahun 2020-2024 dalam rancangan teknokratik agar disesuaikan dengan capaian tahun 2019. Demikian juga dengan indikator kinerja di masing-masing unit kerja agar menggunakan capaian tahun 2019 sebagai baseline dalam penyusunan target tahun 2020-2024.
10. Untuk perbaikan dan penyeragaman struktur dokumen perencanaan dan penganggaran kedepan agar masing-masing unit kerja eselon III memiliki satu output dan Eselon IV memiliki satu komponen, sehingga pengelompokan anggaran dalam mendukung sasaran strategis tergambar dengan jelas.
11. Dalam hal kinerja pelaksanaan anggaran agar setiap unit kerja/satker lebih disiplin melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya dalam setiap pelaksanaan kegiatan.
12. Untuk meningkatkan nilai kinerja Reformasi Birokrasi KKP perlu dilakukan upaya perbaikan antara lain :
 - a. melakukan penyempurnaan peta bisnis proses dan menjabarkannya dalam SOP,
 - b. melakukan *assessment* kepada pegawai yang belum pernah mendapatkannya dan memanfaatkan hasil *assessment* untuk pengembangan kompetensi dan meningkatkan mutu SDM organisasi, serta sebagai sarana pengambilan keputusan pimpinan dalam promosi, mutasi, dan karir pegawai,
 - c. melakukan pembangunan zona integritas lebih intensif sehingga jumlah unit yang dapat diajukan sebagai unit berpredikat WBK/WBBM lebih banyak lagi dan nantinya akan melahirkan unit yang berpredikat WBK/WBBM. Meningkatkan tingkat kepatuhan LHKASN
13. Untuk meningkatkan nilai AKIP KKP beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain:
 - a. Melakukan reviu dan penyempurnaan Indikator Kinerja Utama
 - b. Memanfaatkan Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam Rancangan Renstra Tahun 2020-2024 sebagai instrumen untuk mencapai tujuan organisasi.
 - c. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja unit kerja, sehingga menggambarkan tingkat akuntabilitas kinerja unit kerja.
 - d. Meningkatkan kualitas evaluasi program, sehingga menggambarkan keberhasilan pelaksanaan program (perubahan kondisi terukur atau target grup program)





LAMPIRAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16, GEDUNG MINA BAHARI III LANTAI 2, 3, 4
TELEPON : (021) 3522310, FAX : (021) 3522310
JAKARTA PUSAT KODE POS 10110
email : itjen@kcp.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2019

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Tahun Anggaran 2019 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami tersebut, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 24 Februari 2020

Inspektur Jenderal
Kementerian Kelautan dan Perikanan



Dr. Muhammad Yusuf
NIP. 19620518 198803 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
STAKEHOLDER PERSPECTIVE				
1.	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP	1.	Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP (indeks)	57
		2.	Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	11
COSTUMER PERSPECTIVE				
2.	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP	3.	Persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku (%)	87
		4.	Tingkat Kemandirian SKPT (level)	4
3.	Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan	5.	Persentase Pengelolaan wilayah KP yang berkelanjutan (%)	62,50
		6.	Persentase peningkatan ekonomi KP (%)	71,50
		7.	Produksi perikanan (juta ton)	38,30
		8.	Produksi garam nasional (juta ton)	4,50
		9.	Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)	9,50
		10.	Konsumsi ikan (kg/kap/thn)	54,49
		11.	Nilai PNBP dari sektor KP (Rp miliar)	820
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				
4.	Tersedianya kebijakan pembangunan KP yang efektif	12.	Indeks efektivitas kebijakan pemerintah (indeks)	7,90
5.	Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang berkeadilan, berdaya saing dan berkelanjutan	13.	Efektivitas tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan (%)	77
6.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif	14.	Persentase penyelesaian tindak pidana KP yang disidik dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai kebutuhan perundang-undangan yang berlaku (%)	92
		15.	Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan (%)	78
LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE				
7.	Terwujudnya ASN KKP yang kompeten, profesional dan berintegritas	16.	Indeks Profesionalitas ASN KKP (indeks)	71
8.	Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses	17.	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	80
9.	Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi	18.	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi KKP (nilai)	A (81)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
STAKEHOLDER PERSPECTIVE				
1.	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP	1.	Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP (indeks)	57
		2.	Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	11
COSTUMER PERSPECTIVE				
2.	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP	3.	Persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku (%)	87
		4.	Tingkat Kemandirian SKPT (level)	4
3.	Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan	5.	Persentase Pengelolaan wilayah KP yang berkelanjutan (%)	62,50
		6.	Persentase peningkatan ekonomi KP (%)	71,50
		7.	Produksi perikanan (juta ton)	38,30
		8.	Produksi garam nasional (juta ton)	4,50
		9.	Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)	9,50
		10.	Konsumsi ikan (kg/kap/thn)	54,49
		11.	Nilai PNPB dari sektor KP (Rp miliar)	820
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				
4.	Tersedianya kebijakan pembangunan KP yang efektif	12.	Indeks efektivitas kebijakan pemerintah (indeks)	7,90
5.	Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang berkeadilan, berdaya saing dan berkelanjutan	13.	Efektivitas tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan (%)	77
6.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif	14.	Persentase penyelesaian tindak pidana KP yang disidik dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai kebutuhan perundang-undangan yang berlaku (%)	92
		15.	Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan (%)	78
LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE				
7.	Terwujudnya ASN KKP yang kompeten, profesional dan berintegritas	16.	Indeks Profesionalitas ASN KKP (indeks)	71
8.	Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses	17.	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	80
9.	Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	18.	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi KKP (nilai)	A (81)
		19.	Level Maturitas SPIP KKP (level)	3
10.	Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan	20.	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran KKP (nilai)	Baik (87)



No.	Program	Anggaran
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP	Rp. 523.438.939.000
2.	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP	Rp. 73.381.988.000
3.	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 619.122.765.000
4.	Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya	Rp. 656.379.044.000
5.	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp. 646.521.072.000
6.	Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Rp. 362.218.547.000
7.	Pengelolaan Ruang laut	Rp. 436.249.762.000
8.	Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Rp. 1.635.981.255.000
9.	Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Rp. 529.720.397.000
Total Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2019		Rp. 5.483.013.769.000

Menteri Kelautan dan Perikanan


Susi Pudjiastuti





PENGHARGAAN

1. Penghargaan dari Komisi Informasi Pusat RI yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Badan Publik Informatif dalam implementasi Undang Undang Nomor 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penghargaan diterima tanggal 21 November 2019 di Kantor Wakil Presiden RI.
2. KKP menjadi Pemenang pada *GSM Award 2019* untuk kategori *Best Crisis Handling*. Penghargaan diterima di Jakarta tanggal 24 September 2019
3. KKP dianugerahi Juara 1 Stand Terbaik pada Nusantara Expo 2019. Sertifikat penganugerahan diberikan oleh Walikota Pariaman di Kota Pariaman, Sumatera Barat pada tanggal 10 Desember 2019
4. KKP menjadi Pemenang pada *GSM Award 2019* untuk kategori *Best Collaboration*. Penghargaan diterima di Jakarta tanggal 24 September 2019
5. KKP menyabet Juara I Stand Terbaik untuk Kategori Umum pada Pameran Hari Pangan Sedunia yang diselenggarakan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada tanggal 2 s.d 5 November 2019.
6. KKP menerima Sertifikat Penghargaan sebagai Juara 1 dalam acara *Wonderful Nias Expo 2019* yang berlangsung di Lapangan Orurusa, Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Sertifikat Penghargaan dan trofi diberikan oleh Dody Edward, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan RI.
7. Penghargaan Subroto Bidang Efisiensi Energi (PSBE) dari Kementerian ESDM pada tanggal 29 September 2019 untuk Gedung Mina Bahari IV.
8. *ONE STOP SERVICE QUARANTINE* (OSS-Q) Dari Unit Penyelenggara Pelayanan Balai KIPM Suarabaya II Mendapat Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2019 yang diserahkan oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, 15 Oktober 2019.
9. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2019 adalah 92,75 (sembilan puluh dua koma tujuh lima) dengan kategori "AA (Sangat Memuaskan)" atau mengalami peningkatan sebesar 9,68 (sembilan koma enam delapan) dari hasil pengawasan Tahun 2018 sebesar 83,07 (delapan puluh tiga koma nol tujuh) dengan kategori "Baik" Berdasarkan surat Kepala ANRI Nomor B-AK.01.00/H03/2018 tentang Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan Jakarta pada 20 Desember 2019.



10. Penghargaan Top 30 Instansi Pemerintah Penyelenggara Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2019. Penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian PAN dan RB kepada KKP yang diwakili Sekretaris Itjen KKP (Riza Trianzah) yang diberikan langsung oleh Menteri PAN dan RB (Tjahyo Kumolo) pada Senin, 9 Desember 2019 di Jakarta.
11. Kementerian Kelautan dan Perikanan Menerima Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2019 dalam acara “Penganugerahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2019 yaitu BKIPM Surabaya II, Balai Besar KIPM Makasar, BKIPM Denpasar
12. Penghargaan Pelopor Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Saudara Hasim, S.Pi.
13. HTCA adalah suatu bentuk penghargaan prestisius yang diberikan kepada Komite Teknis Perumusan SNI yang memiliki kinerja terbaik. Kriterianya adalah Komite Teknis yang memiliki kinerja sekretariat yang baik dan dapat merumuskan SNI yang sesuai dengan kebutuhan pasar, telah menerapkan tahapan proses perumusan standar sesuai dengan Program Nasional Perumusan Standarisasi (PNPS), serta mampu menyelesaikan program kerjanya sesuai target yang telah ditetapkan.

Komite Teknis 65-05 Produk Perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk kelima kalinya sejak tahun 2015-2019 berhasil meraih penghargaan tertinggi HTCA dari Badan Standarisasi Nasional (BSN). Komite Teknis 65-05 Produk Perikanan berhasil menggungguli 11 komite teknis lainnya yang berhasil memperoleh nilai diatas 70. Penilaian HTCA telah dilakukan terhadap 148 Komite Teknis dari Kementerian/Lembaga. Pada HTCA tahun 2019 ini KKP juga berhasil meloloskan Komite Teknis 65-08 Produk Kelautan/Perikanan Non Pangan.

Penghargaan HTCA 2019 diserahkan di acara temu Temu Komite Teknis Perumusan SNI pada tanggal 20 November 2019 di Gedung BPPT II Jakarta.









